



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan ketentuan pada ayat (3) bahwa Perubahan yang mendasar dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6. Undang-undang ...

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 meliputi:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	:	DAERAH
BAB VI	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB VII	:	PEMBANGUNAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
BAB VIII	:	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB IX	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
		PENUTUP

(2) Perubahan ...

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Mekanisme data tata cara penghapusan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 29

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan bangunan /gedung sebagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung,
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

Pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2021 NOMOR.../5

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH NO 15 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2019-
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 7
1.3 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I - 10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I - 13
1.5 Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten OKI.....	I - 14
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	II - 1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II - 1
2.1.1 Aspek Geografis	II - 1
2.1.1.1 Satuan Geomorfik Rawa.....	II - 3
2.1.1.2 Satuan Geomorfik Sungai.....	II - 4
2.1.1.3 Klimatologi	II - 4
2.1.1.4 Penggunaan Lahan	II - 6
2.1.1.5 Kerawanan Bencana Alam.....	II - 7
2.1.2 Aspek Demografis	II - 11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 16
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 16
2.2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto	II - 16
2.2.1.2 Inflasi.....	II - 23
2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita dan Gini Ratio.....	II - 24
2.2.1.4 Perkembangan Penduduk Miskin.....	II - 26
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II - 28
2.2.2.1 Pendidikan.....	II - 28
2.2.2.2 Kesehatan.....	II - 31
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	II - 33
2.2.2.4 Ketenagakerjaan.....	II - 35
2.2.2.5 Seni Budaya dan Olahraga.....	II - 36
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 37
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II - 37
2.3.1.1 Pendidikan.....	II - 37
2.3.1.2 Kesehatan	II - 39
2.3.1.3 Pekerjaan Umum.....	II - 41
2.3.1.4 Perumahan.....	II - 42
2.3.1.5 Komunikasi dan Informasi.....	II - 43

2.3.1.6	Lingkungan Hidup	II - 44
2.3.1.7	Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II - 46
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II - 46
2.3.1.9	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	II - 47
2.3.1.10	Ketenagakerjaan.....	II - 48
2.3.1.11	Sosial.....	II - 51
2.3.1.12	Penanggulangan Bencana.....	II - 53
2.3.2	Fokus Urusan Pilihan.....	II - 55
2.3.2.1	Perikanan.....	II - 55
2.3.2.2	Pariwisata.....	II - 55
2.3.2.3	Pertanian.....	II - 56
2.3.2.4	Perdagangan.....	II - 60
2.3.2.5	Perindustrian.....	II - 61
2.4	Aspek Daya Saing	II - 62
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II - 62
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II - 63
2.4.2.1	Perhubungan	II - 63
2.4.2.2	Penataan Ruang	II - 64
2.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang	II - 66
2.4.4	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II - 67
2.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OKI.....	II - 68
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 1
3.1.2	Neraca Daerah	III - 5
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 10
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 16
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III - 19
3.3	Kerangka Pendanaan	III - 21
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III - 21
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III - 26
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH	IV - 1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV - 1
4.1.1	Tata Kelola Pemerintahan	IV - 2
4.1.1.1	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.....	IV - 3
4.1.1.2	Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.....	IV - 3
4.1.1.3	Pelayanan Publik.....	IV - 4
4.1.1.4	Keuangan Daerah.....	IV - 4
4.1.1.5	Pemerintahan Desa.....	IV - 4
4.1.2	Infrastruktur Dasar	IV - 5
4.1.3	Pendidikan	IV - 6
4.1.4	Kesehatan	IV - 8

4.1.5	Kemiskinan	IV – 9
4.1.6	Pengelolaan Sumber daya Alam	IV – 10
4.1.7	Pemanfaatan tata ruang yang berdimensi lingkungan hidup.....	IV – 11
4.1.8	Merebaknya Penyebaran Pandemi Covid-19	IV – 12
4.1.8.1	Perkembangan Kasus Covid-19	IV – 12
4.1.8.2	Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19	IV – 12
4.2	Isu Eksternal.....	IV – 13
4.3	Isu Tata Ruang dan Lingkungan.....	IV – 24
4.4	Analisis KLHS.....	IV – 27
4.5	Isu-isu Strategis.....	IV – 31
4.6	Penyelarasan Isu Strategis	IV – 33
4.7	Keselarasan Isu Strategis Pemabangunan Daerah.....	IV – 35
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V – 1
5.1	Visi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir	V – 1
5.2	Arahan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir	V – 3
5.2.1	Visi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V - 3
5.2.2	Misi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V - 3
5.3	Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V - 4
5.3.1	Visi.....	V - 4
5.3.2	Misi.....	V - 6
5.4	Tujuan dan Sasaran	V – 12
5.4.1	Tujuan	V – 12
5.4.2	Sasaran	V – 13
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI – 1
6.1	Strategi.....	VI – 1
6.2	Strategi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir	VI – 10
6.3	Arah Kebijakan	VI – 14
6.4	Program Pembangunan Daerah	VI – 17
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII – 1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	VII – 1
7.2	Program Perangkat Daerah	VII – 6
7.2.1	Program Setiap Perangkat Daerah	VII – 9
7.2.2	Program Pembangunan Daerah Urusan Wajib Layanan Dasar.....	VII – 9
7.2.3	Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar	VII – 10
7.2.4	Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	VII – 13
7.2.5	Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	VII – 14
7.2.6	Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Unsur	VII – 15

Penunjang Urusan Pemerintahan	
7.2.7 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	VII - 15
7.2.8 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan	VII - 15
7.2.9 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan.....	VII – 16
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII – 1
8.1 Indikator Kinerja Utama	VIII – 1
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII – 4
BAB IX PENUTUP	IX – 1
9.1 Pedoman Transisi	IX – 2
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX – 4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah & Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten OKI.....	II – 2
Tabel 2.2	Curah Hujan rata- rata di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019.....	II – 5
Tabel 2.3	Data penutupan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019	II – 6
Tabel 2.4	Areal sawah yang tergenang akibat banjir di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019.....	II – 8
Tabel 2.5	Jumlah sebaran titik api di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019.....	II – 9
Tabel 2.6	Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019.....	II – 12
Tabel 2.7	Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019.....	II – 14
Tabel 2.8	Komposisi penduduk berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019.....	II – 15
Tabel 2.9	Proporsi penduduk menurut agama di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019	II – 15
Tabel 2.10	Stuktur perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019 (Persen).....	II – 18
Tabel 2.11	Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019	II – 21
Tabel 2.12	Pendapatan per kapita di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan harga berlaku dan konstan tahun 2016-2019.....	II – 24
Tabel 2.13	Jumlah Rumah Tangga BDT Tahun 2015 Menurut Klasifikasi Kemiskinan per Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir	II – 27
Tabel 2.14	Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016-2019	II – 27
Tabel 2.15	Indikator Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan perKabupaten Tahun 2019.....	II – 28
Tabel 2.16	Perkembangan bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019.....	II – 29
Tabel 2.17	Persentase Penduduk umur 15 Tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016-2019.....	II – 29
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.....	II – 30
Tabel 2.19	Perkembangan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016-2019.....	II – 31
Tabel 2.20	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik dan Polkesdes yang ada di Ogan Komering Ilir Tahun 2019.....	II – 32
Tabel 2.21	Variabel indeks pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019.....	II – 34

Tabel 2.22	Besaran dan peringkat IPM menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.....	II – 34
Tabel 2.23	Perkembangan TPAK dan Pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019.....	II – 35
Tabel 2.24	Potensi seni budaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir	II – 36
Tabel 2.25	Indikator seni budaya dan olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019	II – 37
Tabel 2.26	Indikator Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019	II – 38
Tabel 2.27	Indikator Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019	II – 40
Tabel 2.28	Persentase penduduk yang pernah berobat jalan Menurut tempat berobat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019.....	II – 41
Tabel 2.29	Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Tahun 2016-2019.....	II – 41
Tabel 2.30	Kondisi Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten OKI Tahun 2019.....	II – 42
Tabel 2.31	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten OKI Tahun 2019	II – 42
Tabel 2.32	Indikator Perumahan.....	II – 43
Tabel 2.33	Indikator Teknologi informasi dan komunikasi.....	II – 44
Tabel 2.34	Indikator Lingkungan Hidup.....	II – 45
Tabel 2.35	Perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup.....	II – 45
Tabel 2.36	Indikator Kependudukan.....	II – 46
Tabel 2.37	Rasio APS perempuan terhadap Laki-Laki,IPG dan IDG di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019	II – 47
Tabel 2.38	Indikator Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah	II – 47
Tabel 2.39	Jumlah Industri kecil menurut kelompok industri kecil (unit) kab. OKI Tahun 2019.....	II – 47
Tabel 2.40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017-2020....	II – 50
Tabel 2.41	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial kab. OKI Tahun 2019-2020.....	II – 52
Tabel 2.42	Indeks Risiko Bencana di kab.OKI Tahun 2013.....	II – 53
Tabel 2.43	Cakupan Luas Wilayah Risiko Bencana Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 54
Tabel 2.44	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub- Urusan Bencana Kabupaten Ogan Komering Ilir.Tahun 2019-2020.....	II – 54
Tabel 2.45	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Kab. OKI.....	II – 55
Tabel 2.46	Obyek Wisata di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 56
Tabel 2.47	Luas Panen dan Produksi Padi Per Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 57
Tabel 2.48	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 58
Tabel 2.49	Luas Areal Perkebuna Besar Menurut Komoditas Tahun 2019	
Tabel 2.50	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (Ekor) Kab.OKI Tahun 2016-2019.....	II – 59
Tabel 2.51	Indikator Sektor Pertanian.....	II – 60

Tabel 2.52	Indikator Perdagangan.....	II – 61
Tabel 2.53	Indikator Peindustrian.....	II – 62
Tabel 2.54	Indikator Pengeluaran Per Kapita.....	II – 63
Tabel 2.55	Indikator Pendukung Daya Saing.....	II – 63
Tabel 2.56	Indikator Perhubungan.....	II – 64
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Penataan Ruang.....	II – 66
Tabel 2.58	Indikator Fungsi Penunjang.....	II – 67
Tabel 2.59	Indikator Investasi.....	II – 68
Tabel 2.60	Capaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabuapten OKI Tahun 2020.....	II – 69
Tabel 3.1	Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019.....	III – 2
Tabel 3.2	Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019.....	III – 4
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019	III – 5
Tabel 3.4	Rata – rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019	III – 6
Tabel 3.5	Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016- 2019	III – 10
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019	III – 17
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016 – 2019.....	III – 18
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019.....	III – 19
Tabel 3.9	Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016-2019.....	III – 19
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	III – 20
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	III – 20
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 – 2024.....	III – 22
Tabel 3.13	Proyeksi SILPA Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 – 2024.....	III – 26
Tabel 3.14	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 – 2024.....	III – 27
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024.....	III – 29
Tabel 4.1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 – 2020.....	IV – 13
Tabel 4.2	Isu Strategis RPJMD Daerah Perbatasan.....	IV – 22
Tabel 4.3	Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan.....	IV – 25
Tabel 4.4	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah.....	IV – 25
Tabel 4.5	Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah.....	IV – 27

Tabel 4.6	Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS.....	IV – 28
Tabel 4.7	Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten OKI	IV – 30
Tabel 4.8	Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten OKI.....	IV – 27
Tabel 4.9	Keselarasn Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	IV – 35
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi Misi dan Tujuan	V – 12
Tabel 5.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	V – 15
Tabel 5.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Sasaran..	V – 17
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Ogan Komeriing Ilir Tahun 2019-2024 untuk Mewujudkan Misi	VI – 11
Tabel 6.2	Tema atau Fokus Lima Tahun	VI – 15
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ogan Komeriing Ilir Tahun 2019-2024.....	VI – 16
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten OKI.....	VI – 23
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ilir Tahun 2019-2024.....	VII – 3
Tabel 7.2	Program Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ogan Komeriing Ilir.....	VII - 17
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komeriing Ilir.....	VIII - 3
Tabel 8.2	Penetapan Indiktor Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komeriing Ilir Tahun 2019-2024.....	VIII – 5
Tabel 9.1	Rancangan Program Transisi Penyusunan RKPD Tahun 2024	IX – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan RPJP dan RPJM Daerah.....	I – 13
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir	II – 2
Gambar 2.2	Peta Lokasi rawan banjir di Kabupaten Ogan Komering Ilir	II – 10
Gambar 2.3	Peta Daerah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 10
Gambar 2.4	Struktur Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016-2019.....	II – 20
Gambar 2.5	Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 22
Gambar 2.6	Laju Inflasi PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 24
Gambar 2.7	Gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 25
Gambar 2.8	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016-2019.....	II – 26
Gambar 2.9	Persentase balita menurut penolong persalinan tahun 2016-2019.....	II – 32
Gambar 2.10	Tingkat Pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2018-2020.....	II – 50
Gambar 4.1	Jumlah Kasus Covid-19 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020	IV - 12



Bab I

Pendahuluan

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, telah membawa perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara bertahap terus meningkat, kondisi sosial semakin membaik dan kegiatan ekonomi daerah terus berkembang. Peningkatan kinerja pembangunan menandai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, menunjukkan kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam dinamika pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir semakin maju dan berkembang, tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang (2019-2024) adalah melakukan akselerasi pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah terutama peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, sanitasi dan energi di pedesaan, peningkatan kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanganan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan ekonomi lokal, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; serta pembangunan antar wilayah. Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan di setiap wilayah.

Pembangunan daerah sebagai suatu proses perubahan dan pertumbuhan sangat bergantung pada kinerja pemerintah yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Pembangunan berkelanjutan berangkat dari suatu permasalahan dan hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya berorientasi pada Visi, Misi dan Strategi kedepan, berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui berbagai program pembangunan untuk mewujudkan kondisi daerah yang lebih maju telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai kehidupan masyarakat, namun demikian masih terdapat kekurangan yang harus segera diatasi

terutama masalah pembangunan yang berkualitas dan di satu sisi pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan.

Upaya mengatasi masalah tersebut tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pelaku pembangunan. Untuk meningkatkan sinergitas seluruh potensi pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi seluruh pihak-pihak terkait dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perencanaan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, komitmen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan **“Melanjutkan pembangunan dari Desa yang berkualitas”**, yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode 2014-2019 yaitu program pembangunan infrastruktur dasar pedesaan (jalan, air bersih, sanitasi dan penerangan), pembangunan PAUD setiap desa, pembangunan poskesdes setiap desa, pembentukan koperasi setiap desa. Maka pada periode berikutnya memfokuskan kepada peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat yaitu sumber daya manusia. Peningkatkan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan agar lebih mandiri, sejahtera, dan beriman melalui program dan kegiatan yang lebih fokus dan strategis dengan mempertimbangkan keterbatasan dana dan sumberdaya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah, menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur, dan mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari sesuai RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di bidang ekonomi, pembangunan diarahkan untuk menjadikan industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi berperan signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan sektor pertanian tetap menjadi penopang struktur ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk masa lima tahun, sesuai dengan periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019-2024 yang telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 15 Januari 2019. Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah tahun 2019-2024, yang memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang disusun dengan menggunakan pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1. Politis**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;

2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) terhadap pembangunan, pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. **Atas-bawah** (*top-down*) dan **bawah-atas** (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional,

Tahapan penyusunan dokumen RPJMD berlaku mutatis mutandis sebagaimana tertuang pada pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun melalui 6 (enam) tahapan yaitu 1) Persiapan penyusunan RPJMD, 2) Penyusunan rancangan awal RPJMD, 3) Penyusunan rancangan RPJMD, 4) Pelaksanaan musrenbang RPJMD, 5) Perumusan rancangan akhir RPJMD, dan 6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 penting untuk segera ditindak lanjuti di antaranya untuk menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2019-2024 dan Dokumen Perubahan RPJMD selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun.

Terkait dengan uraian di atas, maka Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Sejak ditetapkan pada tahun 2019 Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir telah memasuki tahun ketiga. Selama dua tahun terakhir RPJMD telah dievaluasi baik target maupun capaiannya, yang mengharuskan bahwa RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir harus diadakan perubahan sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, fleksibel dan mampu merespon perubahan dan perkembangan yang cepat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3). Dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain dari hal tersebut, perubahan RPJMD juga dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Daerah. Dalam menyikapi perkembangan bencana tersebut juga telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional, sehingga berdasarkan kebijakan ini RPJMD Kabupaten

Ogan Komering Ilir memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan dalam rangka menjawab permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terjadi penyesuaian terhadap Struktur APBD, sehingga dirasa perlu untuk merubah Struktur APBD yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024. Disamping itu, perubahan yang mendasar juga difokuskan terhadap capaian target beberapa Indikator Makro RPJMD seperti target tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Gini rasio, laju inflasi Kabupaten, IPM, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini disebabkan oleh karena target yang telah ditetapkan akan sulit tercapai karena adanya Pandemi *Covid-19*.

Perubahan RPJMD juga dilakukan untuk menyelaraskan Program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Penyelarasan isu strategis ini penting untuk pendukungan dan sinergitas terhadap pencapaian Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Selain hal-hal tersebut di atas, perubahan RPJMD yang paling mendasar sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan. Perubahan RPJMD difokuskan terhadap Program dan Indikator Program masing-masing urusan pemerintah daerah. Program dan Indikator Program ini menjadi acuan OPD dalam menyusun dan menetapkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta target dan pendanaannya dalam dokumen Renstra masing-masing Perangkat Daerah.

Inilah beberapa hal yang menjadi dasar perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya diharapkan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di sisa waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 9 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
14. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *corona virus Disease 2019 9 (Covid-19)*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten OKI Tahun 2016 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ilir khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

(1) RPJMD dan RPJM Nasional

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kurun waktu 2020-2024 maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah diselaraskan dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional, dan pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

(2) RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir diselaraskan dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas provinsi, dan pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah yaitu indeks pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan.

(3) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019–2024 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025, oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti tahun 2019–2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005–2025.

(4) RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sesuai dengan amanat pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: a) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(5) RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan program kegiatan RPJMD dilakukan analisa sistematis untuk memastikan unsur pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam suatu wilayah. KLHS menyatakan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap suatu kebijakan rencana dan program pembangunan.

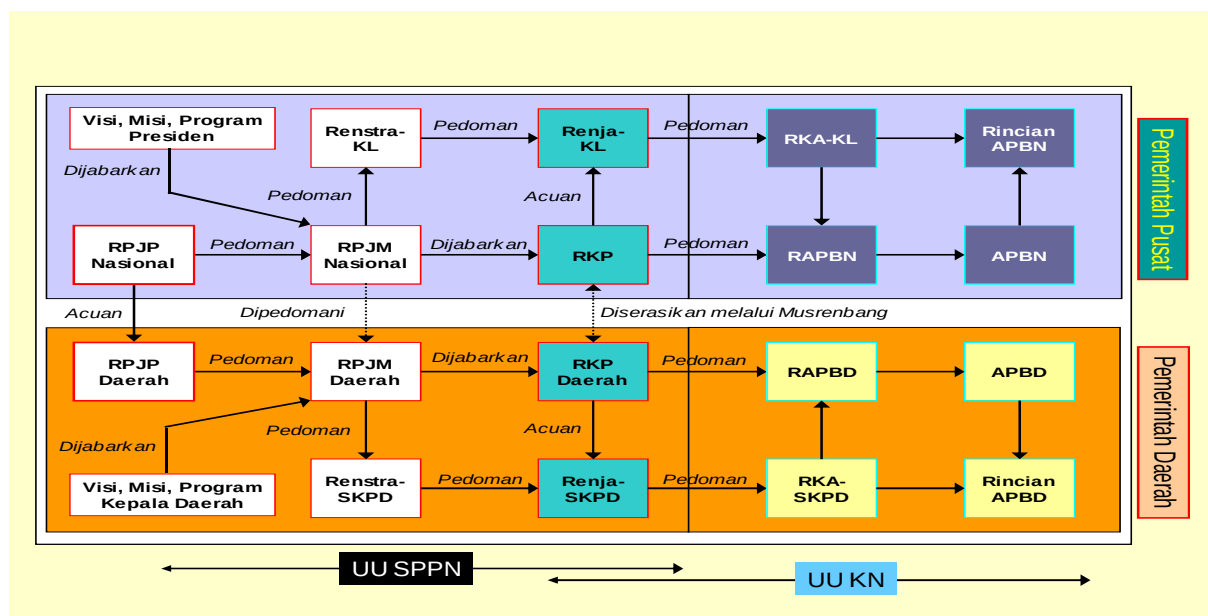
(6) RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(7) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019–2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.

Untuk memahami bagaimana hubungan Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui alur gambar berikut ini:



Gambar 1.2. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan RPJP dan RPJM Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019–2024 adalah tetap sama dengan maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJMD kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yaitu untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024. Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019–2024 adalah:

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
2. Terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Daerah;
5. Tersedianya acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.

1.5. Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten OKI

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP



Bab II

Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir

2.1.1. Aspek Geografis

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Dengan luas wilayah 19.023,47 km², pada tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ilir berpenduduk 829.800 jiwa, dengan kepadatan penduduk 44 jiwa/km²,

Aspek Geografis menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan Wilayah. Secara Geografis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak diantara 104⁰, 20" sampai 106⁰⁰0' Bujur Timur dan 2⁰,30' sampai 4⁰,15' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter diatas permukaan laut. Daerah tertinggi diperlihatkan oleh topografi Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur, sedang daerah terendah terletak di kawasan timur, tepatnya di Kecamatan Air Sugihan, dengan rata-rata ketinggian sekitar 8 meter dari permukaan laut. Bentang alam pada umumnya disusun oleh endapan aluvial yang bersifat lempungan liat atau lembek dan endapan gambut, kecuali Bukit Gajah dimana batuan penyusun utamanya adalah batuan beku intrusi granit.

Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ibu kota Kayuagung memiliki luas wilayah 19.023,47 km² atau 21,86 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan, secara administratif pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 18 Kecamatan, 13 kelurahan dan 314 desa berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara

:

Kabupaten Banyuasin;
- Sebelah Selatan

:

Kabupaten Mesuji (Provinsi Lampung);
- Sebelah Barat

:

Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur, dan ;
- Sebelah Timur

:

Selat Bangka dan Laut Jawa.



Sumber: Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKI, 2013-2033

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 2.1. Luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan tiap Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah	Luas wilayah (km²)	Persentase (%)
1	Lempuing	19	-	19	295,61	1,55
2	Lempuing Jaya	16	-	16	505,80	2,66
3	Mesuji	17	-	16	642,86	3,38
4	Sungai Menang	18	-	18	2.305,42	12,12
5	Mesuji Makmur	19	-	19	493,14	2,59
6	Mesuji Raya	17	-	17	515,85	2,71
7	Tulung Selapan	22	1	23	5.363,65	28,19

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah	Luas wilayah (km ²)	Persentase (%)
8	Cengal	17	-	17	3.038,66	15,97
9	Pedamaran	14	-	14	376,68	1,98
10	Pedamaran Timur	7	-	7	692,79	3,64
11	Tanjung Lubuk	21	1	22	219,97	1,16
12	Teluk Gelam	14	-	14	169,29	0,89
13	Kayuagung	14	11	25	224,45	1,18
14	Sirah Pulau Padang	20	-	20	102,08	0,54
15	Jejawi	19	-	19	237,98	1,25
16	Pampangan	22	-	22	483,42	2,54
17	Pangkalan Lampam	19	-	19	1.104,75	5,81
18	Air Sugihan	19	-	19	2.251,07	11,83
	Total	314	13	327	19.023,47	100,00

Sumber: Kabupaten OKI dalam Angka, 2020

2.1.1.1. Satuan Geomorfik Rawa

Daerah rawa di sejumlah lokasi telah kering atau tidak berair kecuali pada musim penghujan akibat proses sedimentasi terutama oleh sungai. Satuan geomorfik rawa mendominasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama kawasan timur. Satuan geomorfik rawa ini mencapai 75 persen dari luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada satuan geomorfik rawa ini dijumpai empat danau, yaitu : 1). Danau Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam; 2). Danau Air Nilang di Kecamatan Pedamaran; 3). Danau Teluk Gelam di Kecamatan Teluk Gelam; dan 4). Danau Teloko di Kecamatan Kota Kayuagung.

Berdasarkan pada pola penyebaran areal permukiman di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka perubahan satuan geomorfik rawa yang paling signifikan terjadi di kawasan barat dan kawasan tengah. Penyusutan areal rawa berair terjadi pula akibat pembukaan lahan-lahan perkebunan dengan sistem drainasenya yang berperan dalam pengeringan rawa. Perubahan akibat pemanfaatan lahan rawa menjadi areal perkebunan sebagian besar terjadi di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang.

2.1.1.2. Satuan Geomorfik Sungai

Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari: 1). Sungai Komering yang berhulu dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan bermuara ke Sungai Musi, dan 2). Sungai Mesuji yang membatasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Provinsi Lampung bermuara ke Laut Jawa. Kedua sungai utama Sungai Komering dan Sungai Mesuji dialiri air sepanjang tahun. Selain kedua sungai utama tersebut, daerah Ogan Komering Ilir dialiri pula oleh sungai-sungai kecil yang bermuara ke Selat Bangka. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Sugihan yang mengalir di wilayah Kecamatan Air Sugihan, Sungai Dua belas dan Sungai Lebong Itam yang mengalir di wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Sungai Lumpur yang membatasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Cengal, Sungai Jeruju dan Sungai Pasir yang mengalir di wilayah Kecamatan Cengal.

Sungai-sungai ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu sebagai prasarana transportasi air, terutama sebagai akses bagi daerah-daerah yang tergolong masih terisolir seperti di kawasan timur. Selain itu, sungai berperan pula dalam kegiatan ekonomi seperti tempat mencari ikan, perdagangan (pasar terapung), dan pengadaan air bersih (*water intake*).

2.1.1.3. Klimatologi

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah yang beriklim tropis dengan musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan umumnya berkisar antara bulan November sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya. Penyimpangan musim biasanya terjadi lima tahun sekali, yaitu musim kemarau yang lebih panjang dari pada musim penghujan.

Sementara itu, rata-rata curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2019) adalah sekitar 2.065 mm/tahun atau sekitar 172 mm/bulan. Ini berarti bahwa situasi

rata-rata curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap bulannya termasuk ke dalam kategori sedang. Adapun untuk rata-rata jumlah hari hujan selama satu tahun adalah sekitar 109 hari atau sebanyak 9 sampai 10 hari setiap bulan. Temperatur udara (suhu) di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki rata-rata sekitar 27°C sampai dengan 28° C, dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 82 persen.

Curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat berpengaruh terhadap kondisi hidrologi wilayah. Pada musim penghujan terjadi kenaikan permukaan air atau peningkatan volume air. Sebaliknya, pada musim kemarau terjadi penurunan permukaan air atau penyusutan volume air. Sebagai konsekuensinya, pada periode kenaikan permukaan air terdapat kecenderungan dataran-dataran rendah tergenang air atau mengalami banjir dan pada masa penyusutan air banyak dijumpai daerah cekungan terutama yang dangkal mengalami kekeringan. Fenomena alam seperti ini terjadi pada setiap perubahan musim. Dengan demikian, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki daerah-daerah yang rawan banjir dan rawan kekeringan akibat perubahan pola hidrologi.

Tabel 2.2. Curah Hujan rata-rata di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktober	Nop	Des
1	Mesuji												
2	Jejawi												
3	Tj. Lubuk												
4	Tl. Selapan	248	315	232	437	101	123	85		35	9	109	465
5	Pampangan	100	309	238	177	269	190	55	3	42	18	62	333
6	Sp.Padang												
7	Pedamaran												
8	Lempuing	264	446	508	168	190	164	15	75	5	55	126	186
9	Kayuagung												
10	Air Sugihan												
11	Cengal												
12	Sungai Menang												
13	Mesuji Makmur												
14	Mesuji Raya												
15	Lempuing Jaya												
16	Tl. Gelam												
17	Pedamaran Timur												
18	Pangkalan Lampam												
		204,00	356,67	326,00	260,67	186,67	159,00	51,67	39,00	27,33	27,33	99,00	328,00
	Rata-Rata												

172,11

Keterangan : (-) data tidak tercatat/tidak tersedia

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtukultura Kab. OKI 2020

2.1.1.4. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari Belukar, Perkebunan, Persawahan, Perkampungan, Rawa, Tegalan dan Tambak. Secara lebih rinci luas masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat Tabel 2.3.

Berdasarkan proyeksi penggunaan lahan terlihat bahwa potensi lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih besar, terutama yang ditunjukkan oleh areal belukar (346.373,735 ha) dan semak alang-alang (6.047,811 ha), atau $\pm 18,53\%$ dari total luas lahan yang ada sehingga kabupaten ini mempunyai peluang besar untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi lahan produktif. Gambaran potensi sumber daya alam di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat dari kondisi hidrologi dan penggunaan lahan.

Tabel 2.3. Data Penutupan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019

No	Penutupan Lahan	Luas Tahun 2019 (Ha)**	Kawasan Hutan (Ha)**
1	Hutan Lahan Kering Primer	-	-
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	8,748	8,748
3	Hutan Mangrove Primer	-	-
4	Hutan Mangrove Sekunder	22.130	22.130
5	Hutan Rawa Primer		
6	Hutan Rawa Sekunder	9.831	9.831
7	Hutan Tanaman	116.782	116.782
8	Perkebunan	389.645	
9	Pemukiman (lahan terbangun)	21.246	
10	Pertambangan	-	
11	Pertanian Lahan Kering	117.230	
12	Pertanian Lahan Kering campur Semak	24.940	
13	Rawa	63.190	
14	Padang Rumput	46.431	
15	Sawah	114.460	
16	Semak Belukar	79.628	
17	Semak Belukar Rawa	470.105	
18	Tambak	46.753	
19	Lahan Terbuka	263.335	
20	Transmigrasi	30.319	
21	Tubuh Air	11.130	
	Total	1.835.904	157.491,00

Keterangan : (**) angka sangat sementara

Sumber : BPKH Sumsel 2019

2.1.1.5 Kerawanan Bencana Alam

Kemungkinan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan topografi wilayah antara lain: banjir, kebakaran hutan/gambut, dan angin puting beliung. Tinjauan terhadap kawasan rawan bencana alam, menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki sejumlah kawasan yang tergolong sebagai kawasan rawan bencana alam, terutama bencana banjir, kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Kecamatan Lempuing Jaya di Desa Sungai Belida dan Kecamatan Air Sugihan merupakan daerah yang memiliki kawasan rawan banjir. Di Kecamatan Lempuing desa-desa ini sering mengalami banjir seperti di Desa Cahya Bumi, Desa Tebing Suluh, dan Desa Bumi Arjo. Banjir ini selain menggenangi perumahan penduduk juga menggenangi areal persawahan sehingga menyebabkan gagal panen dan gagal tanam. Luasan areal sawah yang tergenangi air akibat banjir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.4, sedangkan peta lokasi rawan banjir ditampilkan pada Gambar 2.2. Fenomena alam ini pada dasarnya dikarenakan volume air yang meresap ke bawah permukaan jauh lebih kecil dari pada air yang membentuk aliran bebas (*run off*) di permukaan sebab tanah pembentuk alam bersifat impermiabel atau kedap air. Selain faktor tanah, bencana alam banjir kemungkinan diakibatkan pula oleh: 1). Luapan air dari sungai-sungai kecil, karena air sungai tidak mengalir akibat sampah buangan yang membendung aliran sungai; 2). Sistem pengaliran (*drainase*) yang kurang baik sehingga terjadi konsentrasi atau genangan air permukaan; 3). Penyempitan areal tangkapan air (*catchment areas*) akibat penimbunan untuk areal permukiman dan pembuatan jaringan jalan; 4). Naiknya permukaan air rawa ketika musim penghujan dan; 5) Kombinasi peristiwa-peristiwa tersebut.

Tabel 2.4. Areal Sawah yang Tergenang Akibat Banjir
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019

No	Kecamatan	Luas Areal Tergenang (ha)			
		2016	2017	2018	2019
1	Kayuagung	150	0	0	0
2	Lempuing	0	0	47	327
3	Lempuing Jaya	50	194	0	0
4	Pedamaran Timur	111	820	35	0
5	Tanjung Lubuk	292	33	0	4
6	Mesuji	0	394	0	0
7	Jejawi	315	327	23	0
8	Sirah Pulau Padang	2	0	0	0
9	Air Sugihan	6657	295	211	0
10	Tulung Selapan	611	689	184	16
11	Cengal	709	1895	983	94
12	Sungai Menang	88	4800	475	10
13	Pedamaran	0	62	52	0
14	Teluk Gelam	98	0	0	0
15	Pampangan	136	275	0	76
16	Pangkalan Lampam	144	742	0	0
17	Mesuji Makmur	0	0	0	0
18	Mesuji Raya	0	209	6	0
Jumlah		9.363	10.735	2.016	527

Sumber : Dinas Ket. Pangan, T.Pangan & Holtikultura Kabupaten OKI,

Kabupaten Ogan Komering Ilir juga jadi daerah yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan, secara umum faktor utama terjadinya kebakaran bisa digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu pemicu kebakaran dan kondisi pendukung. Pemicu kebakaran merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi terjadinya penyulutan api. Aktifitas manusia merupakan porsi terbesar di dalam penyulutan api, dibandingkan secara alami. Kebakaran yang berasal dari batubara yang terbakar, halilintar ataupun gesekan ranting kering sangat jarang terjadi, terlebih di Sumatera Selatan, oleh karenanya penyulutan oleh alam cenderung dapat diabaikan.

Penyulutan api oleh manusia juga dikelompokkan menjadi 2 komponen yaitu kesengajaan dan kecerobohan. Walaupun seringkali kebakaran besar diawali dari upaya yang disengaja dan akibat ketidapahaman pembakar

mengenai kondisi yang ada, sehingga menjadi kecerobohan yang menyebabkan kebakaran merambat ke tempat lain.

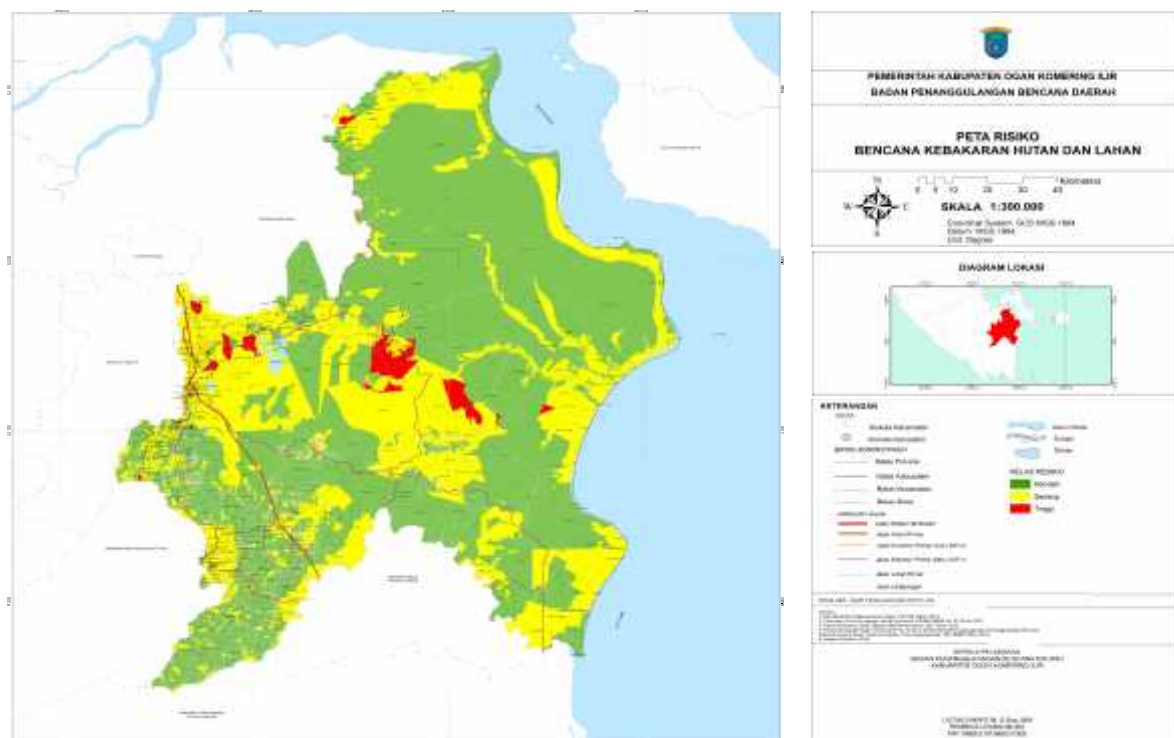
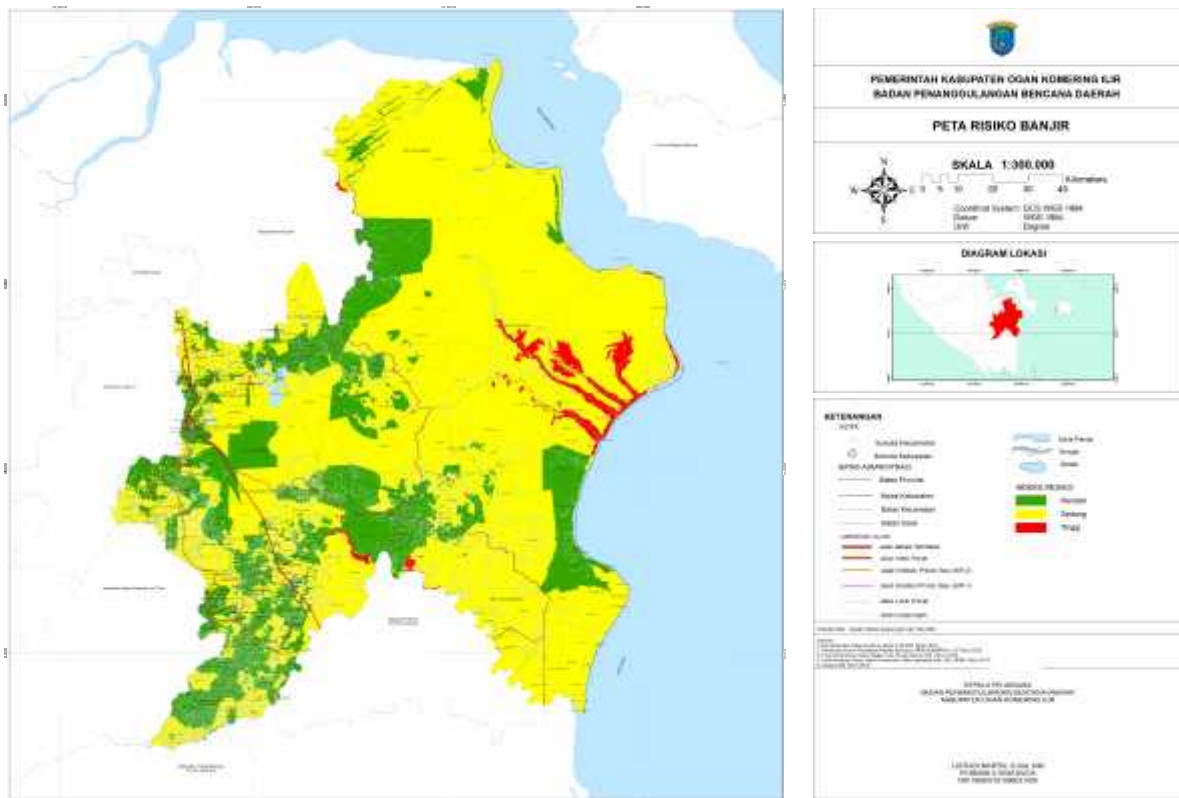
Sebaran titik panas di beberapa di kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat pada Tabel 2.5, sedangkan peta lokasi daerah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditampilkan pada Gambar 2.3.

Tabel 2.5. Jumlah Sebaran Titik Api Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016–2019

No	Kecamatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Air Sugihan	28	-	5	39
2	Tulung Selapan	32	-	7	1.386
3	Cengal	1	6	1	2.186
4	Sungai Menang	1	-	87	-
5	Pangkalan Lampam	18	9	18	1
6	Pampangan	4	33	147	1.271
7	Jejaw	-	3	45	-
8	Sirah Pulau Padang	-	2	114	67
9	Kayuagung	5	3	3	107
10	Pedamaran	8	-	-	772
11	Pedamaran Timur	2	-	1	-
12	Tanjung Lubuk	7	3	-	206
13	Teluk Gelam	-	-	1	-
14	Lempuing Jaya	-	-	28	56
15	Lempuing	-	1	253	-
16	Mesuji Raya	-	2	6	596
17	Mesuji Makmur	-	1	13	-
18	Mesuji	3	8	20	-
	Jumlah	109	71	749	6.687

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab OKI, 2020

Terlihat dari Tabel 2.5 di atas bahwa jumlah titik api di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 meningkat jauh dibandingkan tahun 2018, titik api ini terbesar berasal dari kecamatan Cengal, Tulung Selapan, dan Pampangan. Hal ini bisa disebabkan oleh masih banyaknya rawa di kecamatan-kecamatan tersebut. Jumlah titik api terbanyak biasanya pada bulan September setiap tahunnya.



2.1.2. Aspek Demografis

Berdasarkan data Statistik tahun 2019, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 829.800 jiwa terdiri dari 423.892 laki-laki dan 405.908 perempuan, dengan sex ratio penduduk laki-laki terhadap perempuan 104,43. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu 819.570 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir sebesar 1,34 persen, dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 mencapai 44 jiwa/km², dengan kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan SP. Padang (454 jiwa/km²). Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Tulung Selapan (9 jiwa/km²). Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 s.d 2019, ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 s.d 2019

No	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Penduduk	%	Kepadatan /km2	Penduduk	%	Kepadatan /km2	Penduduk	%	Kepadatan /km2	Penduduk	%	Kepadatan /km2
1	Lempuing	79.096	9,91	267,57	80.421	9,94	272,05	81.229	9,91	274,78	80.626	9,72	272,74
2	Lempuing Jaya	65.375	8,19	129,25	66.225	8,18	130,93	67.009	8,18	132,48	68.729	8,28	135,88
3	Mesuji	42.604	5,34	66,27	43.202	5,34	67,2	43.600	5,32	67,82	44.184	5,32	68,73
4	Sungai Menang	51.141	6,4	22,18	51.710	6,39	22,43	52.475	6,40	22,76	54.580	6,58	23,67
5	Mesuji Makmur	56.172	7,03	113,91	56.743	7,01	115,06	57.286	6,99	116,17	58.761	7,08	119,16
6	Mesuji Raya	38.073	4,77	73,81	38.609	4,77	74,85	39.059	4,77	75,72	39.644	4,78	76,85
7	Tulung Selapan	44.377	5,56	8,27	44.926	5,55	8,38	45.488	5,55	8,48	46.705	5,63	8,71
8	Cengal	48.354	6,06	15,91	49.103	6,07	16,16	49.843	6,08	16,40	50.245	6,06	16,54
9	Pedamaran	44.803	5,61	118,94	45.597	5,63	121,05	46.297	5,65	122,91	45.739	5,51	121,43
10	Pedamaran Timur	22.463	2,81	32,42	22.806	2,82	32,92	23.146	2,82	33,41	23.281	2,81	33,60
11	Tanjung Lubuk	34.238	4,29	155,65	34.584	4,27	157,22	34.906	4,26	158,69	34.976	4,21	159,00
12	Teluk Gelam	22.768	2,85	134,49	22.977	2,84	135,73	23.264	2,84	137,42	23.778	2,87	140,46
13	Kayuagung	68.743	8,61	306,27	69.694	8,61	310,51	70.703	8,63	315,01	71.513	8,62	318,61
14	Sirah Pulau Padang	45.400	5,69	444,75	45.996	5,68	450,5	46.541	5,68	455,93	46.360	5,59	454,15
15	Jejawi	41.068	5,14	172,57	41.551	5,13	174,6	42.114	5,14	176,96	43.003	5,18	180,70
16	Pampangan	29.983	3,76	62,02	30.294	3,74	62,67	30.781	3,76	63,67	31.470	3,79	65,10
17	Pangkalan Lampam	28.361	3,55	25,67	28.668	3,54	25,95	29.165	3,56	26,40	30.297	3,65	27,42
18	Air Sugihan	35.463	4,44	15,75	36.097	4,46	16,04	36.664	4,47	16,29	35.909	4,33	15,95
Total		798.482		41,97	809.203		42,54	819.570		43,08	829.800		43,62

Sumber: Diolah dari Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2020

Ditinjau dari sebaran geografis, jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 terbanyak di Kecamatan Lempuing sebesar 9,72 persen dan yang terkecil terletak di kecamatan Pedamaran Timur sebesar 2,81 persen. Tabel di atas menunjukkan bahwa persebaran penduduk tidak merata antar kecamatan. Kondisi ini memicu ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan pembangunan antar bagian wilayah ini, terutama dengan kawasan-kawasan yang masih terisolasi memerlukan prioritas penanganan guna mencegah bertambahnya tingkat kesenjangan, meningkatkan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga mencegah potensi konflik horizontal.

Profil penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat dari komposisi penduduknya, yakni berdasarkan jenis kelamin, usia, lapangan usaha dan pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dalam 5 tahun terakhir lebih banyak daripada perempuan. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan pada 2019 adalah 104,43% sedangkan dilihat dari usianya, persentase penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) pada tahun 2019 masih cukup tinggi yaitu 66,81 persen.

Tabel 2.7. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019

Kelompok Umur	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0 – 4	41.737	40.404	82.141	41.542	40.244	81.786	41.303	40.027	81.330	40.998	39.803	80.801
5 – 9	39.995	38.134	78.129	40.339	38.657	78.996	40.606	39.130	79.736	40.900	39.503	80.403
14 - 10	37.623	35.944	73.567	37.892	36.225	74.117	38.258	36.527	74.785	38.601	36.902	75.503
15 - 19	34.828	32.492	67.320	35.077	32.749	67.826	35.334	33.017	68.351	35.599	33.304	68.903
20 - 24	33.138	32.738	65.876	33.013	32.533	65.546	32.897	32.313	65.210	32.796	32.302	65.098
25 - 29	35.525	34.828	70.353	35.343	34.313	69.656	35.151	34.544	69.695	34.897	34.396	69.293
30 - 34	35.231	34.123	69.354	35.499	34.712	70.211	35.628	34.374	70.002	35.698	34.401	70.099
35 - 39	34.324	31.868	66.192	34.932	32.573	67.505	35.512	33.245	68.757	36.000	33.802	69.802
40 - 44	29.327	26.246	55.573	30.120	26.947	57.067	30.897	27.646	58.543	31.502	28.404	59.906
45 - 49	23.634	22.078	45.712	24.363	22.677	47.040	25.105	23.280	48.385	25.803	23.902	49.705
50 - 54	18.594	18.413	37.007	19.108	18.957	38.065	19.652	19.486	39.138	20.300	19.998	40.298
55 - 59	15.209	14.731	29.940	15.730	15.442	31.172	16.221	16.100	32.321	16.600	16.799	33.399
60 - 64	12.447	10.951	23.398	13.192	11.700	24.892	13.915	12.499	26.414	14.498	13.396	27.894
65 - 69	7.233	6.949	14.182	7.732	7.282	15.014	8.294	7.653	15.947	9.001	7.999	17.000
70 - 74	4.790	4.997	9.787	4.917	5.144	10.061	5.079	5.316	10.395	5.400	5.398	10.798
75+	4.647	5.304	9.951	4.799	5.450	10.249	4.956	5.605	10.561	5.299	5.599	10.898
Jumlah	408.282	390.200	798.482	413.598	395.605	809.203	418.808	400.762	819.570	423.892	405.908	829.800

Sumber: Diolah dari Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2020

Dari sisi lapangan usaha, komposisi penduduk yang bekerja di sektor primer cenderung mengalami kenaikan dari 58,95 persen pada tahun 2017 menjadi 59,26 persen pada tahun 2019, sedangkan proporsi penduduk yang bekerja disektor tersier mengalami kenaikan dari 28,21 persen pada tahun 2017 menjadi 28,64 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.8. Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019

No	Jenis lapangan usaha	Komposisi Penduduk (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	Primer	TIDAK ADA PUBLIKASI	58,95	58,10	59,26
2	Sekunder		12,84	13,03	12,10
3	Tersier		28,21	28,86	28,64

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

Dari sisi agama, komposisi penduduk berdasarkan agama pada tahun 2019 didominasi oleh agama Islam (97,01 persen), sedangkan proporsi agama lainnya masing-masing Hindu 1,67 persen, Kristen Protestan 0,75 persen, Katolik 0,50 persen dan sisanya 0,06 persen beragama Budha. Secara umum kondisi kehidupan antara warga beragama di Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup kondusif. Secara historis di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah hidup secara berdampingan, khususnya antara penganut agama Islam dan Nasrani yang telah hidup rukun selama ini. Kemudian bertambah dengan migrasi dan urbanisasi penduduk baru yang berbeda agama, suku, dan budaya; telah memperkaya kondisi sosial keagamaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 2.9. Proporsi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019

No	Kecamatan	Islam	Kriten Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Lempuing	68.358	515	824	947	30	0
2	Lempuing Jaya	54.525	635	854	3.791	42	0
3	Mesuji	37.001	129	272	750	4	0

No	Kecamatan	Islam	Kriten Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
4	Sungai Menang	29.006	128	323	172	0	0
5	Mesuji Makmur	53.430	1.106	1.112	2.093	54	0
6	Mesuji Raya	35.214	375	525	1.717	1	0
7	Tulung Selapan	38.257	0	13	0	0	0
8	Cengal	29.632	1	31	1	1	0
9	Pedamaran	41.040	14	46	24	2	0
10	Pedamaran Timur	20.318	58	94	10	39	0
11	Tanjung Lubuk	36.659	3	10	1	0	5
12	Teluk Gelam	24.173	55	153	181	0	0
13	Kayuagung	74.171	39	266	14	208	1
14	Sirah Pulau Padang	44.655	0	2	3	0	0
15	Jejawi	33.838	1	14	1	0	0
16	Pampangan	29.778	1	1	27	0	0
17	Pangkalan Lampam	22.566	0	1	0	0	0
18	Air Sugihan	33.431	90	318	17	0	0
	Jumlah	706.052	3.150	4.859	9.749	381	6

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan tanah, ketenagakerjaan serta fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), dan angka kriminalitas yang tertangani.

2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator yang biasa dipakai untuk mengukur kondisi perekonomian suatu daerah secara makro diantaranya adalah

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai PDRB, tingkat kemiskinan dan lain-lain. PDRB sebagai salah satu indikator penting merupakan dasar pengukuran penciptaan nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut definisinya, PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Struktur perekonomian digunakan untuk melihat sektor-sektor yang mendominasi dalam pembentukan nilai tambah ekonomi suatu daerah. Dari struktur tersebut akan didapat gambaran mengenai potensi ekonomi suatu wilayah. Struktur perekonomian didapat dari besaran distribusi persentase nilai tambah tiap-tiap sektor terhadap total PDRB yang pada umumnya menggunakan ukuran harga berlaku.

Struktur perekonomian merupakan besar *share* lapangan usaha terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.

Tabel 2.10. Struktur Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2016-2019 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2016	2017	2018	2019*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	57,62	56,24	54,67	53,82
2	Pertambangan dan Penggalian	1,09	1,09	1,21	1,29
Sektor Primer		58,71	57,33	55,88	55,11
3	Industri Pengolahan	6,43	7,27	8,19	8,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	12,84	13,21	13,25	13,33
Sektor Sekunder		19,35	20,56	21,52	21,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,54	9,92	10,43	10,81
8	Transportasi dan Pergudangan	0,7	0,83	0,88	0,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,87	0,98	1,09	1,18
10	Informasi dan Komunikasi	0,42	0,45	0,47	0,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,06	1,05	1,02	0,98
12	Real Estate	1,82	1,89	1,97	2,08
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,37	4,89	4,62	4,35
15	Jasa Pendidikan	1,49	1,42	1,39	1,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,15	0,15	0,15
17	Jasa Lainnya	0,45	0,47	0,49	0,52
Sektor Tersier		21,94	22,12	22,58	22,98

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Struktur ekonomi berarti juga menggambarkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Suatu daerah yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian, maka nilai tambah ekonomi akan banyak terbentuk di sektor pertanian sehingga sektor primernya akan cenderung lebih dominan. Sebaliknya pada wilayah yang masyarakatnya banyak bergerak di sektor perdagangan dan jasa seperti di daerah perkotaan, sektor tersier akan lebih dominan dibanding sektor primernya. Dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir masih bertumpu pada sektor primer dengan kontribusi rata-rata mendekati angka 50 persen. Namun jika dilihat secara series dari tahun ke tahun tampak adanya penurunan kontribusi dari sektor primer. Pada tahun 2016

sektor primer memberikan kontribusi sebesar 58,71 persen dan pada tahun 2019 kontribusinya menurun menjadi 55,11 persen. Data empiris tersebut menunjukkan bahwa mulai terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran meskipun berlangsung secara perlahan. Penurunan kontribusi sektor primer yang dibareng dengan peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten OKI sejalan dengan teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh *Lewis* yang menyoroti terjadinya perubahan struktur perekonomian dari tradisional ke industri/modern yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melebihi tingkat subsisten.

Sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan, penggalian, keduanya memberikan kontribusi sebesar 57,33 persen. Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan sendiri memberikan kontribusi sebesar 56,24 persen terhadap total PDRB. Sisanya sebesar 1,09 persen merupakan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian. Dengan kontribusi sebesar ini berarti dapat dikatakan separuh perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ilir berasal dari sektor primer. Besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar masih bergerak di bidang agraris sehingga sektor ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Ogan Komering Ilir. Kondisi ini selaras dengan kultur masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan masyarakat agraris juga ditunjang dengan potensi alam di bidang pertanian yang masih melimpah.

Sektor sekunder pada tahun 2019, memberikan kontribusi sebesar 21,91 persen. Kontribusi ini sedikit meningkat dibanding kontribusi yang diberikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,35 persen. Kontribusi yang dihasilkan ini sebagian besarnya yaitu 13,33 persen berasal dari sektor Konstruksi dan 8,5 persen berasal dari industri pengolahan, kontribusi sektor ini terus meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 2.4. Struktur Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 – 2019

Sementara itu, pada tahun 2019 sektor tersier memberikan kontribusi sebesar 22,98 persen. Tampak bahwa kontribusi sektor tersier mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Peranan terbesar dalam sektor tersier terbentuk dari aktivitas sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 10,81 persen, real estate sebesar 2,08 persen, Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan sosial wajib sebesar 4,35 persen. Sementara, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan, serta jasa-jasa masih relatif kecil. Jika dilihat secara global, tampak bahwa peranan sektor primer mengalami penurunan bersamaan dengan meningkatnya peranan sektor sekunder dan tersier. Keadaan ini diharapkan menjadi indikasi adanya kemajuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena pada umumnya ekonomi negara maju cenderung didominasi oleh sektor sekunder dan tersier.

Pertumbuhan Ekonomi

Pergeseran kontribusi sektoral ternyata tidak diiringi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 4 tahun terakhir (2016 – 2019) rata-rata sebesar 4,9 persen. Jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut mengalami sedikit kenaikan, dimana pada tahun 2016 sebesar 4,47 persen menjadi 5,08 persen pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 0,61 persen. Fakta empiris ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi hampir seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan dunia. Fenomena tersebut terjadi disebabkan dampak melemahnya perekonomian dunia yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar rupiah dalam perdagangan internasional, sehingga berimbas pada merosotnya nilai ekspor baik barang maupun jasa dan sebaliknya mahalnya biaya impor dari negara lain. Keadaan ini pada akhirnya juga akan dirasakan oleh segenap masyarakat dalam wilayah Negara Indonesia dengan melambatnya aktivitas roda perekonomian domestik.

Tabel 2.11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2016-2019

No	Sektor	Tahun			
		2016	2017	2018	2019*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,58	2,97	3,52
2	Pertambangan dan Penggalian	7,33	8,54	15,36	12,04
3	Industri Pengolahan	10,86	12,08	16,00	10,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,23	4,9	5,18	7,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,49	4,08	7,98	8,92
6	Konstruksi	9,4	9,64	6,02	7,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran	11,82	9,65	10,55	8,67
8	Transportasi dan Pergudangan	8,76	10,5	9,71	8,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,97	11,48	11,57	7,11
10	Informasi dan Komunikasi	11,43	11,51	9,5	11,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,36	2,71	0,86	0,36
12	Real Estate	11,53	9,01	8,02	8,95
13	Jasa Perusahaan	8,65	9,55	8,13	9,53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,08	11,05	3,01	1,87
15	Jasa Pendidikan	4,3	2,32	4,04	5,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	3,31	2,51	6,52
17	Jasa Lainnya	7,25	9,24	8,02	10,31
	PDRB	4,47	5,11	4,94	5,08

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2020

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan nasional mengalami tren perlambatan dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melambat selama periode tersebut sangat relevan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan maka dapat dikatakan kurang relevan. Namun demikian, di Tahun 2019 kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami kenaikan (dari 4,94% menjadi 5,08%) ternyata relevan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional yang juga mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan yang masing-masing sebesar 5,02 persen dan 5,69 persen. Meskipun demikian, kondisi pertumbuhan ekonomi pada setiap level pemerintahan masih dikatakan relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional dapat ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut ini :



Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019

2.2.1.2 Inflasi

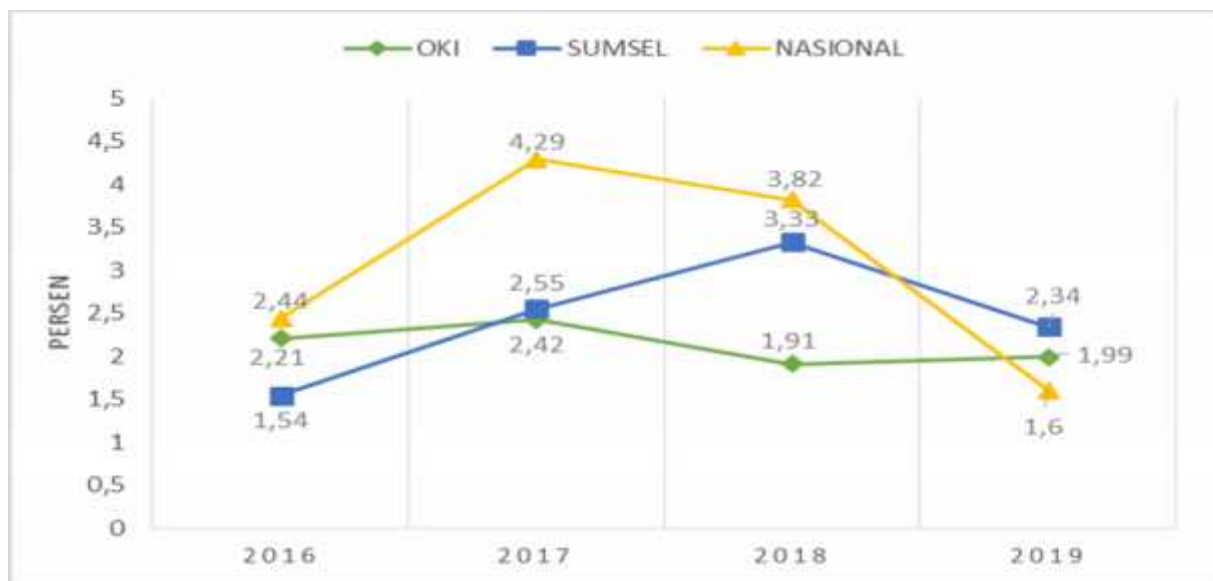
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi yang umum dipakai sebagai indikator perekonomian adalah inflasi pada tingkat harga konsumen/harga pasar. Adapun inflasi pada penghitungan PDRB ini adalah inflasi pada tingkat harga produsen yaitu inflasi yang timbul dari kegiatan produksi barang dan jasa, sehingga sangat mungkin adanya perbedaan antara keduanya.

Pada umumnya, inflasi ditimbulkan akibat naiknya ongkos produksi sehingga mendorong naiknya harga barang yang diproduksi. Selain itu bisa juga diakibatkan karena meningkatnya permintaan terhadap barang jasa yang menyebabkan naiknya daya tawar barang dan jasa.

Dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga 2019 kinerja inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional secara umum mengalami penurunan. Meskipun demikian, di tahun 2019 inflasi mengalami kenaikan di setiap tingkatan wilayah. Inflasi selama periode tersebut berada di bawah angka 10 persen, yang menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi masih dalam kondisi yang wajar. Perkembangan inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ke tahun sangat relevan dengan inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Tingkat inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Inflasi yang terjadi pada setiap tingkatan wilayah di tahun 2019 dapat dikatakan relatif rendah dengan angka sebesar 1,99 persen untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebesar 2,60 persen untuk Provinsi Sumatera Selatan dan sebesar 2,72% untuk nasional. Baik Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun Nasional, inflasi pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan untuk Propinsi Sumatera Selatan nilai inflasi tahun 2019 lebih

tinggi dibandingkan tahun 2016, sebagaimana dapat ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Sumber: BPS Kabupaten OKI

Gambar 2.6. Laju Inflasi PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019

2.2.1.3. Pendapatan Per Kapita dan Gini Ratio

Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto, nilai hasilnya akan sama dengan pendapatan regional (*regional income*) bila diasumsikan pendapatan netto sama dengan nol.

Tabel 2.12. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ilir Berdasarkan Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2016-2019

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Pendapatan per Kapita (Juta Rp)	Pertumbuhan	Pendapatan Per Kapita (Juta Rp)	Pertumbuhan
2016	29,35	6,35	21,85	6,66
2017	31,11	6,00	22,61	3,48
2018	32,75	5,27	23,43	3,63
2019	34,66	5,83	24,32	3,80

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2021

Kemudian jika pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk maka didapat nilai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang biasa digunakan untuk

mengukur tingkat kemakmuran di suatu wilayah namun tidak dapat melihat pemerataannya karena ini bersifat rata-rata pendapatan per orang, dan kurang menggambarkan distribusinya. Dengan kata lain, dapat saja nilai tersebut diperoleh dari sekelompok masyarakat dengan penghasilan sangat tinggi dan sekelompok besar lainnya dengan penghasilan yang sangat rendah. Untuk mengukur hal ini digunakan indeks gini rasio yang sering digunakan untuk menilai kesenjangan distribusi pendapatan. Berdasarkan perhitungan BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir (2019), angka Gini Ratio Kabupaten Ogan Komering sebesar 0,279. Angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (Kurang dari 0,4).

Dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga 2019 kinerja gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional secara umum mengalami fluktuatif. Perkembangan gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ke tahun sangat relevan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 berada di bawah tingkat gini ratio Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Gini ratio yang terjadi pada setiap tingkatan wilayah di tahun 2019 dapat dikatakan relatif rendah dengan angka sebesar 0,279 untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebesar 0,330 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan sebesar 0,390 untuk Nasional, sebagaimana dapat ditunjukkan pada Gambar 2.7

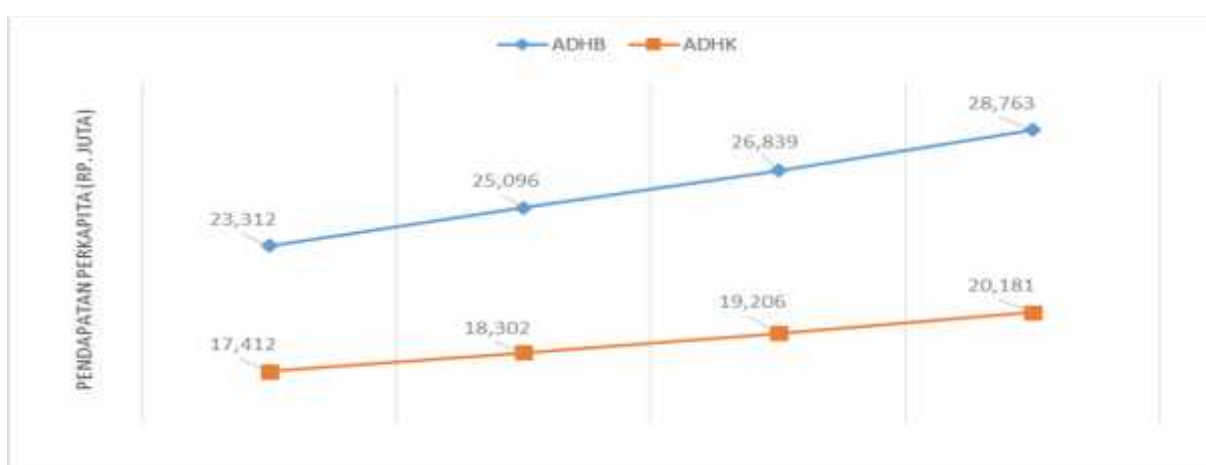


Sumber: PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2021

Gambar 2.7. Gini Ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019

Indeks gini ratio bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini ratio bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Pada tahun 2019 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp. 28.763.068,9,- meningkat 7 persen dibanding dengan kondisi tahun 2018 yang pendapatan per kapitanya sebesar Rp. 26.839.366,8,- Dengan menggunakan harga konstan pendapatan per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 20.180.568,9,- meningkat 5 persen dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp 19.205.726,9,-.



Sumber: PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2021

Gambar 2.8. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019

Perkembangan Penduduk Miskin

Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 15,28 persen menurun pada tahun 2019 menjadi 15,01 persen. Dan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang di terbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 sebesar 17,08 persen. Sedangkan nilai Garis Kemiskinan terus meningkat selama 2014 sampai 2017. Pada tahun 2018 nilai Garis Kemiskinan adalah 333.505 rupiah; dan meningkat menjadi 347.121 rupiah pada 2019. Naiknya garis kemiskinan diiringi dengan turunnya nilai persentase penduduk miskin kabupaten Ogan Komering Ilir

menunjukkan bertambahnya pendapatan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir secara rata-rata.

Tabel 2.13. Jumlah Rumah Tangga BDT tahun 2015 Menurut Klasifikasi Kemiskinan dirinci per Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Kecamatan	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin Lainnya	Total
1.	Lempuing	455	1.302	1.508	318	3.583
2.	Lempuing Jaya	693	1.932	2.253	532	5.410
3.	Mesuji	340	739	757	163	1.999
4.	Sungai Menang	462	1.053	1.308	459	3.282
5.	Mesuji Makmur	448	1.200	1.325	258	3.231
6.	Mesuji Raya	265	724	1.047	272	2.308
7.	Tulung Selapan	1.554	1.983	1.445	219	5.201
8.	Cengal	1.006	1.575	1.576	462	4.619
9.	Pedamaran	1.792	1.479	1.124	197	4.592
10.	Pedamaran Timur	290	463	478	123	1.354
11.	Tanjung Lubuk	1.673	1.904	1.170	204	4.951
12.	Teluk Gelam	741	910	685	148	2.484
13.	Kota Kayuagung	2.087	2.526	1.808	358	6.779
14.	Sirah Pulau Padang	2.128	2.660	2.080	483	7.351
15.	Jejawi	2.133	1.563	872	183	4.751
16.	Pampangan	1.462	1.686	1.420	275	4.843
17.	Pangkalan Lampam	755	1.342	1.113	213	3.423
18.	Air Sugihan	285	723	921	234	2.163
	Jumlah	18.569	25.764	22.890	5.101	72.324

Sumber : Diolah dari Hasil BDT tahun 2015

Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin cenderung menurun dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin 15,28 menjadi 15,01 di tahun 2019.

Tabel 2.14. Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016– 2019

No	URAIAN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Miskin	127.540	127,06	124,86	124,14
2	Persentase Penduduk Miskin	16,03	15,75	15,28	15,01
3	P1 Kedalaman kemiskinan	2,79	2,95	3,05	2,67
4	P2 Keparahan kemiskinan	0,70	0,78	0,78	0,61
5	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/BL)	295.852	310.341	333.505	347.121

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

Persentase penduduk miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan demikian pula dengan Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (p_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (p_2) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai data pembandingan, tabel berikut akan memperlihatkan Jumlah dan Indikator Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

Tabel 2.15. Indikator Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Per Kabupaten Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin (000)			Persentase	Peringkat
		2016	2017	2019		
1	Ogan Komering Ulu	46,97	46,97	47	12,77	9
2	Ogan Komering Ilir	127,54	127,06	124	15,01	4
3	Muara Enim	82,35	82,35	79	12,41	10
4	Lahat	67,83	67,83	65	15,92	3
5	Musi Rawas	55,5	55,5	54	13,37	6
6	Musi Banyuasin	106,78	106,78	106	16,41	2
7	Banyuasin	95,99	95,99	97	11,33	13
8	OKU Selatan	38,42	38,42	38	10,53	15
9	OKU Timur	73,93	73,93	70	10,43	16
10	Ogan Ilir	57,01	57,01	57	13,31	7
11	Empat Lawang	30,17	30,17	31	12,30	11
12	PALI	25,89	25,89	25	13,47	5
13	Musi Rawas Utara	36,95	36,95	37	19,12	1
14	Palembang	191,95	191,95	181	10,90	14
15	Prabumulih	20,47	20,47	22	11,61	12
16	Pagar Alam	12,4	12,4	12	8,90	17
17	Lubuk Linggau	31,05	31,05	30	12,95	8
	Sumatera Selatan	1.101,20	1.101,20	1074	12,71	

Sumber : BPS Propinsi Sumsel

Dari uraian indikator kemiskinan di atas dapat disimpulkan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara bertahap menunjukkan hasil yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.16. Perkembangan bidang pendidikan
di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016- 2019**

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Angka Melek Huruf	97,74	98,09	98,24	97,96
2	Rata-Rata Lama sekolah	7,25	7,45	7,02	7,03
3	Angka Partisipasi Kasar				
	SD	119,84	112,96	112,21	116,50
	SMP	80,71	89,42	75,43	79,69
4	Angka Partisipasi Murni				
	SD	98,11	96,46	99,16	98,23
	SMP	72,96	74,43	73,98	75,36

Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, 2020

Dilihat dari bidang pendidikan, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir tingkat pendidikannya masih belum baik, hal ini terlihat dari angka melek huruf yang belum mendekati 100 persen dan rata-rata lama sekolah belum mencapai wajib belajar 9 tahun. Selain itu dilihat dari Angka Partisipasi Kasar menunjukkan bahwa seluruh penduduk usia sekolah sudah menikmati pendidikan tingkat SD sederajat, tetapi masih ada sebagian anak usia sekolah SMP yang belum menikmati pendidikan.

Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memenuhi wajib belajar sembilan tahun, pada tahun 2019 baru mencapai 7,03 tahun, yang artinya masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir rata-rata baru menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/sederajat, hal ini disebabkan masih tingginya masyarakat yang tidak tamat SD atau belum mempunyai ijazah SD/sederajat sebesar 21,90 persen seperti disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.17. Persentase Penduduk umur 15 tahun ke atas menurut
pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2016- 2019**

No	Pendidikan Tertinggi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Tidak Punya Ijazah	23,86	19,03	23,73	21,90
2.	SD/Sederajat	36,59	40,06	31,41	31,61
3.	SMP/ Sederajat	19,95	23,19	23,53	23,61

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

Persentase penduduk umur 15 tahun keatas menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 hanya 24 persen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengenyam pendidikan dibangku SMP sederajat (23,61 persen). Masih cukup tingginya jumlah penduduk yang berpendidikan SD kebawah tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan.

Tabel 2.18. Perkembangan Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Angka Melek Huruf	Peringkat	Rata-rata Lama Sekolah	Peringkat
1	Ogan Komering Ulu	99,3	4	8,69	5
2	Ogan Komering Ilir	97,96	16	7,03	15
3	Muara Enim	98,46	11	7,78	9
4	Lahat	98,98	7	8,45	6
5	Musi Rawas	98,1	15	7,51	12
6	Musi Banyuasin	98,19	13	7,61	10
7	Banyuasin	98,15	14	7,19	14
8	Ogan Komering Ulu Selatan	98,83	8	7,83	8
9	Ogan Komering Ulu Timur	98,4	12	7,54	11
10	Ogan Ilir	99,21	5	7,85	7
11	Empat Lawang	98,55	10	7,39	13
12	Penukal Abab Lematang Ilir	98,71	9	6,75	16
13	Musi Rawas Utara	97,9	17	6,5	17
14	Kota Palembang	99,74	1	10,52	1
15	Kota Prabumulih	99,41	3	9,72	3
16	Kota Pagar Alam	99,42	2	9,14	4
17	Kota Lubuk Linggau	99,09	6	9,81	2
	Sumatera Selatan	98,76		8,18	

Sumber : BPS Propinsi Sumsel

Angka melek huruf Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 sebesar 97,96 persen yang rata-rata sudah mendekati dengan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 98,76 persen dan menempati peringkat 16 dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 sebesar 7,03 tahun

masih dibawa rata-rata Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sebesar 8,18 tahun dan menempati peringkat (peringkat 15) dari 17 kabupaten/kota yang ada. Perlu kerja keras Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar dapat setara dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2.2. Kesehatan

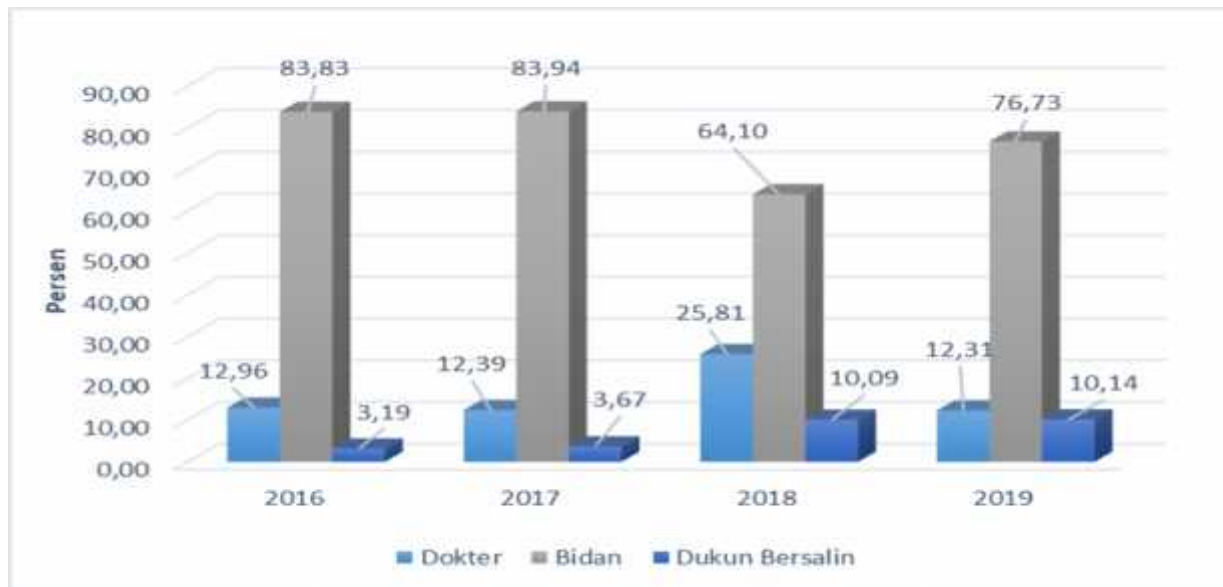
Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini.

Tabel 2.19. Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016– 2019

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Usia Harapan Hidup	68,02	68,04	68,22	68,41
2	Jumlah Kematian Bayi	41	33	6	13
3	Jumlah Kematian Ibu	8	2	12	3
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,01	0,01	0,01	0,02

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin meningkat yaitu 68,41 pada tahun 2019. Namun, disisi lain dengan jumlah kematian bayi dan Ibu yang terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 jumlah kematian bayi 13 dan jumlah kematian ibu 3 perlu peningkatan kinerja di bidang kesehatan sehingga angka kematian bayi dan ibu dapat diturunkan.



Gambar 2.9. Persentase balita menurut penolong persalinan tahun 2016 – 2019

Bila dilihat secara rinci pada Gambar 2.9, penolong persalinan oleh tenaga dokter mengalami penurunan dari 12,96 persen pada tahun 2016 menjadi 12,31 persen pada tahun 2019. Untuk persentase persalinan yang dibantu oleh bidan juga mengalami penurunan dari 83,83 persen pada tahun 2016 menjadi 76,73 persen pada tahun 2019. Sedangkan persalinan oleh dukun bersalin mengalami kenaikan yaitu dari 3,19 persen pada tahun 2016 menjadi 10,14 persen di tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang proses persalinannya ditolong oleh bukan tenaga kesehatan, terlepas dari dukun terlatih maupun tidak terlatih. Hal ini diduga erat kaitannya dengan tingkat kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang masih berlaku.

Tabel 2.20. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik dan Poskesdes yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019

No	Kecamatan	Pusekesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Praktek Dokter	Klinik
1	Lempuing	3	5	16	4	5
2	Lempuing Jaya	2	8	16	0	1
3	Mesuji	2	6	13	4	0

No	Kecamatan	Pusekesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Praktek Dokter	Klinik
4	Sungai Menang	1	8	17	0	1
5	Mesuji Makmur	2	11	18	0	2
6	Mesuji Raya	2	6	16	1	0
7	Tulung Selapan	2	4	22	1	0
8	Cengal	1	2	15	0	1
9	Pedamaran	1	5	14	3	1
10	Pedamaran Timur	1	2	6	1	0
11	Tanjung Lubuk	1	5	19	2	0
12	Teluk Gelam	2	7	13	0	0
13	Kayuagung	2	4	22	8	4
14	Sirah Pulau Padang	2	4	14	0	1
15	Jejawi	2	2	17	1	0
16	Pampangan	2	0	21	0	1
17	Pangkalan Lampam	1	3	17	1	1
18	Air Sugihan	2	4	17	0	2
	Total	31	86	293	26	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. OKI, 2020

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 66,96. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 66,57 berarti meningkat sebesar 0,39 poin. Kenaikan indeks penyusun IPM disebabkan oleh kenaikan variable pembangunan manusia yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli). Kalau dilihat dari Tabel 2.21 di bawah ini kenaikan Indeks Kesehatan disebabkan oleh bertambahnya Angka Harapan Hidup sebesar 0,19 tahun. Kenaikan Indeks Pendidikan disebabkan oleh kenaikan angka melek huruf sebesar 0,13 persen dan kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar 0,10 tahun. Dan kenaikan Indeks Daya beli disebabkan oleh kenaikan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 331.000,-

Tabel 2.21. Variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 – 2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Angka Harapan Hidup	68,02	68,04	68,22	68,41
2	Harapan Lama Sekolah	11,35	11,39	11,40	11,41
3	Rata-rata Lama Sekolah	6,74	7,01	7,02	7,03
4	Pengeluaran Riil Perkapita (Juta Rupiah)	10.039	10.306	10.706	11.032
	IPM	65,44	66,11	66,57	66,96

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 masih berada dibawah rata-rata IPM provinsi Sumatera Selatan dan berada pada posisi ke-11 dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini tentunya karena angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya mengalami peningkatan sedikit. Sehingga berpengaruh terhadap percepatan perkembangan IPM itu sendiri. Sedangkan kabupaten/kota yang naik ke peringkat ke-10 pada tahun 2019 adalah Kabupaten Ogan Ilir (0,26) lebih besar dibandingkan dengan perkembangan IPM Kabupaten Ogan Komering Ilir (0,39).

Tabel 2.22. Besaran dan Peringkat IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peringkat
1	Palembang	78,44	1
2	Lubuk Linggau	74,81	2
3	Prabumulih	74,40	3
4	Ogan Komering Ulu	69,45	4
5	Ogan Komering Ulu Timur	69,34	6
6	Muara Enim	68,88	5
7	Pagar Alam	68,44	7
8	Musi Banyuasin	67,83	8
9	Lahat	67,62	9
10	Ogan Ilir	67,22	10
11	Ogan Komering Ilir	66,96	11
12	Musi Rawas	66,92	12
13	Banyuasin	66,90	13

No	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peringkat
14	Ogan Komering Ulu Selatan	65,43	14
15	Empat Lawang	65,10	15
16	Pali	64,33	16
17	Musi Rawas Utara	64,32	17
	Sumatera Selatan	70,02	

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Tabel 2.23 menyajikan TPAK selama tahun 2017 – 2020, terlihat bahwa angka pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020 adalah 2,19 persen mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 6,89 persen.

Tabel 2.23. Perkembangan TPAK dan Pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 – 2019

No	Indikator Ketenagakerjaan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan Kerja	401.335	413.021	423.246	399.714
	Bekerja	387.495	402.256	410.932	386.545
	Pengangguran	13.840	10.765	12.314	13.169
2.	Bukan Angkatan Kerja	174.533	172.250	171.454	212.899
3.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas	757.868	593.777	603.248	612.613
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,69	70,28	70,96	65,25
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	2,65	2,98	3,29

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ke tahun meningkat, diimbangi dengan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun meningkat. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebagian besar dapat terserap dalam lapangan kerja yang ada dengan rata-rata 71 persen.

Jumlah penduduk yang tidak bekerja juga ada kecenderungan semakin menurun. Dengan demikian upaya-upaya yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait perlu terus ditingkatkan.

2.2.2.5. Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki keanekaragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Sejumlah kesenian, museum purbakala dan sejarah nilai budaya masih dapat ditemukan disetiap wilayah kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24. Potensi Seni budaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Kecamatan	Seni Budaya	Jenis
1	Kayuagung	Kesenian	Tari peguton, incang-incang, tari sabung ayam, tari cang-cang, tari konoi mibor, tari cindo, tari perempuan kurungan, tari benang setungkal dan tari gurdan
		Museum	Rumah bari, makam ratu jimat, makam puyang buncit, makam seriang kuning,
		Sejarah nilai budaya	Midang morge siwe, mengarak haji, perahu jukung, legenda negeri silap, legenda putri rambut putih, legenda buluh cawang, gerabah adat perkawinan, mabak handuk dan bidar
2	Tanjung Lubuk dan Teluk Gelam	Kesenian	Tari ngantak dan tari gopung
		Museum	Makam syeh, rumah seratus tiang, rumah adat pulau gemantung, masjid tua, rumah mantan pangeran bengkulah pulau gemantung
		Sejarah nilai budaya	Quran tua, beduk tua dan adat nyucuk
3	Pedamaran dan Pedamaran Timur	Kesenian	Tanjidor
		Sejarah nilai budaya	Rumah rakit, legenda siberanak dan sembilan muyang
4	Pampangan dan Pangkalan Lampam	Museum	Batu pengantin, batu lesung, bantu gajah dan bukit batu
		Sejarah nilai budaya	Legenda bukit batu
5	Tulung Selapan	Kesenian	Batanghari sembilan dan gamelan
		Museum	Makam panglima batu api, pemangku adat selapan
		Sejarah nilai budaya	Masjid alawiyah, masjid taqwa, legenda panglima batu api dan legenda puyang atung bungsu
6	Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur dan Air Sugihan	Kesenian	Reog, ludruk, sintren, wayang kulit, legog, tari pendet, kuda lumping, tayub, dan campur sari
		Sejarah nilai budaya	Legenda saman lempuing

Sumber, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI, 2019

Kesenian daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terus dilestarikan dengan modifikasi untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat yang diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian. Pertumbuhan sanggar seni tidak terlalu pesat, namun menunjukkan adanya kegiatan seni yang berusaha dilestarikan masyarakat melalui penampilan kegiatan acara budaya berupa acara perayaan pernikahan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesenian daerah sebagai unsur penting dalam mempertahankan kelestarian budaya dan kesenian daerah yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun.

Tabel 2.25. Indikator seni budaya dan olahraga
Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jumlah sanggar seni	Unit	22
2	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Unit	2
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Unit	2

Sumber, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI, 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat dari keadaan pendidikan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah (APS), pendidikan anak usia dini, fasilitas pendidikan, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata.

Tabel 2.26. Indikator Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 – 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Angka Partisipasi Sekolah					
	SD	%	100	99,57	99,16	99,69
	SMP	%	86,39	88,62	73,98	90,25
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	%	63,6	63,7	94,01	75,9
3.	Fasilitas Pendidikan					
	- Bangunan SD/MI Kondisi Baik	%	77	77,25	78,45	79,8
	- Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik	%	78,9	78,45	79,5	80,8
4.	Angka Putus Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	%	0,46	0,45	0,28	0,007
	- APS SMP/MTs	%	0,52	0,5	0,5	0,05
5.	Angka Kelulusan (AL)					
	- AL SD/MI	%	100	100	100	100
	- AL SMP/MTs	%	100	100	100	100
6.	Angka Melanjutkan (AM)					
	- AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89,4	89,5	71,45	82,9
	- AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	77,5	77,6	89,49	0
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	%	60	60	75	80
8.	Rasio Guru/murid	Per 10.000 murid				
	- SD/MI		0,157	0,059	0,057	0,062
	- SMP/MTs		0,208	0,083	0,069	0,072

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan secara umum banyaknya anak kelompok umur tertentu bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Indikator ini sangat relevan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, yaitu dengan melihat APS penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) dan 13-15 tahun (usia SMP). Dengan adanya program wajib belajar tersebut seharusnya anak-anak usia 7-15 tahun sedang berada di bangku sekolah. Data pada Tabel 2.26 menunjukkan bahwa tahun 2019 APS penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) mencapai 99,69 persen. Sedangkan pada usia 13-15 tahun (usia SMP) APS sebesar 90,25 persen. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun telah cukup berhasil namun belum sepenuhnya menjangkau anak-anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun angka partisipasi sekolah penduduk semakin kecil sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini mudah dipahami, karena mereka yang memasuki usia produktif, dituntut partisipasinya dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin mahal pula kebutuhan biaya, Sehingga tidak semua penduduk mampu menjangkaunya. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah adalah meningkatnya sarana pendidikan seperti sekolah dan meningkatnya jumlah tenaga pendidik. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, jumlah tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan SD/ MI pada tahun 2019 sebanyak 5.541 orang, untuk pendidikan SMP/MTs pada tahun 2019 sebanyak 2.072 orang. Peningkatan jumlah tenaga pendidik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pendidik yang bersertifikat sehingga dapat menghasilkan siswa siswi yang berkualitas dan berprestasi.

2.3.1.2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir 29 buah dan telah tersebar di 18 kecamatan. Selain itu pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh klinik swasta dan dokter praktek. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah adalah meningkatnya pelayanan kunjungan dan status gizi, sedangkan untuk sarana kesehatan yang ada telah mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penurunan indikator derajat kesehatan akan ditanggulangi dengan beberapa program dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan dokter siaga di wilayah maupun penambahan tenaga medis maupun anggaran perlindungan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.27. Indikator Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016 -2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	2,2	2,17	1 : 5906,6	1 : 1770
2.	Rasio dokter per satuan penduduk	14,39	7,29	1 :26973,4	8,8
3.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	59,25	51,9	1 : 13486,7	1 : 189300
4.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	73,5	66,42	71,37	76,2
5.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,7	93,94	97,08	100
6.	Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	99,08
7.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2,36	2,81	55,64	100
10.	Cakupan kunjungan bayi	88,5	97,2	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, 2020

Sejauh mana pengadaan berbagai fasilitas kesehatan telah mampu menjangkau seluruh masyarakat, bisa dilihat melalui beberapa ukuran atau rasio antara jumlah fasilitas kesehatan yang ada dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Keterbatasan sarana kesehatan yang ada, masih relatif sulitnya akses sebagian masyarakat pada sarana yang tersedia serta kesadaran kesehatan masyarakat yang rendah berdampak rendahnya kunjungan masyarakat pada sarana kesehatan. Tabel 2.28 memberikan informasi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan kunjungan ke tempat fasilitas kesehatan, dari tabel tersebut didapat ternyata di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 penduduknya lebih banyak mengunjungi Proktek Dokter/Poliklinik dan Puskesmas/Pustu, dari tabel tersebut didapat bahwa persentase jumlah

kunjungan ke fasilitas Proktek Dokter/Poliklinik sebanyak 72,89 persen dan Puskesmas/Pustu sebanyak 15,41 persen.

Tabel 2.28. Persentase penduduk yang pernah berobat jalan menurut tempat berobat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016– 2019

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Rumah Sakit	6,99	7,40	5,53	5,19
2.	Praktek Dokter / Poliklinik	66,81	76,53	66,78	72,89
3.	Puskesmas / Pustu	26,32	19,96	27,18	15,41
4.	Petugas Kesehatan	-	-	-	-
5.	Praktek Tradisional	0,68	1,30	3,69	2,06
6.	Lainnya	0,17	0	0,55	1,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, 2020

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pergerakan perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya pada aksesibilitas arus transportasi jalan masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak di tahun 2019 sebesar 28,86 persen dari total panjang jalan yang ada 2.037,106 km, hanya 18,51 persen kondisi jalan baik dan sisanya 52,64 persen dalam kondisi sedang. Di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak transportasi air yang digunakan masyarakat, seperti di Kecamatan Air Sugihan, Cengal dan Sungai Menang sekitar 70 persen masih menggunakan kendaraan air.

Tabel 2.29. Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun							
	2016		2017		2018		2019	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Jenis Permukaan Jalan								
Aspal/Penetrasi Macadam	358,687	23,31	376,62	18,49	357,353	17,54	292,678	14,37
Beton	538,316	34,98	166,529	8,17	837,574	41,12	1245,769	61,15
Telford/Kerikil	564,354	36,67	830,147	40,75	661,41	32,47	301,003	14,78
Tanah	77,512	5,04	663,81	32,59	180,769	8,87	197,656	9,7
Jumlah	1.538,87	100	2.037,11	100	2.037,11	100	2.037,11	100
Kondisi Jalan								
Baik	485,408	31,54	648,472	31,83	676,202	33,19	377,021	18,51
Sedang	578,118	37,57	787,035	38,63	765,886	37,6	1072,335	52,64
Rusak Ringan	368,406	23,94	433,059	21,26	403,797	19,82	396,964	19,49

Uraian	Tahun							
	2016		2017		2018		2019	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Rusak Berat	106,937	6,95	168,54	8,27	191,221	9,39	190,786	9,37
Jumlah	1.538,87	100	2.037,11	100	2.037,11	100	2.037,11	100

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2020

Adapun total panjang jaringan jalan berstatus di Kabupaten OKI pada tahun 2019 mencapai 2.225,81 km. Jaringan jalan tersebut terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sepanjang 109,6 km (4,92%), jalan provinsi sepanjang 79,1 km (3,55%) dan jalan kabupaten sepanjang 2.037,11 km (91,53%) dengan kondisi kemandapan jalan 72,91 %.

Tabel 2.30 Kondisi Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten OKI Tahun 2019

No	Status Jalan	Panjang (km)	%	Kondisi mantap (km)	%
1.	Nasional	109,6	4,92	109,6	100,00
2.	Provinsi	79,1	3,55	63,8	80,66
3.	Kabupaten OKI	2.037,11	91,53	1.449,36	71,15
	Total	2.225,81	100,00	1.622,76	72,91

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten OKI, 2020

Wilayah Kabupaten OKI yang sebagian besar berupa rawa, maka infrastruktur sumber daya air yang ada yaitu infrastruktur jaringan irigasi rawa. Adapun kondisi jaringan irigasi rawa dengan kondisi rusak berat 44,36%, rusak sedang 24,53%, dan rusak ringan 14,92%

Tabel 2.31 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten OKI Tahun 2019

No.	Luas Daerah Irigasi Rawa (ha)	Kondisi Daerah Irigasi (ha)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1.	1.019	452	250	152

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten OKI, 2020

2.3.1.4. Perumahan

Sumber air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat ini masih bertumpu pada air tanah dangkal, sungai dan Perusahaan Daerah

Air Minum Tirta Agung. Dimana pada tahun 2016 masih terdapat 40,25 persen rumah tangga menggunakan air yang tidak bersih, persentase atas pengguna air tidak bersih ini menurun pada tahun 2019 menjadi 30,68 persen. Persentase rumah tangga pengguna listrik terjadi peningkatan di tiap tahun nya, pada tahun 2019 persentase rumah tangga berlistrik sudah mencapai 95,09 persen. Untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi layak telah mencapai 75,88 persen pada tahun 2019, sementara rumah tidak layak huni sebesar 29,56 persen.

Tabel 2.32. Indikator Perumahan

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Rumah Tangga memiliki akses Air Bersih	59,75	61,83	66,49	69,32
2.	Persentase Rumah Tangga memiliki sumber Listrik	95,57	97,08	98,59	99,60
3.	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak /Jamban Sendiri	48,71	68,19	60,46	75,88
4.	Persentase Rumah tidak layak huni	7,18	8,01	7,95	29,56

Sumber : Dinas PRKP Kabupaten OKI, 2020

2.3.1.5. Komunikasi dan Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi mencakup semua keperluan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK memiliki dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Persentase penduduk yang memiliki telepon seluler mengalami peningkatan menjadi 56,6 persen, sementara penduduk yang mengakses internet baru mencapai 30,46 persen.

Tabel 2.33. Indikator teknologi informasi dan komunikasi

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Rumah Tangga memiliki telepon	0,07	0,54	-	-
2.	Persentase Anggota Rumah Tangga memiliki telepon seluler	50,37	51,54	50,7	56,6
3.	Persentase Anggota Rumah Tangga mengakses internet	11	17,31	25,59	30,46

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

2.3.1.6. Lingkungan Hidup

Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani saat ini, semakin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah pula jumlah timbunan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain : penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program Adipura, sosialisasi program adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan, melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan system 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*). Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah anorganik dapat di gunakan kembali sesuai fungsinya misal kantong plastik, dapat juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tertentu misalnya bekas kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain-lain dapat juga langsung dijual ke pengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga timbunan sampah yang dihasilkan dapat di perkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Permasalahan yang timbul adalah sebagian besar masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang sampah tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu.

Tabel 2.34. Indikator Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Penanganan sampah (%)	%	50,51	61,78	73	80
2.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	%	0,03	0,03	-	0,001
3.	Penegakan hukum lingkungan hidup (%)	%	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKI, 2020

Indeks Kualitas Lingkungan diperoleh melalui perhitungan akumulasi dari 30 persen Indeks Kualitas Air, 30 persen Indeks Kualitas Udara dan 40 persen Indeks Tutupan Lahan.

Tabel 2.35. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penutupan Lahan (Tahun 2019)	Nilai Indeks	Bobot Indeks
Indeks Kualitas Air (IKA)	83	30%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	96,27	30%
Indeks Tutupan Lahan (ITL)	55,97	40%
Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) = 30% (IKA) + 30% (IKU) + 40% (ITL)	76,169	

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKI 2020

Maka Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2019 : 30% (83,0) + 30% (96,27) + 40% (55,97) yaitu 76,169 (baik).

Rentang nilai IKLH sbb :

Unggul	: > 90
Sangat Baik	: $82 < x \leq 90$
Baik	: $74 < x \leq 82$
Cukup	: $66 \leq x \leq 74$
Kurang	: $58 \leq x \leq 66$
Sangat Kurang	: $50 \leq x \leq 58$
Waspada	: < 50

2.3.1.7. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepemilikan KTP pada tahun 2016 sebesar 70,84 persen dan meningkat menjadi 86,72 persen di tahun 2019. Untuk Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di tahun 2019 adalah sebesar 85,68 persen.

Tabel 2.36. Indikator Kependudukan

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	5,28	54,84	91,06	85,68
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	2,87	29,69	92,22	91,48
3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100
4.	Kepemilikan KTP	%	70,84	77,27	85,74	86,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKI, 2020

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan hanya dapat dilakukan apabila potensi sumber daya manusia telah berimbang antara pria dan wanita. Dalam pembentukan wanita yang dapat bersaing secara positif dengan pria tentu saja harus merubah pola pikir, dimana pada zaman dahulu pola pikir bahwa wanita hanya menjadi pendamping dan mengurus rumah tangga, tetapi juga harus berpikir maju bahwa wanita juga dapat berprestasi sama bahkan dapat melebihi prestasi pria. Peningkatan potensi sumber daya wanita tentu saja dapat dicapai melalui pendidikan yang cukup dan kesetaraan untuk mendapatkan hak yang sama dalam menuntut ilmu.

Dalam mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik. Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama baik bagi perempuan maupun laki laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks paritas gender/IPG (Gender Parity Index/GPI) angka partisipasi murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki laki.

Tabel 2.37. IPG dan IDG di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki usia 7 - 12 tahun	1	0,19	0,95	0,94
2	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki usia 13 - 15 tahun	1,09	0,65	1,10	0,93
3	Indeks pembangunan gender (IPG)	-	91,08	91,35	91,22
4	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	-	56,08	56,08	57,47

Sumber : Kemen PPPA dan BPS, 2020

2.3.1.9. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terjadi peningkatan persentase koperasi aktif dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Peningkatan persentase koperasi aktif pada tahun 2019 sebesar 84,11 persen yang sebelumnya pada tahun 2016 hanya 80,87 persen selama 4 tahun terakhir peningkatan koperasi aktif rata-rata sebesar 1,08 persen. Usaha Mikro dan Kecil setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2016 sebanyak 9.280 usaha mikro dan kecil sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 10.986 usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.38. Indikator Koperasi Serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah koperasi	Unit	413	421	440	440
2.	Jumlah anggota koperasi	Orang	76.173	78.727	79.834	80.083
3	Persentase koperasi aktif	%	80,87	83,11	83,69	84,11
4	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	9.280	10.233	10.900	10.986
5.	Jumlah tenaga kerja di industri kecil	Orang	4.633	5.439	5.565	5.565

Sumber : Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kabupaten OKI, 2020

Tabel 2.39. Jumlah industri kecil menurut kelompok industri kecil (unit) Kabupaten OKI Tahun 2019

No.	Kecamatan	Industri pangan	Industri sandang & kulit	Industri kerajinan	Industri logam & jasa industri	Industri kimia & Bhn bangunan
1	Lempuing	-	21	-	-	18
2	Lempuing Jaya	-	-	325	-	38
3	Mesuji	-	-	-	-	-
4	Sungai Menang	-	-	-	-	-
5	Mesuji Makmur	-	-	-	-	-
6	Mesuji Raya	-	-	-	-	-
7	Tulung Selapan	41	-	388	-	-

No.	Kecamatan	Industri pangan	Industri sandang & kulit	Industri kerajinan	Industri logam & jasa industri	Industri kimia & Bhn bangunan
8	Cengal	16	-	-	-	-
9	Pedamaran	25	-	428	-	-
10	Pedamaran Timur	-	-	-	-	-
11	Tanjung Lubuk	46	-	-	-	-
12	Teluk Gelam	46	-	-	1	16
13	Kayuagung	38	6	77	-	32
14	Sirah Pulau Padang	25	-	-	-	-
15	Jejawi	27	48	-	-	-
16	Pampangan	27	-	185	-	-
17	Pangkalan Lampam	-	-	-	-	-
18	Air Sugihan	88	-	-	-	-
	Tahun 2019	379	75	1.403	1	104
	Tahun 2018	379	75	1.403	1	104
	Tahun 2017	338	36	1.357	1	104
	Tahun 2016	335	36	1.218	1	104

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. OKI, 2020

2.3.1.10. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan karena tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Secara umum, TPAK perempuan jauh lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Hal ini disebabkan karena TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah dirinya maupun keluarganya. TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya pendidikan wanita, terbukanya kesempatan kerja bagi wanita, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat seperti pandangan terhadap wanita yang bekerja. Sebaliknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan cenderung lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Kondisi ini disebabkan karena kesempatan kerja perempuan lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu pada momen-momen tertentu penduduk laki-laki lebih besar peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017–2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,69	70,28	70,96	65,25
	- Laki-Laki	84,61	84,42	86,34	76,91
	- Perempuan	54,07	55,67	54,85	53,05
2	Tingkat Pengangguran	3,45	2,65	2,98	3,29
	- Laki-Laki	3,74	2,72	2,49	3,84
	- Perempuan	2,97	2,53	3,80	2,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten OKI, 2021

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020 sebanyak 612.613 orang. Jumlah angkatan kerja diperkirakan sebanyak 399.714 orang, terdiri dari 240.870 orang angkatan kerja laki-laki dan 158.844 orang angkatan kerja perempuan. Jumlah angkatan kerja dirinci menurut kegiatannya adalah sebanyak 386.545 orang bekerja dan 13.169 orang pengangguran (sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja). Dengan kata lain tingkat kesempatan kerja sebesar 65,25 persen dan tingkat pengangguran sebesar 3,29 persen. Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor primer sebagai ciri perekonomian daerah perdesaan merupakan pekerjaan yang dominan dilakukan oleh penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada tahun 2020 sekitar 62,04 persen penduduk bekerja di sektor primer (pertanian). Sektor sekunder (pertambangan, industri, listrik, dan bangunan) menyerap sekitar 10,27 persen tenaga kerja, sedangkan sektor tersier (perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa) menyerap hampir 27,67 persen tenaga kerja.

Kinerja angka pengangguran di suatu daerah dapat menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana kemajuan ekonomi di suatu daerah. Dalam kurun waktu antara tahun 2017 hingga tahun 2020 tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami tren yang berfluktuasi. Tahun 2017 adalah tahun di mana tingkat pengangguran tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode tersebut, yaitu

sebesar 3,45 persen. Namun, di tahun 2020 tingkat pengangguran turun menjadi 3,29 persen.

Kinerja tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami tren berfluktuasi selama periode tahun 2017 hingga 2020 ternyata sejalan dengan tren perkembangan tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan nasional yang juga mengalami tren berfluktuasi. Tahun 2020 tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan nasional mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2019). Adanya peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup relevan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Peningkatan secara bersama-sama pada setiap tingkatan wilayah mengindikasikan bahwa setiap level pemerintahan menghadapi persoalan yang sama terhadap rendahnya lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja yang ada. Hal demikian merupakan imbas dari pertumbuhan ekonomi yang melambat selama beberapa tahun terakhir dan akibat adanya dampak pandemi covid-19. Kinerja tingkat pengangguran dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Sumber : Statistik Indonesia 2018-2020; Statistik Propinsi Sumatera Selatan 2018-2020; dan Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir 2020

Gambar 2.10. Tingkat Pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2020

Berdasarkan Gambar 2.10, diketahui bahwa pada tahun 2020 tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami peningkatan dari periode waktu sebelumnya ternyata relevan dengan kinerja tingkat Provinsi dan Nasional yang juga meningkat. Di sisi lain, tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan nasional masing-masing sebesar 5,51 persen dan 7,07 persen.

2.3.1.11. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluasluasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sosial. Jenis Pelayanan Dasar Sosial Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota.

Berikut capaian pelaksanaan SPM bidang sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Realisasi Capaian (2019)	Realisasi Capaian (2020)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang terpenuhi	%	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti yang terpenuhi	%	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang terpenuhi	%	100	66,67	66,67
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase kebutuhan dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi	%	100	13,33	13,33
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap bencana bagi Korban Bencana yang terpenuhi	%	100	100	100
JUMLAH			%	100	95,28	95,28

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten OKI tahun 2021

2.3.1.12. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Indeks Risiko Bencana cukup tinggi. Jenis risiko bencana yang ada cukup beragam, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim, cuaca ekstrim, tanah longsor, hingga gempa bumi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki tingkat risiko multi hazard atau keseluruhan jenis bencana, meskipun tingkatan risikonya berbeda-beda. Berikut data indeks risiko bencana Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan IRBI tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BNPB sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013

No	Jenis Bencana	Nilai Indeks	Kategori Risiko
1	Banjir	36	Tinggi
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	36	Tinggi
3	Kekeringan	24	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim	21	Tinggi
5	Cuaca Ekstrim	14	Tinggi
6	Tanah Longsor	12	Sedang
7	Gempa Bumi	11	Sedang

Sumber: IRBI BNPB tahun 2013

Dari tabel diatas, maka tampak jelas bahwa risiko tertinggi adalah bencana Banjir, kebakaran hutan dan lahan yang memiliki nilai indeks mencapai 36 dengan kategori tinggi. Disusul oleh jenis bencana kekeringan, gelombang ekstrim, cuaca ekstrim, sedangkan tanah longsor dan gempa bumi memiliki risiko sedang. Menindaklanjuti data IRBI tahun 2013, maka pada tahun 2019, BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan Kajian Risiko Bencana (KRB) di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menghasilkan setidaknya ada tiga jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Bencana Banjir, Kebakaran hutan dan lahan, dan bencana Angin Puting Beliung (Cuaca ekstrim) dengan cakupan risiko bencana sebagai berikut:

**Tabel 2.43 Cakupan Luas Wilayah Risiko Bencana
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Jenis Bencana	Hasil Kajian Risiko Bencana (Tinggi)			
		Ancaman (ha)	Kerentanan (Rp)	Risiko (ha)	Kapasitas
1	Banjir	46.218,51 ha	149.77 miliar	38.086,43 ha	Rendah
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	212.288,83 ha	6,824 miliar	26.034,89 ha	Rendah
3	Angin Puting Beliung	105.101 ha	2.18 miliar	209.359 ha	Cukup

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten OKI tahun 2019-2024

Selanjutnya, terkait upaya pelayanan bidang penanggulangan bencana. Kabupaten Ogan Komering Ilir memfokuskan dalam penanganan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang SPM sub-urusan bencana Kabupaten/Kota yang dititikberatkan pada:

1. pelayanan informasi rawan bencana;
2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Berikut capaian pelaksanaan SPM bidang sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Bencana Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Capaian	Realisasi Capaian (2019)	Realisasi Capaian (2020)
1	Layanan Informasi di Daerah Rawan Bencana	Terwujudnya Layanan Informasi di Daerah Rawan Bencana	%	100	99,64	99,98
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	%	100	99,96	100
3	Penanganan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terciptanya Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	99,36
	JUMLAH			100	99,86	99,78

Sumber: BPBD Kabupaten OKI tahun 2021

2.3.2. Fokus Urusan Pilihan

2.3.2.1. Perikanan

Perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengingat luas wilayah yang 75 persen tergenangi oleh air, yang menjadi tempat berkembangnya ikan, baik untuk budidaya ikan maupun perikanan tangkap. Produksi ikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 sebesar 47.581,66 ton terdiri dari produksi perikanan perairan laut sebesar 34.192,34 ton dan perikanan tangkap 13.389,32 ton

Tabel 2.45. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) Kabupaten OKI

No.	Kecamatan	Perairan Laut	Perairan Umum	Jumlah
1	Lempuing	-	32,64	32,64
2	Lempuing Jaya	-	1.792,90	1.792,90
3	Mesuji	-	22,60	22,60
4	Sungai Menang	10.281,70	312,95	10.594,65
5	Mesuji Makmur	-	-	-
6	Mesuji Raya	-	93,41	93,41
7	Tulung Selapan	9.034,30	655,90	9.690,20
8	Cengal	13.953,96	15,67	13.969,63
9	Pedamaran	-	1.640,50	1.640,50
10	Pedamaran Timur	-	18,92	18,92
11	Tanjung Lubuk	-	190,00	190,00
12	Teluk Gelam	-	68,02	68,02
13	Kayuagung	-	1.404,77	1.404,77
14	Sirah Pulau Padang	-	2.192,60	2.192,60
15	Jejawi	-	2.117,30	2.117,30
16	Pampangan	-	2.483,58	2.483,58
17	Pangkalan Lampam	-	108,08	108,08
18	Air Sugihan	922,38	239,48	1.161,86
Jumlah Tahun 2019		34.192,34	13.389,32	47.581,66
Tahun 2018		25.681,32	11.055,45	36.736,77

Sumber : BPS Kabupaten OKI

2.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan untuk peningkatan pendapatan daerah. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi obyek wisata, seperti Danau Teluk Gelam yang pernah dijadikan lokasi pertandingan cabang olahraga sky air dan lomba dayung pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2004 di Provinsi

Sumatera Selatan. Beberapa obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 2.46. Obyek wisata di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Kecamatan	Wisata Alam
1	Kayuagung	Lebak teloko, sungai komering, dan pantai love
2	Lempuing dan Lempuing jaya	Pemandangan sawah, Perkebunan sawit dan karet
3	Pedamaran dan Pedamaran Timur	Areal Persawahan dan perkebunan, teluk / danau rasau, dan desa menang raya
4	Tanjung Lubuk dan Teluk Gelam	Danau teluk gelam dan area persawahan
5	Pampangan dan Pangkalan Lampam	Bukit batu, lebak deling, pulau hantu, pulau bayas, pulau napo
6	Tulung Selapan	Kuala lebung itam, kuala sungai sibur, kuala sungai pasir, hutan mangrove, dan pulau maspari
7	Cengal	Pantai sungai lumpur

Sumber : Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI

2.3.2.3. Pertanian

Pada tahun 2019 luas lahan pertanian adalah sebesar 135.530 hektar, terdiri dari 130.934 hektar lahan pertanian sawah dan 4.596 hektar lahan pertanian bukan sawah. Dari keseluruhan luas lahan, yang paling luas adalah lahan rawa lebak sebesar 99.492 hektar. Dilihat dari sub sektor tanaman pangan, produksi padi Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 mencapai 750.989 ton, dengan luas panen sebesar 150.407 hektar, terdiri dari 741.421 ton padi sawah dan 9.568 ton padi bukan sawah. Dengan angka tersebut, maka produktivitas padi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 adalah sebesar 4,99 ton per hektar.

Empat daerah penghasil padi terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Air Sugihan dan Tanjung Lubuk. Pada tahun 2019 luas panen tanaman padi di kecamatan Lempuing seluas 17.600 hektar dengan produksi padi mencapai 88.915 ton, kecamatan Lempuing Jaya seluas 17.889 hektar dengan produksi padi mencapai 90.339 ton, kecamatan Tanjung Lubuk seluas 24.323 hektar dengan produksi padi mencapai 122.880 ton dan kecamatan Air Sugihan seluas 20.388 hektar dengan produksi padi mencapai 94.981 ton.

**Tabel 2.47. Luas panen dan produksi padi per kecamatan
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Kecamatan		Padi Sawah			Padi Ladang			Jumlah		
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Lempuing	9.116	17.600	88.915	-	-	-	9.116	17.600	88.915
2.	Lempuing Jaya	6.968	17.874	90.299	-	15	39	6.968	17.889	90.339
3.	Mesuji	2.318	2.045	10.331	-	-	-	2.318	2.045	10.331
4.	Sungai Menang	11.107	14.324	72.365	-	-	-	11.107	14.324	72.365
5.	Mesuji Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Mesuji Raya	671	181	914	-	-	-	671	181	914
7.	Tulung Selapan	2.411	3.223	16.283	1.868	-	-	4.279	3.223	16.283
8.	Cengal	2.771	3.501	17.687	-	-	-	2.771	3.501	17.687
9.	Pedamaran	7.496	8.575	43.321	-	-	-	7.496	8.575	43.321
10.	Pedamaran Timur	1.267	234	1.182	-	334	876	1.267	568	2.058
11.	Tanjung Lubuk	23.100	24.323	122.880	-	-	-	23.100	24.323	122.880
12.	Teluk Gelam	3.978	3.882	19.612	-	-	-	3.978	3.882	19.612
13.	Kayuagung	4.266	4.266	21.552	-	-	-	4.266	4.266	21.552
14.	Sirah Pulau Padang	7.429	7.434	37.557	-	-	-	7.429	7.434	37.557
15.	Jejawi	9.154	9.227	46.615	-	-	-	9.154	9.227	46.615
16.	Pampangan	10.680	10.816	54.642	-	-	-	10.680	10.816	54.642
17.	Pangkalan Lampam	2.521	2.165	10.938	748	-	-	3.269	2.165	10.938
18.	Air Sugihan	25.681	17.088	86.329	1.980	3.300	8.653	27.661	20.388	94.981
Jumlah 2019		130.934	146.758	741.421	4.596	3.649	9.568	135.530	150.407	750.989
2018		173.283	162.478	820.839	4.502	5.340	14.001	177.785	167.818	834.840
2017		173.538	162.502	811.862	4.487	2.845	7.344	178.025	165.347	819.206
2016		161.021	162.611	720.504	3.577	11.247	31.874	164.598	173.858	752.378

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2020

Kontribusi sub sektor perkebunan khususnya tanaman keras mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 hektar. Tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh rakyat yang arealnya lebih besar atau sama dengan 25 hektar. Komoditi yang dicakup

meliputi antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pinang, kopi, kapuk, aren, dan kakao. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2019 sebesar 182.570 hektar dengan jumlah produksi 397.209 ton seperti tertera pada Tabel 2.48. Sedangkan luas areal perkebunan besar pada tahun 2019 sebesar 186.555,92 hektar dengan jumlah produksi 1.687.877,62 ton (Tabel 2.48).

Tabel 2.48. Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)				Produksi		Jumlah Petani/ (KK)
		Tanaman belum menghasilkan	Tanaman menghasilkan	Tanaman tua/ Tanaman rusak	Jumlah	Ton	Rata-Rata (Ton/Ha)	
1	Karet	28.492	113.633	15.120	157.245	191.115	1,68	63.051
2	Kelapa Sawit	2.564	18.565	318	21.447	204.148	11,00	12.516
3	Kelapa	362	1.258	704	2.324	1.384	1,10	9.739
4	Lada	93	52	8	154	32	0,61	359
5	Pinang	49	194	44	287	54	0,28	841
6	Kopi	14	494	306	813	331	0,67	2.184
7	Kapuk	5	33	18	55	7	0,21	370
8	Aren	5	67	10	81	46	0,68	280
9	Kakao	16	127	22	164	92	0,73	355
Jumlah 2019		31.600	134.423	16.549	182.570	397.209	16,96	89.695
2018		33.885	132.025	15.868	181.777	339.215	2,57	87.266
2017		34.307	131.568	15.831	181.706	339.757	2,58	87.342
2016		41.651	121.841	17.644	181.136	299.508	2,46	87.868

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2020

Tabel 2.49. Luas Areal Perkebunan Besar Menurut Komoditas Tahun 2019

Komoditas		Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Sawit	186.555,92	1.687.877,62
	- Inti	121.706,98	835.588,06
	- Plasma	64.848,94	852.289,56
2	Karet		
	- Inti	-	-
	- Plasma	-	-

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2020

Populasi ternak yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini letaknya tersebar di 18 kecamatan, adapun jumlah populasi ternak yang ada dan sebarannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, disajikan pada Tabel 2.50 berikut ini.

Tabel 2.50. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (Ekor)
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019

No	Kecamatan	Jenis Ternak			
		Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba
1.	Lempuing	7.561	53	6.195	445
2.	Lempuing Jaya	5.235	58	1.587	424
3.	Mesuji	2.016	42	1.730	45
4.	Sungai Menang	501	153	2.700	31
5.	Mesuji Makmur	1234	-	869	54
6.	Mesuji Raya	4.607	55	4.320	450
7.	Tulung Selapan	1.450	69	1.650	300
8.	Cengal	1.335	245	2.800	122
9.	Pedamaran	1.069	498	1.750	79
10.	Pedamaran Timur	1.605	169	802	242
11.	Tanjung Lubuk	265	55	1.535	515
12.	Teluk Gelam	883	35	1.850	79
13.	Kayuagung	255	12	1.660	34
14.	Sirah Pulau Padang	123	31	1.474	50
15.	Jejawi	1104	220	1.582	35
16.	Pampangan	1.754	1.886	2.430	108
17.	Pangkalan Lampam	2.782	3.940	1.750	98
18.	Air Sugihan	1.088	51	1.665	235
Jumlah 2019		34.867	7.572	38.349	3.346
2018		28.999	10.866	37.880	2.953
2017		28.285	11.150	37.109	2.970
2016		26.745	10.997	36.564	2.940

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2020

Pada tahun 2019 kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuhan dan Jasa Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 64,58 persen, dimana sektor Perkebunan memberikan kontribusi sebesar 34,29 persen, tanaman pangan sebesar 17,44 persen, dan perikanan sebesar 19,04 persen. Secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.51 kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuhan dan Jasa Pertanian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 67,15 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 64,58 persen.

Tabel 2.51. Indikator sektor pertanian

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019*
1.	Produktivitas padi	ton/ha	4,3	4,9	0	49,75
2.	Produktivitas karet	ton/ha	1,28	-	1,29	0
3.	Produktivitas kelapa sawit	ton/ha	10,81	-	10,97	0
4.	Sumbangan sektor pertanian, Peternakan, Perburuhan dan Jasa pertanian terhadap PDRB	%	67,15	68,22	66,32	64,58
5.	Sumbangan tanaman pangan terhadap PDRB	%	18,96	18,98	18,08	17,44
6.	Sumbangan tanaman Hortukultura terhadap PDRB	%	2,56	2,6	3,24	3,3
7.	Sumbangan tanaman perkebunan terhadap PDRB	%	40,77	35,39	35,66	34,29
8.	Sumbangan peternakan dan hasilnya terhadap PDRB	%	6,94	7,06	7,36	7,73
9.	Sumbangan tanaman kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB	%	15,48	15,46	15,95	16,38
10.	Sumbangan perikanan terhadap PDRB	%	17,37	16,32	17,73	19,04

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

2.3.2.4. Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baik barang baru maupun bekas untuk tujuan penyaluran/ pendistribusian tanpa mengubah sifat barang. Sub sektor perdagangan dalam perhitungannya dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu sektor tersier memberikan kontribusi terbesar ketiga yaitu mencapai 8,67 persen selama kurun waktu 5 tahun

Tabel 2.52. Indikator Perdagangan

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,49	9,88	10,55	8,67
2.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	23,49	21,53	19,62	18,38
3.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/	%	76,51	78,47	80,38	81,62
4	Jumlah sarana perdagangan (pasar, toko, kios, warung)	unit	3.262	3.202	3.202	3.202

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

2.3.2.5. Perindustrian

Gerak pertumbuhan sektor industri pengolahan berkaitan erat dengan kemajuan perekonomian suatu daerah atau negara. Hal ini dikarenakan salah satu ciri kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai dengan berkurangnya peranan sektor primer (pertanian) dan meningkatnya peranan sektor industri. Sektor industri pengolahan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu sub sektor industri pengolahan migas dan sub sektor industri pengolahan non migas. Sektor industri di Kabupaten Ogan Komering Ilir sepenuhnya berasal dari industri non migas, karena belum ditemukan industri migas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sub sektor Industri non migas tetap menjadi harapan agar menjadi sektor primadona pada masa-masa yang akan datang. Sebab, proses industrialisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Konsep pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Seperti halnya di negara-negara maju, biasanya sektor industri dan jasa memegang peranan dan kontribusi yang cukup dominan dalam perekonomiannya. Kriteria utama pembangunan adalah kenaikan pendapatan per kapita yang sebagian besar disebabkan oleh adanya industrialisasi. Dalam mengembangkan sektor industri, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap industri kecil, menengah, dan industri kerajinan rumah tangga. Sebab

Industri ini menyangkut perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, disamping juga relatif stabil terhadap pengaruh faktor-faktor dari luar negeri.

Nilai tambah sub sektor industri non migas sebagian besar masih dihasilkan dari industri makanan, minuman dan tembakau, pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 89,91 persen, disusul kemudian oleh industri barang kayu dan hasil hutan lainnya yang memiliki kontribusi 3,54 persen.

Tabel 2.53. Indikator perindustrian

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019*
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	10,86	12,08	16	10,34
2	Kontribusi industri makanan, minuman dan tembakau terhadap PDRB	%	86,84	88,77	90,3	89,91
3	Kontribusi industri barang kayu dan hasil hutan lainnya terhadap PDRB	%	4,84	3,83	3,05	3,54
4	Pertumbuhan industri	%	46,56	11,23	32,45	-35,37

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Data besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Sehingga untuk mempermudah pengumpulan data pendapatan dalam kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 835.028,- per bulan, yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp. 478.238,- dan non makanan sebesar Rp. 356.790,-. Berdasarkan jenis pengeluarannya, pengeluaran perkapita makanan sebulan terbesar tahun 2019 digunakan untuk membeli makanan dan

minuman jadi yaitu Rp. 124,98,-. Sementara pengeluaran perkapita non makanan digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.54. Indikator Pengeluaran Per Kapita

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Pengeluaran rata-rata per kapita kelompok barang makanan	Rp	436.397	503.453	504.441	478.238
2.	Pengeluaran rata-rata per kapita kelompok barang non makanan	Rp	297.684	377.343	414.451	356.790
3.	Rata-rata konsumsi per kapita per bulan	Rp.	734.082	880.795	918.892	835.028
4.	Ketersediaan energi dan protein Per Kapita	Energi (kkal/kpt/hr)	2.131,13	2.276,33	2.082,32	2.237,94
		Protein (gram/kpt/hr)	55,75	61,42	60,83	61,16

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2020

Jenis dan jumlah bank dan cabang didalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 28 unit pada tahun 2014 dan terjadi peningkatan sebanyak 7 unit pada tahun 2017. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel pada tahun 2014 sebanyak 23 unit sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 30 unit.

Tabel 2.55. Indikator Pendukung Daya Saing

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah bank dan cabang	Unit	28	35	35	35
2	Jumlah penginapan/hotel	Unit	23	25	29	30
3.	Jumlah restoran/rumah makan	Unit	124	124	124	127

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Perhubungan

Pada tahun 2019 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 0,104 dimana setiap 104 meter terdapat 1 kendaraan yang melintas, sedangkan jumlah orang/ barang yang

terangkut oleh angkutan umum pada tahun 2019 sebesar 0,18 unit per orang dimana jumlah angkutan darat sebesar 221.483 unit, jumlah penumpang angkutan darat sebesar 1.254.500 orang. Jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada cabang-cabang Dinas LLAJR menurut jenis kendaraan (Unit) pada tahun 2019 berjumlah 6.339 unit kendaraan, dan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 berjumlah 33. Jumlah Dermaga dan tambahan perahu (Unit) di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 berjumlah 27 unit yang terdiri dari 7 Unit Dermaga dan 20 Unit Tambatan Perahu yang tersebar di 10 kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 2.56. Indikator Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Rasio jumlah angkutan darat (load factor)	%	47,58	60,11	61,06	62,01
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	org	889.200	1.144.000	1.209.650	1.254.500
3	Jumlah dermaga sungai, pelabuhan, terminal bis	Lokasi/unit	21	33	33	33

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten OKI, 2020

2.4.2.2. Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Tujuan dari penataan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, memiliki infrastruktur yang memadai dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033, telah disusun rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di beberapa kawasan yakni:

1. RDTR kawasan strategis kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014. Lokasi kawasan di Eks. Transmigrasi Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang;
2. RDTR kawasan Penyangga metropolitan Palembang tahun 2015. Lokasi kawasan di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Jejawi, SP. Padang, Pampangan, dan Kota Kayuagung;
3. RDTR kawasan strategis cepat tumbuh Agropolitan tahun 2015. Lokasi kawasan di Desa Surya Adi dan Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji;
4. RDTR kawasan Minapolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2016. Lokasi kawasan di Desa Mangun Jaya dan Desa Ulak Jerman Kecamatan SP. Padang;
5. RDTR kawasan Penyangga kawasan Industri tahun 2016. Lokasi kawasan di Desa Bukit Batu dan Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan;
6. Penataan Ruang Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 yang disusun melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi kawasan meliputi Desa Lubuk Makmur dan Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Tugu Jaya, Tugu Agung, Mekar Jaya, Tugu Mulyo, Tulung Harapan, Sindang Sari, Bumi Agung, Cahaya Maju, Desa Tebing Suluh dan Desa Cahaya Tani Kecamatan Lempuing.

Selanjutnya secara teknis melalui APBN (Satker PBL) telah disusun Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL) di beberapa kawasan strategis Kabupaten yakni :

1. RTBL kawasan Penyangga Kota Palembang Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014. Kawasan RTBL meliputi Desa Terusan Menang, Terate, Sirah Pulau Padang dan Desa Serdang Menang Kecamatan SP. Padang.
2. RTBL kawasan Cagar Budaya Kota Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014. Kawasan RTBL meliputi Kelurahan Mangun Jaya, Sidakersa, dan Kelurahan Jua-Jua.

Dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang, didasarkan pada kesesuaian terhadap rencana tata ruang. Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup signifikan hal ini di tunjukan dengan adanya permintaan *advice planning* atau rekomendasi kesesuaian dengan tata ruang oleh pemangku kepentingan. Pada tahun 2016 ketataan terhadap RTRW sebesar 92 persen, dan menurun pada tahun 2019 sebesar 90 persen. Adapun pengurusan IMB dari masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100 persen terlayani.

Tabel 2.57. Indikator Kinerja Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RTBL	Dok	2	-	-	2
2	Ketersediaan Perda RTRW	Dok	-	-	-	-
3	Persentase Layanan IMB	%	100	100	100	100
4	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	92	90	90	90

Sumber Data : OPD Kabupaten OKI, 2020

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh fungsi penunjang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi: administrasi pemerintahan, perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian serta penelitian dan pengembangan.

Struktur pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai Perda Kabupaten OKI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, didukung 35 perangkat daerah yaitu 1 Setda dengan 12 bagian, 1 Setwan dengan 4 bagian, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 24 Dinas dan 7 Badan serta 18 Kecamatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2019 sebanyak 8.234 orang yang terdiri dari tenaga administrasi 3.264 orang dan tenaga pendidik/guru 4.970 orang, dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2.816 orang (34%), D1/D3 sebanyak 2.556 orang (31%), dan S1/D4 sebanyak 2.383 orang (29%). Sementara jika dilihat dari tingkat kepangkatan golongan maka PNS memiliki kepangkatan golongan II

sebanyak 1.671 orang (20%), golongan III sebanyak 4.428 orang (54%) dan golongan IV sebanyak 2.104 orang (26%)

Tata kelola keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tergolong baik. Hal ini diindikasikan oleh opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meningkat dari tahun ke tahun, namun alokasi belanja tidak langsung yang masih lebih besar dari alokasi belanja langsung.

Penyediaan layanan publik berkualitas yang lebih cepat, lebih mudah yang ditandai dengan penerapan SOP pelayanan serta keterbukaan informasi. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel diharapkan dapat menjadi stimulan dalam meningkatkan kapasitas birokrasi.

Tabel 2.58. Indikator Fungsi Penunjang

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Indeks reformasi birokrasi	56,5	55,95	55,95	49,16
2	Nilai SAKIP	CC (47,14)	CC (51,84)	CC (52,42)	CC (55,63)
3.	Nilai LPPD	ST	ST	ST	ST
4.	Indeks kepuasan masyarakat	76,30	78,29	B 78,29	A 82,59
5	Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : OPD Kabupaten OKI, 2020

2.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka peningkatan perekonomian maka iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga dan pendapatan daerah. Pemerintah daerah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengusaha dan investor sehingga dapat terus meningkatkan iklim investasi.

Beberapa indikator yang mendukung iklim investasi diantaranya tingkat kriminalitas, Jumlah perizinan yang dikeluarkan, Penegakan Perda perizinan dan Rata-rata lama Proses Perizinan. Iklim investasi yang

kondusif sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tidak hanya berdampak terciptanya lapangan kerja melainkan juga stabilitas harga dan peningkatan pajak sebagai pendapatan pemerintah.

Angka kriminalitas merupakan gangguan ketertiban umum, semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan rendahnya tingkat keamanan suatu daerah sehingga akan berdampak pada turunnya iklim investasi pada tahun 2019 terdapat 904 kasus. Perkembangan jumlah izin usaha mengalami peningkatan akibat percepatan kegiatan ekonomi nasional pada tahun 2019 telah dikeluarkan sebanyak 809 izin.

Tabel 2.59. Indikator Investasi

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Angka kriminalitas	Kasus	1328	881	862	904
2	Jumlah perizinan yang dikeluarkan	Buah	687	497	615	809
3	Penegakan Perda perizinan	%	100	100	100	100
4	Rata-rata lama Proses Perizinan	Hari	3	3	3	3

Sumber : BPS Kab.OKI, 2020

2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ogan Komering Ilir

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan Indonesia maka capaian pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pembangunan sosial, Pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan tata kelola pelaksanaan.

Kabupaten OKI telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 yang diselaraskan dengan RPJMD tahun 2019-2024, gambaran umum capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.60. Capaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten OKI Tahun 2020
Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
1.2 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua Pilar, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial	menurun 7% sd 8%	15,75	15,01	14,73	SB
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Kesehatan	meningkat 95%	N/A	50.690	50.690	SB
	1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Kesehatan	meningkat PF: 62,4 jt PI: 3,5 jt	N/A	N/A	N/A	BB
	1.3.1(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Sosial	meningkat 17,2%	N/A	N/A	N/A	BB
	1.3.1(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan.	Sosial	menurun 2,8 juta	N/A	34.666	34.666	SB
1.4 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kesehatan	meningkat 70%				
	1.4.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Kesehatan	meningkat 63%				
	1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Keluarga Berencana	meningkat 65%				
	1.4.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Pemukiman	meningkat 100%	64,25	60,66	85,87	SB
	1.4.1(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Pemukiman	meningkat 100%	58%	75,88%	75,88%	SB
	1.4.1(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Pendidikan	meningkat 94,78%	84,66	76,83	76,83	SB
	1.4.1(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Pendidikan	meningkat 83,3%	67,45	58,18	58,18	SB
	1.4.1(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Pendidikan	meningkat 91,63%	36,06	46,79	46,79	SB
	1.4.1(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Penduduk	meningkat 77,4%	43,27	74,89	74,89	SB

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
	1.4.1(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Pemukiman	meningkat 100%	84,89	88,45	27,28	SB
1.5. membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Penanggulangan Bencana	menurun	607 (kk)	183	140	SS
	1.5.1(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Pen. Bencana	meningkat	2	5	13	SS
	1.5.1(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Sosial	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	1.5.1(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Sosial	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	1.5.1(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan dilayanan khusus.	Pendidikan	meningkat 450 kab				
	1.5.1(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Penanggulangan Bencana	menurun				
	1.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Pen. Bencana	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah.	Pen. Bencana	Ada	-	-	-	BB
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua Pilar.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Perencanaan Pembangunan	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Perencanaan Pembangunan	meningkat	N/A	12,75%	16,87%	SS

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
2.1 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Pangan	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Kesehatan	menurun 17%	0,009	0,007	0,007	SS
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Pangan	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Pangan	menurun 8,5%	N/A	N/A	N/A	BB
2.2 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Kesehatan	menurun	22,5	21,5	30,8	SB
	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Kesehatan	Menurun 28%	13,60	13,00	31,7	SB
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Kesehatan	menurun				
	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Kesehatan	menurun 28%	N/A	N/A	N/A	BB
	2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Kesehatan	Meningkat 50%	72,86	60,00	60,00	SS
	2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. PPH: 92,5 Konsumsi Ikan: 54,5 kg/kpt/thn	Pangan	Meningkat	87,7	88,8	80,19	SB
					33,6	N/A	N/A	
2.3 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Pangan	meningkat	62,159 juta	64,902 juta	64,189 juta	SB

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
3.1. mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kesehatan	Menurun 306	11	3	0	SS
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Kesehatan	meningkat 95%	96,33	96,5	96,5	SS
	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Kesehatan	meningkat 85%	96,33	96,5	96,5	SS
3.2. mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	menurun	2	0	0	SS
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	menurun	2	12	0	SS
	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kesehatan	menurun 24	2	0	0	SS
	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Kesehatan	meningkat 95%	98,2	98,2	98,2	SS
3.3. mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Kesehatan	menurun	N/A	12	29	SB
	3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kesehatan	menurun	91	81	81	SS
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kesehatan	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Kesehatan	menurun				
	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Kesehatan	meningkat				
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Kesehatan	menurun				
	3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Kesehatan	meningkat				
	3.3.5(b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Kesehatan	meningkat				
	3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Kesehatan	menurun				
3.4. mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kesehatan	menurun 24,3%	N/A	N/A	N/A	BB
	3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Kesehatan	menurun				
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Kesehatan	menurun				
	3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Kesehatan	meningkat	-	-	-	BB

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Kesehatan	menurun				
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Kesehatan	menurun				
3.7 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Keluarga Berencana	meningkat 66%	77,60	81,37	83,85	SS
	3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Keluarga Berencana	meningkat 65%	77,60	81,37	83,85	SS
	3.7.1(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Keluarga Berencana	meningkat 23,5%	16,02	18,37	19,51	SB
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Kesehatan	menurun 38	N/A	N/A	N/A	BB
	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Kel. Berencana	menurun 2,28	1,78	1,78	1,78	SS
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Keluarga Berencana	menurun 9,91%	N/A	4,79	4,79	SS
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Kesehatan	meningkat 95%				
	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Kesehatan	meningkat 95%	243,5 ribu	522 ribu	522 ribu	SB
3.9 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Kesehatan	Menurun				
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yg tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Kesehatan	Menurun				

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular serta menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau untuk melindungi kesehatan masyarakat, khusus-nya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Kesehatan	meningkat	100	100	100	SS
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kesehatan	meningkat	N/A	1,01	1,01	SB

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-4. Menjamin Pendidikan yang Berkualitas

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2015	2016	2017	CAPAIAN
4.1 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Pendidikan	meningkat	N/A	N/A	100	SS
	4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Pendidikan	meningkat				
	4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Pendidikan	meningkat				
	4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	pendidikan	Meningkat 114,09%	112,9	116,5	112,80	SB
	4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Pendidikan	meningkat 106,94%	89,42	79,69	83,88	SB
	4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Pendidikan	Meningkat 91,63 %	73,50	73,45	74,54	SB
	4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Pendidikan	meningkat 8,8%	7,45	7,24	7,24	SB

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2015	2016	2017	CAPAIAN
4.2 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pendidikan	meningkat 77,2%	91,02	91,10	74,5	SB
4.3. menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Pendidikan	Meningkat 91,63 %	73,50	73,45	74,54	SB
	4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Pendidikan	Meningkat 36,73 %	8,22	10,22	10,22	SB
4.4 meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Pendidikan	meningkat	N/A	N/A	34,92	SS
4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di	Pendidikan	meningkat				SB
		(1) SD/MI/ sederajat;			101,7	98,98	98,01	
		(2) SMP/MTs/ sederajat;			95,18	94,14	75,27	
		(3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan			118,2	122,63	60,86	
		Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di			129,2	44,52	44,52	
4.6 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Pendidikan	meningkat 96,1%	98,09	97,96	97,96	SS
	4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Pendidikan	meningkat	99,35	99,6	99,6	SS

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2015	2016	2017	CAPAIAN
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Pendidikan	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
4.c secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Pendidikan	meningkat %	100	84,2	84,2	SS
					50	96,3	96,3	
					59,2	97,4	97,4	

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Pemberdayaan Perempuan	bertambah	4	18	21	SS
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Pemberdayaan Perempuan	Menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	5.2.1(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Pemberdayaan Perempuan	menurun <20,48%	0,07	0,03	0,06	SS
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Pemberdayaan Perempuan	Menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Pemberdayaan Perempuan	meningkat 70%	95%	100	100	SS
	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DPPKB	menurun	5,07	0,25	0,25
	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Pemberdayaan Perempuan	meningkat 21 tahun	N/A	N/A	N/A	BB
	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Pemberdayaan Perempuan	menurun				
	5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Pendidikan	Meningkat 91,63 %	73,50	73,45	74,54	SB
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Pemberdayaan Perempuan	meningkat	4	7	7	SS
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Pemberdayaan Perempuan	meningkat	45	39	39	SB

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Keluarga Berencana	meningkat				
	5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Keluarga Berencana	menurun 9,9%	8,1	8,1	8,1	SS
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Keluarga Berencana	meningkat				
5. b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Komunikasi dan Informasi	meningkat	51,54	56,60	70,71	SS

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-6. Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
6.1. mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Pemukiman	meningkat 100%	64,26	69,32	85,87	SB
	6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Pemukiman	meningkat 118,6 m3/detik	N/A	285	285	SS
	6.1.1(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Pemukiman	meningkat 100%	77,73	69,32	85,87	SB
6.2. mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Kesehatan	meningkat				
	6.2.1(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Kesehatan	meningkat 100%	62,12	75,88	75,88	SB
	6.2.1(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kesehatan	meningkat	262	269	269	SS
	6.2.1(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kesehatan	meningkat	52	82	82	SS
	6.2.1(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Pemukiman	meningkat	N/A	2 Unit	2 Unit	SB
	6.2.1(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Pemukiman	meningkat	N/A	50	50	SB
5.3. meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimal-kan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Pemukiman	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	6.3.1(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Pemukiman	meningkat	0	N/A	N/A	BB
	6.3.2(a)	Kualitas air danau.	Lingkungan Hidup	meningkat				
	6.3.2(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Lingkungan Hidup	meningkat	65,38	62,14	65,82	SS

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
6.4 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pekerjaan Umum	meningkat				
6.5 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Pekerjaan Umum	ada	2	3	3	SS
	6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pekerjaan Umum	meningkat				
	6.5.1(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Pekerjaan Umum	meningkat				
	6.5.1(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Pekerjaan Umum	meningkat				

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
7.1. menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Pemukiman	Meningkat 96,6%	97,08	99,60	90,27	SB
7.2 meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Pemukiman	meningkat 10-16%	N/A	N/A	N/A	BB
7.3 melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Pemukiman	menurun 463,2 SBM	N/A	N/A	N/A	BB

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Perencanaan Pembangunan	meningkat	3,47	6,94	6,94	SS
	8.1.1(a)	PDB per kapita.	Perencanaan Pembangunan	meningkat >50Jt	31,14	35,126	35,126	SB
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja / Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Tenaga Kerja	meningkat	14,23	2,92	2,92	SB
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Tenaga Kerja	meningkat	1,63	80,79	80,79	SB
	8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Tenaga Kerja	meningkat 51%	26,09	32,63	32,63	SB
	8.3.1(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Tenaga Kerja	meningkat	58,95	58,95	58,95	SB
	8.3.1(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	UKM, Koperasi & Perindustrian	Meningkat				
8.5 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Tenaga Kerja	meningkat				
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tenaga Kerja	menurun	3,45	3,45	2,91	SS
	8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Tenaga Kerja	menurun	45,69	45,69	45,69	SB
8.6 secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Tenaga Kerja	meningkat	21,60	26,50	26,50	SS

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Tenaga Kerja	meningkat	N/A	N/A	ada	SB
8.9 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Pariwisata	meningkat 8%	N/A	N/A	N/A	BB
	8.9.1(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Pariwisata	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	8.9.1(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Pariwisata	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	8.9.1(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Pariwisata	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Pariwisata	meningkat				
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Ekonomi	meningkat	25	25	26	SS
	8.10.1(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Ekonomi	menurun	<1km	0,55	0,55	SS
	8.10.1(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	UKM, Koperasi & Perindustrian	meningkat				

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Industri Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1(a)	Kondisi Mantap Jalan (Kabupaten)	Pekerjaan Umum	meningkat	70,47	48,10	70,29	SS
	9.1.1(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Pekerjaan Umum	meningkat	-	30 km	42,5 km	SS
	9.1.1(c)	Panjang jalur kereta api.	Perhubungan	meningkat				
	9.1.2(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Perhubungan	meningkat	25	33	33	SS
	9.1.2(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Perhubungan	meningkat				
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	UKM, Koperasi & Perindustrian	meningkat	5,39	8,37	8,37	SS
	9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	UKM, Koperasi & Perindustrian	Lebih tinggi dari PDB	12,06	12,30	12,30	SS
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	UKM, Koperasi & Perindustrian	meningkat	12,84	12,10	12,10	SB
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	UKM, Koperasi & Perindustrian	meningkat				
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	UKM, Koperasi & Perindustrian	meningkat				
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Perencanaan Pembangunan	meningkat	N/A	0,06	0,05	SB
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Komunikasi dan Informasi	meningkat	N/A	N/A	66,97	SS
	9.c.1(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Komunikasi dan Informasi	meningkat	51,54	70,71	70,71	SS
	9.c.1(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Komunikasi dan Informasi	meningkat	17,31	30,46	34,92	SS

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-10. Mengurangi Kesenjangan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
10.1 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Perencanaan Pembangunan	Menurun 0,36	0,337	0,279	0,302	SS
	10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial	menurun 7% - 8%	15,75	15,01	14,73	SB
	10.1.1(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Perencanaan Pembangunan	meningkat				
	10.1.1(c)	Jumlah desa tertinggal.	Pemerintahan Desa	berkurang	193	183	10	SS
	10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Pemerintahan Desa	meningkat	1	1	1	SB
	10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Perencanaan Pembangunan	meningkat				
	10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Perencanaan Pembangunan	menurun				
10.2 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Sosial	menurun				
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Sosial	Meningkat				
	10.3.1(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sosial	Ada				
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tenaga Kerja	meningkat				

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
11.1 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	Pemukiman	meningkat	56,66	56,66	56,66	SB
	11.1.1(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Pemukiman	meningkat				
11.3 memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Pemukiman	meningkat				
	11.3.2(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Pemukiman	meningkat				
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Pemukiman	meningkat				
11.5 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Penanggulangan Bencana	menurun	607	183	140	SS
	11.5.1(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Penanggulangan Bencana	menurun 30%	153,2	153,2	153,2	SB
	11.5.1(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Penanggulangan Bencana	ada	N/A	N/A	1	SS
	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Penanggulangan Bencana	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
11.6 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Lingkungan Hidup	Meningkat 80%	61,79	60,13	61,95	SB
	11.6.1(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Pemukiman	meningkat				
11.7 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Pemukiman	meningkat				

11.b meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang meng-adopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini,	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Penanggulangan Bencana	ada	0	0	0	BB

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
12.4 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Lingkungan Hidup	meningkat	4	4	4	SB
	12.4.2(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Lingkungan Hidup	meningkat	N/A	0,10	0,99	SS
12.5 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Lingkungan Hidup	meningkat 20 ton/hari	52,07 ton/hari	55,20 ton/hari	57,58 ton/hari	SS
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (sistem Manajemen Lingkungan)	Lingkungan Hidup	meningkat	7	7	7	SB
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	UKM, Koperasi & Perindustrian	meningkat				

12.8 menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Pemukiman	meningkat	-	-	-	BB

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Penanggulangan Bencana	ada	N/A	N/A	N/A	BB
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Penanggulangan Bencana	menurun	607	183	140	SS

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR	URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
				2018	2019	2020	CAPAIAN
-	(Uraian Kelautan merupakan Kewenangan Provinsi)	-	-	-	-	-	-

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
15.1 menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Kehutanan	meningkat	8,95	21,75	21,75	SS
15.2 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Kehutanan	meningkat				
15.3 menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Lingkungan Hidup	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Perencanaan Pembangunan	ada				

15.9 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keaneka-ragaman hayati.	Lingkungan Hidup	ada	-	-	-	BB

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Sosial	Menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Sosial	Menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Sosial	Menurun	119	103	101	SS
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Sosial	Meningkat				
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Perlindungan Anak	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
	16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Perlindungan Anak	menurun	0,5	0,05	0,07	SB
	16.2.3(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Perlindungan Anak	menurun	N/A	N/A	N/A	BB
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat	Meningkat				
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Kuangan	Meningkat				
	16.6.1(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kuangan	meningkat	100	100	100	SS

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
	16.6.1(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Kuangan	meningkat 50%	51,84	55,63	57,53	SS
	16.6.1(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Kuangan	meningkat 80%	86,70	94,79	84	SS
	16.6.1(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah	Orgnasasi	meningkat 45%	56,20	53,60	53,60	SS
	16.6.2(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Orgnasasi	meningkat 80%	N/A	N/A	N/A	BB
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Pemberdayaan Perempuan	meningkat	8,9	11%	16%	SS
	16.7.1(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Pemberdayaan Perempuan	meningkat	10	10,00	7,5	SB
16.9 memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pen-catatan sipil, menurut umur.	Kependudukan	meningkat	60,87	63,40	63,40	SS
	16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Kependudukan	meningkat 77,4%	16,26	16,26	16,26	SB
	16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Kependudukan	meningkat 85%	86,91	91,48	91,48	SS
	16.10.2(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kominfo dan Informasi	meningkat	6	9	9	SS
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.	Kominfo dan Informasi	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Hukum	ada				

Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Keuangan	meningkat	1,08	0,65	0,65	SB
	17.1.1(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Pajak	meningkat 12%	0,15 %	0,22 %	0,22%	SB
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Pajak	Meningkat				
17.6 Meningkatkan kerjasama terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada,	17.6.2(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Kominfo dan Informasi	meningkat				
	17.6.2(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Kominfo dan Informasi	meningkat Perkotaan 100% Perdesaan 52%:	N/A	100	100	SS
					N/A	65,5	65,5	
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Kominfo dan Informasi	meningkat	17,31	30,46	34,92	SS
	17.8.1(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kominfo dan Informasi	meningkat				
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Perencanaan Pembangunan	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	17.17.1(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Perencanaan Pembangunan	meningkat				

URAIAN TARGET	INDIKATOR		URUSAN	TARGET	PELAKSANAAN			
					2018	2019	2020	CAPAIAN
17.18 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Data Statistik	meningkat	N/A	100	100	SS
	17.18.1(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Data Statistik	meningkat	N/A	80%	80%	SS
	17.18.1(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Data Statistik	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Perencanaan Pembangunan	meningkat	46,2	46,7	46,7	SS
17.19 mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik	17.19.2(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kependudukan	ada	46,7	91,48	91,48	SS
	17.19.2(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Data Statistik	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB
	17.19.2(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Data Statistik	meningkat	N/A	N/A	N/A	BB

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kab. OKI Tahun 2019-2024

Keterangan Indikator :

- Indikator TPB yang diidentifikasi sebagai kewenangan provinsi/pusat dan terdapat di Kab OKI sebanyak 10 Indikator
- Indikator TPB yang diidentifikasi memiliki kekhususan dan tidak terdapat di Kab. OKI sebanyak 16 Indikator
- Indikator TPB yang diidentifikasi tidak terdapat di TPB Inti dan Tidak terdapat di Kab OKI sebanyak 45 Indikator
- Indikator tidak digunakan

Keterangan Capaian :

- SS Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan dan Sudah mencapai Target (SS)
- SB Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan tetapi Belum mencapai Target (SB)
- BB Indikator TPB yang Belum dilaksanakan dan Belum ada Data (BB)



Bab III

Gambaran Keuangan Daerah

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu dibutuhkan data dan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya tiga tahun sebelumnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa lima tahun mendatang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis Keuangan masa lalu sangat penting untuk merancang keuangan masa depan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sementara itu, neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan, belanja langsung dan tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi dan

tantangan ke depan. Secara umum gambaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna.

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat laju pertumbuhan pendapatan daerah dilihat dari perkembangannya dengan menggunakan data realisasi pendapatan lima tahun kebelakang. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019 *(dalam milyar)*

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	1.979,25	2.120,35	2.224,00	2.471,79	7,72
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	108,99	222,96	235,94	195,40	31,07
4.1.1.	Pajak Daerah	21,85	37,27	45,69	62,97	
4.1.2.	Retribusi Daerah	6,33	4,89	4,40	5,40	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan	7,34	7,10	7,25	8,01	
4.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	73,47	173,70	178,59	119,02	
4.2.	Dana Perimbangan	1.472,01	1.493,74	1.603,72	1.610,23	3,08
4.2.1.	Dana Bagi Hasil	126,27	144,87	180,16	183,40	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.050,00	1.042,87	1.053,84	1.080,76	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	295,74	306,00	369,72	346,07	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	379,61	403,65	384,34	666,16	24,96
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,38	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	88,29	121,56	99,36	162,99	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi daerah	39,25	7,50	26,25	33,70	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40,87	7,20	5,53	59,86	
4.3.6.	Pendapatan Lainnya	211,20	267,39	253,19	409,23	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir, 2020

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kenaikan pada Tahun 2019 yakni sebesar 11 persen dari Rp 2.223.996.961.753,69,- pada Tahun 2018 menjadi Rp 2.471.793.547.800,91,- pada Tahun 2019 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.979.249.631.381,- menjadi Rp. 2.120.350.526.972,- pada tahun 2017 dengan kenaikan sebesar 7,13 persen dalam perkembangannya selama 4 (empat) tahun terakhir realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, secara keseluruhan menghasilkan rata – rata pertumbuhan pendapatan sebesar 7,72 persen.

Kontribusi terbesar untuk pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dari Dana Perimbangan dengan proporsi kontribusinya terhadap pendapatan selama periode 2016-2019 adalah 74 persen, 70 persen, 72 persen, dan 65 persen. Walaupun terjadi penurunan kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan, tetapi kontribusinya terhadap pendapatan masih sangat besar. Dengan kondisi demikian maka pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sangat bergantung kepada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK. Sementara itu kontribusi PAD terhadap pendapatan selama periode 2016-2019 berfluktuasi sebesar 6 persen, 11 persen, 11 persen, dan 8 persen.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta sulit untuk diukur dalam pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan. Sedangkan, belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah

ditetapkan. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah periode tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019 *(dalam milyar)*

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2	BELANJA	1.979,33	2.108,71	1.819,13	2.369,15	7,68
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	993,3	1.196,38	1207,30	1.208,83	7,16
2.1.1.	Belanja pegawai	692,86	744,89	744,70	756,87	3,04
2.1.2.	Belanja Subsidi	1,35	1,35	1,58	2,63	27,89
2.1.3.	Belanja Hibah	12,67	54,94	72,87	13,54	94,95
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1,1	0	1,64	3,10	51,15
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil	74,94	126,76	132,68	140,39	26,54
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan	210,38	268,41	253,41	292,03	12,41
2.1.7.	Belanja tidak terduga	0	0,04	0,43	0,26	315,28
2.2.	BELANJA LANGSUNG	986,04	912,33	611,82	1160,32	16,41
2.2.1.	Belanja pegawai	28,29	34,29	23,25	34,33	12,22
2.2.2.	Belanja barang dan jasa	396,76	399,43	308,86	499,57	13,25
2.2.3.	Belanja modal	560,99	478,61	279,72	626,42	22,57

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2020

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode tahun 2016 – 2019 berfluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi realisasi belanja ini dipengaruhi oleh fluktuasi realisasi pendapatan yang disajikan pada Tabel 3.1. Realisasi belanja tertinggi terjadi pada Tahun 2019 senilai Rp 2.369.154.292.252,-. Sedangkan realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2018 senilai Rp 1.819.127.825.083,-. Secara keseluruhan, rata – rata pertumbuhan per tahun belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode tahun 2016 – 2019 sebesar 7,68 persen dengan rata – rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 7,16 persen dan rata – rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 16,41 persen. Bila ditinjau dari proporsi belanja daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, persentase komponen Belanja Langsung terhadap belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir menurun, dimana pada tahun 2016 persentase belanja langsung terhadap belanja adalah 49,82 persen menurun menjadi 48,98 persen pada tahun 2019. Sementara itu rata-rata

pertumbuhan realisasi sampai Tahun 2019 untuk masing-masing jenis belanja langsung, yaitu untuk belanja pegawai sebesar 12,22 persen, belanja barang dan jasa sebesar 13,25 persen dan belanja modal yakni sebesar 22,57 persen.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah selama periode 2016-2019 sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena faktor pembayaran hutang (*carry over*) dana bagi hasil yang tidak jelas setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan perencanaan pembiayaan untuk tahun selanjutnya menjadi bias. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah periode tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019(*dalam milyar*)

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9,06	8,26	0,00	0,00	-36,28
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	9,04	8,17	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,02	0,10	0,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,00	5,00	1,00	1,00	106,67
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah	1,00	5,00	1,00	1,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO		8,06	3,26	-1,00	-1,00	-63,41
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		7,97	14,75	302,79	89,02	679,30

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir, 2020

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Ilir melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Perkembangan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2016-2019 dan rata-rata pertumbuhannya disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019 *(dalam jutaan)*

7.5	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.1.	ASET					
1.1.1	Kas di kas Daerah	1.881,97	2.029,50	293.364,40	362.480,05	4795,47
1.1.2	Kas Dibendahara Penerimaan	1,69	0,75	5,62	7,62	209,75
1.1.3	Kas Bendahara Pengeluaran	1.740,05	767,47	109,47	4,98	-79,03
1.1.4	Kas diBadan Layanan Umum Daerah	1.215,04	4.911,36	7.164,51	23.869,19	194,42
1.1.5	Kas di bendahara FKTP	3.132,43	6.217,37	8.665,15	12.121,48	59,25
1.1.6	Kas di Bendahara Dana Bos APBN	786,22	845,98	1.404,33	-	-8,80
1.1.7	Kas di Bendahara PSG	106,03	71,6	-	-	
1.1.8	Kas Lainnya	-	8,39	5,37	13.896,94	
1.1.9	Kas dan setara Kas					
1.1.10	Inventasi Jangka pendek	-	-	-	-	
1.1.11	Piutang Pajak Daerah	17.589,28	19.444,48	21.256,94	22.879,16	9,17
	- Penyisihan Piutang Pajak	-8.017,77	-10.186,85	(12.827,80)	(14.273,90)	21,42
	- Piutang Pajak Netto	9.571,51	9.257,63	8.429,14	8.605,26	-3,38
1.1.12	Piutang Retribusi Daerah	348,92	347,28	347,28	347,28	-0,16
	- Penyisihan Piutang Retribusi	-347,28	-347,28	(347,28)	(347,28)	0,00
	- Piutang Retribusi Netto	1,64	-	-	-	
1.1.13	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	
1.1.14	Piutang Trasfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	-	-	95.420,80	
1.1.15	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	107.392,06	67.799,81	79.962,74	18.816,12	-31,80

7.5	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	- Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	
	- Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya Netto	107.392,06	67.799,81	79.962,74	18.816,12	-31,80
1.1.16	Penyisihan Piutang	-	-	-	-	
1.1.17	Belanja Dibayar Dimuka	334,32	347,28	315,57	278,86	-5,63
1.1.18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	370,19	386,03	415,77	475,75	8,80
	- Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-118,66	-70,79	(97,45)	(212,97)	38,62
	- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	251,53	315,23	318,32	262,78	2,95
1.1.19	Bagian Lancar tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	
1.1.20	Bagian Lancar Tuntunan Ganti Rugi	923,15	126,02	123,12	160,07	-19,55
	- Penyisihan Bagian Lancar Tuntunan Ganti Rugi	-105,59	-60,27	(113,92)	(117,59)	16,44
	- Bagian Lancar Tuntunan Ganti Rugi Netto	817,57	65,75	9,20	42,48	61,25
1.1.21	Piutang Lainnya	2.679,23	2.561,73	2.561,73	2.561,73	-1,46
	- Penyisihan Piutang Lainnya	-2.247,98	-2.400,48	(2.561,73)	(2.561,73)	4,50
	- Piutang Lainnya Netto	31,25	161,25	-	-	
1.1.22	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	30.553,15	33.457,76	32.947,74	5.602,87	-25,00
	- Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	-1.976,68	-1.332,63	1.503,58	(40,30)	-116,03
	- Piutang Lain - Lain PAD yang Sah Netto	28.576,47	32.125,13	3.144,17	5.562,56	-0,29
1.1.23	Persediaan	9.681,73	11.492,51	8.990,92	14.332,39	18,78
	JUMLAH ASET LANCAR	139.119,90	101.772,86	440.188,92	564.410,55	111,30
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.2.1	Inventasi Non Permanen	-	-	-	-	
	- Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	
	- Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	
	- Pinjaman Kepada Pemda Lainnya	-	-	-	-	
	- Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	
	- Investasi Dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	
	- Investasi dalam Proyek Negara	-	-	-	-	
	- Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	
	- Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	
	- Investasi Non Permanen yang diragukan tertagih	-	-	-	-	
1.2.2	Investasi Permanen					
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	125.856,18	105.744,74	102.634,13	103.633,37	-5,98
	- Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	125.856,18	105.744,74	102.634,13	103.633,37	-5,98

7.5	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.3	ASET TETAP					
1.3.1	Tanah	183.354,08	320.937,59	328.888,47	341.382,35	27,10
1.3.2	Peralatan dan Mesin	432.116,61	439.103,95	459.433,70	509.245,13	5,70
1.3.3	Gedung dan Bangunan	952.234,19	992.603,16	1.017.844,50	1.090.853,99	4,65
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.698.544,87	2.920.667,23	3.052.876,98	3.568.696,24	9,88
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	69.838,04	81.085,88	102.792,45	113.661,33	17,82
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	3.609,60	-	269,46	339,00	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.582.569,99	-1.795.610,20	(2.061.225,23)	(2.343.204,28)	13,98
	JUMLAH ASET TETAP	2.757.127,40	2.958.787,60	2.900.880,33	3.280.973,76	6,15
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	
1.5	ASET LAINNYA					
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	911,7	745,94	580,17	414,41	-22,99
	- Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	4,56	4,06	(2,90)	(2,07)	-70,33
	- Tagihan Penjualan Angsuran Netto	907,14	741,88	577,27	412,34	-22,99
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	
	- Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	
	- Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-	-	-	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	
	- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto	-	-	-	-	
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	509,4	-	-	223,18	
	- Amortisasi Aset Tak Berwujud	-509,4	-	-	(44,12)	
	- Aset Tak Berwujud Netto	-	-	-	179,05	
1.5.5	Aset Lain - Lain	371.814,35	387.379,61	323.811,80	407.178,12	4,51
	- Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-107.103,60	-116.994,70	-	-	
	- Aset Lain-lain Netto	264.710,75	270.384,90	323.811,80	407.178,12	15,88
	JUMLAH ASET LAINNYA	265.617,89	271.126,78	324.389,07	407.769,50	15,81
	JUMLAH ASET DAERAH	3.022.745,55	3.229.914,59	3.768.092,45	4.356.787,18	13,05
2.	KEWAJIBAN					
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	8,18	-	27,37	
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	
2.1.3	Utang Pajak	-	-	-	-	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	77,06	151,54	90,28	173,96	49,64
2.1.6	Utang Belanja					
2.1.7	Utang Beban	58.532,35	52.559,53	39.167,24	19.729,07	-28,44
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	160.642,94	50.894,84	9.145,53	9.213,43	-49,87
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	219.252,35	103.614,08	48.403,05	29.143,83	-48,61

7.5	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	
2.2.2	Utang Luar Negeri			-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	219.252,35	103.614,08	48.403,05	29.143,83	-48,61
3	EKUITAS DANA					
3.1	EKUITAS DANA LANCAR					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)					
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang					
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan					
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek					
3.1.5	Pendapatan yang ditangguhkan					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI					
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang					
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap					
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)					
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang					
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.095.270,61	3.368.462,06	3.719.689,40	4.327.643,35	11,87
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.314.522,96	3.472.076,14	3.768.092,45	4.356.787,18	9,63

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir, 2020

Analisis terhadap data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio quick merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban jangka pendek.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Sedangkan rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan total utang dengan total ekuitas.

Hasil analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas, periode tahun 2016-2019 tersaji pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5. Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
A	Rasio Likuiditas				
1.	Rasio Lancar (Current Ratio)	0,76	1,32	9,09	19,37
2.	Rasio Quick (Quick Ratio)	0,71	1,21	8,91	18,87
B	Rasio Solvabilitas				
1.	Rasio total utang terhadap total aset	0,07	0,03	0,01	0,01
2.	Rasio utang terhadap modal	0,07	0,03	0,01	0,01

Sumber : Hasil Analisis

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan Kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga berpedoman Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk pelaksanaannya

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perpaduan dari beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam implementasinya kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dari dana perimbangan pusat - daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari

bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar mampu mendanai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektivitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana Perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya penting yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Melakukan kajian peningkatan pendapatan melalui PBB jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung-Palembang.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan periode tahun 2016-2019 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, dari sisi pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat perubahan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, yaitu ditetapkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan perundang-undangan tersebut mengakibatkan adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah. Undang-undang tersebut ditetapkan dalam upaya memperbaiki sistem pemungutan serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, melalui perluasan objek dan penambahan jenis pajak daerah. Penetapan undang-undang tersebut memberikan dukungan

terhadap langkah yang sangat strategis guna lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 dan mempedomani dokumen perencanaan RKPD, serta dibahas secara bersama sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan, kebijakan umum belanja daerah pada periode Tahun 2016-2019 adalah:

1. Peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas.
2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan infrastruktur dasar, perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial,
4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah.
5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja perangkat daerah yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgetting*). Kebijakan belanja yang dilakukan tidak berdasarkan pengalokasian anggaran yang didasarkan pada fungsi masing-masing urusan (*money follow function*) tetapi pengalokasian anggaran

didasarkan pada program prioritas (*money follow program priority*). Tidak semua tugas dan fungsi dibiayai secara merata.

7. Belanja daerah memenuhi ketentuan belanja minimal fungsi pendidikan sebesar 20% dan ketentuan belanja minimal fungsi kesehatan sebesar 10%.
8. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Disamping kebijakan belanja yang dituangkan dalam RPJMD, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempedomani kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, diantaranya:

1. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
2. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan kinerja kegiatan pembangunan.
3. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang meliputi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera, mencapai pendidikan dasar yang berkualitas, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, akses energi yang terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang berkualitas, mengurangi kesenjangan, pemukiman yang layak, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.
4. Percepatan penurunan prevalensi stunting meliputi 10 desa di 5 kecamatan.

Dalam pemenuhan pengalokasian anggaran fungsi bidang pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalokasikan minimal

sebesar 20 persen, sedangkan fungsi bidang kesehatan minimal sebesar 10 persen. Selanjutnya alokasi kebijakan belanja diprioritaskan untuk memenuhi fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban serta air bersih dan air limbah. Sehingga diharapkan kebijakan belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada dan kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang memiliki resiko terkecil dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah.
2. Menjadikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk air minum.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran proporsi penggunaan anggaran periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran periode tahun 2016-2019 pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019
(dalam milyar)

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2	BELANJA												
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.133,56	993,3	87,63	1.390,91	1.196,38	86,01	1.501,99	1.207,30	80,38	1.473,12	1.208,83	82,06
2.1.1	Belanja pegawai	825,29	692,86	83,95	931,99	744,89	79,92	1.023,89	744,70	72,73	1.010,64	756,87	74,89
2.1.3	Belanja Subsidi	1,35	1,35	99,99	1,35	1,35	100	1,58	1,58	100,00	2,63	2,63	99,98
2.1.4	Belanja Hibah	13,54	12,67	93,58	57,57	54,94	95,43	86,41	72,87	84,33	13,75	13,54	98,51
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,54	1,1	71,43	-	-	-	1,64	1,64	100,00	3,12	3,10	99,44
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	79,28	74,94	94,52	130,95	126,76	96,8	133,31	132,68	99,53	140,95	140,39	99,60
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	211,81	210,38	99,32	268,56	268,41	99,94	254,51	253,41	99,57	294,82	292,03	99,05
2.1.8	Belanja tidak terduga	0,75	-	-	0,5	0,04	8,05	0,65	0,43	66,55	7,20	0,26	3,64
2.2	Belanja Langsung	1.254,78	986,04	78,58	1.013,76	912,33	89,99	774,80	611,82	78,97	1.259,73	1.160,32	92,11
2.2.1	Belanja pegawai	36,39	28,29	77,73	36,77	34,29	93,28	37,80	23,25	61,49	37,00	34,33	92,78
2.2.2	Belanja barang dan jasa	474,7	396,76	83,58	436,32	399,43	91,55	417,82	308,86	73,92	560,57	499,57	89,12
2.2.3	Belanja modal	743,69	560,99	75,43	540,67	478,61	88,52	319,17	279,72	87,64	662,17	626,42	94,60

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir, 2020

b. Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran belanja daerah yang menginformasikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 – 2019 *(dalam jutaan)*

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	676.069,56	689.786,54	673.160,94	686.061,80
2.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan	11.350,51	46.094,70	53.727,30	51.416,13
2.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.168,42	7.417,11	16.203,23	17.218,51
2.1.1.05	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.003,42	1.445,91	1.461,44	1.986,94
2. 2	Belanja Langsung				
2.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	23.676,61	20.699,21	20.419,30	30.502,10
2.2.1.02	Belanja Uang Lembur	753,42	283,43	445,14	431,21
2.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	776,94	763,08	2.424,78	16.689,92
2.2.1.05	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	8.892,00	9.078,50	7.866,88	11.135,33
2.2.1.06	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir	1.085,36	1.450,68	1.243,08	793,27
2.2.1.08	Belanja sarana mobilitas	928,67	4.469,45	2.937,66	2.744,14
2.2.1.10	Belanja sarana perlengkapan dan peralatan kantor	2.940,11	2.634,52	-	-
2.2.1.11	Belanja makanan dan minuman	34.095,58	13.045,46	12.131,29	17.781,42
2.2.1.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.541,55	3.390,35	1.347,84	2.598,71
2.2.1.14	Belanja pakaian Khusus dan pakaian hari hari tertentu	2.594,03	1.865,44	2.410,74	2.949,07
2.2.1.15	Belanja perjalanan dinas	78.692,97	82.309,04	85.106,34	124.713,16
2.2.1.16	belanja beasiswa pendidikan PNS	0	350	75,00	540,00
2.2.1.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.251,58	1.725,25	1.842,98	3.277,60
2.2.1.20	Belanja pemeliharaan	23.780,57	27.280,91	10.069,09	27.902,94
2. 2. 3	Belanja modal	560.990,40	473.963,60	279.718,82	626.423,29
	Total	1.435.591,68	1.388.053,18	1.172.591,84	1.625.165,55

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir, 2020

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas diperoleh proporsi penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016–2019 *(dalam milyar)*

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase 3/4 x 100%
1	2	3	4	5
1	2016	1.436	1.980	72,50
2	2017	1.388	2.114	65,66
3	2018	1.173	1.928	60,82
4	2019	1.582	2.370	66,74

Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2016-2019 alokasi belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur persentasenya relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik dan diharapkan belanja untuk pelayanan publik lebih meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya, efektivitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perkembangan kondisi defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir periode tahun 2016-2019 tersaji pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir 2016–2019 *(dalam jutaan)*

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan	1.979.250,00	2.120.190,00	2.122.919,74	2.471.793,55
	Dikurangi realisasi:				
2	Realisasi Belanja	1.979.330,00	2.108.710,00	1.918.481,26	2.369.154,29
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000,00	5.000,00	9.579,57	1.000,00
	Surplus/defisit Riil	-1.080,00	6.480,00	194.858,90	101.639,26

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir, 2020

Pada Tabel 3.9. di atas terlihat bahwa pada tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 terdapat surplus, sementara pada tahun 2016 terdapat defisit. Untuk menutupi defisit tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir *(dalam jutaan)*

No	Uraian	Proporsi dari Defisit Riil							
		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya	9.036,01	0	8.167,38	0	14.772,64	0	310.713,63	0
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20	0	96,35	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	7.971,18	0	14.772,64	0	310.713,63	0	412.352,89	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir, 2020

Kemudian analisis terakhir yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) periode tahun 2016-2019 tersaji pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir *(dalam jutaan)*

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		Rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
1	Jumlah SILPA	7.970,91	113,36	14.747,70	54,05	310.713,63	4,75	412.352,89	75,35	708,20
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan Dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	4.240,29	46,93	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		Rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	4.795,72	53,07	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada pihak ketiga s.d Akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2020

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk mendapatkan proyeksi pendanaan lima tahun kedepan dilakukan analisis proyeksi data masa lalu yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun ke belakang. Dari analisis rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak konsisten atau dinamis. Hal ini disebabkan dari faktor eksternal terutama dari pendapatan dana perimbangan. Bila dilihat untuk pertumbuhan realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2019 hanya tumbuh sekitar 7,72% karena pergerakan yang fluktuatif.

Sebagai bahan pertimbangan proyeksi pendapatan dan belanja lima tahun kedepan selain melihat rata-rata pertumbuhan juga mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan di sektor keuangan. Untuk proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2024 diasumsikan pertumbuhan setiap tahunnya sekitar 7,6%. Secara lengkap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun Anggaran 2019-2024 (*dalam jutaan*)

PROYEKSI									
Permendagri No 13 tahun 2006				Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019					
No	URAIAN	2019	2020	No	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	2.403.175	2.828.145	1	PENDAPATAN DAERAH	2.298.942	2.736.563	2.795.415	2.864.269
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.197	211.366	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	331.557	390.530	332.079	321.486
1.1.1	Pajak Daerah	40.643	42.674	1.1.1	Pajak Daerah	58.475	64.323	67.539	70.916
1.1.2	Retribusi Daerah	4.178	4.386	1.1.2	Retribusi Daerah	7.109	7.820	8.211	8.621
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	7.254	7.616	1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	8.011	8.812	9.253	9.715
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	138.123	156.690	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	257.980	309.575	247.077	232.234
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.692.275	2.070.042	1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.819.335	2.183.202	2.292.362	2.363.261
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	247.371	259.739	1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.734.899	2.081.879	2.185.973	2.251.552
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.083.057	1.430.364	1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.436	101.323	106.389	111.709
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	361.847	379.939						

PROYEKSI									
Permendagri No 13 tahun 2006				Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019					
No	URAIAN	2019	2020	No	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	520.703	546.737	1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148.029	162.832	170.973	179.522
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	86.475	90.798	1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	148.029	162.832	170.973	179.522
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.699	35.383						
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	5.495	5.769						
1.3.4	Pendapatan Lainnya	395.035	414.787						
2	BELANJA DAERAH	2.419.909	2.838.077	2	BELANJA	2.705.500	2.759.605	2.814.797	2.871.093
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.421.207	1.492.093	2.1	BELANJA OPERASI	1.730.785	1.761.845	1.797.082	1.833.024
2.1.1	Belanja Pegawai	964.417	1.012.638	2.1.1	Belanja Pegawai	1.030.193	1.050.797	1.071.813	1.093.249
2.1.2	Belanja Subsidi	1.716	1.849	2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	577.576	589.128	600.910	612.928
2.1.3	Belanja Hibah	13.366	14.000	2.1.3	Belanja Subsidi	2.776	2.832	2.888	2.946
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.135	3.292	2.1.4	Belanja Hibah	116.585	118.917	121.295	123.721
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	140.954	148.001	2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	169	172	176	179

PROYEKSI									
Permendagri No 13 tahun 2006				Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019					
No	URAIAN	2019	2020	No	URAIAN	2021	2022	2023	2024
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	294.824	309.564	2.2	BELANJA MODAL	500.854	514.424	524.712	535.206
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2.750	2.750	2.2.1	Belanja Modal Tanah	35.240	35.945	36.664	37.397
2.2	BELANJA LANGSUNG	998.702	1.345.984	2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.614	58.766	59.942	61.140
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.395	88.123	89.885	91.683
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	324.974	331.473	338.103	344.865
					Belanja Modal Aset Tetap lainnya	114	116	119	121
2.2.3	Belanja Modal	-	-	2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000	51.000	52.020	53.060
	<i>Surplus / (Defisit)</i>	-16.733	-9.932	2.3.1	Belanja Tidak Terduga	50.000	51.000	52.020	53.060
				2.4	BELANJA TRANSFER	423.859	432.336	440.983	449.803
					Belanja Bagi Hasil	126.195	128.719	131.293	133.919
					Belanja Bantuan Keuangan	297.664	303.617	309.690	315.883
					<i>Surplus / (Defisit)</i>	-406.557	-23.042	-19.382	-6.824

PROYEKSI									
Permendagri No 13 tahun 2006				Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019					
No	URAIAN	2019	2020	No	URAIAN	2021	2022	2023	2024
3	PEMBIAYAAN			3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.733	10.932	3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	411.557	28.142	24.585	12.130
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14.773	7.971	3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	408.597	24.886	21.003	8.190
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.961	2.961	3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.960	3.256	3.582	3.940
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-						
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000	1.000	3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000	5.100	5.202	5.306
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.000	1.000	3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.000	5.100	5.202	5.306
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-						
	<i>Pembiayaan Netto</i>	16.733	9.932		<i>Pembiayaan Netto</i>	406.557	23.042	19.383	6.824
	SILPA TAHUN BERKENAAN	0	0		SILPA TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2020

Proyeksi pendapatan dan belanja ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar dari pendapatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sama seperti periode RPJMD sebelumnya. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi harus ditingkatkan penerimaannya, dikarenakan kebijakan dana transfer pemerintah pusat menyesuaikan dengan penerimaan negara.

Dalam menentukan proyeksi SiLPA pada periode tahun 2019-2024 menggunakan data SiLPA pada periode sebelumnya. Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal sebesar 0,3 % dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana disajikan pada tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13. Proyeksi SILPA Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019-2024 *(dalam jutaan)*

No	URAIAN	KONDISI AWAL 2018	PROYEKSI					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	7.971	14.773	7.971	408.597	24.886	21.003	8.190

Sumber : Hasil Analisis

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2019-2024, Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dari penganggaran setiap tahunnya, Selengkapny secara indikatif tersaji pada tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019- 2024 *(dalam jutaan)*

N O	URAIAN	PROYEKSI						
		Kondisi Awal 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendapatan	2,231,343	2,406,752	2,828,145	2,985,597	3,093,107	3,277,572	3,459,896
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)							
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10,932	17,733	10,932	10,932	10,932	10,932	10,932
	Total penerimaan	2,242,275	2,420,908	2,839,077	2,996,529	3,104,039	3,288,504	3,470,828
	Dikurangi :							
4	Belanja Tidak langsung	1,499,930	1,421,207	1,492,093	1,566,560	1,644,751	1,726,851	1,813,056
5	Pengeluaran pembiayaan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUA N KEUANGAN DAERAH	741,346	1,002,279	1,345,984	1,428,969	1,458,288	1,560,653	1,656,772

Sumber : Hasil Analisis

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan pengeluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksudkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari

kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 *(dalam jutaan)*

PROYEKSI										
Permendagri No. 13 tahun 2006					Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019					
NO	URAIAN	Kondisi Awal APBD 2018	2019	2020	NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024
A	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	741.246	991.900	1.345.984	A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.170.993	1.708.715	1.742.890	1.777.747
B	PRIORITAS I (Belanja Rutin PD)	-	190.084	252.282	B	PRIORITAS I (Belanja Modal)	500.854	514.424	524.712	535.206
C	PRIORITAS II (Belanja Urusan PD)	-	808.618	1.093.701	C	PRIORITAS II (Belanja Barang Jasa, belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga)	670.139	1.194.291	1.218.178	1.242.541

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping pengelolaan belanja sejak proses perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek, efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*) dan kebutuhan.

Selanjutnya, ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah berdasarkan prioritas. Prioritas dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15. Penetapan anggaran tiap tahun sesuai urutan prioritas (I dan II) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Secara simultan anggaran tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Kelompok prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum kelompok prioritas II. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2019-2024, yang merupakan program pembangunan daerah atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada pencapaian visi misi daerah.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib.



Bab IV

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir selama lima tahun terakhir terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disamping itu terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah mengakibatkan tidak semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga memerlukan pemilahan dan penentuan skala prioritas permasalahan atau tantangan yang mendesak untuk diatasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Namun demikian, permasalahan atau tantangan yang tidak menjadi prioritas utama bukan berarti tidak diatasi oleh pemerintah daerah akan tetapi secara operasional tetap menjadi perhatian sepanjang memiliki pengaruh terhadap kinerja yang telah dicapai di masa lalu dan berpengaruh terhadap standar pelayanan bagi masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis harus melibatkan stakeholder kabupaten, provinsi dan pusat agar terjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar pusat dan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terutama program pengembangan infrastruktur pedesaan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, Pembangunan Pertanian, Pengembangan ekonomi lokal

dan beberapa program/kegiatan lainnya yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kabupaten, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dilaksanakan selama 2014-2017 selain membawa kemajuan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga menyisakan berbagai permasalahan yang harus diatasi secara terencana, terukur dan tuntas. Permasalahan pembangunan daerah di Ogan Komering Ilir yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2019-2024) adalah sebagai berikut:

4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengupayakan reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah. Perubahan pola pikir dan kebiasaan serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang

baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

4.1.1.1. Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Reformasi birokrasi yang berjalan tidak seiring dengan tuntutan efisiensi pelaksanaan manajemen menjadi salah satu kendala penerapan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan kinerja pengawasan baik secara internal maupun eksternal dalam bentuk kelembagaan maupun non kelembagaan masih belum optimal. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan telah dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Penyebab lambannya upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan pada masing-masing PD dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) / Inspektorat dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit.

4.1.1.2. Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Kinerja birokrasi berdasarkan kelembagaan belum optimal sesuai harapan dan ini tercermin dari kinerja Perangkat Daerah yang masih rendah. Hal ini disebabkan dukungan kualitas tenaga teknis masih rendah, terdapat tumpang tindih kewenangan pada beberapa PD, sistem perencanaan dan pelaporan yang belum optimal, proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

4.1.1.3. Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi. Beberapa unit pelayanan publik belum menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik adalah Sumber Daya Manusia dan kapasitas aparatur yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir harus ditingkatkan.

4.1.1.4. Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan, ini ditunjukkan dari nilai rasio kemandirian keuangan daerah yang sebesar 10,51 persen pada tahun 2017, sementara jika dilihat dari rasio pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah maka nilainya hanya 1,98 persen. Permasalahan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah adalah kurangnya kajian mengenai potensi dan kualitas aparatur pemungut.

4.1.1.5. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa sebanyak 314 dari 327 desa/kelurahan memiliki APB Desa lebih kurang satu milyar membutuhkan kemampuan teknis aparat pemerintah desa mengelola keuangan desa, sehingga alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan desa dalam bidang infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.2. Infrastruktur Dasar

Permasalahan penyediaan infrastruktur dasar antara lain:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan dan jembatan yang belum memadai mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa.
 - a. Karakteristik wilayah terbagi menjadi wilayah barat berupa dataran sedang dan wilayah timur berupa satuan geomorfik rawa dan sungai mencapai 75 persen. Pembangunan dan perbaikan akses transportasi darat di kawasan timur membutuhkan alokasi dana yang besar, kondisi tanah rawa yang labil mempercepat kerusakan jalan
 - b. Kondisi jalan menuju sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang kurang baik menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi jalan rusak pada tahun 2017 sepanjang 601.599 km atau sebesar 29,53 persen.
 - c. Kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung beban yang melebihi tonase (*overloading*) dalam mobilisasi barang sehingga dalam siklus tahunan jalan telah mengalami kerusakan, karena kapasitas jalan kabupaten tidak mampu dilalui oleh kendaraan bertonase besar yang mengangkut hasil perkebunan.
 - d. Sarana prasarana transportasi sungai di wilayah timur belum memadai seperti perahu, kapal, dermaga, tambatan perahu dan rambu
 - e. Integrasi antar moda transportasi darat di wilayah barat untuk mendukung aksesibilitas transportasi sungai di wilayah timur.
 - f. Belum berfungsinya terminal di Kota Kayuagung dalam mendorong kegiatan perekonomian, karena saat ini dikelola pemerintah pusat
2. Jangkauan aliran listrik belum mencapai seluruh desa di wilayah pesisir timur dan pasokan daya listrik yang ada masih kurang dan tidak stabil, sehingga diperlukan adanya gardu induk yang saat ini sedang dibangun di kayuagung

- a. Rasio desa berlistrik telah mencapai 90,63 persen yang didukung listrik PLN, genset dan pembangkit listrik tenaga surya sistem komunal
 - b. Rasio Rumah tangga yang telah menggunakan listrik 63,83 persen
3. Penyediaan air bersih yang masih kurang di wilayah pesisir timur
- Cakupan layanan air bersih telah mencapai 65,9 persen, sementara rumah tangga pengguna air bersih mencapai 64,26 persen. Kecamatan yang belum terlayani instalasi air minum adalah Kecamatan Lempuing Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Mesuji Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pedamaran Timur dan Kecamatan Air Sugihan. Kecamatan Cengal dan Kecamatan Air Sugihan termasuk kecamatan rawan air bersih, karena wilayahnya dipengaruhi intrusi air asin dan hujan yang rendah
4. Masih adanya rumah tinggal belum bersanitasi di wilayah pesisir timur dan sepanjang aliran sungai
- Proporsi rumah tangga yang memiliki jamban sendiri baru mencapai 68,17 persen, sisanya sekitar 31,83 persen rumah tangga membuang limbahnya langsung ke sungai atau rawa lebak, kondisi ini akan mencemari aliran sungai sebagai air baku untuk air bersih.
5. Masih perlunya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi teknis dan non teknis di wilayah lebak/rawa.
- Potensi sumber daya alam yang paling besar adalah pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Wilayah pertanian terbagi menjadi wilayah dataran rendah yang memerlukan irigasi teknis dan wilayah rawa/lebak irigasi non teknis.

4.1.3. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu 7,01 tahun pada tahun 2017. Kondisi ini relevan dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk sebagian besar adalah tamatan SD/ sederajat yaitu 40,06 persen pada tahun 2017. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan faktor angka putus sekolah yang masih

tinggi, yang dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga angka partisipasi kasar SMA/ sederajat masih rendah yaitu 73,50 persen dan angka partisipasi murni SMA/ sederajat yaitu 57,95 pada tahun 2017. Namun sejak beralihnya kewenangan pengelolaan satuan pendidikan SMA/ sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi, maka tanggungjawab pencapaian indikator pendidikan terkait SMA/sederajat bukan lagi kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah provinsi. Sehingga dengan kebijakan ini pemerintah kabupaten/kota hanya fokus terhadap pengelolaan pendidikan usia dini atau PAUD dan pendidikan dasar atau SD, SMP/sederajat. Dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, salah satunya adalah pelayanan minimal pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara memperoleh pendidikan. Selanjutnya, ketentuan dari peraturan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang membagi SPM bidang pendidikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Ketentuan jenis pelayanan dasar menyangkut pemenuhan hak warga negara dalam pendidikan sedangkan mutu pelayanan dasar menyangkut ketentuan terkait standar mutu pelayanan dasar yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengukuran standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan usia dini dan pendidikan dasar menunjukkan bahwa sebagian indikator dan sub indikator pencapaiannya belum optimal. Kesenjangan terkait dengan penyediaan sarana prasarana (kebutuhan ruang kelas, laboratorium IPA, meja, kursi, papan tulis, buku dan lain-lain), pemenuhan sumber daya manusia (pendidik dan pengawas sekolah yang belum berkualifikasi S1 dan atau akta IV, belum memiliki sertifikat profesi). Permasalahan pendidikan yang masih belum tertangani yaitu:

1. Kondisi ruang kelas yang terbatas dan mengalami kerusakan.
2. Kondisi sarana meja, kursi dan papan tulis yang terbatas dan mengalami kerusakan

3. Masih terbatasnya sarana penunjang buku teks mata pelajaran dan peralatan laboratorium IPA
4. Belum terpenuhinya pemerataan dan kualifikasi akademik serta kompetensi tenaga pendidikan.
5. Penerapan SPM bidang Pendidikan belum sepenuhnya optimal, masih terdapat indikator SPM bidang pendidikan yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu indikator pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD sebesar 0 persen, dan pengadaan alat praktik dan peraga Siswa Pendidikan Dasar sebesar 94 persen. (Laporan realisasi SPM tahun 2019).

4.1.4. Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah masih belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan masih tingginya angka kematian ibu (2 jiwa), bayi (33 jiwa) dan balita (33 jiwa) pada tahun 2017, selain itu masih terdapat kasus balita kurang gizi (0,88 persen) dan balita gizi buruk (0,01 persen). Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu:

1. Kinerja pelayanan kesehatan belum optimal terutama desa yang relatif jauh dan tertinggal dari pusat pelayanan kesehatan, yang menyebabkan masih terdapatnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu.
2. Belum optimalnya pencapaian perbaikan gizi masyarakat, utamanya bagi balita yang mengalami *stunting* atau kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah dua tahun.
3. Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit menular.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat.
5. Masih terbatasnya tenaga spesialis dan teknis dalam mendukung pelayanan Rumah Sakit maupun Puskesmas.
6. Belum optimalnya peran dan fungsi, serta masih rendahnya kualitas Posyandu dengan persebaran strata yang tidak merata.

7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana yang semakin memadai serta kapasitas SDM tenaga kesehatan yang berkualitas.
8. Belum optimalnya partisipasi semua lapisan masyarakat dalam menjaga *hygiene* dan sanitasi lingkungan sekitar dan tempat-tempat umum.
9. Kemandirian peserta KB masih rendah.
10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan belum optimal.

4.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan tidak hanya pada level lokal, nasional, maupun internasional. Maka penanganan kemiskinan harus bersinergi baik oleh pemerintah daerah, provinsi, dan nasional melalui program anggaran dan pendekatan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih cukup tinggi, meskipun sudah mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 15,75 persen atau 127.060 jiwa menjadi sebesar 14,73 persen atau 123.340 jiwa di tahun 2020, dimana angka kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih berada diatas angka kemiskinan provinsi sebesar 12,66 persen dan Nasional sebesar 9,78 persen.

Dari hasil pemetaan permasalahan dan perumusan akar masalah faktor pembentuk kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang paling mendasar adalah penyediaan infrastruktur dasar yang masih kurang dan belum merata, ketenagakerjaan dan sumber mata pencaharian masyarakat yang masih belum mantap. Penyebab dan tantangan kemiskinan setelah dilakukan identifikasi dan perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan data penduduk miskin.
2. Daya beli masyarakat yang rendah dikarenakan menurunnya harga komoditi pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk terus mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
4. Belum optimalnya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan daerah sehingga program penanganan kemiskinan yang diupayakan belum dapat dapat mendorong akselerasi dan efektifitas penurunan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.
5. Belum adanya keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan indikator capaian yang terukur.
5. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum fokus, masih sektoral dan belum terpadu.
6. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, sesuai tuntutan kebutuhan pasar.

4.1.6. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam antara lain

1. Pengelolaan lahan pertanian belum optimal
 - a. Kawasan pertanian sawah tadah hujan dikecamatan lempuing dan lempuing jaya sudah dialiri pengairan irigasi teknis yang memungkinkan untuk penanaman padi 2 – 3 kali setahun
 - b. Kawasan pertanian lahan sawah lebak dioptimalkan dengan pembuatan pintu air dan jaringan tersier
 - c. Kawasan pertanian sawah pasang surut dikembangkan untuk penanaman 2 kali setahun
2. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) pengolahan hasil sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian sebagai komoditas unggulan.

Produksi hasil pertanian tanaman pangan masih dikirim ke daerah lain belum dilakukan pengolahan lebih lanjut

3. Pengembangan perikanan budidaya air tawar belum optimal
Potensi wilayah yang sebagian besar perairan sangat tepat menjadi sentra produksi perikanan air tawar
4. Belum efektifnya tata niaga setiap komoditi bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.
Pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan basis ekonomi lokal yang menjadi komoditi unggulan. Hasil produknya menjadikan pusat agrobisnis dan agroindustri. Pengelolaan komoditi tersebut belum dikembangkan sehingga peningkatan nilai tambah komoditi melalui proses industri, pengangkutan, pemasaran dan distribusi yang kuat belum ada.

4.1.7. Pemanfaatan tata ruang yang berdimensi lingkungan hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan tata ruang antara lain:

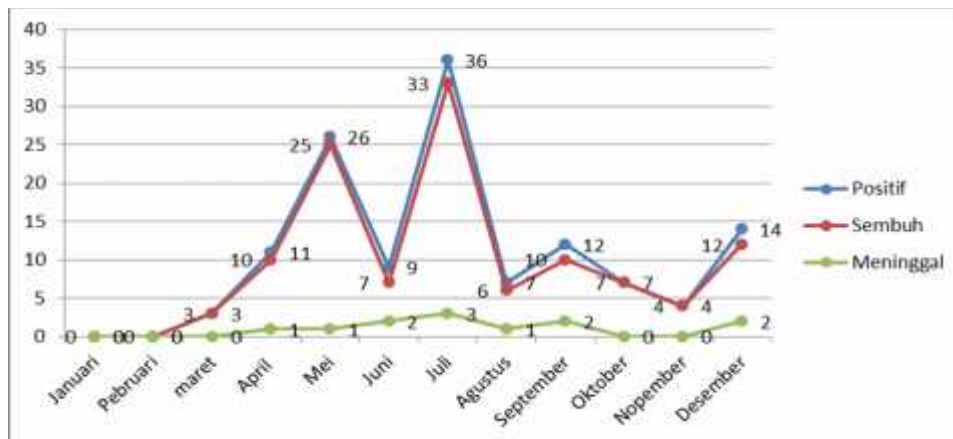
1. Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan
Perkembangan penduduk dan ekonomi berimplikasi pada ketersediaan daya dukung lingkungan untuk pemukiman dan ketahanan pangan. Prinsip keberlanjutan bermakna agar dilakukan kearifan dalam pengelolaan lingkungan sehingga tidak mengakibatkan bencana di masa datang. Perlu pengendalian alih fungsi lahan pertanian mke permukiman dan pertanian ke perkebunan
2. Masih terdapat pembukaan lahan dengan cara membakar, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan perkebunan.
3. Penurunan fungsi hutan sudah memasuki titik yang mengkhawatirkan terlihat ketika musim hujan dan musim panas gejala banjir dan kekeringan begitu cepat terjadi.
4. Terjadinya konversi lahan tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan.
5. Penanganan mitigasi bencana
Karakteristik wilayah topografi mendatar, berawa dan tanah penusunan alluvial lempeng memiliki potensi bencana banjir. Adanya kawasan perkebunan dan hutan yang luas pada lahan gambut berpotensi mudahnya terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini juga

didukung dengan kebiasaan masyarakat yang menggarap padi sonor dan pembukaan lahan perkebunan dengan membakar.

4.1.8. Merebaknya Penyebaran Pandemi Covid-19

4.1.8.1 Perkembangan Kasus Covid-19

Terjadinya penyebaran pandemi Corona Virus Diasese 2019 (*Covid-19*) yang melanda dunia juga menjadi permasalahan bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kasus *Covid-19* Kabupaten Ogan Komering Ilir sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 129 kasus dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,70 persen dan tingkat kematian mencapai 9,30 persen. Kasus *Covid-19* pertama kali terdeteksi di bulan Maret 2020 yaitu sebanyak 3 kasus dengan tingkat kesembuhan 100 persen. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



Sumber: Satgas Covid-19 Kabupaten OKI, tahun 2021.

Gambar 4.1

Jumlah Kasus *Covid-19* Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020

4.1.8.2 Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19

Penyebaran *Covid-19* telah mengakibatkan proses pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terganggu. Hal ini disebabkan oleh diterapkannya protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan sosial serta ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tercatat pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2018-2020

No	Indikator	Capaian menurut Tahun			
		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,11	5,08	5,19	0,24
2	Laju Inflasi	2,54	1,99	2,54	1,78
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,25	2,98	3,00	3,29
4	Indeks Gini Rasio	0,280	0,280	0,310	0,302
5	Angka Kemiskinan	14,66	15,01	13,72	14,73
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,03	66,96	67,88	66,82
7	Rata-rata lama Sekolah	7,30	7,03	7,50	7,04
8	Usia Harapan Hidup	68,40	68,41	68,60	68,61

Sumber: BPS Kabupaten OKI Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa capaian beberapa indikator tidak sesuai target RPJMD, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, angka kemiskinan, IPM, dan rata-rata lama sekolah. Capaian beberapa target indikator seperti tersebut diatas, akan sulit diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun akhir RPJMD. Apalagi tercatat bahwa kasus *Covid-19* di Kabupaten Ogan Komering Ilir tampak masih ada dan belum sepenuhnya hilang. Untuk itu, melalui perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 ini, beberapa target indikator makro seperti tersebut di atas perlu disesuaikan kembali sehingga target tersebut lebih rasional dan objektif untuk diwujudkan.

4.2. Isu Eksternal

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa datang. Untuk menentukan isu-isu strategis daerah dilakukan penelaahan terhadap permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan. Permasalahan dan peluang tersebut bisa berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah seperti dari dunia internasional, nasional, regional dan daerah perbatasan. Isu- isu strategis yang dapat menjadi

permasalahan dan peluang dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan dari hasil analisis diuraikan sebagai berikut:

1. Isu Internasional

a. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Implementasi MEA dimulai tanggal 31 Desember 2015, ASEAN telah menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini akan membuka peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi tidak saja oleh Pemerintah tetapi juga oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu meningkatkan kesiapan terutama mengedukasi masyarakat tentang peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk merebut pasar kerja lokal maupun pasar kerja regional. Isu terakhir yang mengemuka yaitu masuknya tenaga kerja Tiongkok ke pasar kerja Indonesia. Efek ini jika tidak disikapi dengan menyiapkan tenaga kerja terampil bahkan bersertifikat maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang cukup tinggi.

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada saat penyusunan Rencana Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024, maka dipandnag perlu melakukan review terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/0501/DLHP/B.I/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Review KLHS RPJMD Kabupaten/Kota. Tinjauan terhadap KLHS RPJMD adalah upaya melihat capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Review KLHS RPJMD difokuskan dengan melihat capaian indikator SDGs dengan tujuan untuk melihat sejauhmana realisasi target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024, dengan tetap pada prinsipnya yaitu untuk memberikan arah tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan

tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 220 indikator. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, beberapa indikator yang belum tercapai sampai dengan tahun 2019, antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun:
 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
 - Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
 - Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan Gizi yang baik:
 - Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. PPH: 92,5
Konsumsi Ikan: 54,5 kg/kpt/thn
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera:
 - Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
 - Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

- Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
 - Unmet need pelayanan kesehatan.
 - Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Menjamin Pendidikan yang Berkualitas:
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
 - Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan:
 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
 6. Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan:
 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
 - Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
 - Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern:
 - Bauran energi terbarukan.
 - Intensitas energi primer.
 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan:
 - PDB per kapita.

- Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
 - Persentase tenaga kerja formal.
 - Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
 - Tingkat setengah pengangguran.
 - Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
 - Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
9. Mengurangi Kesenjangan Inovasi:
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
10. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan:
- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
11. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan:
- Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
12. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
 - Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
13. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan:
- Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
 - Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
14. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan:
- Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.”

2. Isu Nasional

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2019-2024. Selain itu, tantangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memberdayakan tenaga sumber daya PNS yang dimiliki dengan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional serta distribusi PNS.

b. Pemberantasan Korupsi dan Penegakkan Hukum

Pemberantasan korupsi merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*

development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Desa

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam sasaran pembangunan nasional khususnya pembangunan ketahanan air, infrastruktur dan konektivitas terdapat sasaran pembangunan strategis nasional yang menjadi tugas daerah seperti: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 9,136 juta hektar menjadi 10 juta hektar, rasio elektrifikasi 81,5 – 96,6, kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 ha – 0 ha, akses air minum layak dari 70% - 100%, akses sanitasi layak dari 60,9% - 100%, kabupaten/kota yang dijangkau broadband 82% - 100%, jumlah dermaga penyeberangan 210 – 275, pangsa pasar angkutan umum perkotaan 23% - 32%.

Kebijakan Pemerintah yang perlu di sikapi antara lain percepatan pembangunan desa dan wilayah tertinggal, terpencil dan terluar. Paradigma baru membangun Indonesia dari pinggiran atau desa sangat rasional bila dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah penduduk miskin perdesaan. Kebijakan yang populis ini sudah mulai ditindaklanjuti sejak tahun 2015 dengan ditandai adanya dana desa dan alokasi dana desa. Dana tersebut akan terus bertambah sesuai dengan jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang keduanya masuk dalam struktur APBD. Dapat dipastikan setiap desa akan menerima sekitar Rp. 500 – Rp. 1 milyar per tahun

tergantung karakteristik desa masing-masing. Dana yang cukup besar tersebut harus tepat sasaran dan pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah diatur sebanyak 29 jenis layanan dasar yang harus dimuat dalam RPJMD, yaitu:

- 1) pendidikan anak usia dini;
- 2) pendidikan dasar;
- 3) pendidikan kesetaraan;
- 4) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 5) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 6) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 7) pelayanan kesehatan balita;
- 8) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 9) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 10) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 11) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 12) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 13) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 14) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 15) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- 16) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 17) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- 18) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- 19) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 20) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 21) pelayanan informasi rawan bencana;
- 22) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- 23) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 24) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- 25) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 26) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 27) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 28) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 29) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Saat penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 ke-29 jenis layanan dasar tersebut di atas menjadi komponen yang juga diukur selain dari indikator yang diatur oleh Permendagri No. 86 tahun 2017, SPM selanjutnya menjadi indikator yang diprioritaskan untuk dicapai oleh masing-masing urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada sisa tahun periode RPJMD Kabupaten Ogan Komeirng Ilir tahun 2019-2024.

e. Perubahan Nomenklatur Masing-Masing urusan Pemerintahan

Perubahan nomenklatur masing-masing urusan pemerintahan menjadi isu nasional sebagai dampak dari perubahan kebijakan nasional yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimana, melalui regulasi tersebut, nomenklatur Program pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah harus disesuaikan dan disusun ulang sehingga terjadi perubahan yang menysasar substansif RPJMD. Perubahan Program yang ada dalam RPJMD akan berdampak terhadap perubahan atas kegiatan, dan Sub kegiatan yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dimana selama ini baik

RPJMD dan Renstra-PD disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

3. Isu Regional

Penelaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Isu strategis dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan penurunan angka kemiskinan.
- b. Pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi.
- d. Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan.
- e. Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar.
- f. Optimalisasi reformasi birokrasi.
- g. Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan.
- h. Peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tukar petani.
- i. Pengembangan energi baru dan terbarukan pengembangan energi baru dan terbarukan.
- j. Pengembangan sosial budaya dan olahraga.

4. Isu Daerah Perbatasan

Penelaahan RPJMD Kabupaten Perbatasan Agar perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah lainnya maka, perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMD kabupaten perbatasan seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Timur.

Tabel 4.2.
Isu Strategis RPJMD Daerah Perbatasan

No	Kabupaten OKU Timur (2016-2021)	Kabupaten Ogan Ilir (2016-2021)	Kabupaten Banyuasin (2018-2023)
1.	Isu Strategis Daerah: 1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah , agar sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional 2. Peningkatan sinergi antara	Isu Strategis Daerah: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 3. Penyediaan layanan dasar berkualitas	Isu Strategis Daerah: 1. Pendidikan, Kesehatan dan dukungan ekonomi 2. Lingkungan 3. Jaminan Sosial 4. Tenaga Kerja

No	Kabupaten OKU Timur (2016-2021)	Kabupaten Ogan Ilir (2016-2021)	Kabupaten Banyuasin (2018-2023)
	aparat dan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban 3. Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) 4. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 5. Masih kurangnya aksesibilitas mutu pendidikan sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat 6. Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana kesehatanyang berpengaruh pada kurangnya aksesibilitas dan kuantitas pelayanan bidang kesehatan 7. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan daerah 8. Belum terkelolanya lingkungan hidup yang asridan lestari dalam rangka pengembangan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 9. Pemulihan ekonomi dampak Covid-19	4. Kedaulatan pangan 5. Percepatan penanggulangan kemiskinan 6. Pemerataan dan perluasan pendidikan 7. Peningkatan layanan kesehatan 8. Pelayanan adminstrasi publik 9. Penurunan angka pengangguran 10.Konektivitas pembangunan antar wilayah 11.Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 12.Pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana 13.Keamanan dan ketetiban umum 14.Pemulihan ekonomi dampak Covid-19	5. Kemiskinan 6. Insfrastruktur 7. Pemulihan ekonomi dampak Covid-19

Dari beberapa isu strategis kabupaten perbatasan dapat disimpulkan isu-isu utama pada masing-masing daerah perbatasan yang menjadi perhatian perencanaan pembangunan kedepan sebagai berikut:

- a. Isu Penyediaan Infrastruktur Dasar masyarakat
- b. Isu Pendidikan dan Kesehatan
- c. Isu Pengembangan Ekonomi Global
- d. Isu Kemiskinan
- e. Isu Peningkatan Tatakelola Pemerintahan
- f. Isu Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.
- g. Pemulihan ekonomi dampak Covid-19

5. Isu Pengembangan Kota

City branding diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pencapaian visi Kabupaten Ogan Komering Ilir. *City branding* merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan image sebuah kota atau daerah

beserta isinya (budaya, obyek wisata, produk barang, layanan jasa, dan sebagainya) di dalam pemikiran target pasar (*investor, tourist, talent, event*) kota dengan menggunakan slogan, *icon*, pameran dan berbagai media lainnya, agar kota tersebut dikenal secara luas baik regional maupun nasional. “*kayuagung kota lama wisata budaya*” sebagai *city branding* Kota Kayuagung merupakan *trigger* untuk peningkatan perekonomian kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya Kota Kayuagung. Kota wisata budaya ini dilatarbelakangi oleh keberadaan rumah dan pemukiman tua yang masih terjaga.

Penataan Kota Kayuagung sebagai pusat pemerintahan perlu dilakukan seiring dengan dilaksanakannya pembangunan jalan tol ruas Pematang Panggang – Kayuagung dan Kayuagung – Palembang - Betung yang memberikan dampak terhadap pengembangan Kota Kayuagung dibidang permukiman, perdagangan dan jasa. Arus barang dan orang dengan kendaraan roda empat dari wilayah Sumatera ke Jawa dan sebaliknya sangat padat yang berimbas pada kebutuhan akan tempat makan dan tempat istirahat. Untuk itu perlu diperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan melakukan penataan Kota Kayuagung seperti lahan pemukiman, ketersediaan air bersih, energi dan sanitasi.

4.3. Isu Tata Ruang dan Lingkungan

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Berdasarkan rumusan strategi pengembangan wilayah, struktur ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan pada penguatan fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.
Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan

No	Kecamatan	Pusat Pelayanan	Hirarki	Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kayuagung	10 Kel dan 2 Desa	PKW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√
2	Lempuing	4 Desa	PKL		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
3	Tulung Selapan	1 Kel dan 3 Desa	PKLp		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	
4	Lempuing Jaya	1 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
5	Mesuji	2 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		√	
6	Sungai Menang	1 Desa	PPK		√			√		√			√	√	√	√		√	
7	Mesuji Makmur	1 Desa	PPK		√		√	√		√			√	√	√	√		√	
8	Mesuji Raya	3 Desa	PPK		√		√	√		√			√	√	√	√		√	
8	Cengal	1 Desa	PPK		√		√	√		√			√	√	√	√		√	
10	Pedamaran	8 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	Pedamaran Timur	1 Desa	PPK		√		√	√		√			√	√	√	√		√	
12	Tanjung Lubuk	1 Kel dan 1 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	
13	Teluk Gelam	4 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
14	SP. Padang	4 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	
15	Jejawi	2 Desa	PKLp		√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	
16	Pampangan	1 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
17	Pkl Lampam	1 Desa	PPK		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
18	Air Sugihan	1 Desa	PPK		√	√	√	√		√			√	√	√	√	√		

Keterangan :

Pemerintah
Kabupaten (Ibukota
Kabupaten)
Pemerintah Lokal
(Ibukota Kecamatan)
Distribusi dan
Koleksi
Industri (UMKM)
Perdagangan, Kios dan
Los Pasar

6. Jasa Persewaan dan Perbankan
7. Jasa Koperasi Unit Desa
8. Jasa Hukum dan Konsultasi
9. Pariwisata dan Jasa Penginapan

11. Kesehatan
12. Listrik
13. Telekomunikasi
14. Irigasi

16. Air Limbah

15. Air Minum Bersih

PKW : Pusat Kegiatan Wilayah ,
PKLp : Pusat Kegiatan Lokal Promosi,

PKL : Pusat Kegiatan Lokal,
PPK: Pusat Pelayanan Kawasan,

Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Program RPJMD
1.	Sistem Perdesaan dan Perkotaan	Sistem Perdesaan dan Perkotaan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Sesuai RTRW
			Program pembangunan saluran darainase dan gorong-gorong	Sesuai RTRW
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	Sesuai RTRW
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Sesuai RTRW

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Program RPJMD
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Sesuai RTRW
			Program pengendalian banjir	Sesuai RTRW
			Program pengembangan perumahan	Sesuai RTRW
			Program lingkungan sehat perumahan	Sesuai RTRW
2.	Rencana jaringan prasarana wilayah	Sistem jaringan transportasi	Program pembangunan terminal	Sesuai RTRW
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Sesuai RTRW
			Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Sesuai RTRW

2. Telaah Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berdasarkan rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5.
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
1	Rencana Kawasan lindung	Rencana Kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Sesuai prioritas
			Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Sesuai prioritas
			Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	Sesuai prioritas
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai prioritas
2	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program pengembangan dan peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> seluas 551.510,45 Ha	Sesuai prioritas
			Program pengembangan tanaman hutan kota	Sesuai prioritas
			Program terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Sesuai prioritas

4.4. Analisis KLHS

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya

tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Tabel 4.6.
Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup (lahan masih cukup luas, ITL 33,2)	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan pada wilayah tertentu
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Rentan	Program terkait dengan lingkungan hidup	Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3	Kinerja layanan/jasa Ekosistem	Kurang	Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem pada jasa penyediaan (pangan, air bersih, energi), pengaturan (kualitas lingkungan) , budaya (tempat tinggal) dan pendukung.
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air, lahan dan hutan mineral)	Cukup	Program-program Pembangunan layanan kebutuhan dasar	Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien sesuai dengan jumlah penduduk, kebutuhan konsumsi dan pelestarian lingkungan hidup
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Rentan	Program-program Pembangunan infrastruktur dan pertanian	Perangkat Daerah memperhatikan tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Rentan	Program-program Pembangunan pertanian dan lingkungan hidup	Perangkat Daerah memperhatikan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7	Ketersediaan tenaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik di pinggiran dan wilayah pesisir
8	Pemerataan air minum	Kurang	Pembangunan IPA dan jaringan air minum	Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan air minum di wilayah sulit air dan pesisir

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
9	Pengelolaan sampah	Kurang	Pembangunan TPA dan sarana pendukung	Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan TPA di setiap kecamatan dan sarana pengangkutan dan pengolahan

Hasil Penelaahan KLHS yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana program Pembangunan Daerah yaitu:

1) Daya dukung sumber daya air

Ketersediaan sumber daya air sesuai perhitungan pada tahun 2017 sebanyak 14.694.809.967,92 m³/tahun. Dengan menggunakan kriteria WHO kebutuhan air sebesar 1.000 – 2.000 m³/orang/tahun pada tahun 2017 adalah 809.203 jiwa x 1500m³/orang/tahun yaitu sebesar 1.213.804.500 m³/tahun, jadi surplus pemenuhan kebutuhan air 13.481.003.467 m³/tahun. Proyeksi kebutuhan air di Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.
Proyeksi kebutuhan air di Kabupaten OKI

Tahun	Proyeksi jumlah penduduk (jiwa)	Koefisien kebutuhan air 1000-2000m ³ /org/th)	Proyeksi kebutuhan air (m ³ /tahun)
2017	809.203	1.500	1.213.804.500
2023	876.482	1.750	1.533.843.500
2030	962.076	2.000	1.924.152.000

Sumber : Analisa KLHS

2) Daya dukung sumber daya lahan untuk penyediaan pangan

Potensi lahan untuk penyediaan pangan berdasarkan identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkait pengediaan pangan menunjukkan potensi ketersediaan dan kemampuan paling tinggi berada di Kecamatan Mesuji Makmur. Pada tahun 2017 produksi padi sebanyak 819.206 ton, dengan luas panen 165.347 hektar atau nilai rata-rata produktivitas adalah 4,5 ton/hektar. Wilayah penghasil padi adalah Kecamatan Lempuing, Lempuing jaya,

Air Sugihan dan Tanjung Lubuk. Berdasarkan data berikut menunjukkan kondisi yang berlebih (surplus) dimana jumlah produksi lebih banyak dari kebutuhan.

Tabel 4.8.
Ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten OKI

Tahun	Proyeksi jumlah penduduk (jiwa)	Produksi padi	Produksi beras (62,74% padi)	Kebutuhan pangan 114 kg/orang/tahun (jumlah penduduk x 0,114)
	(jiwa)	(ton/tahun)	(ton/tahun)	(ton/tahun)
2014	776.263	568.043	356.390	88.493,98
2015	787.513	624.002	391.499	89.776,48
2016	798.482	752.378	472.042	91.026,95
2017	809.203	819.206	513.970	92.249,14
2018	819.570	810.570	508.552	93.430,98
2019	829.800	748.273	469.466	94.597,20
2020	839.625	849.555	533.010	95.717,25

Isu-isu lingkungan hidup yang perlu di perhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya air
 - a. Kondisi sawah terendam di sebagian wilayah mengakibatkan gagal tanam
 - b. Kurangnya ketersediaan air bersih pada wilayah pesisir
 - c. Penurunan kualitas air sungai pada saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan.
2. Konsumsi sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan pangan
 - a. Terhambatnya kegiatan pertanian akibat kondisi sawah terendam saat musim penghujan
 - b. Kesulitan membuka dan mengolah lahan karena adanya larangan membakar
 - c. Nilai jual hasil pertanian dan perkebunan rendah
 - d. Terbatasnya pupuk untuk pertanian, terutama pupuk subsidi pemerintah
3. Sebagian wilayah belum terhubung akses jalan darat
4. Timbulan sampah yang belum terkelola

- a. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah (retribusi sampah dan pengelolaan swasta)
- b. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah seperti: lahan, TPS, TPS 3R, TPA, angkutan sampah, pusat daur ulang dan lainnya.
5. Potensi kebakaran lahan dan hutan terkait kondisi rawan dan bergambut.
6. Kegiatan penambangan pasir sungai dan galian tanah.
7. Menurunnya kondisi pariwisata.
 - a. Berdasar peta indikatif DDDT LH jasa ekosistem budaya rekreasi dan estika alam memiliki nilai indeks yang rendah. Potensi wisata budaya, alam dataran rendah dan rawa seperti: Danau Teluk Gelam, Danau Teloko, Bulit Batu, Pantai Tanjung Menjangan, Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, Kawasan Mangrove dan Pulau Maspari
8. Peran serta swasta/perusahaan terhadap pembangunan daerah melalui CSR PKBL

4.5. Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil pemilahan dan kriteria terkait isu-isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka **isu-isu strategis** yang paling menentukan dalam penyusunan visi dan misi lima tahun ke depan yaitu tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik
 - a. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi aparatur untuk perbaikan kinerja birokrasi sesuai dengan tuntutan pelayanan publik.
 - b. Belum optimalnya penggunaan IT (*e-goverment*) dalam menunjang peningkatan pelayanan publik.
 - c. Pengembangan wilayah
 Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan upaya memperpendek rentang kendali. Luasnya wilayah dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan

pembangunan daerah, untuk itu perlu dilakukan kajian pengembangan wilayah kecamatan dan desa. Disamping itu perlu dilakukan kajian pendetilan terhadap kemungkinan pengembangan wilayah kecamatan dan desa.

2. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
 - a. Peningkatan dan pengembangan transportasi darat (Infrastruktur Jalan dan Jembatan) dan sungai (perahu dan dermaga) dalam mendukung pengembangan wilayah.
 - b. Pengembangan Infrastruktur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
 - a. Pemenuhan ketersediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Distribusi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama pada daerah wilayah perairan.
4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
 - a. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
 - b. Distribusi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan terutama pada daerah wilayah perairan.
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (dengan memperhatikan ketersediaan lahan, bibit unggul dan pupuk bagi petani), sektor peternakan, perkebunan dan perikanan.
 - b. Pengembangan sektor hilir (*agroindustri*) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas unggulan.
 - c. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal seperti Pengembangan pusat pertanian tanaman pangan dan hortikultura, karena potensi lahan yang cukup luas dijadikan sebagai salah satu daerah sentra beras dan buah.

- d. Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha masyarakat.
 - e. Upaya Pemulihan Ekonomi akibat Dampak *Covid-19*, yaitu: mempertahankan keunggulan ketahanan pangan dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta program padat karya.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- a. Pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
 - b. Isu global yang tidak kalah pentingnya adalah program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.
 - c. Mitigasi bencana
Ancaman bencana banjir dari meluapnya sungai yang ada dan ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan dari pengolahan lahan pertanian sawah lebak dan pembukaan lahan perkebunan.
7. Menciptakan kondisi Ketentraman dan ketertiban masyarakat
Mencegah konflik sosial SARA, politik dan ekonomi, potensi konflik penguasaan lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat.

4.6. Penyelarasan Isu Strategis

Pelaksanaan otonomi daerah bukanlah membagi ruang dan pemerintahan dengan memisahkan pemerintahan kabupaten/kota dengan pemerintahan provinsi maupun nasional melainkan program pembangunan kabupaten/kota wajib mendukung program pembangunan provinsi maupun nasional. Bertitik tolak dari hal tersebut maka dipandang perlu dilakukan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan nasional. Penyelarasan RPJMD kabupaten dan kota meliputi: Penyelarasan Isu Strategis, Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Penyelaraan Program Prioritas Pembangunan

Daerah, Penyelarasan Pendanaan Program Pembangunan Daerah serta Penyelarasan lokasi Pelaksanaan kegiatan Strategis Nasional.

Penyelarasan isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Isu Strategis Nasional sesuai Agenda Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 di sajikan dalam tabel 4.9. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah di bawah ini:

Tabel 4.9 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

No.	Isu Strategis		
	RPJMD Kab OKI 2019-2024	RPJMD Provinsi 2019-2024	RPJMN 2020-2024
1	Tata kelola pemerintahan yang baik: - Kinerja birokrasi masih perlu perbaikan sesuai dengan tuntutan pelayanan publik. - Belum optimalnya penggunaan IT dalam menunjang peningkatan pelayanan publik. - Penerapan SPM belum optimal.	- Pengembangan Sumber Daya Manusia - Optimalisasi reformasi birokrasi	- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah: - Masih perlunya peningkatan dan pengembangan Transportasi darat (infrastruktur Jalan dan Jembatan) dan sungai (perahu dan dermaga) dalam mendukung pengembangan wilayah yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. - Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidaktersediaan prasarana dan sarana infrastruktur	- Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar	- Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3	Peningkatan kualitas layanan pendidikan: - Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas; - Belum optimalnya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	- Pengembangan sumber daya manusia bidang Pendidikan	- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4	Peningkatan kualitas layanan kesehatan - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum memadai. - Rasio tenaga dokter dan tenaga medis belum sesuai standar pelayanan kesehatan terutama pada daerah dengan infrastruktur sulit.	- Pengembangan sumber daya manusia bidang Kesehatan	- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Isu Strategis		
	RPJMD Kab OKI 2019-2024	RPJMD Provinsi 2019-2024	RPJMN 2020-2024
5	Pengembangan ekonomi kerakyatan: - Produksi dan produktivitas pertanian (dengan memperhatikan ketersediaan lahan, bibit unggul dan pupuk bagi petani), peternakan, perkebunan dan perikanan belum optimal. - Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas unggulan. - Perlu pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal dan terbarukan antara lain seperti Pengembangan Pusat Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, karena potensi lahan yang cukup besar dan ke depan sebagai salah satu daerah sentra beras. - Belum tersedianya upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi - Tingkat kemandirian Koperasi dan UKM masih rendah. - Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD. - Melambatnya upaya Pemulihan Ekonomi akibat Dampak <i>Covid-19</i>.	- Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan - Peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tukar petani - Percepatan penurunan angka kemiskinan - Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi - Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi	- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan - Mengembangkan wilayah untuk untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

No.	Isu Strategis		
	RPJMD Kab OKI 2019-2024	RPJMD Provinsi 2019-2024	RPJMN 2020-2024
6	Pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan: - Pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan - Isu global yang tidak kalah pentingnya adalah program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan	- Pengembangan energi baru dan terbarukan pengembangan energi baru dan terbarukan - Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan	- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan iklim.
7	Menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat: - Implementasi nilai – nilai agama dalam kehidupan masih rendah dan terkesan terkontaminasi budaya negatif asing.	- Pengembangan sosial budaya dan olahraga	- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Bab V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi Pemerintahan

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara telah ditetapkan Negara Republik Indonesia, maka bangsa Indonesia telah meletakkan dasar sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa, menegakkan kedaulatan martabat dan kebanggaan bangsa. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia disebutkan adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dengan Misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap bangsa dan Membeirkan Rasa Amana pada seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut di atas, Presiden memberikan 5 (lima) arahan yaitu:

- 1) Pembangunan SDM;
- 2) Pembangunan Infrastruktur;
- 3) Penyederhanaan Regulasi;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi;
- 5) Transformasi Ekonomi.

Selanjutnya dalam melaksanakan arahan Presiden tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya menyelaraskan visi dan misi daerah dengan visi dan misi provinsi maupun nasional. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Perumusan visi kabupaten mengacu kepada dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan dokumen perencanaan jangka panjang daerah agar terjaga keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah **Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut, pada periode lima tahun ketiga ditetapkan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 adalah : **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Sementara itu Visi Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: ***“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”***.

5.2. Arahan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir

5.2.1. Visi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar Kabupaten Ogan Komering Ilir dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, visi pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah:

“Kabupaten Ogan Komering Ilir Mandiri, Sejahtera, dan Beriman”.

5.2.2. Misi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 - 2025

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten tersebut di atas ditetapkan melalui 5 misi pembangunan kabupaten sebagai berikut:

1. Menjamin kualitas pelayanan infrastruktur dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah;

Pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi salah satu ciri utama pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam tahun mendatang untuk menyelaraskan kontradiksi: timur - barat, rawa - darat, pertanian - perkebunan, dan kontradiksi lainnya dengan perbaikan kualitas pelayanan infrastruktur secara proporsional guna menunjang roda pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;

Lingkungan hidup sebagai media kegiatan sosial dan ekonomi penduduk perlu dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan guna menjamin tersedianya lingkungan hidup yang berkualitas bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

3. Memberdayakan ekonomi lokal yang berdaya saing;
Ekonomi lokal yang berdaya saing merupakan kekuatan utama daerah dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kekuatan ekonomi lokal juga merupakan wujud sumber daya manusia yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, dan berpendidikan;
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset utama pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sumber daya manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, dan berpendidikan.
5. Meningkatkan kemampuan birokrasi dan kapasitas keuangan daerah;
Peningkatan kemampuan birokrasi dilakukan untuk meningkatkan daya dukung dan kemampuan dalam menyelenggarakan pembangunan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, dengan dukungan kapasitas keuangan daerah yang sehat dan kuat.

Tahap ke IV (2019-2024) pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir dititik beratkan pada memantapkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan tingginya indeks pembangunan manusia, rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran, memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan terpercaya, mempertahankan keseimbangan pembangunan antar wilayah, memantapkan kapasitas pelayanan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan daya saing wilayah dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang asri dan lestari.

5.3. Visi dan Misi

5.3.1. Visi

Untuk melaksanakan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2005-2025 tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi

pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 -2025, diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju suatu kehidupan masyarakat yang lebih baik. Maka visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 adalah:

***"Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang lebih Maju,
Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa "***

Visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini menjadi cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Komitmen Bupati Ogan Komering Ilir yaitu *Semangat membangun dan melayani dari desa menuju OKI Mandira*. Adapun Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

OKI Lebih Maju berlandaskan Iman dan Taqwa;

Kondisi Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berwibawa dan mampu memberikan pelayanan kepada publik baik administrasi kependudukan maupun infrastruktur transportasi, listrik, air bersih sanitasi dan telekomunikasi sehingga berkemampuan mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan ciri identitas

masyarakat Ogan Komering Ilir yang majemuk, saling menghargai dan menghormati dalam bingkai keluarga besar masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang serasi dan harmonis berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

OKI Mandiri berlandaskan Iman dan Taqwa;

Kemampuan Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan), tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat lebih beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

OKI Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa;

Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan menurunnya angka pengangguran, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan daya beli sehingga memiliki penghidupan yang layak/seimbang jasmani dan rohani, berdaya saing, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang ramah lingkungan serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, memiliki integritas dan moralitas sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih maju dan mandiri, berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.3.2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan

6. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman.

Dari enam misi yang ditetapkan dapat dijelaskan target dan uraian yang akan dicapai untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa

Target yang akan dicapai pada misi 1 adalah:

- Membentuk aparatur pemerintah yang professional
Menerapkan standar berupa skill, kemampuan, dan semangat melayani yang tinggi terhadap masyarakat untuk kualitas kinerja yang lebih baik.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Mengembangkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan penerapan layanan berbasis information technology.
- Meningkatkan birokrasi yang bersih, jujur dan bertanggungjawab
Pemerintahan yang baik dan bersih, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan hukum dan kerangka kebijakan bagi tumbuhnya aktivitas usaha, dengan menciptakan kredibilitas publik yang baik maka akan tercipta pemerintahan yang berwibawa.

Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana

Target yang akan dicapai pada misi 2 adalah:

- Meningkatkan pembangunan transportasi darat: jalan kabupaten, jalan antar desa, jalan poros, jalan akses perkebunan secara merata dan transportasi sungai (kapal, perahu, dermaga dan tambatan perahu).
- Pembangunan jaringan listrik perdesaan bagi seluruh desa.
- Meningkatkan pasokan air bersih rumah tangga sehingga seluruh desa mendapatkan akses air bersih.
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air limbah rumah tangga yang layak.
- Pembangunan jaringan irigasi teknis dan non teknis dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

- Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perekonomian masyarakat.
- Melakukan penataan Kota Kayuagung
- Master plan transportasi pesisir pantai timur.

Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Target yang akan dicapai pada misi 3 adalah:

- Menyempurnakan kualitas pendidikan untuk masyarakat.
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan).
- Meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara menaikkan standar kompetensi guru atau pengajar.
- Pemerataan tenaga pendidik pada wilayah terpencil.
- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan.
- Menjamin ketersediaan obat-obatan di rumah sakit atau di puskesmas.
- Membangun puskesmas rawat inap di beberapa titik strategis dari masing-masing kecamatan.
- Penempatan tenaga kesehatan; dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga analis, apoteker, dan tenaga ahli gizi di fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan poskesdes)

Misi 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Target yang akan dicapai pada misi 4 adalah:

- Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Mengembangkan industri pengolahan hasil bumi (hilirisasi) dan industri hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Memfasilitasi dan mengakomodir pelatihan keterampilan di tiap-tiap kecamatan dengan memberdayakan unit-unit sektor usaha kecil yang berbasis *home industry*.

- Pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan dan pembangunan zona-zona industri yang berdasarkan zona/ cluster ekonomi, *one village one product*.
- Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan hasil sumber daya alam, usaha pariwisata, dan usaha pertambangan mineral non logam.
- Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelatihan keterampilan dengan memaksimalkan keberadaan BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada.
- Memadukan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan mendorong peningkatan pendapatan keluarga miskin dan mengurangi pengeluarannya yang fokus pada Basis Data Terpadu (BDT).

Misi 5 Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan

Target yang akan dicapai pada misi 5 adalah:

- Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan perubahan iklim.
- Melaksanakan pembangunan fisik yang berbasis tatar uang dengan memperhatikan ekosistem.
- Melaksanakan pembangunan fisik dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Kesiapsiagaan/mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana alam (kebakaran hutan, lahan dan kebun serta bencana banjir dan kekeringan) serta kerusakan alam yang disebabkan manusia.

Misi 6 Menciptakan kehidupan sosial budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman.

Target yang akan dicapai pada misi 6 adalah:

- Mencegah terjadinya konflik sosial berlatar belakang SARA, ekonomi dan politik, konflik antar umat beragama maupun konflik antar anggota masyarakat.
- Memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- Menghidupkan kebudayaan lokal untuk mencegah masuknya budaya asing yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

- Menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dari enam misi Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dapat dilihat keselarasan dengan Nawacita adalah sebagai berikut:

1. Misi ke I Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Nawacita kedua yaitu ; membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya dan Nawacita keempat menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi dan bermartabat dan terpercaya.
2. Misi ke II Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan.
3. Misi ke III Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.
4. Misi ke IV Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Nawacita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.
5. Misi ke V Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan.
6. Misi ke VI Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Nawacita kesembilan yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keenam misi Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diselaraskan dengan misi Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Misi ke I Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Misi ketiga Provinsi Sumatera Selatan yaitu; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif

2. Misi ke II Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan dengan Misi keempat Provinsi Sumatera Selatan yaitu Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
3. Misi ke III Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Misi kedua Provinsi Sumatera Selatan yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas
4. Misi ke IV Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Misi Pertama Provinsi Sumatera Selatan yaitu Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan
5. Misi ke V Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Misi keempat Provinsi Sumatera Selatan yaitu Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
6. Misi ke VI Kabupaten Ogan Komering Ilir selaras dengan Misi kelima Provinsi Sumatera Selatan yaitu ; Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

5.4. Tujuan dan Sasaran

5.4.1 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dari Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Terciptanya suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik.

Untuk mengukur keberhasilan dalam lima tahun, maka setiap tujuan diukur dengan indikator tujuan. Mengacu pada hasil evaluasi dan pengendalian capaian target RPJMD tahun 2021, maka dalam perubahan RPJMD ini, ada beberapa target diadakan penyesuaian sehingga dari masing-masing indikator tujuan dan target yang ingin dicapai disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan

Visi “Terwujudnya Masyarakat OKI yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”				
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	1) Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggung jawab	1) Indeks reformasi birokrasi	≥ 56

2.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana	2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata	2) Indeks pelayanan infrastruktur dasar	0,75
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	3) Indeks pembangunan manusia	71,28
				68,32
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	2	3	4	5
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	4) Pertumbuhan ekonomi	5,5%
				5,05%
5.	Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan	5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	5) Indeks kualitas lingkungan hidup	62
6.	Menciptakan kehidupan sosial budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman	6) Menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik	6) Kasus konflik sosial SARA, politik, dan ekonomi	Tidak ada

5.4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Langkah-langkah perumusan sasaran pelayanan pemerintah daerah:

- 1) Mereview pernyataan tujuan RPJMD yang telah disusun.
- 2) Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.
- 3) Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi pemerintah daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

- 4) Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan, misi dan visi daerah serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
4. Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata
5. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat
6. Meningkatnya mutu pendidikan
7. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat
8. Meningkatnya mutu layanan kesehatan
9. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak
10. Meningkatkan daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
11. Meningkatnya pemberdayaan koperasi
12. Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
13. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
14. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)
15. Menurunnya angka kemiskinan
16. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
17. Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan
18. Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai
19. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Untuk mengukur kinerja sasaran digunakan indikator sasaran. Adapun masing-masing indikator sasaran dan target yang ingin dicapai dan beberapa target indikator sasaran telah diadakan penyesuaian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggung jawab	1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B
			2) Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	ST
			3) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
			4) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3
		2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5) Indeks kepuasan masyarakat	75%
		3) Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik	6) Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	60%
			7) SPBE	5,0
2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata	4) Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata	8) Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75%
			9) Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	75%
			10) Persentase rumah tangga yang terlayani sarana dan prasarana air limbah yang layak	72,30%
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	5) Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat	11) Angka melek huruf	99%
			12) Rata-rata lama sekolah	8 tahun
				7,08 tahun
		6) Meningkatnya mutu pendidikan	13) Angka kelulusan SD/MI	100%
			14) Angka kelulusan SMP/MTs	100%
		7) Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	15) Angka Usia harapan Hidup	70 tahun
				69,41 tahun
		8) Meningkatnya mutu layanan kesehatan	16) Rasio fasilitas kesehatan terkreditasi baik	100%
9) Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	17) Indeks pemberdayaan gender (IDG)	71,70		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	10) Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	18) Nilai tukar petani	100%
		11) Meningkatnya pemberdayaan koperasi	19) Persentase koperasi yang aktif	86%
		12) Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	20) Indeks gini	0,30
				0,30
		13) Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	21) Tingkat pengangguran terbuka	2,00%
		14) Meningkatnya PAD	22) Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	2,77%
				11%
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	16) Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	23) Angka kemiskinan	9,95%
				13,61%
			24) Indeks tutupan lahan	54,68
		17) Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	25) Indeks kualitas air	52,90
			26) Indeks kualitas udara	83,02
			27) Persentase penurunan titik kebakaran (<i>hot spot</i>)	95%
		18) Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	28) Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat	0
		19) Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	29) Angka PMKS yang mendapat layanan	10%

Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Sasaran

Visi: “Terwujudnya Masyarakat OKI yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa											
1.	Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggung jawab		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	55,95	55,95	55,98	55,98	56,00	56,00	56,00
	1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	B
			Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Nilai	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
			Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Tingkat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	70	70	71	72	73	74	75
		1.1.3	Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	%	55	55	56	57	58	59
				SPBE	tingkat kematangan				3,8	4,2	4,6
Misi II Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana											
2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata		Indeks pelayanan infrastruktur dasar	Indeks	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	0,75
	2.1.1	Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	70,46	70,46	71	72	73	74	75
			Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	%	64,26	65	67	69	71	73	75
			Persentase rumah tangga yang terlayani sarana dan prasarana air limbah yang layak	%					65,58	68,86	72,30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Misi III Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan												
3.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia		Indeks pembangunan manusia	Indeks	66,18	67,03	67,88	68,73	69,58	70,43	71,28	
			Target Baru	Indeks					67,60	67,93	68,32	
	3.1.1	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat	Angka Melek huruf	%	97,69	98	98	99	99	99	99	
			Rata-rata lama sekolah Target Baru	Tahun	7,25	7,3	7,5	7,6	7,7	7,8	8	
				Tahun					7,06	7,07	7,08	
	3.1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka kelulusan SD/MI	%	98,02	98,4	98,8	99,2	99,6	100	100	
			Angka kelulusan SMP/MTs	%	99,88	99,9	99,9	100	100	100	100	
	3.1.3	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	Angka Usia harapan Hidup	Tahun	68,04	68,4	68,8	69,2	69,5	69,8	70	
			Target Baru	Tahun					69,01	69,21	69,41	
	3.1.4	Meningkatnya mutu layanan kesehatan	Rasio fasilitas kesehatan terkreditasi baik	%	85	88	91	94	97	99	100	
3.1.5	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,31	60,54	62,77	65,01	67,24	69,47	71,70		
Misi IV Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi												
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat		Pertumbuhan ekonomi	%	5,03	5,11	5,19	5,27	5,34	5,42	5,5	
			Target baru	%					3,09	4,12	5,05	
	4.1.1	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Nilai tukar petani	%	92,42	94	95	96	97	98	100	
	4.1.2	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	83	84	84	85	85	86	86	
	4.1.3	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Indeks gini	Indeks	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	
Target Baru			Indeks					0,31	0,31	0,30		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4.1.4	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,45	3,25	3,00	2,75	2,50	2,25	2,00
			Target Baru	%					3,30	2,98	2,77
	4.1.5	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	10,52	10,55	10,6	10,7	10,8	10,9	11
	4.1.6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	15,6	14,66	13,72	12,78	11,83	10,89	9,95
			Target Baru	%					14,17	13,89	13,61
Misi V Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan											
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	64	64	63	64,21	64,64	65,06	65,49
	5.1.1	Menurunnya pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup	Indeks tutupan lahan	Indeks	55,97	55,97	54	49,92	51,51	53,10	54,68
			Indeks kualitas air	Indeks	65,38	64	64	52,60	52,70	52,80	52,90
			Indeks kualitas udara	Indeks	99,06	99,06	98	82,72	82,82	82,92	83,02
	5.1.2	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	%	85	86	87	89	91	93	95
Misi VI Menciptakan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Religius, Tertib, Aman dan Nyaman											
6.	Menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik		kasus konflik sosial SARA, politik, dan ekonomi	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.1	Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Angka PMKS yang mendapat layanan	%	8	10	10	10	10	10	10



Bab VI

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi atau cara yang digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi pada hakikatnya merupakan komitmen pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Strategi memuat program-program yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program prioritas pembangunan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan juga akan mengatur urutan satu strategi dengan strategi lainnya selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan. Dalam menentukan strategi pembangunan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota wajib mengarahkan strategi pembangunannya pada kebutuhan dasar

rakyat untuk penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pertama pemenuhan kebutuhan dasar dan kedua menciptakan landasan pembangunan yang kuat untuk menopang visi dan misi Kabupaten.

Terkait dengan kewajiban Kabupaten/Kota menerapkan urusan wajib layanan dasar diatur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan wajib layanan dasar meliputi: 1) urusan pendidikan, 2) urusan kesehatan, 3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, 5) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) urusan sosial.

2) Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ 2016 perihal Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimaksudkan untuk menciptakan layanan yang simpel, efektif dan efisien, diarahkan untuk mendukung sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Urgensi penataan struktur organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembagian urusan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Setelah dua tahun penataan organisasi berjalan, perlu dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan apakah telah efektif dan efisien atau belum. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Banyaknya jumlah perangkat daerah membebani anggaran untuk

operasional perangkat daerah dan tunjangan pejabat struktural. Untuk itu perlu diciptakan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien agar alokasi anggaran lebih besar dapat diarahkan kepada belanja langsung pelayanan publik.

3) Sinkronisasi Antar Urusan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, maka dalam RPJMD sangat perlu dilakukan sinergi antar urusan Pemerintahan Daerah. Sinergi antar urusan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 pada dasarnya mengacu pada konsep bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditopang oleh sinergi kebijakan, program prioritas dan hasil dari semua urusan dan dukungan para pemangku kepentingan.

Dalam kerangka keterpaduan antar urusan, maka prinsip-prinsip keterpaduan menjadi landasan berpijak bagi seluruh pembangunan urusan pemerintahan daerah. Keterpaduan dilakukan dengan struktur kriteria sebagai berikut : (1) Keterpaduan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan urusan; (2) Keterpaduan tidaklah mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan, dan (3) Keterpaduan dilakukan pada urusan terkait, dan diprioritaskan pada urusan penting yang terkait dengan isu-isu pembangunan.

4) Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Penanggulangan Kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral, namun harus dilakukan secara terpadu melalui lintas perangkat daerah. Penyusunan program sektoral dalam penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2019-2024. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka penanggulangan kemiskinan lima tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan:

1. Fokus mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan keluarga penduduk miskin yaitu kepemilikan identitas diri, penyediaan infrastruktur dasar, akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan dan sumber mata pencaharian.
2. Fokus pelaksanaan program pada lokasi banyak ditemukan penduduk miskin seperti di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kota Kayuagung dan Lempuing Jaya.
3. Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dengan penyusunan program lintas perangkat daerah dan fokus menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial.

5) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Program prioritas lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi dicapai apabila ketergantungan dengan dana transfer dari pusat semakin berkurang; hal ini dapat terjadi bila pendapatan asli daerah meningkat secara proporsional.

Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan, maka peningkatan pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui strategi lintas urusan/lintas perangkat daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah diantaranya dilakukan dengan :

a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. Intensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain :

- 1) Pendaftaran/pendataan, pemutakhiran dan konfirmasi data pajak daerah.
- 2) Pengelolaan sistem pajak daerah.
- 3) Implementasi aplikasi simda pendapatan.
- 4) Intensifikasi penagihan/pemungutan PAD.
- 5) Pelayanan dan penertiban pajak daerah.
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan aspek kelembagaan pengelola pendapatan asli daerah.

Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain:

- 1) Penyusunan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
 - 2) Sosialisasi dan publikasi pajak dan retribusi daerah.
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen.
- c. Menumbuhkan kembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah termasuk mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah Daerah yang *profitable*.

6) Arahan Pengembangan Wilayah

Mengacu pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, wilayah kecamatan dan desa memiliki peran yang sangat strategis sehingga diperlukan strategi pengembangan wilayah pada masing-masing kecamatan dan desa berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada.

Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan beserta pembiayaannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan pedoman pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menyusun dan melaksanakan program 20 (dua puluh) tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan.

RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan tahun 2013 sehingga ketaatan atas implementasi perda ini belum terukur. Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan memiliki infrastruktur wilayah yang memadai, dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di atas, meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan untuk pemerataan pelayanan di wilayah kabupaten, meliputi:
 - memantapkan Kecamatan Kayuagung (Ibukota Kabupaten) sebagai PKW;
 - memantapkan Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing) sebagai PKL; dan
 - mempromosikan Ibukota Kecamatan Tulung Selapan dan Ibukota Kecamatan Jejawi sebagai PKLp.

- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana untuk membuka akses seluruh wilayah meliputi:
- memantapkan jaringan jalan lintas timur Sumatera sebagai jaringan jalan arteri primer, termasuk pembangunan jalan bebas hambatan ruas Kayuagung - Palembang via Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Jejawi;
 - membangun jalan lingkaran timur Sumatera Selatan (Lampung– Sungai Menang – Cengal – Tulung Selapan – Riding - Air Sugihan – Banyuasin - Tanjung Api-Api);
 - membangun, mengembangkan dan meningkatkan status jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dan menghubungkan ibukota kabupaten dengan kawasan pantai timur dan wilayah kabupaten tetangga;
 - membangun dan mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dan jaringan transportasi laut; dan
 - membangun dan mengembangkan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana dan sarana lingkungan.
- c. Pemantapan, perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, suaka alam dan kawasan lindung lainnya meliputi:
- memantapkan Kawasan hutan lindung pantai (hutan lindung Sungai Lumpur - Mesuji) dan kawasan Hutan Suaka Alam (HSA) Padang Sugihan;
 - memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya;
 - mencegah kerusakan fungsi ekosistem pada kawasan lindung; dan;
 - meningkatkan peranserta masyarakat dalam pemantapan, perlindungan, pengelolaan dan pengembangan kualitas kawasan lindung.

- d. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan budidaya meliputi:
- membangun dan mengembangkan kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi kawasan hutan tanaman industri;
 - membangun dan mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - membangun dan mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan perkebunan swasta nasional;
 - membangun dan mengembangkan kawasan perikanan air tawar, air payau dan perikanan tangkap baik di perairan umum maupun perairan laut;
 - membangun dan mengembangkan kawasan peternakan;
 - membangun dan mengembangkan kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan permukiman; dan
 - membangun dan mengembangkan kawasan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, ruang terbuka hijau dan kawasan perdagangan dan jasa.
- e. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:
- membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan penyangga Kota Palembang;
 - membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan Minapolitan;
 - membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan Agropolitan;
 - membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM);

- menetapkan kawasan Hutan Mangrove (Bakau) Pantai Timur sebagai kawasan lindung pantai untuk kelestarian sumber daya alam hayati;
 - menetapkan kawasan Lebak Deling sebagai kawasan Plasma Nutfah, Kerbau Rawa Pampangan; dan
 - menetapkan kawasan Kota Lama Kayuagung sebagai kawasan cagar budaya.
 - Pengembangan ekowisata Pulau Maspari
- f. Mengembangkan kawasan strategis kabupaten untuk sistem mitigasi bencana di kawasan budidaya maupun kawasan lindung meliputi:
- membangun dan mengembangkan sistem informasi komunikasi dan peringatan dini;
 - membangun dan mengembangkan tanggul penahan banjir dan atau rekayasa teknik di sepanjang daerah aliran sungai yang berpotensi banjir;
 - membangun polder untuk menampung air banjir dan mengalirkan air banjir dengan cara gravitasi atau menggunakan pompa;
 - mempertahankan sistem vegetasi pada lahan-lahan yang berpotensi bencana;
 - memanfaatkan ruang terbuka hijau, sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi; dan
 - memperkuat partisipasi masyarakat dan swasta dalam upaya pencegahan, penanganan tanggap darurat dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- g. Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi:
- Kawasan hutan produksi terbatas Pedamaran - Kayuagung seluas 9.986 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar yang terletak di Kecamatan Pedamaran dan Kecamatan Pedamaran Timur.

- Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP), meliputi kawasan hutan produksi Mesuji III, Way Hitam Mesuji, Mesuji IV, Sempang Heran Beyuku dan kawasan hutan produksi Terusan Sialang yang terletak di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang, Lempuing Jaya, Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Makmur seluas 652.423 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar;
 - Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak Pedamaran Timur, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang seluas 160.716 (seratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas) hektar;
 - Kawasan pertanian pangan lahan basah terletak di semua kecamatan terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan dan sawah lebak;
 - Kawasan perkebunan rakyat dan perkebunan besar terdapat di semua kecamatan.
 - Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 551.510,45 Ha
- h. Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka pengembangan wilayah yaitu: pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang - Kayuagung sepanjang 85 Km, dan Jalan Tol Kayuagung – Palembang - Betung sepanjang 112 Km merupakan bagian dari 8 ruas jalan tol Trans Sumatera.

7) Penanganan Pandemi Covid-19

Kebijakan penanganan *Covid-19* Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada 3 (tiga) strategi, yaitu 1) bidang kesehatan, 2) bidang pengaman sosial, dan 3) bidang ekonomi. Penanganan *Covid-19* yang saat ini masih terus dilakukan harus tetap menjadi prioritas Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melihat upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan kebijakan dan program yang difokuskan pada 3 (tiga) hal sebagai strategi sebagai berikut:

a) Program bidang Penanganan Kesehatan

Dengan kebijakan ini, maka upaya percepatan penanganan *Covid-19* dapat segera dilakukan, mulai dari pencegahan bagi masyarakat rentan, evakuasi, perawatan, isolasi, prokes, pemakaman dan lain sebagainya. Langkah ini dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

b) Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Program jaring pengaman social (JPS) merupakan program penyediaan bantuan bagi masyarakat terdampak *Covid-19*, yang menjadi salah satu prioritas melalui upaya Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dianggarkan pemerintah daerah bersifat temporer.

c) Program Pemulihan Ekonomi

Program pemulihan ekonomi sekaligus peningkatan pertumbuhan, difokuskan pada sektor tanaman pangan, pertanian dan UMKM.

Selanjutnya melalui kebijakan anggaran, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan *refocusing* atau penyesuaian sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.

6.2. Strategi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Strategi Pembangunan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Ogan Komering Ilir maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa, diperlukan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah. Dari hasil analisis permasalahan, isu-isu strategis dan analisis faktor internal dan eksternal yang tersaji pada Bab IV secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Strategi mencapai tujuan meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggung jawab;
2. Strategi mencapai tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata;

3. Strategi mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Strategi mencapai tujuan mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
5. Strategi mencapai tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
6. Strategi mencapai tujuan menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2019-2024 untuk Mewujudkan Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa		
1. Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggung jawab.	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan daerah	1) Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel 2) Meningkatkan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah 4) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) 5) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah
	2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1) Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui sistem informasi terpadu (<i>e-government</i>) 2) Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan public

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik	1) Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan pengembangan sistem penopang (<i>support system</i>) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana		
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang baik dan merata	1. Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata	1) Pemerataan pembangunan wilayah dengan optimalisasi dana desa 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem transportasi publik dan Pengembangan wilayah pesisir 4) Pemenuhan sarana prasarana perumahan dan pemukiman penduduk 5) Percepatan pemenuhan layanan dasar listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat 6) Peningkatan kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat 7) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air, kualitas jaringan irigasi teknis dan non teknis (rawa lebak)
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan		
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat	1) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat 2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan
	2. Meningkatnya mutu pendidikan	1) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 2) Meningkatkan dan pengelolaan manajemen pendidikan
	3. Meningkatnya jangkauan kesehatan kepada masyarakat	1) Meningkatkan / Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat 2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan 3) Penanganan Pandemi Covid-19

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan 2) Meningkatkan manajemen pengelolaan fasilitas kesehatan
	5. Meningkatkan pemberdayaan Gender dan perlindungan anak	1) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender 2) Meningkatkan perlindungan anak
Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1) Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2) Pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan kemandirian ekonomi masyarakat
	2. Meningkatkan pemberdayaan koperasi	1) Mengembangkan unit- unit sektor usaha kecil yang berbasis <i>home industry</i> pertanian 2) Meningkatkan kualitas manajemen pengelola serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
	3. Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1) Mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat
	4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	1) Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja 2) Menciptakan iklim kreatif , inovatif dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi kemajuan
	5. Meningkatkan PAD	1) Meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak daerah dan non pajak 2) Penegakan Perda terkait Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah 3) Optimalisasi penerimaan PAD melalui sektor pariwisata dan sarana olahraga 4) Mengoptimalkan BUMD

Tujuan	Sasaran	Strategi
	6. Menurunnya angka kemiskinan	1) Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin seperti identitas diri, kebutuhan dasar, akses pendidikan dan kesehatan. 2) Meningkatkan pendapatan keluarga penduduk miskin seperti akses sumber mata pencaharian 3) Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan fokus menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah di verifikasi dan divalidasi
Misi 5: Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan		
1. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	1. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan sesuai dengan RTRW 2) Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan 3) Penerapan perencanaan dan Kebijakan tata ruang yang partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan 4) Meningkatkan kualitas air, udara dan lahan
	2. Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	1) Peningkatan kapasitas penanganan bencana
Misi 6: Menciptakan kehidupan sosial budaya masyarakat yang religius, tertib, aman dan nyaman		
1. Menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik	1. Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	1) Penguatan toleransi dan solidaritas antar umat beragama dan masyarakat
	2. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	1) Perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan komponen atau bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama lima tahun. Arah kebijakan pembangunan dapat dijalankan dalam satu tahun

periode, namun dapat juga membutuhkan lebih dari satu tahun. Hal yang terpenting adalah arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Agar penetapan arah kebijakan terarah dan fokus maka dilakukan pemetaan waktu arah kebijakan pembangunan. Dengan adanya pemetaan waktu pencapaian arah kebijakan dapat terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Dari hasil analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan maka ditetapkan fokus atau tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan

NO	TAHUN	TEMA / FOKUS
1	2019	Penciptaan aparatur yang profesional dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih guna memberikan pelayanan publik
2	2020	Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah
3	2021	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4	2022	Peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis inovasi dan teknologi dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
5	2023	Pengembangan industri dan investasi dalam percepatan hilirisasi industri berbasis pertanian
6	2024	Mewujudkan visi “OKI yang lebih maju mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa” menciptakan pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan kualitas SDM yang prima

Perumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang ditetapkan agar fokus untuk mencapai apa yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.3.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2019-2024

Arah Kebijakan					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan pengembangan aplikasi berbasis aplikasi (e-Gov) 2. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah. 3. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan minat baca (literasi). 4. Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. 5. Penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan 6. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran. 7. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah. 8. Pembangunan Berwawasan Lingkungan 9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	1. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah serta pengembangan wilayah. 2. Penataan ibukota kabupaten 3. Pengembagan sarana prasarana perekonomian masyarakat 4. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 5. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan 6. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. 7. Penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan 8. Pemberdayaan UMKM, Koperasi, Industri dan perdagangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. 9. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran. 10. Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.	1. Pemeliharaan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah. 2. Penataan ibukota kabupaten 3. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 4. Pengembagan sarana prasarana perekonomian masyarakat 5. Mengembangkan promosi potensi daerah 6. Pengembangan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha. 7. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran. 8. Peningkatan produktifitas dan sportifitas generasi muda. 9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan. 10. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan. 11. Penguatan ketahanan sosial masyarakat. 12. Penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi	1. Pemeliharaan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah. 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran. 3. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 4. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. 5. Peningkatan pemerataan pengembangan ekonomi antar wilayah. 6. Pengembangan produk unggulan daerah melalui hilirisasi industri . 7. Penciptaan sistem distribusi dan pemasaran komoditas unggulan. 8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata. 9. Mengembangkan promosi potensi daerah. 10. Penyederhanaan Birokrasi 11. Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi	1. Mengembangkan industri yang berbasis kearifan lokal. 2. Revitalisasi sektor pertanian yang mendukung industri. 3. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 4. Mengembangkan promosi potensi daerah. 5. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan. 5. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran. 6. Meningkatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja. 7. Mengembangkan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. 8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata. 9. Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi	1. Peningkatan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat. 2. Peningkatan birokrasi yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. 3. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 4. Akselerasi pembangunan wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar berkualitas. 5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah. 6. Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan.

6.4. Program Pembangunan Daerah

Dalam menjabarkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendefinisikan program-program prioritas berdasarkan misi pembangunan. Berdasarkan hasil *mapping* yang telah dilaksanakan antara program pembangunan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 jo Kepmendagri Nomor 50-3708 tahun 2020, maka terdapat sebanyak 139 program pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana jika dibandingkan dari sebelumnya yaitu sebanyak 218 program. Hal ini berarti terdapat perubahan baik dari sisi jumlah maupun dari sisi nama program. Berikut secara garis besar arah Program pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif (*melalui*): Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur; Optimalisasi pendapatan daerah (intensifikasi dan ekstensifikasi); Penyelesaian permasalahan pertanahan.
 - Penataan administrasi kependudukan (KK, Akte Kelahiran, KTP, Akte Kematian).
 - Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan.
 - Peningkatan dan pengembangan aparatur pemerintahan desa.
 - Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
 - Peningkatan kualitas pengawasan internal.
 - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan.
 - Pengembangan sistem informasi *e-government*.
 - Penataan wilayah.
2. Penguatan konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana yang berkualitas melalui Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dermaga, listrik, pasar dan komunikasi) di perdesaan dan perkotaan

- Pembentukan unit penanganan infrastruktur wilayah.
 - Penyusunan masterplan transportasi pesisir timur (jalan Sungai menang - cengal, tulung selapan, air sugihan, KEK Tanjung Api-api).
 - Melanjutkan pembangunan jalan sepucuk (Kayuagung - Pedamaran Timur - Mesuji Raya - Sungai Menang).
 - Menuntaskan pemasangan jaringan listrik perdesaan.
 - Menuntaskan ketersediaan air bersih di desa.
 - Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
 - Peningkatan jalan Eks Transmigrasi sepanjang 601,54 km.
 - Pembangunan jalan baru ke Kawasan Pantai Timur termasuk ke kawasan Wisata Tanjung Menjangan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui kemudahan akses dan keterjangkauan masyarakat, penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan penguatan pendidikan usia dini dengan peningkatan kualitas PAUD/TK/TPA
- Melanjutkan program kemudahan akses pendidikan dasar (SD dan SMP).
 - Melanjutkan program bantuan peralatan sekolah (pakaian, tas dan alat tulis).
 - Melanjutkan program beasiswa beprestasi ke jenjang selanjutnya.
 - Melanjutkan peningkatan kesejahteraan guru PAUD dan guru daerah terpencil.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan (peningkatan kualitas layanan Poskesdes)
- Melanjutkan program kemudahan akses kesehatan yg diintegrasikan dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 - Peningkatan layanan kualitas kesehatan mulai dari Poskesdes, PKM sampai RSUD.
 - Melanjutkan program rumah singgah.
 - Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Mesuji.
 - Penyediaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana.

- Penurunan *Stunting*.
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui perkuatan ekonomi pertanian, industri kecil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan usaha pariwisata dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan serta optimalisasi program padat karya
 - Melanjutkan dukungan penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra).
 - Melanjutkan program bantuan kematian bagi keluarga tidak mampu.
 - Melanjutkan program pugar rumah.
 - Menjaga ketahanan pangan (melalui): Optimalisasi sektor pertanian, dalam arti luas, penanganan gagal tanam dan gagal panen, dan peningkatan manajemen KUD.
 - Melanjutkan program bantuan bibit, pupuk, pakan dan sarana prasarana kepada kelompok tani, nelayan dan peternak.
 - Melanjutkan program bantuan kepada koperasi UMKM dan UP3K.
 - Melanjutkan program peningkatan produksi padi (pemanfaatan lahan tidak produktif dan peningkatan panen menjadi 2 sampai 3 kali).
 6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan (melalui): penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan (RDTRK) serta penyusunan kawasan strategis; penataan Kota Kayuagung, pembangunan dan pengembangan permukiman dan perumahan termasuk kasiba dan lisiba; pengamanan Perda RTRW Kab OKI.
 7. Menciptakan stabilitas dan kondusivitas daerah (melalui) Peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; Pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; Peningkatan ketaatan beragama masyarakat yang terwujud dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan budaya; Penumbuh kembangkan wawasan keagamaan dan toleran selaras dengan wawasan kebangsaan dan kebhinekaan.

- Melanjutkan program pembinaan lembaga adat desa, kecamatan dan kabupaten.
- Melanjutkan program bantuan masjid.
- Melanjutkan program peningkatan kesejahteraan ustadz, ustadzah, imam masjid dan mudin.
- Melanjutkan program pembinaan pembinaan umat beragama.

Selanjutnya gambaran program pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program masing-masing misi diuraikan pada tabel 6.4 berikut:

6.5. Integrasi KLHS dengan RPJMD

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam RPJMD, berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut yaitu target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi dan rekomendasi tanpa upaya tambahan, diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Indikator TPB Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 71 Indikator dari 169 Indikator atau 42,0% diuraikan berdasarkan masing-masing pilar. Alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pada indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai berupa arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian.

Sedangkan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditujukan kepada pencapaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dan indikator-indikator yang belum ada data. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan:

- a. pencapaian target tanpa upaya tambahan;
- b. pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
- c. potensi, daya saing dan inovasi daerah;
- d. daya dukung dan daya tampung daerah; dan
- e. pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hasil identifikasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat:

- 55 Indikator TPB/SDG's yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) atau 32,5%.
- 43 Indikator TPB/SDG's yang belum dilaksanakan atau belum ada data (BB) atau 25,4%.

Perumusan skenario pembangunan dilakukan dengan beberapa cara alur fikir yaitu; (1) Proyeksi kemampuan keuangan, (2) Proyeksi pertumbuhan capaian TPB Daerah, (3) Potensi Daerah, (4) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, (5) Potensi Dukungan Mitra-Pemerintah, (6) Perbandingan Proyeksi capaian TPB, dan (7) Penentuan Target Berdasarkan Skenario.

Berdasarkan skenario pembangunan tersebut, Tim KLHS RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir memilih skenario perbandingan proyeksi capaian TPB yang menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan KLHS baik dalam RPJMD maupun untuk dokumen lain seperti Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB).

TABEL 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ogan Komering Ilir
(pagu indikatif dalam jutaan)

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
1		MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa																		
1	1	Tujuan:																		
		-	Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggungjawab	Indeks Reformasi Birokrasi	55,95	55,95		55,98		55,98				56,00		56,00		56,00		
1	1	1	Sasaran :																	
		-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan daerah	1) Nilai SAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	CC	CC		B		B			B		B		B			
				2) Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	ST	ST		ST		ST			ST		ST		ST			
				3) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		WTP			WTP		WTP		WTP			
				4) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3			Level 3		Level 3		Level 3			
		1	Belanja Rutin Setiap OPD			181.576		249.203		245.487	X.XX	Belanja Rutin Setiap OPD			1.188.008		1.199.888		1.211.769	
		-	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			118.980		126.567		132.283	X.XX.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			1.044.527		1.054.972		1.065.418	Semua OPD (Kecuali Setda dan Setwan)
			1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
		-	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			39.810		67.139		55.293										
			1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%	4.01.01	Program Administrasi Umum			78.141		78.922		79.704	Setda
		-	Program peningkatan disiplin aparatur			4.265		14.184		13.906		Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Sekretariat Daerah		100%		100%		100%		
			1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%										
		-	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			11.648		27.999		30.012	4.02.01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota			65.340		65.994		66.647	Setwan
			1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD		100%		100%		100%		
		-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6.873		13.314		13.993										
			1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17		Rp 18	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah								
			2.1. Administrasi Pemerintahan				71.641		65.550		69.200	4.02	Sekretariat DPRD								
		-	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				50.598		43.795		45.984	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			57.676		60.423		63.169	Setwan
			1	Tercapainya Rasio jumlah perda yang disahkan	5 Buah	5 Buah		5 Buah	2.903	5 Buah	3.048		Tingkat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Bidang Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi		100%		100%		100%		
			2	Teridentifikasinya masalah - masalah di Daerah Pemilihan (DAPIL) yang teratasi	3 Kali	3 Kali		3 Kali	2.610	3 Kali	2.740										
			3	Meningkatnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali		3 Kali	4.179	3 Kali	4.388	4.01	Sekretariat Daerah								
		-	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD				466		294		309	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			21.679		22.711		23.743	Setda
			1	Tersedianya anggaran Setda Kab. OKI	100	-		-	147	-	154		Tingkat pemenuhan fasilitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100%		100%		100%		
		-	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				1.602		1.014		1.106	4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan			6.619		6.934		7.250	Setda
			1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pelayanan informasi	1 Paket	1 Paket		1 Paket	100	1 Paket	100		Tingkat pemenuhan fasilitas perekonomian dan pembangunan		100%		100%		100%		
			2	Tersedianya dan terdokumentasinya Kegiatan Pemerintah kab.OKI	60%	60%		66%	231	73%	254										
		-	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				4.787		6.051		6.437										
			1	Meningkatnya Pelayanan Acara Resmi Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	62%	62%		68%	880	75%	968										
			2	Tersedianya data pembangunan daerah	20 lap	20 lap		20 lap	150	20 lap	150										
			3	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%		100%	432	100%	453										
			4	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	100%	100%		100%	630	100%	662										
		-	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				200		275		295										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17		Rp 18	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				1	Terbentuknya peraturan daerah yang baik	10 Perda	10 Perda		10 Perda	160	10 Perda	170									
				2	Tersedianya buku peraturan perundang-undangan	500 Buku	500 Buku		500 Buku	115	500 Buku	125									
			-	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				400		480		500									
				1	Meningkatnya kinerja camat	18	18		18	280	18	300									
				2	Terfasilitasinya Kesuksesan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden	1	1		-	-	-	-									
			-	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				590		1.218		1.335									
				1	Terfasilitasinya pembentukan kabupaten dan kecamatan baru	-	-		-	165	-	185									
				2	Tersedianya data nama-nama Rupa Bumi	200	200		300	185	300	200									
				3	Terwujudnya kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama antar daerah	1	100%		1	165	1	185									
				4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Layanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	1	1		1	220	1	240									
			-	Program Penataan Batas Wilayah Administrasi				255		585		470									
				1	Terpenuhinya Tertib Wilayah administrasi Batas Desa/ Kelurahan	1	-	100	-	110	-	120									
				2	Tersedianya Data Digital Penataan Batas	1	1	0	1	150	-	0									
			-	Program Pengendalian Perekonomian Daerah				650		680		710									
				1	Tingkat koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kab. OKI	100%	100%		100%	210	100%	220									
				2	Tingkat pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	2 BUMD	2 BUMD		2 BUMD	105	2 BUMD	110									
				3	Terfasilitasinya modal usaha golongan ekonomi lemah	4 Kec	4 Kec		4 Kec	55	5 Kec	60									
			-	Program mengintensifkan pelayanan pengaduan masyarakat				0		200		200									
				1	Terciptanya perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu	10 Perkara	10 Perkara	0	10 Perkara	100	10 Perkara	100									
			-	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa				0		1.980		2.450									

Kode	Misi /Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					Tahun 2022		Tahun 2023					Tahun 2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19		
					1	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	25%	25%		50%	300	70%	250												
				-	Program Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat kecamatan					845		845		888											
					1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%													
			-	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					3.212		3.373		3.518	7	Unsur Kewilayahan										
					1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		7.01	Kecamatan										
														7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80		90		100	Kecamatan		
			-	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)					4.137		0		0			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		100%		100%				
					1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%						7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			9.500		9.953		10.405	Kecamatan		
			-	Program pembangunan kelurahan					3.900		4.760		4.998			Tingkat pencapaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		100%		100%				
					1	Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%	0	100%	3.300	100%	3.300	7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			0		648		648	Kecamatan		
					2	Capaian pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%	0	100%	550	100%	550			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%				
														7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.365		3.925		4.133	Kecamatan		
																Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%				
			2.2. Pengawasan						3.388		4.110		4.540	6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah										
		-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah					3.328		4.050		4.470	6.01	Inspektorat Daerah											
					1	Persentase Pengaduan Masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	65%	75		80		85		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan			3.468		3.633		3.799	Inspektorat		
					2	Persentase hasil pemeriksaan/review tepat waktu	65%	68		75		80				Persentase Tingkat Pengawasan Internal	100%		100%		100%				
					3	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	83%	83		80		85													
					4	Tingkat Kapabilitas APIP	84%	84		84		85		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendamping dan Asistensi			1.317		1.380		1.443	Inspektorat		
					5	Tingkat Maturitas SPIP	3	3		3		3				Persentase Tingkat Integritas Aparatur	100%		100%		100%				

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10			Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	-	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			60		60		70									
		1 Persentase ASN dalam menyampaikan LHKASN	83%	84%	60	85%	60	85%	70									
	2.3	Perencanaan			3.318		2.987		3.108	5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
	-	Program Pengembangan data/informasi			120		130		130	5.01	Perencanaan							
		1 Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%		100%		100%		5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.395		1.595		1.925	Bappeda
	-	Program pengembangan kota-kota menengah dan besar			100		0		0		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%		100%		100%		
		1 Jumlah dokumen koordinasi percepatan pembangunan bidang air bersih/ drainase sanitasi dan pemukiman	100%	1	100		125		125	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		2.100		2.435		2.511	Bappeda
	-	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.821		1.136		1.141		Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah	100%		100%		100%		
		1 Persentase program RPJMD yang ada di RKPD	100%	100%		100%		100%										
		2 Persentase Program Prioritas Kabupaten Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi dan Nasional	100%	100%		100%		100%										
	-	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			410		640		660									
		1 Persentase program/kegiatan PD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%										
	-	Program Perencanaan Sosial Budaya			597		657		722									
		1 Persentase program/kegiatan PD bidang sosial budaya yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%	597	100%	657	100%	722									
	-	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			270		425		455									
		1 Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!									

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	
		2.4	Penelitian Dan Pengembangan				650		2.200		2.200	5.05	Penelitian Dan Pengembangan									
		-	Program Litbang dan Inovasi Daerah				0		300		300	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			1.160		1.215		1.270	Balitbang	
				1	Rekomendasi/ laporan yang di terapkan	100%	100%	0	100%	300	100%	300		Persentase Inovasi Hasil Kajian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh OPD/ Stakeholder	100%		100%		100%			
		-	Program Peningkatan IPTEK bagi UKM				0		300		300											
				1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	0	100%	300	100%	300										
		-	Program Litbang dan Inovasi Peningkatan bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan				0		300		300											
				1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	0	100%	300	100%	300										
		-	Program Inovasi Sosial dan Kemasyarakatan				0		300		300											
				1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	0	100%	300	100%	300										
		-	Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan				150		300		300											
				1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	150	100%	300	100%	300										
		-	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian				260		300		300											
				1	Tingkat Laporan	100%	100%	260	100%	300	100%	300										
		-	Program Desiminasi Iptek hasil Litbang dan Inovasi				40		100		100											
				1	Iptek dan Inovasi yang dipamerkan	100%	100%	40	100%	100	100%	100										
		-	Program Peningkatan Hasil Pemasaran				200		300		300											
				1	Studi komoditas / produk unggulan lokal berkualitas	100%	100%	200	100%	300	100%	300										
		2.5	Keuangan				5.459		8.650		8.665	5.02	Keuangan									
		-	Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan Aset Daerah				0		800		800	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			479.397		470.331		462.498	Bpkad	
				1	Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD OKI)	100%	100%		100%		100%			Pengelolaan Keuangan Daerah yan Efektif, Efisien dan Akuntabel / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	100%		100%		100%			
				2	Persentase Pelaporan Aset yang akurat	80%	80%		82%	800	85%	800	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.407		1.473		1.540	Bpkad
		-	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.459		5.480		5.645			Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	100%		100%		100%			
				1	Predikat laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WTP	780	WTP	850										
				2	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat											
				3	Tingkat Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat											
				4	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	65,45%	66		70	0	75	0										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		-	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah			0		2.370		2.220										
			1	Meningkatnya Penata Usahaan Pengelolaan Aset	1 lap	1 lap	1 lap	750	1 lap	750										
			2	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	750	1 lap	750										
			3	Terpenuhinya dan Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD Kab OKI)	1 lap	1 lap	1 lap	750	1 lap	750										
		2.6 Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan				2.201		5.827		5.730	5.03	Kepegawaian								
		-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		2.040		1.970	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah			6.726		7.078		7.430	Bkpp
			1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%		88%	990	90%	970		Persentase Pegawai (Responden) yang Puas Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian		80%		83%		86%	
			2	Terpenuhinya CPNS golongan II dan III yang memenuhi persyaratan	90%	90%		91%	850	92%	820									
			3	Meningkatkan pemahaman PNS tentang jabatan fungsional dan perhitungan angka kredit bagi tenaga fungsional	80%	80%		82%	100	85%	80	5.04	Pendidikan Dan Pelatihan							
		-	Program pembinaan dan pengembangan aparatur			2.141		1.545		1.660	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			4.320		4.504		4.668	Bkpp
			1	Prosentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	70%	80%		83%	110	85%	120		Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Struktural		35%		45%		55%	
			2	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	1,30%	1%		1,20%	65	1%	55									
			3	Terpenuhinya formasi CPNS sesuai kebutuhan organisasi	90,00%	90%		92,00%	900	94%	940									
			4	Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur	100,00%	100%		100,00%	350	100%	450									
		-	Program Pendidikan Kedinasan			0		2.172		2.035										
			1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%		88%	997	90%	970									
			2	Ketersediaan data PNS yang akurat	30%	85%		90%	75	93%	65									
			3	Peningkatan kualitas SDM aparatur	90%	80%		85%	1.100	90%	1.000									
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				60		70		65										
			1	Meningkatnya tingkat ketersediaan pelaporan data LHKPN pejabat Pemkab OKI	100%	100%	60	100%	70	100%	65									

Kode	Misi /Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		3	Urusan Kearsipan				176		1.110		1.221	2.24	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan								
		-	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				176		500		550	2.24.02	Program pengelolaan arsip			228,625		234,750		240,875	D. Arsip Pustaka
			1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	57,69%	7,69%		7,69%		7,69%				Persentase arsip yang dikelola secara baku	28,8%		48,1%		67,3%		
			2	Persentase arsip /dokumen yg tertata (arsip statis)	9,62%	9,62%		9,62%		9,62%		2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			28,625		34,750		40,875	D. Arsip Pustaka
			3	Persentase buku arsip daerah	0%	0%		19,23%		19,23%				Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100%		100%		100%		
			4	Persentase dokumen/arsip statis & sejarah yang direstorasi	0%	0%		9,62%		9,62%											
			5	Persentase arsip statis yang diakuisisi	0%	0%		9,62%		9,62%											
		-	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan				0		200		220										
			1	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	80%	0%		80%		80%											
			2	Persentase OPD yang memiliki sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar	57,69%	0%		7,69%		7,69%											
		-	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan				0		410		451										
			1	Persentase Layanan Arsip Yg Berbasis Teknologi & Informasi	1,92%	0%		5,77%		5,77%											
			2	Jumlah OPD yang dibina kearsipannya	30 OPD	4 OPD		4 OPD		4 OPD											
			3	Jumlah arsiparis yang dinilai angka kreditnya	0 orang	0 orang		2 orang		2 orang											
1	1	2	Sasaran :																		
		-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1)	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00%	70,00%		71,00%		72,00%				73,00%		74,00%		75,00%		
		1.	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				2.305		2.421		2.542	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
		-	Program penataan administrasi kependudukan				2.305		2.421		2.542	2.12 .02	Program Pendaftaran Penduduk			1.285		1.347		1.408	Disdukcapil
			1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%				Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	95%		97%		99%		
			2	Lama Pengurusan KTP	7 hari	7 hari		7 hari		7 hari		2.12 .03	Program Pencatatan Sipil			248		260		272	Disdukcapil
			3	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	81,2%	85,2%		89,5%		93,9%				Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	75%		87%		100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10			Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				4	Persentase penduduk yang memiliki KTP	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%		2.12 .04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		386		405		423	Disdukcapil
				5	Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	1	86,4%		92,4%		97,9%			Persentase Database Kependudukan	100%		100%		100%		
				6	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	30,91	35,53%		40,15%		44,77%		2.12 .05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		218		229		239	Disdukcapil
				7	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	100	100		100		100			Persentase Profil Kependudukan	100%		100%		100%		
				8	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	100	100		100		100										
				9	Persentase anak umur di bawah 17 tahun yang memiliki KIA	100	100		100		100										
				2 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					4.181		7.975		8.025								
				- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					2.538		3.250		3.300								
				1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM (Kelompok)	327	314		314	150	314	150									
				2	Ketersediaan data desa/kelurahan	327	327		327	500	327	500									
				3	Persentase pelaksanaan roda pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	100		100	500	100	500									
				4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan	100	100		100	2.000	100	2.000									
				5	Jumlah Posyandu yang aktif	635	635		650	100	670	150									
				- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi					80		400		400								
				1	Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (desa)	314	50		50	200	50	200									
				2	Jumlah BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian desa	314	50		50	200	50	200									
				- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					1.006		2.725		2.725								

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	
					1	Jumlah PKK yang aktif (kelompok)	346	346		346	1.500	346	1.500										
					2	Persentase desa inovasi	314	50		50	200	50	200										
					3	Jumlah desa yang sudah menyusun APBDesa	314	314		314	200	314	200										
			-		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					557		1.500		1.500									
					1	Persentase aparat pemerintah desa yang berkinerja baik (%)	40	50		60	500	70	500										
					2	Tingkat pemenuhan administrasi bantuan keuangan kepada pemerintahan	314	314		100	500	314	500										
					3	Jumlah aparat desa terlatih	318	628		628	500	628	500										
			-		Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna					0		100		100									
					1	Persentase posyantekdes yang terbentuk dan aktif	100	1		3	100	3	100										
1	1	3	Sasaran :																				
					1)	Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi / SPBE	55%	55% /2,6		56% /3,5		57% /3,8				58% /4,2		59% /4,6		60% /5,0			
			1	Urusan Komunikasi Dan Informatika					4.178		8.335		8.475	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika								
			-	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa					1.338		3.445		3.550	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik			3.135		3.284		3.433	Diskominfo
					1	Jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	23	28	1.338	35	3.445	41	3.550		Persentase penyelenggaraan Komunikasi Publik, Layanan Informasi Publik dan Statistik		75%	80%		85%			
					2	Jumlah jaringan komunikasi	8	8		10		12		2.16.03	Program Aplikasi Informatika			1.731		1.813		1.896	Diskominfo
			-	Program kerjasama informasi dan mass media					2.700		4.690		4.725		Persentase OPD dan Ruang Publik yang terkoneksi internet dan Aplikasi yang Terintegrasi		60%	70%		80%			
					1	Jumlah/kapasitas mitra komunikasi publik	70	92		92	3.000	92	3.000	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
					2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	10	12		12	190	12	225	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal			262		275		287	Dpmptsp
					3	Rasio wartel dan warnet terhadap jumlah penduduk	73	73		73		73			Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani		100%		100%		100%		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17		Rp 18	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		-	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				140		200		200	2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			630		660		690	Dpmpstsp
			1	Jumlah SDM bidang kominfo	7	10		13	100	16	100		Tersediaanya data dan informasi dalam sistem informasi penanaman modal di daerah yang dapat di akses oleh masyarakat dan stakeholder		1 sistem PM		1 sistem PM		1 sistem PM		
			2	Terlaksananya Pemberdayaan SDM Bidang Kominfo	0	1		2	100	3	100										
		2	Urusan Statistik				0		730		880	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
		-	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				0		150		200	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistktik Sektoral			195		204		213	Diskominfo
			1	Jumlah dokumen data kec dalam angka	1	1		1	150	1	200		Dokumentasi Data Statistik Sektoral		3		3		3		
		-	Program penyelenggaraan statistik sektoral				0		580		680										
			1	Membangun e-database sebagai hasil pengumpulan, pengolahan analisis dan desiminasi data	1	1	0	1	175	1	200										
			2	Aplikasi data e-database yang akurat	1	1	0	1	175	1	200										
		3	Urusan Persandian				0		180		185	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
		-	Program Penyusunan Tata Kelola Bidang Keamanan Informasi dan Persandian				0		30		35	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			221		231		242	Diskominfo
			1	Jumlah kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian (berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas)		2	0	2	30	2	35		Jumlah kualitas SDM bidang persandian yang mempunyai keahlian terkait keamanan informasi persandian dan keamanan ruang kerja pimpinan perangkat daerah Kab. OKI		4		4		4		
			2	Jumlah Masterplan / Grand Design / Pedoman / Pelaksanaan / Petunjuk Teknis / Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian		1	60	1	70	1	80										
		-	Program Operasional Layanan Persandian untuk Mendukung Pengamanan Informasi				0		50		50										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				1	Jumlah kegiatan pengamanan sinyal (jamming)		3	0	3		3										
				2	Jumlah kegiatan pengamanan informasi kontra penginderaan (Streilisasi)		3	0	3		3										
			-	Program Pengawasan dan Evaluasi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian				0		100		100									
				1	Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian		1		1		1										
2			MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana																		
2	1		Tujuan:																		
			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang baik dan merata	1)	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	0,67	0,68		0,69		0,71			0,72		0,73		0,75		
2	1	1	Sasaran :																		
			-	meningkatkan Infrastruktur yang baik dan merata	1)	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	70,46%	70,46%		71%		72%			73%		74%		75%		
			-	meningkatkan Infrastruktur yang baik dan merata	2)	Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	64,26%	65%		67%		69%			71%		73%		75%		
			1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				303.582		376.447		408.551	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
			-	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				33.251		36.575		40.233	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		52.817		53.198		55.616	Pupr
				1	Persentase jalan yang dibangun	5,89%	1%	12.415	1,10%	13.657	1,20%	15.022		Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	46%		50%		75%		
				2	Jumlah jembatan yang dibangun	257 Unit	30 Unit	20.835	30 Unit	22.919	40 Unit	25.210	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		26.320		27.021		28.320	Prkp
			-	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong				0		27.300		27.300		Persentase penduduk yang terlayani air minum	71,75%		73,32%		74,11%		
				1	Panjang drainase jalan kondisi mantap	2,6 Km	-	0	1 Km		1 Km		1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		9.419		10.319		11.325	Prkp
			-	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				35.226		38.749		42.623		Jumlah sarana pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang dibangun	14 unit		18 unit		22 unit		
				1	Rasio panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	70,47%	1,15%	29.632	1,21%	32.595	1,27%	35.855	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		10.900		11.958		12.558	Prkp
				2	Jumlah jembatan kondisi mantap (bisa dilewati)	25 Unit	4 Unit	5.593	5 Unit	6.152	6 Unit	6.768		Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana limbah yang layak	65,58%		68,86%		72,30%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
1	2		3	4	Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	11	12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	19
		-	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan			0		10.000		10.000	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		14.405		16.467		17.392	Pupr/Prkp
			1 Tersedianya dana siap pakai untuk rehab jalan dan jembatan	0	2 Km	0	2 Km	10.000	2 Km	10.000		Panjang Drainase yang dibangun	11,5 Km		12,5 Km		13,5 Km		
		-	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan			0		200		200	1.03.07	Program Pengembangan Permukiman		21.470		22.000		23.181	Prkp
			1 Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan	100%	100%	0	100%	200	100%	200		Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun	26 km		28,6 km		31,5 km		
		-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan			4.182		4.600		5.060	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung		28.612		29.375		30.037	Prkp
			1 Jumlah sarana dan prasarana kebinarmargaan	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit			Jumlah Gedung yang dibangun dan direhab	12		14		16		
		-	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan			0		500		500	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan		249.538		263.291		275.241	Pupr
			1 Ketersediaan Data Kondisi Eksisting Jalan dan Jembatan	100%	100%	0	100%	500	100%	500		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	0,4%		0,5%		0,5%		
		-	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			156.426		172.069		189.275									
			1 Jumlah jembatan yang ditingkatkan	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0										
			2 Panjang jalan yang ditingkatkan	144 Km	0	261 Km	0	314 Km	0										
		-	Program Perencanaan Jalan dan Jembatan			4.952		5.447		5.992									
			1 Rencana pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	188 Ruas Jln & Jbt	188 Ruas Jln & Jbt	4.952	188 Ruas Jln & Jbt	5.447	188 Ruas Jln & Jbt	5.992									
		-	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			59.476		65.424		71.966									
			1 Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	18%	37%	59.475	57%	65.423	75%	71.965									
		-	Program Pembangunan Turap, Talud,Bronjong			10.069		12.183		13.402									
			1 Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran	19%	35%	0	51%	3.400	68%	2.000									
		-	Program Rehabilitas/Pemeliharaan Talud/Bronjong			0		3.400		2.000									
			1 Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran	19%	35%	0	51%	3.400	68%	2.000									
		2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			64.323		67.575		69.436	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
		-	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			0		2.261		3.281	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan		500		520		550	Prkp
			1 Panjang drainase permukiman dalam kondisi baik	0,05	0	0	0,10		0,15			Persentase Perbaikan Rumah Karena Bencana Alam	100%		100%		100%		
		-	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			14.738		30.145		30.725	1.04.03	Program Kawasan Permukiman		4.049		4.247		4.364	Prkp
			1 Persentase rumah tinggal bersanitasi	53,95	56,65	5.411	59,48	5.682	62,45	5.966		Persentase Rumah Layak Huni	75,23%		76,91%		78,71%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
1	2			3	4	Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	11	12		Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	19
				2	Persentase penduduk berakses air minum (PDAM)	6,51	7,46	6.826	8,28	24.463	13,54	24.759	1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		500		520		550	Prkp
		-	Program pembangunan infrastruktur perdesaan					9.728		10.020		10.320		Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	100%		100%		100%		
				1	Persentase jalan lingkungan yang terbangun	40,18	40,23	9.728	67,88	10.020	70,67	10.320	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		32.092		33.000		34.224	Prkp
		-	Program penyediaan dan pengelolaan air baku					0		4.315		4.962		Persentase rumah tangga yang terlayani PSU	96,55%		97,40%		98,40%		
				1	Persentase penduduk yang terlayani air baku(Non PDAM)	67,96	69,45	3.752	70,21	4.315	70,98	4.962									
		-	Program Pengembangan Perumahan					647		3.500		3.675									
				1	Persentase Rumah Layak huni	64,68	68,38	647	73,65	3.500	73,65	3.675									
		-	Program Penataan Lingkungan Kumuh					0		1.166		1.224									
				1	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	2,67	2,80	1.110	2,94	1.166	3,09	1.224									
		-	Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan					32.097		12.500		12.750									
				1	Persentase desa berlistrik	92,71%	93,6%	32.097	94,6%	12.500	95,5%	12.750									
		-	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					0		880		880									
				1	Persentase RTH Ibukota kabupaten dalam Kondisi baik	100	0	0	100	880	100	880									
		-	Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar					880		0		0									
				1	Pemenuhan pasokan air minum	100	100	880	0	0	0	0									
		-	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					0		1.900		1.500									
				1	Unit lahan yang tersedia	3 unit	0	0	3 unit	1.900	2	1.500									
		-	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman					250		250		250									
				1	Unit sarana prasarana pemakaman yang dibangun	2 unit	3 unit	250	5 unit	250	7 unit	250									
		-	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan					0		2.700		2.900									
				1	Jumlah TPS 3R yang di bangun	2 unit	6 unit	0	10 unit	2.700	14 unit	2.900									
		-	Program Lingkungan Sehat Perumahan					2.040		200		250									
				1	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	0,05		2.040	0	0	0	0									
				2	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	0	0	0	100	200	100	250									
		-	Program Pembangunan Distribusi penyediaan air baku					3.943		0		0									
				1	Tingkat ketersediaan air baku	40%	45%														

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		3	URUSAN PERHUBUNGAN				1.655		4.673		3.556	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
		-	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				895		200		300	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			1.035		1.084		1.134	Dishub
				1	Jumlah Prasarana Transportasi LLAJSDP	25 lokasi	27 lok	895	28 lok	200	29 lok	300		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota	40%		45%		45%		
		-	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				20		302		156										
				1	Persentase Fasilitas LLAJSDP dalam keadaan baik	25,00%	29,16%	20	33,32%	252	37,48%	100	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran		1.481		1.552		1.622	Dishub
				2	Persentase rambu-rambu LLAJSDP dalam kondisi baik	30,00%	30,00%	0	34,00%	50	38,00%	56		Jumlah ketersediaan sarana sungai dan danau	31 unit		33 unit		35 unit		
		-	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				695		784		750										
				1	Jumlah rute pelayaran	18 rute	18	0	20	200	21	200									
				2	Jumlah Peraturan Yang Dikeluarkan	13 buah	14	695	15	584	16	550									
		-	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				45		312		250										
				1	Persentase Fasilitas Keselamatan LLAJSDP	41,32%	43,23%	45	51,17%	312	59,11%	250									
		-	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				0		3.075		100										
				1	Persentase kepemilikan Keur (Pengujian Kendaraan Bermotor)	60%	63,34%	0	66,68%	75	70,02%	100									
				2	Jumlah Uji Keur kendaraan bermotor	3500 unit	3900	0	4300	3.000	4700	0									
		-	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana				0		0		2.000										
				1	Tersedianya Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	0	0	0	0	0	1	2.000									
3			MISI 3 : Meningkatkan Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan																		
3	1		Tujuan:																		
			Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia		66,57	66,96		66,82		67,21					67,6		67,93		68,32		
3	1	1	Sasaran :																		
			Meningkatnya Jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat		1)	Angka melek huruf	97,69%	98%	98%		99%				99%		99%		99%		
					2)	Rata-rata lama sekolah	7,02 tahun	7,03	7,04		7,05				7,06		7,07		7,08		
		1	URUSAN PENDIDIKAN				144.285		242.910		260.398	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
			Program Pendidikan Anak Usia Dini				726		27.300		28.665	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan			180.365		188.954		197.542	Disdik
				1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,01	95,20		96,40		97,60			Tingkat pemenuhan palayanan pengelolaan pendidikan	92,40%		92,40%		96,60%		
				2	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	5,33	12,30		19,20		26,10										
		-	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				41.623		59.000		61.740										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)							Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11			Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	110,93	110,93		111		111										
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,7	101,8		101,82		101,90										
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,18	96,10		97,10		98,10										
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	74,76	76,80		78,90		80,90										
		5	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi	48,84	56,10		63,30		70,50										
		6	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi	48,93	55,10		61,40		67,60										
		7	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	50,06	53,00		56,00		59,00										
		8	Rata-rata skor Indeks Integritas Ujian Nasional SMP	69,17	70,30		71,50		72,70										
		9	Angka kelulusan SD/MI	98,02	98,40		98,80		99,20										
		10	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,88	99,90		99,90		100										
		11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	71,45	74,16		76,87		79,58										
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	89,49	91,59		93,69		95,80										
		-	Program Pendidikan Non Formal		260		2.940		3.087										
		1	Angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	98,09	98,5		98,9		99,2										
		2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	3	3		6		9										
		3	Jumlah lembaga PKBM terakreditasi	0	7		11		15										
		-	Program Bantuan Operasional Sekolah		99.970		108.900		119.790										
		1	Tingkat Penyaluran BOS ke sekolah	100%	100%		100%		100%										
3	1	2	Sasaran :																
			Meningkatnya mutu pendidikan	1)	Angka kelulusan SD/MI	100%	100%		100%				100%		100%		100%		
				2)	Angka kelulusan SMP/MTs	99,5%	100%		100%				100%		100%		100%		
		1	URUSAN PENDIDIKAN							1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
		-	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		810		18.375		19.294	1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum		91		95		100	Disdik	
		1	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	100	100	600	100	600	100	600		Tersedianya tenaga kependidikan yang dapat menyusun kurikulum yang baik	74%		76%		78%		
		2	Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1/D4	100	100	1.400	100	1.400	100	1.400									

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)							Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	50,00	60,00	450	70,00	450	80,00	450	1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		273		286		299	Disdik
		4	Persentase Guru SD berkualifikasi S1/ D4	97,00	97,60	900	98,20	900	98,80	900		Terdapat data tenaga kependidikan dan kependidikan yang realtime	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
		5	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	59,16	62,30	12.000	65,50	12.000	68,70	12.000									
		6	Persentase Guru SMP berkualifikasi S1/ D4	89,09	91,30	9.000	93,50	9.000	95,60	9.000									
	-	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				553		24.675		25.909									
		1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh unit kerja Dinas Pendidikan	50	60		70		80										
		2	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan	97	98		98		99										
		3	Persentase Satuan Pendidikan yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar	59,16	62,30		65,50		68,70										
	-	Program Pembinaan Pendidikan Olahraga dan Seni				294		1.650		1.815									
		1	Jumlah siswa yang meraih peringkat 1 (satu) Provinsi/ Nasional	3	4		5		5										
	-	Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan				50		70		98									
		1	Persentase siswa yang dapat baca tulis Al-Qur'an	0	14,00		28,00		42,00										
	2	URUSAN PERPUSTAKAAN				350		500		600	2.23	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan							
	-	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				350		0		0	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan		231,250		237,500		243,750	D. Arsip Pustaka
		1	Persentase peningkatan bahan pustaka	10,09%	11,10%		12,21%		13,43%			Persentase jumlah perpustakaan yang terkelola sesuai standar	2,82%		3,95%		5,08%		
		2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	0,40%	0,42%		0,44%		0,46%										
		3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,39%	1,46%		1,53%		1,61%		2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		31,250		37,500		43,750	D. Arsip Pustaka
		4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	11.920 buku	0 buku		12.516 buku		13.142 buku			Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	2		2		2		
		5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	4,88%	0%		5,12%		5,38%										
	-	Program Pengembangan Perpustakaan				0		350		400									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kependa gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
							Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10			Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16		Target 17	Rp 18	19
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19
				1	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar	30%	33%		36%		40%													
				2	Meningkatnya tenaga perpustakaan sesuai standar	4,88%	5,12%		5,38%		5,65%													
		-	Program Peningkatan minat baca					0		150		200												
				1	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca	7673 orang	8056 orang		8458 orang		8881 orang													
		3	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					2.688		2.925		3.050	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga										
		-	Program peningkatan peran serta kepemudaan					816		830		850	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					1.038		1.088		1.137	Dispora
				1	Cakupan organisasi pemuda yang aktif	80%	80%	816	85%	830	85%	850		Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepemudaan yang Terlaksana				100%		100%		100%		
		-	Program upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba					0		75		75												
				1	Persentase Pemuda yang bebas narkoba	55%	55%		60%	75	60%	75	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					7.401		7.753		8.106	Dispora
		-	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					55		70		75		Tingkat Pengembangan Kapasitas Keolahragaan yang Terlaksana				100%		100%		100%		
				1	Jumlah Pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup	30	30	55	35	70	35	75												
		-	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					1.267		1.200		1.250	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					1.050		1.100		1.150	Dispora
				1	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	25	25	1.267	30	1.200	30	1.250		Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang Terlaksana				100%		100%		100%		
		-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					550		750		800												
				1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	20%	20%		21%		22%													
				2	Rasio Lapangan Olah Raga per 1.000	17%	18%		20%		22%													
3	1	3	Sasaran :																					
				1)	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	68,22 tahun	68,41		68,61		68,81						69,01		69,21		69,41 tahun			
		1	URUSAN KESEHATAN					147.704		195.500		166.974	1.02	Urusan pemerintah Bidang Kesehatan										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10			Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18		
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		-	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan				3.908		5.000		5.500	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			157.738		165.083		173.608	Dinkes & RSUD
			1	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin untuk Puskesmas	100%	100%	3.908	100%	5.000	100%	5.500		Tingkat ketersediaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		100%		100%		100%		
		-	Program Pelayanan Kesehatan				970		1.050		1.100										
			1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%	100%		100%		100%											
		-	Program Pengawasan Obat Dan Makanan				159		200		225										
			1	Persentase obat dan makanan yang diawasi	100%	100%		100%		100%											
		-	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan				1.005		1.100		1.200										
			1	Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	75%	77%		80%		83%											
			2	Cakupan Desa Siaga Aktif	321	321		323		323											
			3	Persentase Posyandu Aktif	70%	70%		75%		75%											
			4	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	98%	100%		100%		100%											
		-	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				673		750		850										
			1	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,35%	0,35%		0,3%		0,3%											
			2	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan	100%	100%		100%		100%											
			3	Persentase anak 6-24 bulan keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI	100%	100%		100%		100%											
			4	Pesentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan GIZI	98%	98%		98%		98%											
			5	Persentase Stunting pada anak balita yang ditangani	0%	100%		100%		100%											
		-	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				700		1.000		1.100										
			1	Cakupan Rumah tangga sehat	80%	80%		90%		100%											
			2	Cakupan Rumah tangga dengan sumber air terlindungi	80%	80%		90%		100%											
			3	Cakupan Rumah memiliki jamban sehat	65%	100%		100%		100%											
			4	Cakupan Tempat-tempat Umum dan Penjual Makanan (TPUM) yang dibina dan diawasi	78%	80%		83%		85%											

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17		Rp 18	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				5	Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan	80%	80%		90%	100%											
		-	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				1.270		1.500		1.750										
				1	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (semua Kasus)	91%	100%		100%	100%											
				2	Penemuan dan Penanganan Kasus DBD	100%	100%		100%	100%											
				3	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	90%	100%		100%	100%											
				4	Imunisasi (UCI desa)	321	321		323	323											
				5	Imunisasi Dasar anak Usia 0-11 Bulan	321	321		323	323											
				6	Cakupan desa/keurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	100%	100%		100%	100%											
				7	Pelayanan Kesehatan Penderit as Hipertensi	100%	100%		100%	100%											
				8	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	100%	100%		100%	100%											
				9	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat	90%	100%		100%	100%											
				10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut	90%	100%		100%	100%											
		-	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan				150		350		400										
				1	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%		100%	100%											
				2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%		100%	100%											
				3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	100%	100%		100%	100%											
				4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%		100%	100%											
				5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%		100%	100%											
				6	Jumlah Kematian Ibu	11	9		7	5											
		-	Program Hygiene sanitasi air Bersih dan air minum				350		375		400										
				1	Cakupan rumah tangga dengan sumber air terlindungi dan berkualitas	100%	100%	350	100%	375	100%	400									
		-	Program peningkatan dan pengawasan keselamatan kerja dan olah raga				350		375		400										
				1	Persentase Upaya Keselamatan kerja dan olah raga	100%	100%	350	100%	375	100%	400									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		-	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			143		150		175										
			1	Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	100%	100%	143	100%	150	100%	175									
		-	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan			0		150		200										
			1	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100%	100%	0	100%	150	100%	200									
3	1	4	Sasaran :																	
			Meningkatnya mutu layanan kesehatan	1)	Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi baik (%)	85%	88%		91%		94%			97%		99%		100%		
		1	URUSAN KESEHATAN								1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
		-	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan			467		550		600	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			262		274		287	Dinkes
			1	Cakupan Puskesmas yang mengirimkan Laporan ke dinas Kesehatan	100%	100%		100%		100%		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		100%		100%		100%		
			2	cakupan Program yang di kembangkan di bidang kesehatan	2	2		2		2										
		-	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			20.820		22.000		23.000	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			1.072		1.123		1.174	Dinkes
			1	Pembangunan baru Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan jaringannya	0	1		1		1		Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		100%		100%		100%		
			2	Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas.Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	6	5		5		5										
			3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	6	6		6		6	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			321		336		351	Dinkes
			4	Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	6		6		6		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100%		100%		100%		
			5	Persentase sarana Kesehatan yang dapat dimanfaatkan	100%	100%		100%		100%										
			6	Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar	60%	70%		80%		90%										
		-	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata			20.012		60.505		28.469										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujua n/Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19
					1	Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat Kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai standar	80%	80%		90%		95%												
					2	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama	12	12		12		12												
					3	Tersedianya penyimpanan obat di Rumah Sakit	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-											
					4	Tersedianya ruang perawatan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-											
					5	Berfungsinya ruang operasi yang terintegrasi	3 Paket	-	-	3 Paket	-	1 Paket	-											
					6	Tersedianya fasilitas rehabilitasi medik	1 Paket	-	-	1 Paket	-		-											
					7	Tersedianya pelayanan laboratorium klinik	1 Unit	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-											
					8	Pengelolaan limbah yang berfungsi baik	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-	-											
					9	Tertatanya fungsi bangunan rumah sakit	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-	-											
					10	Bertambahnya alat kesehatan yang dibutuhkan		5 Jenis	-	7 Jenis	-	7 Jenis	-											
					11	Lancarnya pengantaran rujukan pasien	-	-	-	1 Unit	-	-	-											
					12	Tersedianya mebeleur gedung rawat inap dan penunjang lainnya	-	-	-	1 Unit	-	-	-											
					13	Tersedianya aparatur dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	-											
					14	Tersedianya CSSD	-	1 Unit	-	-	-	-	-											
					15	Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi pasien hemodialisa	-	-	-	-	-	-	-											
					16	Persentase pemakaian tempat tidur pasien (BOR)	66,26%	68%		70%		72%												
					17	Rata-rata lama perawatan pasien (ALOS)	3,8	3,7		3,6		3,5												
			-			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata		1.646	0	1.775	0	1.885												
					1	Terpeliharanya gedung dan bangunan rumah sakit	100	100		12 bln	-	12 bln	-											
					2	Terpeliharanya Alat-alat kesehatan yang berfungsi sesuai dengan standar Rumah sakit Tipe C	100	100		12 bln	-	12 bln	-											
					3	Peralatan kantor penunjang pelayanan berfungsi dengan baik	100	100		12 bln	-	12 bln	-											

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	
				4	terpemerannya perlengkapan mebeuleur yang baik guna menunjang kualitas pelayanan	100	100		12 bln	-	12 bln	-										
				5	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	61%	64%		100%		100%											
			-	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			95.082	0	98.570	0	99.070											
				1	Persentase Peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan BPJS	100%	100%		100%		100%											
				2	Terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12	12		12		12											
				3	Terintegrasinya JKN	12	12		12		12											
				4	Terselenggaranya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	12	12		12		12											
				5	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%		100%		100%	2.450										
				6	Peningkatan jumlah jenis pelayanan kesehatan	12 plynn	12 plynn		13 plynn		14 plynn											
			-	Program peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan				0	0	100	0	650										
				1	Tipe kelas Rumah Sakit rujukan regional JKN wilayah Sumsel	-	B	-	B	-	B	-										
				2	Tingkatan akreditasi rumah sakit	-	Madya	-	Madya	50	Pari purna	600										
				3	Tingkat Akreditasi RS	0%	madya		madya		madya											
			2	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			371		1.698		1.771	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
			-	Program Keluarga Berencana			95		294		308	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk (KB)			89		93		97	Dppkb	
				1	Prevalensi peserta KB aktif	82,04%	79,00%		79,05%	100	80,00%	123		Cakupan tersedianya data kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				2	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need)	8,10%	13,00%		12,70%	100	12,50%	123										
				3	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%		100,00%	94	100,00%	62	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			5.532		5.796		6.059	Dppkb
			-	Program Pengendalian Penduduk			75		147		154			Cakupan Pelayanan KB		82%		83%		83%		
				1	Penurunan Laju penduduk	0,30%	0,30%		0,30%	147	0,30%	154										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penangng Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
							Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17		Rp 18	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
			-	Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga				75		147		154	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			757		793		829	Dppkb
				1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	25,42%	27,42%	28,42%	50	29,42%	50			Jumlah Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas	51 desa		69 desa		69 desa			
				2	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	10%	13%	15%	50	20%	50											
				3	Cakupan kesehatan reproduksi remaja	28%	32%	36%	47	40%	54											
			-	Program Penyuluhan dan Penggerakan serta penguatan keluarga kecil dan berkualitas				75		165		175										
				1	Persentase keluarga mandiri	75%	75%	80%		90%												
			-	Program meningkatnya dukungan sarana penyuluh KB				51		945		980										
				1	Terpenuhinya dukungan sarana Pelayanan KB	75%	75,00%	80%		90%												
3	1	5	Sasaran :																			
				Meningkatkan pemberdayaan Gender dan perlindungan anak	1)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,31%	60,54%	62,77%		65,01%					67,24%		69,47%		71,70%		
			1	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			715		1.781		1.877	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
			-	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			155		163		171	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			173		181		187	Dpppa	
				1	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	15	20	20		25				Tingkat Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%		100%		100%			
				2	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100		100		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan			42		44		46	Dpppa	
				3	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS	100	100	100		100				Tingkat Perlindungan Perempuan	100%		100%		100%			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
					4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	50	50		50		55		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		472		495		517	Dpppa
					5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	50		50		50			Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	100%		100%		100%		
					6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	54	100		100		100		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		42		44		46	Dpppa
					7	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	54	50		55		55			Tingkat Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%		100%		100%		
					8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	50		60		70		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		271		284		297	Dpppa
					9	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	4	5		6		7			Tingkat Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%		100%		100%		
					10	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	95	95		95		95		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak		338		354		370	Dpppa
			-	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				45		47		50			Tingkat Perlindungan Khusus Anak	100%		100%		100%		
				1	Rasio KDRT perempuan		0,90%	0,17%		0,17%		0,16%										
				2	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina		2	2		2		4										
				3	Rasio KDRT		0,90%	0,11%		0,11%		0,11%										
				4	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan		0,07%	0,07%		0,06%		0,06%										
				5	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan		0,05%	0,05%		0,05%		0,04%										
			-	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				400		725		765										

Kode	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				1	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	17,00	17,00		17,00	725	17,00	765									
		-	Program Peningkatan Perlindungan Anak				0		725		765										
				1	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	23%	50%	0	50%	725	50%	765									
		-	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak				70		74		77										
				1	Jumlah kecamatan layak anak	0	3	70	3	74	3	77									
		-	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak				45		47		50										
				1	Jumlah Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang diperdakan	0	1		0	0	1	0									
4		MISI 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi																			
4	1	Tujuan:																			
			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	5,01%	5,14%	0,24%		2,36%				3,09%		4,12%		5,05%			
4	1	1	Sasaran :																		
			Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1)	Nilai Tukar Petani	92,42%	94%		95%		96%			97%		98%		100%			
		1	URUSAN PANGAN				0		1.390		1.420	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
		-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				0		1.390		1.420	2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			300		330		350	
				1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	90,8		90,9		100			Lumbung Pangan Masyarakat		1 unit		1 unit		1 unit		
				2	Pola Pangan Harapan (PPH) Kesediaan Energi Untuk Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari)	2304		2389		2400		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1.527		1.584		1.651	Dkptph
				3	Pola Pangan Harapan (PPH) Kesediaan Protein Untuk Konsumsi (Gram/Kapita/Hari)	61,40		61,90		62,00			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan		83		84		85		
				4	Cadangan Pangan Daerah							2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan			116		121		127	Dkptph
				-	Pemerintah (Beras/Ton)	50	75		100		125		Cadangan Pangan untuk Daerah Rawan Pangan		5.000 kg		5.000 kg		5.000 kg		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17		Rp 18	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				- Masyarakat (Gabah/Ton)	770	780		790		800		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan		63		66		69	Dkptph	
				5 Persentase lumbung pangan yang dimanfaatkan	N/A	92%		95%		97%			Pemantauan dan Pengujian Keamanan Pangan Segar	7 sample		7 sample		7 sample			
				6 Tersedianya lumbung pangan	0	1 Unit	250	1 Unit	250	1 Unit	250										
				7 Tersusunnya buku SKPG dan peta kawasan pangan	0	1 dok	130	1 dok	80	1 dok	80										
				8 Tersedianya buku laporan NBM dan PPH		2 buku	60	2 buku	100	2 buku	100										
				9 Tersedianya cadangan pangan di daerah rawan pangan	0	10.000 Kg	150	10.000 Kg	150	10.000 Kg	150										
				10 Pemanfaatan perkarangan sebagai sumber pangan gizi	0	18 Kwt	200	21 Kwt	200	24 Kwt	230										
				11 Tersedianya laporan harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	0	12 Laporan	100	12 Laporan	100	12 Laporan	100										
				12 Tersedianya cadangan pangan di tiap lumbung pangan masyarakat	0	10000 kg	150	10000 kg	150	10000 kg	150										
				13 Terbinanya desa dan kawasan mandiri pangan	0	3 klmpk	200	3 klmpk	200	3 klmpk	200										
			2	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.065		6.270		9.900	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan								
			-	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1.703		1.950		2.500	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			1.537		1.611		1.684	Diskan
				1	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	5%	5%		5%	950	7%	1.100		Produksi Perikanan Tangkap	12%		20%		35%		
				2	Persentase Produksi Benih Ikan Unggul	5%	5%		10%	500	20%	700									
				3	Persentase Pokdakan yang Aktif	96 kelompok	50%		55%	300	65%	400	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		1.908		1.998		2.089	Diskan
				4	Persentase UPR/HSRT yang Aktif	18 UPR/HSRT	10%		15%	200	25%	300		Produksi Perikanan Budidaya	10%		15%		25%		
			-	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			1.061		1.720		2.200										
				1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	26005 ton	2%		5%	1.200	8%	1.500	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		1.481		1.551		1.622	Diskan dan Kecamatan
				2	Persentase KUB Nelayan yang Aktif	38 KUB	10%		20%	400	35%	550		Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan	25%		30%		40%		
				3	Persentase Pelayanan TPI Sungai Lumpur	25 surat	50%		60%	120	70%	150									
			-	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan			1.302		1.550		2.100	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			417		437		456	Diskan
				1	Persentase Penurunan Ilegal Fishing	20 kasus	10%		20%	250	30%	350		Konsumsi Ikan Per Kapita	15%		25%		40%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)							Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan / Impact / Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang Aktif	10 kelompok	10%		30%	150	50%	250									
		3	Pelestarian Sumberdaya Perikanan	15 lokasi	15 lokasi		16 lokasi	250	16 lokasi	500									
		4	Persentase Pengelolaan Hasil Perikanan	100%	100%		100%	900	100%	1.000									
	-	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			0		200		250										
		1	Presentase Tingkat Konsumsi Ikan perkapita	33,6 Kg/Kapita	2%	0	5%	200	10%	250									
	-	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			0		0		2.000										
		1	Persentase Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau dan Air Tawar (kawasan minapolitan) yang aktif	868 ha	2%		3%		4%	2.000									
	-	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana			0		650		650										
		1	Peningkatan Jalan Produksi Budidaya	0 unit		1 unit	650	1 unit	650										
		2	Prosentase Pengembangan/ Penyediaan Pabrik Pakan/ Mesin Pakan Mandiri	3 unit	2 unit	3 unit		4 unit											
	-	Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan			0		200		200										
		1	Tersedianya Data Base Perikanan	1 buku	1 buku	0	1 buku	200	1 buku	200									
	3	URUSAN PERTANIAN			10.576		20.380		22.765	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
	-	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			320	-	1.050	-	675	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		2.839		3.043		3.175	Dkptph / Disbunak	
		1	Nilai Tukar Petani	102,11	103,45	104,95		105,60			Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	2%		2%		2%			
		2	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	10 Kelompok	10	10		10		3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		4.611		4.987		5.192	Dkptph / Disbunak	
		3	Persentase kelompok tani yang berprestasi	0%	100	100		100			Tingkat Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%		100%		100%			
		4	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lumbung pangan	100%	100	100		100		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		502		595		621	Disbunak	
		5	Jumlah kelompok tani/ pelaku agribisnis yang mengikuti bimbingan dan pelatihan teknis	0	20 Klp	25 Klp	200	30 Klp	225		Persentase Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	2%		2%		2%			

Kode	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	
					6	Jumlah petani/ pendamping yang mengikuti PEDTA/PENAS KTNA	0	60 org		0	400	60 Org	0	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		368		432		453	Dkptph / Disbunak	
					7	Nilai Tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (Rp/TK)	N/A (BPS)								Persentase Penanggulangan Kerusakan Lahan Oleh OPT dan Bencana Pertanian	100%		100%		100%			
					7	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	10 klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk	250	5 Klmpk	250	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian		130		150		155	Disbunak	
					8	Tersedianya data perusahaan dan pelaku agribisnis lainnya	54 PBSN	54 PBSN		54 PBSN	200	54 PBSN	200		Tersedianya perkembangan data perusahaan dan pelaku agribisnis lainnya	54 perusahaan perkebunan		54 perusahaan perkebunan		54 perusahaan perkebunan			
			-	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ perkebunan						265	-	845	-	890	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		944		989		1.034	Dkptph
					1	Promosi atas hasil produksi pertanian (event)	3 Kali	3 Kali	0	3 Kali	225	3 Kali	250		Tingkat Pendampingan Penyuluh Pada Kelompok Tani	100%		100%		100%			
					2	Jumlah pasar tani	0	2 Unit	0	4 Unit	120	6 Unit	140										
					3	Stabilnya harga dan pasokan pangan pokok melalui toko tani indonesia	0	1 Unit	-	-	-	-	-										
					4	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan	20 Produk, 5 UPPB	1 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB	500	2 Produk, 2 UPPB	500										
			-	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan						730	0	1.600	0	1.650									
					1	Terpenuhinya Benih Padi Penangkaran unggul bermutu	2.642 ton	2650	-	2658	100	2666,00	100										
					2	Meningkatnya pengetahuan petani tentang peningkatan produksi perkebunan	10 Klmpk	20 klmpk		20 klmpk	200	20 klmpk	250										
					3	Tersedianya saprodi perkebun	15 Klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk	300	5 Klmpk	300										
					4	Meningkatnya luas areal dan produksi tanaman perkebunan	50 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk	800	5 Klmpk	800										
					5	Terhindarnya kebun masyarakat dari kebakaran	200 Ha	200 Ha		200 Ha	200	200 Ha	200										
			-	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan Lapangan						644	-	850	-	900									
					1	Persentase penyuluh yang bersertifikat	2	-		-	0		0										
					2	Tingkat pemenuhan 1 desa 1 penyuluh	179 PPL	3 PPL		3 PPL	0	3 PPL	0										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujua n/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				3	Terpenuhinya insentif/ alat peraga/ alat bantu penyuluh pertanian	79	79		220	375	223	400									
				4	Peningkatan wawasan/ motivasi penyuluh pertanian setelah mengikuti pertemuan teknis kabupaten	179 PPL	179		220	175	223	200									
				5	Meningkatnya kapasitas penyuluh perkebunan lapangan	47 Orang	47 Orang	250	47 Orang	300	47 Orang	300									
			-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan				6.562	-	11.790	-	14.080									
				1	Nilai Tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (Rp/TK) (Lihat di SDG's)	N/A (BPS)	#####		#####		#####										
				2	Tingkat pemenuhan data base pertanian	10	10		10	250	10	250									
				3	Jumlah alat pasca panen yang tersedia																
					Terpal Jemur	0	250		300	250	350	300									
					RMU	0	1		1	300	2	650									
					Combine harvester	0	5		5	2.000	5	2.200									
					Power Thresher	0	10		10	350	15	500									
					Corn seller	0	10		10	350	15	500									
					Alat Packing beras	0	1 Unit		1 Unit	250	1 Unit	250									
				4	Jumlah luas tanaman padi/ palawija																
					Produksi tanaman pangan (ton)																
					- Padi	0	846.068		862.989	800	880.249	850									
					- Jagung	0	47.172		48.587	500	50.045	550									
					Produktivitas Tanaman pangan (ku/ha)																
					- Produktifitas Padi (Ku/ Ha)	0	51,17		52,19		53,24										
					- Produktifitas Jagung (Ku/ Ha)	0,00	42,99		43,00		43,21										
				5	Jumlah luas pertanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar	0 ha	100		150		200										
				6	Tersedianya lumbung pangan	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit										
				7	Persentase lumbung pangan yang dimanfaatkan	N/A	80 Persen		80 Persen		80 Persen										
				8	Panjang Jalan Usaha Tani	0	3.000 M		4.000 M	1.600	5.000 M	2.000									
				9	Tingkat pemenuhan laporan agroklimat	0	18 Lap		18 Lap	100	18 Lap	100									
				10	Tingkat pengawasan pupuk bersubsidi	0	18 Kec		18 Kec	80	18 Kec	80									
				11	Tercukupinya kesediaan air pada kawasan tanaman pangan	0	225 Ha		250 Ha	2.000	275 Ha	2.500									

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		12	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Program Pajale	0	18 Kec	18 Kec	100	18 Kec	100									
		13	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi program kawasan hortikultura	0	18 Kec	18 Kec	100	18 Kec	100									
		14	Terbinanya desa dan kawasan mandiri pangan	0	3 klmpk	3 klmpk		3 klmpk										
			produksi Duku	23.869	24.585	25.322	250	26.081	275									
			Produksi Durian	5.976	6.155	6.339	250	6.529	275									
			produksi Mangga	21548 Ton	21.550	21.555		21.565										
			Produksi Pisang	12.619	12.997	13.386	250	13.787	275									
		15	Jumlah produksi tanaman sayur															
			Produksi Cabe Besar	145.234	149.591	#####	1.125	#####	1.350									
			Produksi Cabe Rawit	34.656	35.695	36.765	585	37.867	675									
		16	Produktivitas tanaman sayuran															
			Produksi Cabe Besar	15,8	16,1	16,4		16,7										
			Produksi Cabe Rawit	16,4	16,7	18		18,3										
		17	Tersedianya alat pasca panen produk perkebunan dan peternakan	26 Klmpk	3 Klmpk	5 Klmpk	300	5 Klmpk	300									
	-	Program pengembangan agribisnis			75		0		0									
		1	Persentase Gapoktan yang di	-	-	-		-										
	-	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ perkebunan			400		800		950									
		1	Terlaksananya kajian pengembangan perkebunan	1 Dok	1 Dok	0	0	1 Dok	150									
		2	Tersedianya prasarana dan sarana perkebunan tepat guna	18 Klpk	3 Klpk	5 Klpk	800	5 Klpk	800									
	-	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			300		400		400									
		1	Terciptanya kesehatan hewan di masyarakat	22.000 Ekor	22.000 Ekor	20.000 Ekor	400	18.000 Ekor	400									
	-	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			1.210		2.175		2.200									
		1	Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak dan meningkatnya populasi ternak	12 Unit, 2.500 Dosis	3 Unit, 2.500 Dosis	3 Unit, 2.500 Dosis	800	3 Unit, 2.500 Dosis	800									
		2	Meningkatnya populasi ternak	2.574 Ekor	2.600 Ekor	2.700 Ekor	1.200	2.800 Ekor	1.200									
		3	Meningkatnya konsumsi gizi produk peternakan	40 Sekolah	75 Sekolah	80 Sekolah	175	85 Sekolah	200									
	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			0		200		200									
		1	Peningkatan sarana prasarana pasar hewan	2 Unit	1 Unit	0	1 Unit	200	1 Unit	200								

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
			-	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				0		600		750										
				1	Tersedianya kajian pengembangan peternakan (action plane)		1 Dok	1 Dok			1 Dok	150										
				2	Tersedianya prasarana dan sarana peternakan tepat guna		15 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk	600	5 Klmpk	600									
			-	Program Peningkatan Produksi Peternakan					70		70		70									
				1	Persentase tingkat produksi ternak		50	50		50		50										
4	1	2	Sasaran :																			
				Meningkatnya pemberdayaan koperasi	1)	Persentase koperasi yang aktif	83,00%	84%		84%		85%				85%		86%		86%		
			1	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					720		915		945	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
			-	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					0		100		100	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		105		110		115	Diskoperin
					1	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang memiliki izin usaha	5%	6%	0	7%	100	8%	100		Tingkat Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	5		6		7		
														2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		52		55		57	Diskoperin
															Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	86%		87%		88%		
			-	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah					120		185		195	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi		105		110		115	Diskoperin
					1	Persentase UMKM yang sehat	15%	16%		17%	85	18%	95		Tingkat upaya pemenuhan KSP/ USP Koperasi berprestasi	3		3		3		
					2	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	1%	1%		2%	100	3%	100	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		288		302		316	Diskoperin
															Persentase Koperasi Aktif	86%		87%		88%		
			-	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah					225		175		190	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		52		55		57	Diskoperin
					1	Persentase UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha	15%	16%		17%	85	18%	90		Tingkat upaya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	4		5		6		
					2	Persentase pemenuhan sistem pendukung usaha bagi koperasi	1%	2%		3%	90	4%	100	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		362		379		396	Diskoperin
															Persentase Usaha Mikro dan Kecil	19%		20%		21%		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
							Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10			Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18		
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
													2.17.08	Program Pengembangan UMKM		136		143		149	Diskoperin	
														Tingkat upaya pengembangan UMKM	8		9		10			
			-	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			375		455		460											
					1	Persentase koperasi aktif	83%	83%		84%	275	85%	275									
					2	Jumlah koperasi berprestasi	3	3		3	100	3	100									
					3	Jumlah desa yang mempunyai koperasi aktif	279	286		293	80	300	85									
4	1	3	Sasaran :																			
				Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1)	Indeks Gini	0,33	0,28		0,31		0,31				0,31		0,31		0,30		
			1	URUSAN PERDAGANGAN					5.660		8.700		11.850	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
			-	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				1.600		575		600	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		141		148		155	Disdag	
					1	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	0%	11		13	500	15	500		Terdatanya gudang sesuai peruntukan dan kegunaannya	10 gudang		20 gudang		30 gudang		
					2	Persentase monitoring dan pengawasan barang dan jasa	85	3		4	75	5	100	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		1.806		1.892		1.979	Disdag
														Jumlah sarana perdagangan yang di rehab atau dibangun	3 pasar		4 pasar		5 pasar			
			-	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				0		450		450	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor		42		44		46	Disdag	
					1	Jumlah komoditi yang diekspor	1	315 Ton	0	333 Ton	450	350 Ton	450		komoditi unggulan yang dipromosikan untuk ekspor	5 komoditi		8 komoditi		16 komoditi		
			-	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				4.060		7.300		10.350										
					1	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (Pasar dan Gudang)	2	2		3	5.000	5	7.000									
					2	Persentase penyediaan sarana perdagangan	8%	15%		20%	2.000	25%	3.000									
					3	Persentase penyediaan informasi dan promosi perdagangan	100%	100%		100%	300	100%	350									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023					Tahun 2024	
						Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10			Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16		Target 17	Rp 18
			-	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		0		375		450												
				1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	5,36%	10%	0	20%	200	30%	250										
				2	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	10	20%	0	30%	175	40%	200										
			2	URUSAN PERINDUSTRIAN				595		1.080		1.085	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
			-	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				0		200		200	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			100		105		110	Diskoperin
				1	Jumlah IKM Yang menerapkan inovasi	5	6	100	7	200	8	200		Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan industri, klaster dan sentra industri		1		2		3		
													3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			100		105		110	Diskoperin
			-	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				20		200		200		Persentase pengendalian izin usaha industri		5%		7%		9%		
				1	Jumlah rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah	72	75		80	100	85	100	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			1.178		1.234		1.289	Diskoperin
				2	Jumlah IKM yang menjalin kerjasama dengan swasta	0	1		2	100	3	100		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		25%		30%		35%		
			-	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				130		80		85										
				1	Jumlah produk IKM yang memiliki SNI	0	0	130	1	80	2	85										
			-	Program Penataan Struktur Industri				200		100		100										
				1	Persentase penataan hubungan antara industri hulu dan hilir	25%	30%	200	35%	100	40%	100										
			-	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				245		500		500										
				1	Jumlah IKM yang memiliki sarana informasi	5	7		9	100	11	100										
				2	Pameran hasil industri kecil dan kerajinan	3	4		4	400	4	400										
4	1	4	Sasaran :																			
					Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	1)	Tingkat pengangguran terbuka	3,65	2,98		3,29		3,62			3,30		2,98		2,77		
			1	URUSAN TENAGA KERJA				485		389		418	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
			-	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja				125		249		268	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			937		982		1.027	Disnakertrans
				1	Tingkat Pengangguran terbuka	3,45%	3,25%		3,00%	99	2,75%	108		Persentase pencari kerja yang dilatih		64%		80%		96%		
				2	Rasio penduduk yang bekerja	78,30%	86,30%		86,50%	80	86,80%	85	2.07.05	Program Hubungan Industrial			188		197		206	Disnakertrans

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
							Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				3	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	20%	25%		30%	70	35%	75		Persentase hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif	95%		95%		95%			
			-	Program Peningkatan kesempatan kerja				200		65		70										
				1	Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan	44,90%	45%	200	48%	65	50%	70										
			-	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan				160		75		80										
				1	Persentase Sengketa Pengusaha-pekerjaan yang diselesaikan	20%	22%	160	25%	75	30%	80										
4	1	5	Sasaran :																			
				Meningkatnya PAD	1)	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	10,52%	10,55%		10,6%		10,7%				10,8%		10,9%		11%		
			1	KEUANGAN, URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1.985		2.919		3.068	5.02	Keuangan								
			-	Program Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah				1.985		2.919		3.068	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		3.300		3.458		3.615		Bppd
				1	Persentase Peningkatan Pencapaian PAD	10,5%	10,55%		10,60%		10,70%			Persentase Realisasi Pajak Daerah	100%		100%		100%			
			2	URUSAN PENANAMAN MODAL				732		1.150		1.150	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
			-	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				225		700		700	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		630		660		690		Dpmptsp
				1	Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,06%	10%	-	10%	-	10%	-		Peningkatan Persentase Investasi di Kabupaten OKI	10%		10%		10%			
				2	Jumlah Pengunjung dalam pameran investasi	100	300	-	300	-	300	-	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal		315		330		345		Dpmptsp
				3	Jumlah buku informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kab.OKI	150	50	-	50	-	50	-		Menarik minat investor untuk berinvestasi / menanamkan modal di Kab. OKI	400 pengunjung		450 pengunjung		450 pengunjung			
				4	Jumlah Perusahaan yang dibina	6	50	-	50	-	50	-	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		657		688		720		Dpmptsp
														Pelaku Usaha atau investor yang memenuhi standarisasi dan informasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan	51 perusahaan		52 perusahaan		54 perusahaan			
			-	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				162		200		200										
				1	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,393 T	3.938	-	4.331	-	4.765	-										
				2	Ketersediaan sistem informasi penanaman modal	100	30 izin	-	30 izin	-	30 izin	-										
				3	Tingkat kualitas pelayanan perizinan	100	100	-	100	-	100	-										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
							Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17		Rp 18	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				4	Ketersediaan peta investasi	1	0		1 dok		0											
			-	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan perizinan				345		250		250										
				1	Pelayanan Terpadu satu Pintu Kepada Masyarakat	100%	100%		100%	100	100%	100										
				2	Verifikasi, Visitasi dan Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Teknis	100%	100%		100%	150	100%	150										
			3	URUSAN PARIWISATA				2.102		7.459		9.604	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
			-	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0		1.905		2.285	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			285		252		251	Disbudpar
				1	Jumlah kunjungan wisatawan	10.242	10.444		10.546	425	10.646	645		Jumlah Destinasi Wisata		60		70		80		
				2	Tingkat promosi pariwisata	29	30		40	1.480	50	1.640	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata			628		626		372	Disbudpar
														Jumlah kunjungan wisatawan		10.800		10.900		11.000		
			-	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				353		2.700		3.720	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			0		100		100	Disbudpar
				1	Peningkatan Jumlah objek wisata	2	2		2	350	2	350		Peningkatan Jumlah Zona Kreatif		0		2		2		
				2	Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	15,38	23,08		30,77	2.350	38,46	3.370	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			180		138		128	Disbudpar
			-	Program pengembangan kemitraan				15		1.120		1.865		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		182		187		190		
				1	Tingkat pengembangan kemitraan	161	166	15	172	1.120	177	1.865										
			-	Program Pengembangan daya tarik wisata				1.734		1.734		1.734										
				1	Persentase pemeliharaan objek wisata	50	50		50		50											
4	1	6	Sasaran :																			
			-	Menurunkan angka kemiskinan	1)	Angka kemiskinan	15,28%	15,01%		14,73%		14,45%				14,17%		13,89%		13,61%		
			1	URUSAN SOSIAL				1.000		783		1.915	pendidikan									
			-	Program Pengembangan data dan informasi statistik daerah				1000		150		1250										
				1	Tersedianya data pendukung program				3 dok	150	3 dok	1.250										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10			Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		-	Program bantuan dan jaminan sosial			0		633		665	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
			1	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan pemberian bantuan keluarga miskin	18 Kec	18 Kec		18 Kec		18 Kec	2.13.02	Program Penataan Desa			185		194		203	Dpmd
			2	Terpenuhimmya kebutuhan dasar Korban Bencana	100%	100%		100%		100%		Persentase Desa yang Memperoleh Penataan Desa		100%		100%		100%		
			3	Terlaksananya kesiap siaga bencana	100%	100%		100%		100%	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa			2.624		2.767		2.893	Dpmd
												Tingkat Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		100%		100%		100%		
											2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			2.307		2.416		2.526	Dpmd
												Persentase Kelembagaan Desa yang Diberdayakan		100%		100%		100%		
											2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
											2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja			416		436		456	Disnakertrans
												Persentase pencari kerja yang ditempatkan		51%		52%		53%		
											3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
											3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			84		88		92	Disdag
												Tersedianya data harga barang kebutuhan bahan pokok		9 bahan pokok		9 bahan pokok		9 bahan pokok		
											3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen			280		293		306	Disdag
												Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera sahkan		400		450		500		
											3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			194		203		212	Disdag
												Jumlah pameran atau expo yang diikuti		2 pameran		4 pameran		6 pameran		
5	MISI 5 : Mewujudkan Penataan Ruang Yang Ramah Lingkungan																			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)							Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	1	Tujuan :																		
		Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan	1) Indeks kualitas lingkungan hidup	64	64		63		63			62		62		62				
5	1	Sasaran :																		
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1) Indeks tutupan lahan	55,97	55,97		54		53			52		51		50				
			2) Indeks kualitas air	65,38	64		64		63			63		62		62				
			3) Indeks kualitas udara	99,06	99,06		98		97			96,00		95,00		94,00				
		1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				3.900		4.290		4.719									
		-	Program Perencanaan Tata Ruang				2.650		2.915		3.207		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							
			1	Keberadaan Peraturan Daerah RTRW	Ada	-	2.650	-	2.915	-	3.207	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		4.835		5.318		5.560	Pupr
		-	Program Pemanfaatan Ruang				100		110		121		Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang	4 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen			
			1	Persentase Luas Wilayah Produktif	70%	100%	100	100%	110	100%	121									
		-	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1.150		1.265		1.392									
			1	Ketaatan terhadap RTRW	90%	100%	0	100%	0	100%	0									
			2	Persentase luas wilayah perkotaan yang sesuai tata ruang	50%	100%	0	100%	0	100%	0									
		2	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				5.239		12.239		25.609	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
		-	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.224		10.173		24.224	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		456		478		500	Dlh
			1	Persentase penanganan sampah	6,06 %	7 %		8 %	7.191	9%	21.241		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%		100%		100%		
			2	Persentase pengurangan sampah	8,5 %	10 %		12 %	2.982	15 %	2.983	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		945		990		1035	Dlh
		-	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				636		1.536		891		Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	40%		45%		50%		
			1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64 %	64 %		63 %	50	63 %	65	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		3150		3210		3365	Dlh dan PRKP
				Indeks kualitas air	65,38 %	64		64 %		63 %			Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%		100%		100%		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
					Indeks kualitas udara	99,09 %	99,09		98 %		97 %		2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		112		117		123	Dlh	
					Indeks Tutupan Lahan	55,97 %	55,97		54 %		53 %			Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	40%		45%		50%			
					2 Persentase tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %	50	100 %	50	2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		152		159		166	Dlh	
					3 Jumlah Pengujian Kualitas Lingkungan pada UPT Laboratorium Lingkungan	93 sample	93 sample		100 sample	0	150 sample	0		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%		100%		100%			
					4 Persentase wilayah dalam kota kayuagung yang bersih	80	80		80	110	80	110	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		105		110		115	Dlh	
					5 Persentase jumlah peralatan kualitas lingkungan (alat laboratorium)	95	95		95	1.076	95	411		Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	40%		45%		50%			
					6 Persentase penataan pengendalian pencemaran air dan pencemaran udara	100%	100%		100%	100	100%	100	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		0		110		110	Dlh	
					7 Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	30 prshn	30 prshn		40 prshn	0	45 prshn	0		Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0%		90%		90%			
					8 Persentase Pelayanan Koordinasi Penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UP dan SBPL)	100%	100%		100%	200	100%	220	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		78		82		86	Dlh	
					9 Jumlah desa pembinaan kampung iklim	2 Desa	2 Desa		2 Desa	50	2 Desa	50		Tersedianya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%		100%		100%			
													2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan		7188		7531		7873	Dlh	
														Persentase Layanan Persampahan	40%		45%		50%			
					- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		175		375		325											
					1 Persentase Jumlah sekolah adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah		3 sekolah	100	3 sekolah	100										
					2 Tingkat ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup (informasi status	83 %	85 %		75	87 %	275	90 %	225									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19		
		-	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			20		20		20												
				1	Tingkat pengendalian polusi	20%	30%		30%		30%											
		-	Program Kerjasama Pembangunan			100		100		100												
				1	Jumlah perusahaan yang mengikuti forum CSR -pkbl Kab. OKI	10 prshn	10 prshn		10 prshn	100	10 prshn	100										
		-	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			85		35		50												
				1	Jumlah ruang terbuka hijau	2 desa	2 desa		2 desa		2 desa											
		3	URUSAN TRANSMIGRASI				1.045		1.197		1.208	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
		-	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				1.045		1.197		1.208	3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi			0		100		100	Disnakertrans	
				1	Rencana Penyiapan Kawasan Transmigrasi	2 KW	4 KW	1,045	4 KW	1.145	4 KW	1.150		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	-		100%		100%			
				2	UPT yang dibina dan dikembangkan (Ekosobud,Sapras)	2 UPT	1 UPT	50	1 UPT	60	1 UPT	70	3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			546		472		498	Disnakertrans
														Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	30%		50%		85%			
													3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			166		174		182	Disnakertrans
														Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	55%		70%		85%			
5	1	2	Sasaran :																			
					Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	1)	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	85%	86		87		89			91		93		95%		
		1	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				50		50		50											
		-	Program Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan				50		50		50											
				1	Jumlah penanganan kebakaran hutan dan lahan	2 desa	2 desa		2 desa		2 desa											
		2	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.470	0	1.530	0	1.655	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
		-	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				220		230		290	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana			1.399		1.465		1.532	Bpbd	
				1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	100%	100%	-	100%	30	100%	90		Persentase warga negara yang memperoleh perlindungan dari ancaman bencana	100%		100%		100%			
				2	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	-	100%	30	100%	140										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)								Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmendagri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024				
				Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 13	Rp 14			Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
			3	Tingkat pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran	-	-	80%	100	85%	100										
		-	Program Layanan Informasi di Daerah Rawan Bencana			0		250		320										
			1	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	18 Lok	18 Lok	-	18 Lok	250	18 Lok	320									
		-	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			0		500		310										
			1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	2 Desa		2 Desa	200	2 Desa	250									
			2	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mendapat peralatan pelindung	-	-		45 Orang	100	45 Orang	60									
		-	Program Penanganan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana			0		400		555										
			1	Tingkat Kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan status darurat bencana	80%	80%		80%		80%	50									
			2	Jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	10 Posko	10 Posko		10 Posko		10 Posko	300									
			3	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	1 Lap	1 Lap		-		-	-									
		-	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana			250		150		180										
			1	Jumlah lokasi yang dilakukan survey penaksiran kerusakan dan kerugian pasca bencana	1 Lap			1 Lap	150	1 Lap	180									
		-	Program Tanggap Darurat			520		0		0										
			1	Persentase penanganan bencana	50%	60%														
		-	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana			480		0		0										
			1	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bencana	50%	60%														
6		MISI 6 : Menciptakan Kehidupan Sosial- Budaya Masyarakat yang Relegius, Tertib, Aman dan Nyaman																		
6	1	Tujuan :																		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan / Impact / Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023					Tahun 2024							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19							
				Menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik	Kasus konflik sosial SARA, politik dan ekonomi	0													0									
6	1	1	Sasaran :																									
				Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	1) Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat	0	0		0						0		0		0									
			1	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.235		5.180		6.080	8	Unsur Pemerintahan Umum											
			-	Program Peningkatan peran serta masyarakat							292		1.260		1.480	8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik											
					1	Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat	60%	65%		70%	150	75%	200	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan							369		387		404	Kesbangpol	
					2	Angka (Penurunan) Kasus Konflik Sosial	60%	65%		70%	150	75%	200		Persentase tingkat wawasan kebangsaan					100%			100%		100%			
					3	Cakupan pemantauan Kewaspadaan Dini di daerah	18 kec	18 kec		18 kec	200	18 kec	250	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							2.162		2.265		2.368	Kesbangpol	
					5	Cakupan pemantauan Perkembangan Wawasan Kebangsaan di daerah	18 kec	18 kec		18 kec	50	18 kec	55		Persentase kader partai politik yang mengikuti pembinaan					100%			100%		100%			
					6	Cakupan pemantauan perkembangan Forum kerukunan umat beragama dan Forum Silaturahmi Umat Beragama		-		18 kec	60	18 kec	75	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							126		132		138	Kesbangpol	
			-	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							333		995		1.180		Persentase ormas yang telah terdaftar					100%			100%		100%	
					1	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)	1	1		1	200	1	250	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya							325		341		356	Kesbangpol	
					2	Pemantauan Tenaga Kerja asing dan organisasi masyarakat asing	18	18		18	65	18	70		Persentase tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya					100%			100%		100%			
					3	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran dan Prekursor Narkotika (P4GN)				100 orang	700	100 orang	770	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							997		1.045		1.092	Kesbangpol	
					4	Persentase peningkatan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	0	100%	30	100%	90		Persentase tingkat waspada dini terhadap ancaman konflik sosial					100%			100%		100%			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19
			-	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			450		1.380		1.550												
				1	Jumlah tokoh Agama yang memahami pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama	75 org	142 org	150	142 org	200	142 org	250											
				2	Jumlah peserta penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	60 org	200 org	300	200 org	350	200 org	400											
				3	Jumlah peserta pengembangan Nilai-nilai luhur budaya bangsa	60 org	-	0	120 org	130	120 org	150											
				4	Jumlah masyarakat yang dilatih (Bela Negara)	663 org	-	0	600 org	700	620 org	750											
			-	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			0		150		175												
				1	Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama yang memahami wawasan kebangsaan	60 org	-	0	142 org	150	142 org	175											
			-	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			445	-	90	-	110												
				1	Cakupan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah Serentak	18 kec	-	-	0	-	0												
				2	Cakupan pemantauan pemilihan Presiden dan Pemilihan Legeslatif		18 kec	-	0	-	0												
				3	Cakupan pemantauan anggota Linmas Hansip/ Se-Kab. OKI	18 kec	18 kec	80	18 kec	90	18 kec	110											
				4	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan hansip	100%	100%	-	100%	0	100%	0											
				5	Tingkat engamanan Pilpres/Pileg/Pilkada Gubernur/Bupati	100%	100%	-	100%	0	100%	0											
			-	Program pendidikan politik masyarakat			240	-	195	-	215												
				1	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)	1	-	0	2	0	2	0											
				2	Jumlah pengurus partai politik yang ikut forum diskusi politik	60	-	0	60	75	60	85											

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)							Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024				
				Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 13			Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	Jumlah aparat yang memahami aturan pelaksanaan pileg dan pilkada	120	0		0		0										
		5	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	100%	100%	0	100%	0	100%	0									
	-	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		100		150										
		1	Persentase aset Budaya benda dan non benda yang terverifikasi	10	-	0	10	120	10	130									
	-	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			475		940		1.130	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		2.091		2.191		2.291		
		1	Persentase penegakkan perda dan Perkada	100%	100%		100%	100%		1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.374		1.449		1.524	Satpol PP & PK	
		2	Peningkatan Pengamanan, pengawalan pejabat dan pengamanan aset / kekayaan daerah	100%	100%		100%	100%			Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%		100%		100%			
	-	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat			0		70		90	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		717		742		767	Satpol PP & PK	
		1	Persentase penurunan angka penyakit masyarakat	100%	100%	0	100%	70	100%	90		Persentase penyelenggaraan pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran	100%		100%		100%		
	2	URUSAN PERTANAHAN			10.783		2.055		32.095	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		43.224		45.282		47.341		
	-	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			10.150		400		30.405	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1.464		1.533		1.603	Pertanahan	
		1	Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	0	100		100	0	100	30.000		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%		100%		100%		
										2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		38.411		40.227		42.043	Pertanahan	
												Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%		100%		100%		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)		Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Kepmenda gri No. 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		-	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan			633		1.455		1.490	2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		150		165		180	Pertanahan	
			1 Tersedianya Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	100	100		100	325	100	350		Persentase Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum, dan Tanah Absentee	100%		100%		100%			
											2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat		705		739		773	Pertanahan	
												Tingkat Penetapan Tanah Ulayat	100%		100%		100%			
											2.10.08	Program pengelolaan tanah kosong		100		110		120	Pertanahan	
												Tingkat Pengelolaan Tanah Kosong	100%		100%		100%			
											2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		423		443		463	Pertanahan	
												Persentase Izin Membuka Tanah	100%		100%		100%			
		-	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			0		200		200	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah		1.971		2.065		2.159	Pertanahan	
			1 Tersedianya penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	1 lap	1 lap		1 lap	200	1 lap	200		Tingkat Penatagunaan Tanah	100%		100%		100%			
		3	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			3.595		6.280		6.975										
		-	Program Pelayanan Peningkatan Pendidikan dan Kesenian			3.595		6.280		6.975										
			1 Jumlah pelayanan pendukung peningkatan peribadatan	3155 org	3155 org		4155	2.500	4155	2.500	-									
			2 Jumlah terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	700 org	700 org		650 org	555	650 org	600										
			3 Jumlah pembinaan dan peningkatan kerohanian masyarakat	1000 org	1000 org		1000 org	300	1250 org	350										
			4 Cakupan pembinaan keagamaan	3 lokasi	3 lokasi		3 lokasi	500	3 lokasi	600										
			5 Jumlah peserta pelayanan administrasi pernikahan	140 pasang	140 pasang		205 pasang	550	272 pasang	650										
			6 Jumlah peserta pelayanan pendukung pendidikan peribadatan	2000 org	2000 org		2250 org	400	2500 org	500										
		4	URUSAN KEBUDAYAAN			461		6.165		6.750	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		2.464		2.631		2.648		
		-	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			78		1.050		1.010	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan		2.424		2.349		2.304	Disbudpar	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)			Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Misi/Tujuan/ n/Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
				1	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan	31 CB	0%		1%	520	2%	580		Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7		7		8			
				2	Persentase Cakupan Kajian Seni	15 Seni	0%		1%	530	2%	430	2.22.04	Program Pembinaan Sejarah		0		240		300	Disbudpar	
														Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya dan Sejarah	0		250		300			
													2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		40		42		44	Disbudpar	
														Jumlah Cagar Budaya yang Diinventaris dan Dilestarikan	35		40		45			
			-	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				185		2.875		3.350										
				1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	4	185	5	2.875	6	3.350										
			-	Program Pengembangan Nilai Budaya				198		940		790										
				1	Persentase peran serta pelaku Budaya dalam mewujudkan seni budaya OKI	25	25	198	25	940	25	790										
			-	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				0		1.300		1.600										
				1	Jumlah Tampilan Tim Kesenian Kab. OKI di Luar Daerah/Luar Negeri	100	100	0	100	1.300	100	1.600										
6	1	2	Sasaran :																			
				1)	Menurunnya jumlah peyandang masalah kesejahteraan sosial	Angka PMKS yang mendapat layanan	8%	10		10					10		10		10%			
			1	URUSAN SOSIAL				832		1.127		1.184	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
			-	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.				169		177		186	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial			1.113		1.166		1.219	Dinsos
				1	Persentase PMKS mandiri	NA	20,0%		20,0%		20,0%			Tingkat pemberdayaan sosial yang terlaksana	100%		100%		100%			
				2	Terbinanya KK komunitas adat terpencil	1 klmpk			1 klmpk		1 klmpk		1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			61		64		66	Dinsos
				3	Tercapainya pemberian bantuan sarana lingkungan bagi desa terpencil	5 Unit			5 Unit		5 Unit			Persentase penanganan warga negara migran yang dapat dipenuhi	100%		100%		100%			
			-	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				479		750		788	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial			477		500		523	Dinsos
				1	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS				100%		100%			Persentase penanganan rehabilitasi sosial yang dapat terpenuhi	100%		100%		100%			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006)				Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (TH. 2018)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)					Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu nan Daerah (Kepmenda gri No. 050- 3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/Outcome	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
							Target 5	Rp 6	Target 7	Rp 8	Target 9			Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15		Rp 16	Target 17
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
					2	Tersedianya pelayanan, perlindungan dan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban trafficking	10	12%		14%	15%		1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		286		300		313	Dinsos	
					3	Persediaan buffer stock untuk korban bencana	6.000	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket			Tingkat pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	100%		100%		100%			
		-	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					25		0		0	1.06.06	Program Penanganan Bencana		383		401		419	Dinsos	
					1	Jumlah penyandang disabilitas yang diberdayakan	50	50 org						Tingkat pemenuhan penanganan bencana	100%		100%		100%			
					2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial	70	70 Org					1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		68		71		75	Dinsos	
		-	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					130		200		210		Tingkat pemenuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%		100%		100%			
					1	Terbentuknya WKSBM Kab. OKI		20%		20%	20%											
					2	Persentase Organisasi sosial yang berdaya		20%		20%	20%											
					3	Terlaksannya pembinaan dan penilaian pilar-pilar sosial berprestasi		20%		20%	20%											
					4	Tingkat pembinaan tenaga sosial masyarakat		100%		100%	100%											
		-	Program Pembinaan anak terlantar dan lanjut usia					29		0		0										
					1	Tingkat kemandirian anak terlantar dan lanjut usia	20%	20%														



Bab VII

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Kerangka Pendanaan Pembangunan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah.

Kebijakan pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kedepan memegang prinsip *“money follow program”* yaitu program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang akan mendapatkan anggaran. Pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, pinjaman daerah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan akan digunakan untuk mendanai pembangunan yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka postur dan kerangka pendanaan mengalami perubahan dari sebelumnya pada bagian Belanja Daerah. Perubahan postur APBD tersebut, dari sebelumnya bahwa Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, maka mengalami perubahan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja

Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Selain itu, ada penyesuaian target pada kerangka pendanaan (proyeksi) yang disusun dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2020-2021. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2019-2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir disajikan dalam tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024

(dalam jutaan)

No	URAIAN	Proyeksi						
		Permendagri No. 13/2006		Keputusan Mendagri No. 050-3780 / Tahun 2020				
		2019	2020	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	2.403.175	2.828.145	PENDAPATAN DAERAH	2.298.942	2.736.563	2.795.415	2.864.269
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.197	211.366	PENDAPATAN ASLI DAERAH	331.557	390.530	332.079	321.486
1.1.1	Pajak Daerah	40.643	42.674	Pajak Daerah	58.475	64.323	67.539	70.916
1.1.2	Retribusi Daerah	4.178	4.386	Retribusi Daerah	7.109	7.820	8.211	8.621
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.254	7.616	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.011	8.812	9.253	9.715
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.123	156.690	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	257.980	309.575	247.077	232.234
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.692.275	2.070.042	PENDAPATAN TRANSFER	1.819.335	2.183.202	2.292.362	2.363.261
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	247.371	259.739	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	1.734.899	2.081.879	2.185.973	2.251.552
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.083.057	1.430.364	Pendapatan transfer Antar Daerah	84.436	101.323	106.389	111.709
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	361.847	379.939	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148.029	162.832	170.973	179.522
1.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	520.703	546.737	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	148.029	162.832	170.973	179.522
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	86.475	90.798	BELANJA	2.705.500	2.759.605	2.814.797	2.871.093
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.699	35.383	BELANJA OPERASI	1.730.785	1.761.845	1.797.082	1.833.024
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	5.495	5.769	Belanja Pegawai	1.030.193	1.050.797	1.071.813	1.093.249

No	URAIAN	Proyeksi						
		Permendagri No. 13/2006		Keputusan Mendagri No. 050-3780 / Tahun 2020				
		2019	2020	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1.3.6	Pendapatan Lainnya	395.035	414.787	Belanja Barang dan Jasa	577.576	589.128	600.910	612.928
				Belanja Subsidi	2.776	2.832	2.888	2.946
2	BELANJA DAERAH	2.419.909	2.838.077	Belanja Hibah	116.585	118.917	121.295	123.721
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.421.207	1.492.093	Belanja Bantuan Sosial	169	172	176	179
2.1.1	Belanja Pegawai	964.417	1.012.638	BELANJA MODAL	500.854	514.424	524.712	535.206
2.1.2	Belanja Subsidi	1.761	1.849	Belanja Modal Tanah	35.240	35.945	36.664	37.397
2.1.3	Belanja Hibah	13.366	14.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.614	58.766	59.942	61.140
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.135	3.292	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.395	88.123	89.885	91.683
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	140.954	148.001	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	324.974	331.473	338.103	344.865
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	294.824	309.564	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	114	116	119	121
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2.750	2.750	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000	51.000	52.020	53.060
2.2	BELANJA LANGSUNG	998.702	1.345.984	Belanja Tidak Terduga	50.000	51.000	52.020	53.060
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	BELANJA TRANSFER	423.859	432.336	440.983	449.803
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	Belanja Bagi Hasil	126.195	128.719	131.293	133.919
2.2.3	Belanja Modal	-	-	Belanja Bantuan Keuangan	297.664	303.617	309.690	315.883
	Surplus/(Defisit)	(16.733)	(9.932)	Surplus/(Defisit)	-406.557	-23.042	-19.382	-6.824
3	PEMBIAYAAN			PEMBIAYAAN				

No	URAIAN	Proyeksi						
		Permendagri No. 13/2006		Keputusan Mendagri No. 050-3780 / Tahun 2020				
		2019	2020	URAIAN	2021	2022	2023	2024
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.733	10.932	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	411.557	28.142	24.585	12.130
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	14.773	7.971	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	408.597	24.886	21.003	8.190
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.961	2.961	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.960	3.256	3.582	3.940
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000	1.000	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000	5.100	5.202	5.306
3.2.2	Penyertaan modal (inventasi) pemerintahan daerah	1.000	1.000	Penyertaan modal daerah	5.000	5.100	5.202	5.306
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-					
	Pembiayaan Netto	16.733	9.932	PEMBIAYAAAN NETTO	406.557	23.042	19.383	6.824
	SILPA Tahun Berkenaan	0	0	SILPA TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

7.2. Program Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dengan APBD. Sebagaimana amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- 6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah meliputi:

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Perdagangan;
- 5) Perindustrian; dan
- 6) Transmigrasi.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

- 1) Perencanaan;
- 2) Keuangan;
- 3) Kepegawaian;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan;
- 5) Penelitian dan Pengembangan.

Unsur Pengawas:

- 1) Inspektorat Daerah.

Unsur Kewilayahan:

- 1) Kecamatan.

Unsur Pemerintahan Umum:

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik.

Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 sesuai dengan arahan visi dan misi Kepala Daerah adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
5. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan;
6. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman.

Sedangkan program prioritas dalam urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas daerah adalah sebagai berikut :

7.2.1. Program Setiap Perangkat Daerah

Program setiap Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 adalah program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah atau disebut program rutin perangkat daerah terdiri dari :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

7.2.2. Program Pembangunan Daerah Urusan Wajib Layanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 4) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- 1) Program Kawasan Permukiman;
- 2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Penanggulangan Bencana;
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

6. Urusan Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 3) Program Rehabilitasi Sosial;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5) Program Penanganan Bencana;
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

7.2.3. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 3) Program Hubungan Industrial.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Urusan Pangan

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Urusan Pertanahan
 - 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - 3) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
 - 4) Program Penetapan Tanah Ulayat;
 - 5) Program Pengelolaan Tanah Kosong;
 - 6) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
 - 7) Program Penatagunaan Tanah.
5. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 8) Program Pengelolaan Persampahan.
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Program Pencatatan Sipil;
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Program Penataan Desa;
 - 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Pengendalian Penduduk (KB);
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - 2) Program Pengelolaan Pelayaran.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 2) Program Aplikasi Informatika.
11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
 - 7) Program Pengembangan UMKM.
12. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 - 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
14. Urusan Statistik
 - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

15. Urusan Persandian
 - 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
16. Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
 - 2) Program Pembinaan Sejarah;
 - 3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
17. Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Pembinaan Perpustakaan;
 - 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
18. Urusan Kearsipan
 - 1) Program Pengelolaan Arsip;
 - 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

7.2.4. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Perikanan dan Kelautan
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
2. Urusan Pariwisata
 - 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata;
 - 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
3. Urusan Pertanian
 - 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - 5) Program Perizinan Usaha Pertanian;
 - 6) Program Penyuluhan Pertanian.
4. Urusan Perdagangan
 - 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 4) Program Pengembangan Ekspor;
 - 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 5. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten;
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
 6. Urusan Transmigrasi
 - 1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
 - 2) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

7.2.5. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
 - 1) Program Administrasi Umum;
 - 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Program Perekonomian dan Pembangunan.
2. Sekretariat Dewan
 - 1) Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten;
 - 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

7.2.6. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Urusan Keuangan
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Urusan Kepegawaian
 - 1) Program Kepegawaian Daerah.
4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Urusan Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

7.2.7. Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendamping dan Asistensi.

7.2.8. Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan

1. Urusan Kecamatan
 - 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

7.2.9. Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Unsur Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib dengan Layanan Dasar, Urusan Wajib Non Layanan Dasar, Urusan Pilihan dan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas, Kewilayahan serta Pemerintahan Umum disusun Program Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah dengan pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 dapat diuraikan seperti tabel 7.2 dibawah ini:

TABEL 7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (dalam jutaan)																	
URUSAN & PROGRAM PEMBANGUN AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021				2022		2023				
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.421.172		1.492.093		1.566.560	BELANJA OPERASI				1.761.845		1.797.082		1.833.024
1	Belanja Pegawai		100%	100%	964.417	100%	1.012.638	100%	1.063.270	1	Belanja Pegawai	100%	1.050.797	100%	1.071.813	100%	1.093.249
2	Belanja Subsidi		100%	100%	1.761	100%	1.849	100%	1.942	2	Belanja Barang dan Jasa	100%	589.128	100%	600.910	100%	612.928
3	Belanja Hibah		100%	100%	13.333	100%	14.000	100%	14.700	3	Belanja Subsidi	100%	2.832	100%	2.888	100%	2.946
4	Belanja Bantuan Sosial		100%	100%	3.135	100%	3.292	100%	3.456	4	Balanja Hibah	100%	118.917	100%	121.295	100%	123.721
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		100%	100%	140.953	100%	148.001	100%	155.401	5	Belanja Bantuan Sosial	100%	172	100%	176	100%	179
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		100%	100%	294.823	100%	309.564	100%	325.042	5.2	BELANJA MODAL		514.424		524.712		535.206
7	Belanja Tidak Terduga		100%	100%	2.750	100%	2.750	100%	2.750	1	Belanja Modal tanah	100%	35.945	100%	36.664	100%	37.397
										2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100%	58.766	100%	59.942	100%	61.140
										3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100%	88.123	100%	89.885	100%	91.683
										4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	100%	331.473	100%	338.103	100%	344.865
										5	Belanja Aset Tetap Lainnya	100%	116	100%	119	100%	121
										5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		51.000		52.020		53.060
										1	Belanja Tidak Terduga	100%	51.000	100%	52.020	100%	53.060
										5.4	BELANJA TRANSFER		432.336		440.983		449.803
										1	Belanja Bagi Hasil	100%	128.719	100%	131.293	100%	133.919
										2	Belanja Bantuan Keuangan	100%	303.617	100%	309.690	100%	315.883
BELANJA LANGSUNG				998.702		1.345.984		1.428.969									
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				729.381		985.628		1.014.281	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1.01	URUSAN PENDIDIKAN			146.637		264.703		283.282	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		717.028		730.997		744.966	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.511		1.843		1.936	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		536.299		541.662		547.025	Disdik
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			130		1.365		1.433	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan		180.365		188.954		197.542	Disdik
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		Tingkat pemenuhan palayanan pengelolaan pendidikan	92,40%		92,40%		96,60%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			551		7.350		7.718	1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum		91		95		100	Disdik
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		Tersedianya tenaga kependidikan yang dapat menyusun kurikulum yang baik	74%		76%		78%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023		2024			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100		10.500		11.025	1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			273		286		299	Disdik
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%				Terdapat data tenaga kependidikan dan kependidikan yang realtime	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				60		735		772										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Pendidikan Anak Usia Dini				726		27.300		28.665										
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,01	95,20		96,40		97,60											
	2	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	5,33%	12,30%		19,2%		26,1%											
1.7	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				41.623		59.000		61.740										
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	110,93	110,93		111		111											
	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,7	101,8		101,82		101,90											
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,18	96,10		97,10		98,10											
	4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	74,76	76,80		78,90		80,90											
	5	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi	48,84%	56,10		63,30		70,50											
	6	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi	48,93%	55,10		61,40		67,60											
	7	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	50,06	53,00		56,00		59,00											
	8	Rata-rata skor Indeks Integritas Ujian Nasional SMP	69,17	70,30		71,50		72,70											
	9	Angka kelulusan SD/MI	98,02	98,40		98,80		99,20											
	10	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,88	99,90		99,90		100											
	11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	71,45	74,16		76,87		79,58											
	12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	89,49	91,59		93,69		95,80											
1.8	Program Pendidikan Non Formal				260		2.940		3.087										
	1	Angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	98,09	98,5		98,9		99,2											
	2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	3	3		6		9											
	3	Jumlah lembaga PKBM terakreditasi	7	7		11		15											
1.9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				810		18.375		19.294										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	100%	100%		100%		100%											
	2	Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1/D4	100%	100%		100%		100%											
	3	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	50%	60%		70%		80%											
	4	Persentase Guru SD berkualifikasi S1/D4	97%	97,6%		98,2%		98,8%											
	5	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	59,16%	62,3%		65,5%		68,7%											
	6	Persentase Guru SMP berkualifikasi S1/D4	89,08%	91,3%		93,5%		95,6%											
1.10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				553		24.675		25.909										
	1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh unit kerja Dinas Pendidikan	50%	60%		70%		80%											
	2	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan	97%	97,6%		98,20%		98,80%											
	3	Persentase Satuan Pendidikan yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar	59,16%	62,3%		65,5%		68,7%											
1.11	Program Pembinaan Pendidikan Olahraga dan Seni				294		1.650		1.815										
	1	Jumlah siswa yang meraih peringkat 1 (satu) Provinsi/ Nasional	3	4		5		5											
1.12	Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan				50		70		98										
	1	Persentase siswa yang dapat baca tulis Al-Qur'an	14%	14%		28%		42%											
1.13	Program Bantuan Operasional Sekolah				99.970		108.900		119.790										
	1	Tingkat penyaluran BOS ke sekolah	100%	100%		100%		100%											
1.02	URUSAN KESEHATAN				185.838		240.009		213.436	1.02	Urusan pemerintah Bidang Kesehatan			269.961		276.292		282.624	
	DINAS KESEHATAN				130.990		139.455		143.340	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			127.793		127.355		126.917 Dinkes	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.692		1.800		1.950			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			140.513		147.204		153.895 Dinkes	
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				949		1.000		1.050			Tingkat ketersediaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021					2022		2023		2024		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			262		274	287	Dinkes		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				0		125		150			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%		100%		100%			
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			1.072		1.123	1.174	Dinkes		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				603		660		720			Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%		100%		100%			
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			321		336	351	Dinkes		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				225		4.000		4.500			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%		100%		100%			
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%												
1.6	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan				3.908		5.000		5.500											
	1	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin untuk Puskesmas	100%	100%		100%		100%												
1.7	Program Pelayanan Kesehatan				970		1.050		1.100											
	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%	100%		100%		100%												
1.8	Program Pengawasan Obat dan Makanan				159		200		225											
	1	Persentase obat dan makanan yang diawasi	100%	100%		100%		100%												
1.9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.005		1.100		1.200											
	1	Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	75%	77%		80%		83%												
	2	Cakupan Desa Siaga Aktif	321	321		323		323												
	3	Persentase Posyandu Aktif	70%	70%		75%		75%												
	4	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	98%	100%		100%		100%												
1.10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				673		750		850											
	1	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,35%	0,35%		0,3%		0,3%												
	2	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan	100%	100%		100%		100%												
	3	Persentase anak 6-24 bulan keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI	100%	100%		100%		100%												
	4	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Gizi	98%	98%		98%		98%												

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	5	Persentase Stunting pada anak balita yang ditangani	100%	100%		100%		100%											
1.11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				700		1.000		1.100										
	1	Cakupan Rumah tangga sehat	80%	80%		90%		100%											
	2	Cakupan Rumah tangga dengan sumber air terlindungi	80%	80%		90%		100%											
	3	Cakupan Rumah memiliki jamban sehat	65%	100%		100%		100%											
	4	Cakupan Tempat-tempat Umum dan Penjual Makanan (TPUM) yang dibina dan diawasi	78%	80%		83%		85%											
	5	Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan	80%	80%		90%		100%											
1.12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				1.270		1.500		1.750										
	1	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (semua Kasus)	91%	100%		100%		100%											
	2	Penemuan dan Penanganan Kasus DBD	100%	100%		100%		100%											
	3	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	90%	100%		100%		100%											
	4	Imunisasi (UCI desa)	321	321		323		323											
	5	Imunisasi Dasar anak Usia 0-11 Bulan	321	321		323		323											
	6	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	100%	100%		100%		100%											
	7	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%		100%		100%											
	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	100%	100%		100%		100%											
	9	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat	90%	100%		100%		100%											
	10	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	90%	100%		100%		100%											
1.13	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan				467		550		600										
	1	Cakupan Puskesmas yang mengirimkan Laporan ke dinas Kesehatan	100%	100%		100%		100%											
	2	Cakupan Program yang di kembangkan di bidang kesehatan	2	2		2		2											
1.14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				20.820		22.000		23.000										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Pembangunan baru Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya	0	1		1		1											
	2	Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	6	5		5		5											
	3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	6	6		6		6											
	4	Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	6		6		6											
	5	Persentase sarana Kesehatan yang dapat dimanfaatkan	100%	100%		100%		100%											
	6	Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar	60%	70%		80%		90%											
1.15		Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata			1.488		1.750	2.000											
	1	Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat Kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai standar	80%	80%		90%		95%											
	2	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama	12	12		12		12											
1.16		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			150		350	400											
	1	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%		100%		100%											
	2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%		100%		100%											
	3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	100%	100%		100%		100%											
	4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%		100%		100%											
	5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%		100%		100%											
	6	Jumlah Kematian Ibu	11	9		7		5											
1.17		Program Hygiene sanitasi air Bersih dan air minum			350		375	400											
	1	Cakupan rumah tangga dengan sumber air terlindungi dan berkualitas	100%	100%		100%		100%											
1.18		Program peningkatan dan pengawasan keselamatan kerja dan olah raga			350		375	400											
	1	Persentase Upaya Keselamatan kerja dan olah raga	100%	100%		100%		100%											
1.19		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			95.070		95.570	96.070											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase Peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan BPJS	100%	100%		100%		100%											
	2	Terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	100%	100%		100%		100%											
	3	Terintegrasinya JKN	100%	100%		100%		100%											
	4	Terselenggaranya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	100%	100%		100%		100%											
	5	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%		100%		100%											
1.20	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				143		150		175										
	1	Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	100%	100%		100%		100%											
1.21	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan				0		150		200										
	1	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100%	100%		100%		100%											
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG				8.048		49.904		18.396	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			88.938		93.343		96.525	RSUD
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.133		2.545		2.752			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			17.225		17.875		19.749	RSUD
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.630		1.823		2.228			Tingkat ketersediaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%		100%		100%		
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%											
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				0		384		384										
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%											
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		200		200										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0		82		82										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				5.285		44.150		11.370										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Tersedianya penyimpanan obat di Rumah Sakit	1 unit	1 unit		-		-											
	2	Tersedianya ruang perawatan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		-											
	3	Berfungsinya ruang operasi yang terintegrasi	3 ruang	-		3 ruang		1 ruang											
	4	Tersedianya fasilitas rehabilitasi medik	1 unit	-		1 unit													
	5	Tersedianya pelayanan laboratorium klinik	1 Unit	-		1 Unit		1 Unit											
	6	Tersedianya pengelolaan limbah yang berfungsi baik	-	-		1 unit		-											
	7	Tertatanya fungsi bangunan rumah sakit	1 Unit	-		1 Unit		-											
	8	Tersedianya alat kesehatan yang dibutuhkan		5 Jenis		7 Jenis		7 Jenis											
	9	Terfasilitasinya kelancaran pengantaran rujukan pasien	-	-		1 Unit		-											
	10	Tersedianya mebeleur gedung rawat inap dan penunjang lainnya	-	-		1 Unit		-											
	11	Tersedianya aparatur dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali											
	12	Tersedianya CSSD	-	1 Unit		-		-											
	13	Tingkat kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi pasien hemodialisa	-	-		-		-											
1.7		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata			0		670		780										
	1	Terpeliharanya gedung dan bangunan rumah sakit	100	100		100	-	100	-										
	2	Terpeliharanya Alat-alat kesehatan yang berfungsi sesuai dgn standar Rumah sakit Tipe C	100	100		100	-	100	-										
	3	Terpeliharanya perlengkapan mebeleur yang baik guna menunjang pelayanan di RSU	100	100		100	-	100	-										
1.8		Program peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan			0		50		600										
	1	Tipe kelas Rumah Sakit rujukan regional JKN wilayah Sumsel	B	B		B		B											
	2	Tingkatan akreditasi rumah sakit	Madya	Madya		Madya		Utama											
		BLUD RSUD KAYUAGUNG			46.800		50.650		51.700										
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			29.231		29.578		30.397										
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%											
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.657		300		500										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021				2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%										
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur			510		1.506		1.008									
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%										
1.4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			374		375		410									
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%										
1.5		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			131		131		131									
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%										
1.6		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			13.239		14.605		15.099									
	1	Persentase pemakaian tempat tidur pasien (BOR)	66,26%	68%		70%		72%										
	2	Rata-rata lama perawatan pasien (ALOS)	3,8	3,7		3,6		3,5										
1.7		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			1.646		1.105		1.105									
	1	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	61%	64%		100%		100%										
1.8		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			12		3.000		3.000									
	1	Peningkatan jumlah jenis pelayanan kesehatan	12 pelayanan	12 plynn		13 plynn		14 plynn										
1.9		Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan			0		50		50									
	1	Tingkat Akreditasi RS	0%	madya		madya		madya										
1.03		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			309.786		382.164		414.840	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		428.843		449.579		469.968	
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.409		1.550		1.705	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		10.527		10.632		10.738	Pupr
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%			100%			
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			438		482		530	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		52.817		53.198		55.616	Pupr
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	46%			50%		75%	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				188		207		227	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			26.320		27.021		28.320	Prkp
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase penduduk yang terlayani air minum		71,75%		73,32%		74,11%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				230		253		278	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			9.419		10.319		11.325	Prkp
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Jumlah sarana pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang dibangun		14 unit		18 unit		22 unit		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				39		43		47	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			10.900		11.958		12.558	Prkp
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana limbah yang layak		65,58%		68,86%		72,30%		
1.6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				33.251		36.575		40.233	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			14.405		16.467		17.392	Pupr/Prkp
	1	Persentase jalan yang dibangun	5,89%	1%		1,10%		1,20%			Panjang Drainase yang dibangun		11,5 Km		12,5 Km		13,5 Km		
	2	Jumlah jembatan yang dibangun	257 Unit	30 Unit		30 Unit		40 Unit	1.03.07	Program Pengembangan Permukiman			21.470		22.000		23.181	Prkp	
1.7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				0		27.300		27.300		Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun		26 km		28,6 km		31,5 km		
	1	Panjang drainase jalan kondisi mantap	2,6 Km	-		1 Km		1 Km	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung			28.612		29.375		30.037	Prkp	
1.8	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				35.226		38.749		42.623		Jumlah Gedung yang dibangun dan direhab		12		14		16		
	1	Rasio panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	70,46%	70,46%		71%		72%	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan			249.538		263.291		275.241	Pupr	
	2	Jumlah jembatan kondisi mantap (bisa dilewati)	25 Unit	4 Unit		5 Unit		6 Unit			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota		0,4%		0,5%		0,5%		
1.9	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan				0		10.000		10.000	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			4.835		5.318		5.560	Pupr
	1	Tersedianya dana siap pakai untuk rehab jalan dan jembatan	0	2 Km		2 Km		2 Km			Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang		4 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		
1.10	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan				0		200		200										
	1	Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan	100%	100%		100%		100%											
1.11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				4.182		4.600		5.060										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit											
1.12	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan				0		500		500										
	1	Ketersediaan Data Kondisi Eksisting Jalan dan Jembatan	100%	100%		100%		100%											
1.13	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan				156.426		172.069		189.275										
	1	Jumlah jembatan yang ditingkatkan		2 Unit		2 Unit		2 Unit											
	2	Panjang jalan yang ditingkatkan		144 Km		261 Km		314 Km											
1.14	Program Perencanaan Jalan dan Jembatan				4.952		5.447		5.992										
	1	Rencana pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	188 Ruas Jln & Jbt	188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt											
1.15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				59.476		65.424		71.966										
	1	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	18%	37%		57%		75%											
1.16	Program Pembangunan Turap, Talud, Bronjong				10.069		11.076		12.183										
	1	Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran	19%	35%		51%		68%											
1.17	Program Rehabilitas/Pemeliharaan Talud/ Bronjong				0		3.400		2.000										
	1	Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran	19%	35%		51%		68%											
1.18	Program Perencanaan Tata Ruang				2.650		2.915		3.207										
	1	Keberadaan Peraturan Daerah RTRW	100%	100%		100%		100%											
1.19	Program Pemanfaatan Ruang				100		110		121										
	1	Persentase Luas Wilayah Produktif	70%	100%		100%		100%											
1.20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1.150		1.265		1.392										
	1	Ketaatan terhadap RTRW	90%	100%		100%		100%											
	2	Persentase luas wilayah perkotaan yang sesuai tata ruang	50%	100%		100%		100%											
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				73.785		79.582		82.755	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			1.019.563		1.047.708		1.073.512	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.108		1.141		1.175	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			26.174		26.436		26.698	Prkp
	1	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan sarana dan prasarana				8.074		8.316		8.566	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan			500		520		550	Prkp

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021					2022		2023		2024		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%				Persentase Perbaikan Rumah Karena Bencana Alam	100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				155		160		164	1.04.03	Program Kawasan Permukiman			4.049		4.247		4.364	Prkp	
	1	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%		100%		100%				Persentase Rumah Layak Huni	75,23%		76,91%		78,71%			
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50		52		53	1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			500		520		550	Prkp	
	1	Persentase Pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%		100%		100%				Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	100%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				75		77		80	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			32.092		33.000		34.224	Prkp	
	1	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100%	100%		100%		100%				Persentase rumah tangga yang terlayani PSU	96,55%		97,40%		98,40%			
1.6	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong				0		2.261		3.281											
	1	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	0,05	0		0,10		0,15												
1.7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				14.738		30.145		30.725											
	1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	53,95	56,65		59,48		62,45												
	2	Persentase penduduk berakses air minum (PDAM)	6,51	7,46		8,28		13,54												
1.8	Program pembangunan infrastruktur pedesaan				9.728		10.020		10.320											
	1	Persentase jalan lingkungan yang terbangun	40,18	40,23		67,88		70,67												
1.9	Program penyediaan dan pengelolaan Air Baku				0		4.315		4.962											
	1	Persentase penduduk yang terlayani air baku (Non PDAM)	67,96	69,45		70,21		70,98												
1.10	Program Pengembangan Perumahan				647		3.500		3.675											
	1	Persentase Rumah Layak huni	64,68	68,38		73,65		73,65												
1.11	Program Penataan Lingkungan Kumuh				0		1.166		1.224											
	1	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	2,67	2,80		2,94		3,09												
1.12	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				32.097		12.500		12.750											
	1	Persentase Desa Berlistrik	92,71%	93,6%		94,6%		95,5%												
1.13	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				0		880		880											
	1	Persentase RTH Ibukota kabupaten dalam Kondisi Baik	100	0		100		100												

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
							2019		2020		2021						2022		2023		2024		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.14	Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				880		0		0														
	1	Pemeliharaan Fasilitas Umum Perkotaan	100	100		0		0															
1.15	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				0		1.900		1.500														
	1	Unit lahan yang tersedia	3 unit	0		3 unit		2															
1.16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman				250		250		250														
	1	Unit sarana prasarana pemakaman yang dibangun	2 unit	3 unit		5 unit		7 unit															
1.17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				0		2.700		2.900														
	1	Jumlah TPS 3R yang di bangun	2 unit	6 unit		10 unit		14 unit															
1.18	Program Lingkungan Sehat Perumahan				2.040		200		250														
	1	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	0,05			0		0															
	2	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan Sehat perumahan	0	0		100		100															
1.19	Program Pembangunan distribusi Penyediaan air baku				3.943		0		0														
	1	Tingkat ketersediaan air baku	40%	45%																			
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10.503		16.148		15.702	8	Unsur Pemerintahan Umum												
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.300		5.368		6.404	8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik			9.024		9.265		9.504					
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				674		1.000		1.100	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.045		5.095		5.146		Kesbangpol			
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%							
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				180		198		544	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			369		387		404		Kesbangpol			
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase tingkat wawasan kebangsaan	100%		100%		100%							
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				36		-		40	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			2.162		2.265		2.368		Kesbangpol			
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		-		100%			Persentase kader partai politik yang mengikuti pembinaan	100%		100%		100%							

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021						2022		2023		TARGET		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					0		60		0	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				126		132		138	Kesbangpol
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	-		100%	-				Persentase ormas yang telah terdaftar		100%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					60		60		60	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				325		341		356	Kesbangpol
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%		100%		100%			Persentase tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		100%		100%		100%			
1.6	Program Peningkatan peran serta masyarakat					292		1.260		1.480	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				997		1.045		1.092	Kesbangpol
	1	Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat(%)		60	65		70		75			Persentase tingkat waspada dini terhadap ancaman konflik sosial		100%		100%		100%			
	2	Angka (Penurunan) kasus konflik sosial (%)		60	65		70		75												
	3	Cakupan pemantauan Kewaspadaan Dini di daerah		18 kec	18 kec		18 kec		18 kec												
	4	Cakupan pemantauan Perkembangan Wawasan Kebangsaan di daerah		18 kec	18 kec		18 kec		18 kec												
	5	Cakupan pemantauan perkembangan Forum kerukunan umat beragama dan Forum Silaturahmi Umat Beragama			-		18 kec		18 kec												
1.7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					333		965		1.090											
	1	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)		1	1		1		1												
	2	Pemantauan Tenaga Kerja asing dan organisasi masyarakat asing		18	18		18		18												
	3	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran dan Prekursor Narkotika (P4GN)					100 orang		100 orang												
1.8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					450		1.380		1.550											
	1	Jumlah tokoh Agama yang memahami pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama		75 org	142 org		142 org		142 org												

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	2	Jumlah peserta penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	60 org	200 org		200 org		200 org											
	3	Jumlah peserta pengembangan Nilai-nilai luhur budaya bangsa	60 org	-		120 org		120 org											
	4	Jumlah masyarakat yang dilatih (Bela Negara)	663 org	-		600 org		620 org											
1.9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				0		150		175										
	1	Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama yang memahami wawasan kebangsaan	60 org	-		142 org		142 org											
1.10	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				165		0		0										
	1	Cakupan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah Serentak	18 kec	-		-		-											
	2	Cakupan pemantauan pemilihan Presiden dan Pemilihan Legeslatif		18 kec		-		-											
1.11	Program pendidikan politik masyarakat				110		195		215										
	1	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)	1	-		2		2											
	2	Jumlah pengurus partai politik yang ikut forum diskusi politik	60 org	-		60 org		60 org											
	3	Jumlah aparat yang memahami aturan pelaksanaan pileg dan pilkada	120 org			-		-											
1.12	Program Pengembangan Nilai Budaya				0		100		150										
	1	Persentase aset budaya benda dan non benda yang terverifikasi	20	25		25		25											
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				4.903		7.315		5.660	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			13.227		13.247		13.265	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.328		3.340		3.355	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			11.136		11.056		10.974	Satpol PP & PK
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				285		2.000		325	1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.374		1.449		1.524	Satpol PP & PK
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%		100%		100%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021					2022		2023		2024			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur					0		400		50	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				717		742		767	Satpol PP & PK
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		-	-		100%		100%			Persentase penyelenggaraan pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran		100%		100%		100%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					145		150		150											
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	100%		100%		100%												
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					40		65		70											
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%		100%		100%												
1.6	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					475		940		1.130											
	1	Persentase penegakkan perda dan Perkada		100%	100%		100%		100%												
	2	Peningkatan Pengamanan, pengawalan pejabat dan pengamanan aset / kekayaan daerah		100%	100%		100%		100%												
1.7	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					280		90		110											
	1	Cakupan pemantauan anggota Linmas Hansip/ Se-Kab. OKI		18 kec	18 kec		18 kec		18 kec												
	2	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan hansip		100%	100%		100%		100%												
	3	Tingkat pengamanan Pilpres/Pileg/Pilkada Gubernur/Bupati		100%	100%		100%		100%												
1.8	Program pendidikan politik masyarakat					130		0		0											
	1	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati		100%	100%		100%		100%												
1.9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat					0		70		90											
	1	Persentase penurunan angka penyakit masyarakat		100%	100%		100%		100%												
1.10	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					0		30		90											
	1	Persentase peningkatan dan kenyamanan lingkungan		100%	100%		100%		100%												
1.11	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					220		230		290											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	100%	100%		100%		100%											
	2	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%		100%		100%											
	3	Tingkat pencegahan, pengendalian, pemadaman penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran	-	-		80%		85%											
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.300		3.465		3.638										
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.268		1.225		1.266	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.107		5.350		5.594	Bpbd
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				598		763		830	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana			1.399		1.465		1.532	Bpbd
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase warga negara yang memperoleh perlindungan dari ancaman bencana	100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				109		77		77										
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%											
1.4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				75		100		100										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Layanan Informasi di Daerah Rawan Bencana				0		250		320										
	1	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	18 Lok	18 lok		18 Lok		18 Lok											
1.6	Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				0		500		310										
	1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	2 Desa		2 Desa		2 Desa											
	2	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mendapat peralatan pelindung	-	-		45 Orang		45											
1.7	Program Penanganan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana				0		400		555										
	1	Tingkat kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan status darurat bencana	80%	80%		80%		80%											
	2	Jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	10 Posko	10 Posko		10 Posko		10 Posko											
	3	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	1 Lap	1 Lap		-		-											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021						2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana				250		150		180											
	1	Jumlah lokasi yang dilakukan survey penaksiran kerusakan dan kerugian pasca bencana	1 Lap			1 Lap		1 Lap												
1.9	Program Tanggap Darurat				520		0		0											
	1	Persentase penanganan bencana	50%	60%																
1.10	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana				480		0		0											
	1	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bencana	50%	60%																
1.06	URUSAN SOSIAL				2.832		3.023		4.266	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			8.714		8.891		9.067		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				715		751		788	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.326		6.389		6.452	Dinsos	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				183		192		201	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial			1.113		1.166		1.219	Dinsos	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemberdayaan sosial yang terlaksana	100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				53		55		58	1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			61		64		66	Dinsos	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%				Persentase penanganan warga negara migran yang dapat dipenuhi	100%		100%		100%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		45		47	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial			477		500		523	Dinsos	
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%				Persentase penanganan rehabilitasi sosial yang dapat terpenuhi	100%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				50		70		74	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			286		300		313	Dinsos	
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		10 dok				Tingkat pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	100%		100%		100%			
1.6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.				169		177		186	1.06.06	Program Penanganan Bencana			383		401		419	Dinsos	
	1	Persentase PMKS mandiri	NA	20%		20%		20%				Tingkat pemenuhan penanganan bencana	100%		100%		100%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	2	Terbinanya KK komunitas adat terpencil	1 klmpk			1 klmpk		1 klmpk		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		68		71		75	Dinsos	
	3	Tercapainya pemberian bantuan sarana lingkungan bagi desa terpencil	5 Unit			5 Unit		5 Unit			Tingkat pemenuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%		100%		100%			
1.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				479		750		788										
	1	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS	100%	100%		100%		100%											
	2	Tersedianya pelayanan, perlindungan dan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban trafficking	10	12%		14%		15%											
	3	Tingkat ketersediaan buffer stock untuk korban bencana	6000 paket	1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket											
	9	Jumlah lansia yang mendapat bantuan	1.500	75%		80%		85%											
1.8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				25		0		0										
	1	Jumlah penyandang disabilitas yang diberdayakan	50 org	50 org															
	2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial	70 Org	70 Org															
1.9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				130		200		210										
	1	Cakupan terbentuknya WKSBM Kab. OKI	20%	20%		20%		20%											
	2	Persentase Organisasi sosial yang berdaya	20%	20%		20%		20%											
	3	Terlaksananya pembinaan dan penilaian pilar-pilar sosial berprestasi	20%	20%		20%		20%											
	4	Tingkat pembinaan tenaga sosial masyarakat	100%	100%		100%		100%											
	5	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	100%	100%		100%		100%											
1.11	Program Pembinaan anak terlantar dan lanjut usia				29		0		0										
	1	Tingkat kemandirian anak terlantar dan lanjut usia	20%	20%															
1.12	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah				1.000		150		1.250										
	1	Tersedianya data pendukung program				3 dok		3 dok											
1.13	Program Bantuan dan Jaminan Sosial				0		633		665										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021				2022		2023					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
	1	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan pemberian bantuan keluarga miskin	18 Kec	18 Kec		18 Kec		18 Kec												
	2	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana	100%	100%		100%		100%												
	3	Tingkat kesiapan siaga bencana	100%	100%		100%		100%												
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					59.585		90.468		134.553	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.01	URUSAN TENAGA KERJA				1.758		1.650		1.753	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			678.507		697.444		713.827		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				651		671		700	2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.492		8.577		8.662	Disnakertrans	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				433		400		425	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			937		982		1.027	Disnakertrans	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%				Persentase pencari kerja yang dilatih	64%		80%		96%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				75		70		80	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja			416		436		456	Disnakertrans	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%				Persentase pencari kerja yang ditempatkan	51%		52%		53%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				34		40		45	2.07.05	Program Hubungan Industrial			188		197		206	Disnakertrans	
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%				Persentase hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif	95%		95%		95%			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				80		80		85											
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%												
1.6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				125		249		268											
	1	Tingkat Pengangguran terbuka	3,45%	3,25%		3,00%		2,75%												
	2	Rasio penduduk yang bekerja	78,30%	86,30%		86,50%		86,80%												
	3	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	20%	25%		30%		35%												

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		AKHIR PERIODE RPJMD 2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP			
1.7	Program Peningkat Kesempatan Kerja				200		65		70										
	1	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	44,90%	45%		48%		50%											
1.8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan				160		75		80										
	1	Persentase sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	20%	22%		25%		30%											
2.02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.748		5.377		5.627	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			5.648		5.755		5.860	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				667		1.312		1.412	2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.310		4.353		4.397	Dpppa
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				289		1.974		1.987	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			173		181		187	Dpppa
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				28		50		65	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan			42		44		46	Dpppa
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat Perlindungan Perempuan		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		100		115	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			472		495		517	Dpppa
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Persentase Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				50		160		171	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak			42		44		46	Dpppa
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			Tingkat Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		100%		100%		100%		
1.6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				155		163		171	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			271		284		297	Dpppa
	1	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	15	20		20		25			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak		56%		72%		89%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	2	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100		100		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak			338		354		370	Dpppa	
	3	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS	100	100	100		100				Tingkat Perlindungan Khusus Anak	100%		100%		100%			
	4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	50	50	50		55												
	5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	50	50		50												
	6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	54	100	100		100												
	7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	54	50	55		55												
	8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	50	60		70												
	9	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	4	5	6		7												
	10	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	95	95	95		95												
1.7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				45		47												
	1	Rasio KDRT perempuan	0,90%	0,17%		0,17%		0,16%											
	2	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	2	2	2		4												
	3	Rasio KDRT	0,90%	0,11%		0,11%		0,11%											
	4	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,07%	0,07%		0,06%		0,06%											
	5	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	0,05%	0,05%		0,05%		0,04%											
1.8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				400		725		765										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021						2022		2023		TARGET	RP	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP			
	1	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	17,00	17,00		17,00		17,00												
1.9	Program Peningkatan Perlindungan Anak				0		725		765											
	1	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	23%	50%		50%		50%												
1.10	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak				70		74		77											
	1	Jumlah kecamatan layak anak	0	3		3		3												
1.11	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak				45		47		50											
	1	Jumlah Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang diperdakan	0	1		0		1												
2.03	URUSAN PANGAN				0		1.390		1.420	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			26.426		26.766		27.106		
1.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				0		1390		1420	2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			24.420		24.665		24.909	Dkptph	
	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan		90,8		90,9		100			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%				
	2	Pola Pangan Harapan (PPH) Kesiediaan Energi Untuk Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari)		2304		2389		2400		2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			300		330		350	Dkptph	
	3	Pola Pangan Harapan (PPH) Kesiediaan Protein Untuk Konsumsi (Gram/Kapita/Hari)		61,40		61,90		62,00			Lumbung Pangan Masyarakat	1 unit		1 unit		1 unit				
	4	Cadangan Pangan Daerah								2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1.527		1.584		1.651	Dkptph	
		- Pemerintah (Beras/Ton)	50	75		100		125			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	83		84		85				
		- Masyarakat (Gabah/Ton)	770	780		790		800		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan			116		121		127	Dkptph	
	5	Persentase lumbung pangan yang dimanfaatkan	N/A	92%		95%		97%			Cadangan Pangan untuk Daerah Rawan Pangan	5.000 kg		5.000 kg		5.000 kg				
	6	Tersedianya cadangan pangan di daerah rawan pangan	0	10.000 Kg		10.000 Kg		10.000 Kg		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan			63		66		69	Dkptph	
	7	Tersedianya laporan harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	0	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			Pemantauan dan Pengujian Keamanan Pangan Segar	7 sample		7 sample		7 sample				
	8	Tersedianya cadangan pangan di tiap lumbung pangan masyarakat	0	10000 kg		10000 kg		10000 kg												
	9	Terbinanya desa dan kawasan mandiri pangan	0	3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk												

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2.04	URUSAN PERTANAHAN				12.255		3.805		34.085	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			47.429		49.529		51.630	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				987		800		900	2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.205		4.247		4.289	Pertanahan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				349		750		850	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			1.464		1.533		1.603	Pertanahan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				55		50		70	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan			38.411		40.227		42.043	Pertanahan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		50		70	2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee			150		165		180	Pertanahan
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	0%		100%		100%			Persentase Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum, dan Tanah Absentee		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				81		100		100	2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat			705		739		773	Pertanahan
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			Tingkat Penetapan Tanah Ulayat		100%		100%		100%		
1.6	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				10.150		400		30.405	2.10.08	Program pengelolaan tanah kosong			100		110		120	Pertanahan
	1	Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	0	100		100		100			Tingkat Pengelolaan Tanah Kosong		100%		100%		100%		
1.7	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan				633		1.455		1.490	2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah			423		443		463	Pertanahan
	1	Tersedianya Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	100	100		100		100			Persentase Izin Membuka Tanah		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				0		200		200	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah			1.971		2.065		2.159	Pertanahan
	1	Tersedianya penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	1 lap	1 lap		1 lap		1 lap			Tingkat Penatagunaan Tanah		100%		100%		100%		
2.05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				6.226		13.275		26.901	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			20.133		20.814		21.479	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				690		764		819	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.947		8.027		8.106	Dlh
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				131		85		285	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			456		478		500	Dlh
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				17		44		44	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			945		990		1035	Dlh
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup		40%		45%		50%		
1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				99		95		95	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			3150		3210		3365	Dlh dan PRKP
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100%		100%		100%		
1.5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.224		10.173		24.224	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			112		117		123	Dlh
	1	Persentase penanganan sampah	6,06 %	7 %		8 %		9%			Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		40%		45%		50%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	2	Persentase pengurangan sampah	8,5 %	10 %		12 %		15 %		2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			152		159		166	Dlh
1.6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				636		1.536		891			Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%		100%		100%		
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64	64		63		63		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			105		110		115	Dlh
		Indeks kualitas air	65,38	64		64		63				Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	40%		45%		50%		
		Indeks kualitas udara	99,09	99,09		98		97		2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			0		110		110	Dlh
		Indeks Tutupan Lahan	55,97	55,97		54		53				Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0%		90%		90%		
	2	Persentase tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %		100 %		2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			78		82		86	Dlh
	3	Jumlah Pengujian Kualitas Lingkungan pada UPT Laboratorium Lingkungan	93 sample	93 sample		100 sample		150 sample				Tersedianya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%		100%		100%		
	4	Persentase wilayah dalam kota kayuagung yang bersih	80	80		80		80		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan			7188		7531		7873	Dlh
	5	Persentase jumlah peralatan kualitas lingkungan (alat laboratorium)	95	95		95		95				Persentase Layanan Persampahan	40%		45%		50%		
	6	Persentase penataan pengendalian pencemaran air dan pencemaran udara	100%	100%		100%		100%											
	7	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	30 perusahaan	30 perusahaan		40 perusahaan		45 perusahaan											
	8	Persentase Pelayanan Koordinasi Penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL-ULP dan SPPL)	100%	100%		100%		100%											
	9	Jumlah desa pembinaan kampung iklim	2 Desa	2 Desa		2 Desa		2 Desa											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB		
					2019		2020						2021		2022		2023			2024	
					TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
1.7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			175		375		325													
	1	Persentase Jumlah sekolah adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah													
	2	Tingkat ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup (informasi status mutu air, udara)	83 %	85 %		87 %		90 %													
1.8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			20		20		20													
	1	Tingkat pengendalian polusi	20%	30%		30%		30%													
1.9	Program Kerjasama Pembangunan			100		100		100													
	1	Jumlah perusahaan yang mengikuti forum CSR -pkbl Kab. OKI	10 prshn	10 prshn		10 prshn		10 prshn													
1.10	Program Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan			50		50		50													
	1	Jumlah penanganan kebakaran hutan dan lahan	2 desa	2		2		2													
1.11	Program Ruang Terbuka Hijau			85		35		50													
	1	Jumlah ruang terbuka hijau	2 desa	2		2		2													
2.06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.773		6.084		6.388	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			11.609		11.808		12.004				
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.574		1.653		1.736	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.472		9.567		9.662	Disdukcapil			
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%					
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.774		1.863		1.956	2.12 .02	Program Pendaftaran Penduduk			1.285		1.347		1.408	Disdukcapil			
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	95%		97%		99%					
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			55		63		66	2.12 .03	Program Pencatatan Sipil			248		260		272	Disdukcapil			
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	75%		87%		100%					
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		21		22	2.12 .04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			386		405		423	Disdukcapil			
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Persentase Database Kependudukan	100%		100%		100%					
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			65		63		66	2.12 .05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			218		229		239	Disdukcapil			
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			Persentase Profil Kependudukan	100%		100%		100%					
1.6	Program penataan administrasi			2.305		2.421		2.542													

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%											
	2	Lama Pengurusan KTP	7 hari	7 hari		7 hari		7 hari											
	3	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	81,2%	85,2%		89,5%		93,9%											
	4	Persentase penduduk yang memiliki KTP	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%											
	5	Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	86,4%	86,4%		92,4%		97,9%											
	6	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	30,91	35,53%		40,15%		44,77%											
	7	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	100%	100%		100%		100%											
	8	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	100%	100%		100%		100%											
	9	Persentase anak umur di bawah 17 tahun yang memiliki KIA	100%	100%		100%		100%											
2.07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.666		11.410		10.450	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			12.037		12.367		12.681	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.107		1.750		1.750	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.921		6.990		7.059	Dpmd
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				249		1.500		500	2.13.02	Program Penataan Desa			185		194		203	Dpmd
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Desa yang Memperoleh Penataan Desa	100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				59		80		70	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa			2.624		2.767		2.893	Dpmd
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%		100%		100%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				10		20		20	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			2.307		2.416		2.526	Dpmd
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Persentase Kelembagaan Desa yang Diberdayakan	100%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				61		85		85										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				2.538		3.250		3.300										
	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM (Kelompok)	327	314		314		314											
	2	Ketersediaan data desa/kelurahan	327	327		327		327											
	3	Persentase pelaksanaan roda pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%		100%		100%											
	4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan	100	100		100		100											
	5	Jumlah Posyandu yang aktif	635	635		650		670											
1.7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi				80		400		400										
	1	Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (desa)	314	50		50		50											
	2	Jumlah BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian desa	314	50		50		50											
1.8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				1.006		2.725		2.725										
	1	Jumlah PKK yang aktif (kelompok)	346	346		346		346											
	2	Persentase desa inovasi	314	50		50		50											
	3	Jumlah desa yang sudah menyusun APBDesa	314	314		314		314											
	4	Terlaksananya kajian pemekaran desa	23	23		10		10											
1.9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa				557		1.500		1.500										
	1	Persentase aparat pemerintah desa yang berkinerja baik (%)	40	50		60		70											
	2	Tingkat pemenuhan administrasi bantuan keuangan kepada pemerintahan	314	314		100		314											
	3	Jumlah aparat desa terlatih	318	628		628		628											
1.10	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna				0		100		100										
	1	Persentase posyantekdes yang terbentuk dan aktif	100	1		3		3											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021			2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET			RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
2.08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.870		9.912		10.397	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		12.678		13.045		13.411	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				434		559		587	2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.300		6.363		6.426	Dppkb
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.188		1.247		1.309	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk (KB)		89		93		97	Dppkb
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Cakupan tersedianya data kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				0		170		180	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		5.532		5.796		6.059	Dppkb
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Cakupan Pelayanan KB	82%		83%		83%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				5.787		6.143		6.450	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		757		793		829	Dppkb
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Jumlah Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas	51 desa		69 desa		69 desa		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				90		95		100									
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%										
1.6	Program Keluarga Berencana				95		294		308									
	1	Prevalensi peserta KB aktif	82,04%	79,00%		79,05%		80,00%										
	2	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unneed Need)	8,10%	13,00%		12,70%		12,50%										
	3	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%		100%		100%										
1.7	Program Pengendalian Penduduk				75		147		154									
	1	Penurunan Laju penduduk	0,30%	0,30%		0,30%		0,30%										
1.8	Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga				75		147		154									
	1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	25,42%	27,42%		28,42%		29,42%										
	2	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	10%	13%		15%		20%										
	3	Cakupan kesehatan reproduksi remaja	28%	32%		36%		40%										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021				2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.9	Program Penyuluhan dan Penggerakan serta penguatan keluarga kecil dan mandiri				75		165		175									
	1	Persentase keluarga mandiri	75%	75%		80%		90%										
1.10	Program Meningkatkan dukungan sarana penyuluh KB				51		945		980									
	1	Terpenuhiya dukungan sarana Pelayanan KB	75%	75,00%		80%		90%										
2.09	URUSAN PERHUBUNGAN				2.920		6.419		5.066	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		9.948		10.143		10.337	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				951		955		956	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7.432		7.507		7.581	Dishub
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				169		189		189	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		1.035		1.084		1.134	Dishub
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota	40%		42%		45%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				0		337		100	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran		1.481		1.552		1.622	Dishub
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Jumlah ketersediaan sarana sungai dan danau	31 unit		33 unit		35 unit		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		40		40									
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%										
1.5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				145		225		225									
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%										
1.6	Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				895		200		300									
	1	Jumlah Prasarana Transportasi LLAJSDP	25 lokasi	27 lok		28 lok		29 lok										
1.7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				20		302		156									
	1	Persentase Fasilitas LLAJSDP dalam kondisi baik	25,00%	29,16%		33,32%		37,48%										
	2	Persentase Rambu-Rambu LLAJSDP dalam kondisi baik	30,00%	30,00%		34,00%		38,00%										
1.8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				695		784		750									
	1	Jumlah rute pelayaran LLAJSDP	18 rute	18		20		21										
	2	Jumlah peraturan yang dikeluarkan	13 buah	14		15		16										
1.9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				45		312		250									
	1	Persentase Fasilitas Keselamatan LLAJSDP	41,32%	43,23%		51,17%		59,11%										
1.10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				0		3.075		100									

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase kepemilikan Keur (Pengujian Kendaraan Bermotor)	60%	63,34%		66,68%		70,02%											
	2	Jumlah Uji Keur kendaraan bermotor	3500 unit	3900		4300		4700											
1.11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				0		0		2.000										
	1	Tersedianya Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	0	0		0		1											
2.10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.148		9.486		9.705	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			11.466		11.777		12.091	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				588		731		750	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.184		6.245		6.307	Diskominfo
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				180		160		180	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik			3.135		3.284		3.433	Diskominfo
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase penyelenggaraan Komunikasi Publik, Layanan Informasi Publik dan Statistik	75%		80%		85%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				67		80		80	2.16.03	Program Aplikasi Informatika			1.731		1.813		1.896	Diskominfo
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase OPD dan Ruang Publik yang terkoneksi internet dan Aplikasi yang Terintegrasi	60%		70%		80%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				15		50		80										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				120		130		140										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa				1.338		3.445		3.550										
	1	Jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi,media sosial)	23	28		35		41											
	2	Jumlah jaringan komunikasi	8	8		10		12											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.7	Program kerjasama informasi dan mass media				2.700		4.690		4.725										
	1	Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)	0	35		40	1.500	45	1.500										
	1	Jumlah/kapasitas mitra komunikasi publik	70	92		92		92											
	2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	10	12		12		12											
	3	Rasio wartel dan warnet terhadap jumlah penduduk	73	73		73		73											
1.8	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				140		200		200										
	1	Jumlah SDM bidang kominfo	7	10		13		16											
	2	Terlaksananya Pemberdayaan SDM Bidang Kominfo	0	1		2		3											
2.11	URUSAN STATISTIK				0		730		880	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
1.1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				0		150		200	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			195		204		213	Diskominfo
	1	Jumlah dokumen data kec dalam angka	1	1		1		1			Dokumentasi Data Statistik Sektoral	3		3		3			
1.2	Program penyelenggaraan statistik sektoral				0		580		680										
	1	Membangun e-database sebagai hasil pengumpulan, pengolahan analisis dan desiminasi data	1	1		1		1											
	2	Aplikasi data e-database yang akurat	1	1		1		1											
2.12	URUSAN PERSANDIAN				0		180		185	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
1.1	Program Penyusunan Tata Kelola Bidang Keamanan Informasi dan Persandian				0		30		35	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			221		231		242	Diskominfo
	1	Jumlah kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian (berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas)		2		2		2			Jumlah kualitas SDM bidang persandian yang mempunyai keahlian terkait keamanan informasi persandian dan keamanan ruang kerja pimpinan perangkat daerah Kab. OKI	4		4		4			
	2	Jumlah Masterplan / Grand Design / Pedoman / Pelaksanaan / Petunjuk Teknis / Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian		-		-		1											
1.2	Program Operasional Layanan Persandian untuk Mendukung Pengamanan Informasi				0		50		50										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021						2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Jumlah kegiatan pengamanan sinyal (jamming)		3		3		3												
	2	Jumlah kegiatan pengamanan informasi kontra penginderaan (Streilisasi)		3		3		3												
1.3	Program Pengawasan dan Evaluasi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian				0		100		100											
	1	Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian		1		1		1												
2.13	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.451		2.275		2.095	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			176.590		181.336		184.840		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				550		600		650	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.617		5.673		5.729	Diskoperin	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				85		600		300	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			105		110		115	Diskoperin	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam		5		6		7			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				46		75		100	2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			52		55		57	Diskoperin	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi		86%		87%		88%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		30		40	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			105		110		115	Diskoperin	
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Tingkat upaya pemenuhan KSP/USP Koperasi berprestasi		3		3		3			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				50		55		60	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			288		302		316	Diskoperin	
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			Persentase Koperasi Aktif		86%		87%		88%			
1.6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				0		100		100	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			52		55		57	Diskoperin	
	1	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang memiliki izin usaha	5%	6%		7%		8%			Tingkat upaya pemberdayaan dan perlindungan koperasi		4		5		6			
1.7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah				120		185		195	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			362		379		396	Diskoperin	
	1	Persentase UMKM yang sehat	15%	16%		17%		18%			Persentase Usaha Mikro dan Kecil		19%		20%		21%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021					2022		2023		2024		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	2	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	1%	1%		2%		3%		2.17.08	Program Pengembangan UMKM			136		143		149	Diskoperin	
1.8	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah				225		175		190			Tingkat upaya pengembangan UMKM	8		9		10			
	1	Persentase UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha	15%	16%		17%		18%												
	2	Persentase pemenuhan sistem pendukung usaha bagi koperasi	1%	2%		3%		4%												
1.9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				375		455		460											
	1	Persentase koperasi aktif	83%	83%		84%		85%												
	2	Jumlah koperasi berprestasi	3	3		3		3												
	3	Jumlah desa yang mempunyai koperasi aktif	279	286		293		300												
2.14	URUSAN PENANAMAN MODAL					2.560		3.278		3.203	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			10.385		10.583		10.781	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.181		1.023		1.023	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.891		7.970		8.049	Dpmpmsp	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				432		650		575	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			630		660		690	Dpmpmsp	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur		100%		100%		100%				Peningkatan Persentase Investasi di Kabupaten OKI	10%		10%		10%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				49		260		260	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal			315		330		345	Dpmpmsp	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100%		100%		100%				Menarik minat investor untuk berinvestasi / menanamkan modal di Kab. OKI	400 pengunjung		450 pengunjung		450 pengunjung			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				104		100		100	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal			262		275		287	Dpmpmsp	
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%		100%		100%				Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				63		95		95	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			657		688		720	Dpmpmsp	
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%		100%		100%				Pelaku Usaha atau investor yang memenuhi standarisasi dan informasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	51 perusahaan		52 perusahaan		54 perusahaan			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.6	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi				225		700		700	2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			630		660		690	Dpmtsp
	1	Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,06%	10%		10%		10%			Tersediaanya data dan informasi dalam sistem informasi penanaman modal di daerah yang dapat di akses oleh masyarakat dan stakeholder		1 sistem PM		1 sistem PM		1 sistem PM		
	2	Jumlah Pengunjung dalam pameran investasi	100	300		300		300											
	3	Jumlah buku informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kab.OKI	150	50		50		50											
	4	Jumlah Perusahaan yang dibina	6	50		50		50											
1.7	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi				162		200		200										
	1	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,393 T	3.938		4.331		4.765											
	2	Ketersediaan sistem informasi penanaman modal	100	30 izin		30 izin		30 izin											
	3	Tingkat kualitas pelayanan perizinan	100	100		100		100											
	4	Ketersediaan peta investasi	1	0		1 dok		0											
1.8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan perizinan				345		250		250										
	1	Pelayanan Terpadu satu Pintu Kepada Masyarakat	100%	100%		100%		100%											
	2	Verifikasi, Visitasi dan Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Teknis	100%	100%		100%		100%											
2.15	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				3.410		3.727		3.927	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			15.806		16.322		16.837	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				616		667		733	2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.317		6.381		6.444	Dispora
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				65		70		70	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			1.038		1.088		1.137	Dispora
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepemudaan yang Terlaksana		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				23		25		30	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			7.401		7.753		8.106	Dispora
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat Pengembangan Kapasitas Keolahragaan yang Terlaksana		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		20		22	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			1.050		1.100		1.150	Dispora
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang Terlaksana		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				18		20		22										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				816		830		850										
	1	Cakupan organisasi pemuda yang aktif	80%	80%		85%		85%											
1.7	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba				0		75		75										
	1	Persentase pemuda yang bebas narkoba	55%	55%		60%	75	60%	75										
1.8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				55		70		75										
	1	Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup	30	30		35		35											
1.9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				1.267		1.200		1.250										
	1	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	25	25		30		30											
1.10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				550		750		800										
	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	20%	20%		21%		22%											
	2	Rasio lapangan olahraga per 1.000	17%	18%		20%		22%											
2.16	URUSAN KEBUDAYAAN				1.261		8.215		8.890	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			44.080		45.109		45.704	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				531		800		850	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.491		5.546		5.601	Disbudpar
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				92		1.000		1.000	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan			2.424		2.349		2.304	Disbudpar
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		7		7		8		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)			KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB		
							2019		2020		2021						2022		2023		TARGET			RP	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				121		100		120	2.22.04	Program Pembinaan Sejarah			0		240		300	Disbudpar						
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya dan Sejarah	0		250		300									
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		50		70	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			40		42		44	Disbudpar						
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	0%		100%		100%			Jumlah Cagar Budaya yang Diinventaris dan Dilestarikan	35		40		45									
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				57		100		100																
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%																	
1.6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				78		1.050		1.010																
	1	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang dilestarikan	31 CB	0%		1%		2%																	
	2	Persentase cakupan kajian seni	15 Seni	0%		1%		2%																	
1.7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				185		2.875		3.350																
	1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	4	4		5		6																	
1.8	Program Pengembangan Nilai Budaya				198		940		790																
	1	Persentase peran serta pelaku Budaya dalam mewujudkan seni budaya OKI	25	25		25		25																	
1.9	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				0		1.300		1.600																
	1	Jumlah Tampilan Tim Kesenian Kab. OKI di Luar Daerah/Luar Negeri	100	100		100		100																	
2.17	URUSAN PERPUSTAKAAN				1.365		2.145		2.360	2.23	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan			6.746		6.843		6.940							
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				646		700		750	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.969		6.029		6.089	D. Arsip Pustaka						
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%									
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				235		750		800	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan			231,250		237,500		243,750	D. Arsip Pustaka						
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase jumlah perpustakaan yang terkelola sesuai standar	2,82%		3,95%		5,08%									

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021					2022		2023		2024		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur					34		40		45	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			31,250		37,500		43,750	D. Arsip Pustaka
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100%	100%		100%		100%			Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan		2		2		2		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					0		50		55										
	1	Persentase sumber daya aparatur		100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengendalian sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100		105		110										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%		100%		100%											
1.6	Program pengembangan budaya baca dan Pembinaan Berpustakaan					350		0		0										
	1	Persentase peningkatan bahan pustaka		10,09%	11,10%		12,21%		13,43%											
	2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan		0,40%	0,42%		0,44%		0,46%											
	3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		1,39%	1,46%		1,53%		1,61%											
	4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		11.920 buku	0 buku		12.516 buku		13.142 buku											
	5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat		4,88%	0%		5,12%		5,38%											
1.7	Program Pengembangan Perpustakaan					0		350		400										
	1	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar		30%	33%		36%		40%											
	2	Meningkatnya tenaga perpustakaan sesuai standar		4,88%	5,12%		5,38%		5,65%											
1.8	Program Peningkatan Minat Baca					0		150		200										
	1	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca		7673 orang	8056 orang		8458 orang		8881 orang											
2.18	URUSAN KEARSIPAN					176		1.110		1.221	2.24	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan			257,25		269,50		281,75	
1.1	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					176		500		550	2.24.02	Program pengelolaan arsip			228,625		234,750		240,875	D. Arsip Pustaka
	1	Persentase OPD yg menerapkan arsip secara baku		57,69%	7,69%		7,69%		7,69%			Persentase arsip yang dikelola secara baku		28,8%		48,1%		67,3%		
	2	Persentase arsip /dokumen yg tertata (arsip statis)		9,62%	9,62%		9,62%		9,62%		2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			28,625		34,750		40,875	D. Arsip Pustaka
	3	Persentase buku arsip daerah		0%	0%		19,23%		19,23%			Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan		100%		100%		100%		
	4	Persentase dokumen/arsip statis & sejarah yang direstorasi		0%	0%		9,62%		9,62%											
	5	Persentase arsip statis yang diakuisisi		0%	0%		9,62%		9,62%											
1.2	Program pemeliharaan berkala sarana dan prasarana kearsipan					0		200		220										
	1	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan		80%	0%		80%		80%											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	2	Persentase OPD yang memiliki sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar	57,69%	0%	7,69%		7,69%												
1.3		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan		0		410		451											
	1	Persentase Layanan Arsip Yg Berbasis Teknologi & Informasi	1,92%	0%	5,77%		5,77%												
	2	Jumlah OPD yang dibina kearsipannya	30 OPD	4 OPD	4 OPD		4 OPD												
	3	Jumlah arsiparis yang dinilai angka kreditnya	0 orang	0 orang	2 orang		2 orang												
3. URUSAN PILIHAN				32.510		56.252		66.662	3.	Urusan Pilihan									
3.01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.520		8.095		11.450	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			10.770		11.065		11.362		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.188		1.100		1.200	2.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.760		5.817		5.875	Diskan	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			155		600		200	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			1.537		1.611		1.684	Diskan	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%				Produksi Perikanan Tangkap	12%		20%		35%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			62		50		50	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			1.908		1.998		2.089	Diskan	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%	100%		100%				Produksi Perikanan Budidaya	10%		15%		25%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		25		50	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			1.148		1.202		1.258	Diskan dan Kecamatan	
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%		100%				Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan	25%		30%		40%			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50		50		50	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			417		437		456	Diskan	
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%		100%				Konsumsi Ikan Per Kapita	15%		25%		40%			
1.6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1.703		1.950		2.500											
	1	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	5%	5%	5%		7%												
	2	Persentase Produksi Benih Ikan Unggul	5%	5%	10%		20%												
	3	Persentase Pokdakan yang Aktif	96 kelompok	50%	55%		65%												
	4	Persentase UPR/HSRT yang Aktif	18 UPR/HSRT	10%	15%		25%												
1.7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			1.061		1.720		2.200											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	26005 ton	2%		5%		8%											
	2	Persentase KUB Nelayan yang Aktif	38 KUB	10%		20%		35%											
	3	Persentase Pelayanan TPI Sungai Lumpur	25 surat	50%		60%		70%											
1.8		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan			1.302		1.550		2.100										
	1	Persentase penurunan ilegal fishing	20 kasus	10%		20%		30%											
	2	Persentase kelompok masyarakat pengawas yang aktif	10 kelompok	10%		30%		50%											
	3	Pelestarian Sumberdaya Perikanan	15 lokasi	15 lokasi		16 lokasi		16 lokasi											
	4	Persentase Pengelolaan Hasil Perikanan	100%	100%		100%		100%											
1.9		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			0		200		250										
	1	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan perkapita	33,6 Kg/Kapita	2%		5%		10%											
1.10		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			0		0		2.000										
	1	Persentase Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau dan Air Tawar (kawasan minapolitan) yang aktif	868 ha	2%		3%		4%											
1.11		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan			0		650		650										
	1	Peningkatan Jalan Produksi Budidaya	0 unit			1 unit		1 unit											
	2	Persentase Pengembangan/ Penyediaan Pabrik Pakan/ Mesin Pakan Mandiri	3 unit	2 unit		3 unit		4 unit											
1.12		Program pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan			0		200		200										
	1	Tersedianya Data Base Perikanan	1 buku	1 buku		1 buku		1 buku											
3.02	URUSAN PARIWISATA				2.102		7.459		9.604	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
1.1		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			0		1.905		2.285	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			285		252	251	Disbudpar	
	1	Jumlah kunjungan wisatawan	10.242	10.444		10.546		10.646			Jumlah Destinasi Wisata	60		70		80			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	2	Tingkat promosi pariwisata	29	30		40		50		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata			628		626		372	Disbudpar
1.2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				353		2.700		3.720			Jumlah kunjungan wisatawan	10.800		10.900		11.000		
	1	Peningkatan Jumlah objek wisata	2	2		2		2		3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			0		100		100	Disbudpar
	2	Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	15,38	23,08		30,77		38,46			Peningkatan Jumlah Zona Kreatif	0		2		2			
1.3	Program pengembangan kemitraan				15		1.120		1.865	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			180		138		128	Disbudpar
	1	Tingkat pengembangan kemitraan	161	166		172		177			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	182		187		190			
1.4	Program Pengembangan daya tarik wisata				1.734		1.734		1.734										
	1	Persentase pemeliharaan objek wisata	50	50		50		50											
3.03	URUSAN PERTANIAN				15.519		27.220		29.405	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
	DINAS KETAHANAN PANGAN , TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA				11.044		17.985		20.095	2.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.585		8.671		8.757	Disbunak
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.053		2.150		2.200			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			2.839		3.043		3.175	Dkptph / Disbunak
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1402		2200		2200			Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	2%		2%		2%		
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			4.611		4.987		5.192	Dkptph / Disbunak
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				83		300		300			Tingkat Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%		100%		100%		
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			502		595		621	Disbunak
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		150		200			Persentase Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	2%		2%		2%		
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			368		432		453	Dkptph / Disbunak
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				60		100		100			Persentase Penanggulangan Kerusakan Lahan Oleh OPT dan Bencana Pertanian	100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian			130		150		155	Disbunak
1.6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				200		600		225			Tersedianya perkembangan data perusahaan dan pelaku agribisnis lainnya	54 perusahaan perkebunan		54 perusahaan perkebunan		54 perusahaan perkebunan		
	1	Nilai Tukar Petani	92,42	94		95		96		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian			944		989		1.034	Dkptph
	2	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	10 Kelompok	10		10		10				Tingkat Pendampingan Penyuluh Pada Kelompok Tani	100%		100%		100%		
	3	Persentase kelompok tani yang berprestasi	0%	100%		100%		100%											
	4	Jumlah kelompok tani/ pelaku agribisnis yang mengikuti bimbingan dan pelatihan teknis	0	20 Klp		25 Klp		30 Klp											
	5	Jumlah petani/ pendamping yang mengikuti PEDTA/PENAS KTNA	0	60 org		0		60 Org											
1.7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian				115		345		390										
	1	Promosi atas hasil produksi pertanian (event)	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali											
	2	Jumlah pasar tani	0	2 Unit		4 Unit		6 Unit											
	3	Stabilnya harga dan pasokan pangan pokok melalui toko tani indonesia	0	1 Unit	-	-		-											
1.8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan				100		100		100										
	1	Terpenuhinya Benih Padi Penangkaran unggul bermutu	2.642 ton	2650		2658		2666											
1.9	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian				394		550		600										
	1	Persentase penyuluh yang bersertifikat	2	-		-													
	2	Tingkat pemenuhan 1 desa 1 penyuluh	179 PPL	3 PPL		3 PPL		3 PPL											
	3	Terpenuhinya insentif/ alat peraga/ alat bantu penyuluh pertanian	79	79		220		223											
	4	Peningkatan wawasan/ motivasi penyuluh pertanian setelah mengikuti pertemuan teknis kabupaten	179 PPL	179		220		223											
1.10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian				6.562		11.490		13.780										
	1	Nilai Tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (Rp/TK) (Lihat di SDG's)	N/A (BPS)	68.121.992		71.102.279		74.082.565											
	2	Tingkat pemenuhan data base pertanian	10	10		10		10											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021			2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET			RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
	3	Jumlah alat pasca panen yang tersedia																
		Terpal Jemur	0	250		300		350										
		RMU	0	1		1		2										
		Combine harvester	0	5		5		5										
		Power Thresher	0	10		10		15										
		Corn seller	0	10		10		15										
		Alat Packing beras	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit										
	4	Jumlah luas tanaman padi/palawija																
		Produksi tanaman pangan (ton)																
		- Padi	0	846.068		862.989		880.249										
		- Jagung	0	47.172		48.587		50.045										
		Produktivitas Tanaman pangan (ku/ha)																
		- Produktifitas Padi (Ku/Ha)	0	51,17		52,19		53,24										
		- Produktifitas Jagung (Ku/Ha)	0,00	42,99		43,00		43,21										
	5	Jumlah luas pertanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar	0 ha	100		150		200										
	6	Tersedianya lumbung pangan	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit										
	7	Persentase lumbung pangan yang termanfaatkan	N/A	80 Persen		80 Persen		80 Persen										
	8	Panjang Jalan Usaha Tani	0	3.000 M		4.000 M		5.000 M										
	9	Tingkat pemenuhan laporan agroklimat	0	18 Lap		18 Lap		18 Lap										
	10	Tingkat pengawasan pupuk bersubsidi	0	18 Kec		18 Kec		18 Kec										
	11	Tercukupinya kesediaan air pada kawasan tanaman pangan	0	225 Ha		250 Ha		275 Ha										
	12	Jumlah produksi tanaman buah buahan																
		produksi Duku	23.869	24.585		25.322		26.081										
		Produksi Durian	5.976	6.155		6.339		6.529										
		produksi Mangga	21548 Ton	21.550		21.555		21.565										
		Produksi Pisang	12.619	12.997		13.386		13.787										
	13	Jumlah produksi tanaman sayur																
		Produksi Cabe Besar	145.234	149.591		154.078		158.700										
		Produksi Cabe Rawit	34.656	35.695		36.765		37.867										
	14	Produktivitas tanaman sayuran																
		Produksi Cabe Besar	15,8	16,1		16,4		16,7										
		Produksi Cabe Rawit	16,4	16,7		18		18,3										
1.11	Program pengembangan agribisnis				75		0	0										
	1	Persentase Gapoktan yang dibina	100%	100%														
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN				4.475		9.235	9.310										
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				917		1.000	1.000										
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%										
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				190		650	300										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100%		100,00%		100,00%											
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				123		150		200										
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%											
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				40		40		40										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				75		100		100										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				120		450		450										
	1	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	10 klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk											
	2	Tersedianya data perusahaan dan pelaku agribisnis lainnya	54 PBSN	54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN											
1.7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi perkebunan				150		500		500										
	1	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan	20 Produk, 5 UPPB	1 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB											
1.8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan				400		800		950										
	1	Terlaksananya kajian pengembangan perkebunan	1 Dok	1 Dok		0		1 Dok											
	2	Tersedianya prasarana dan sarana perkebunan tepat guna	18 Klpk	3 Klpk		5 Klpk		5 Klpk											
1.9	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				630		1.500		1.550										
	1	Meningkatnya pengetahuan petani tentang peningkatan produksi perkebunan	10 Klmpk	20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk											
	2	Tersedianya saprodi perkebunan	15 Klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk											
	3	Meningkatnya luas areal dan produksi tanaman perkebunan	50 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk											
	4	Terhindarnya kebun masyarakat dari kebakaran	200 Ha	200 Ha		200 Ha		200 Ha											
1.10	Program Pemberdayaan Penyuluh perkebunan Lapangan				250		300		300										
	1	Meningkatnya kapasitas penyuluh perkebunan lapangan	47 Orang	47 Orang		47 Orang		47 Orang											
1.11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				300		400		400										
	1	Terciptanya kesehatan hewan di masyarakat	22.000 Ekor	22.000 Ekor		20.000 Ekor		18.000 Ekor											
1.12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1.210		2.175		2.200										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak dan meningkatnya populasi ternak	12 Unit, 2.500 Dosis	3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis											
	2	Meningkatnya populasi ternak	2.574 Ekor	2.600 Ekor		2.700 Ekor		2.800 Ekor											
	3	Meningkatnya konsumsi gizi produk peternakan	40 Sekolah	75 Sekolah		80 Sekolah		85 Sekolah											
1.13	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				0		200		200										
	1	Peningkatan sarana prasarana pasar hewan	2 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit											
1.14	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				0		600		750										
	1	Tersedianya kajian pengembangan peternakan (action plane)	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen											
	2	Tersedianya prasarana dan sarana peternakan tepat guna	15 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk	600	5 Klmpk											
1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan				0		300		300										
	1	Tersedianya alat pasca panen produk perkebunan dan peternakan	26 Klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk											
1.16	Program Peningkatan Produksi Peternakan				70		70		70										
	1	Persentase tingkat produksi ternak	50	50		50		50											
3.04	URUSAN PERDAGANGAN				7.729		11.201		13.910	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.539		1.326		1.400	2.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.427		7.502		7.576	Disdag
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				394		980		380	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			141		148		155	Disdag
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100%		100%		100%			Terdatanya gudang sesuai peruntukan dan kegunaannya	10 gudang		20 gudang		30 gudang			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				66		60		130	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			1.806		1.892		1.979	Disdag
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Jumlah sarana perdagangan yang di rehab atau dibangun	3 pasar		4 pasar		5 pasar			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		65		70	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			84		88		92	Disdag
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Tersedianya data harga barang kebutuhan bahan pokok	9 bahan pokok		9 bahan pokok		9 bahan pokok			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			70		70		80	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor			42		44		46	Disdag	
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			komoditi unggulan yang dipromosikan untuk ekspor	5 komoditi		8 komoditi		16 komoditi			
1.6	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				1.600		575		600	3.30.06	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen			280		293		306	Disdag
	1	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	0%	11%		13%		15%			Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera sahkan	400		450		500			
	2	Persentase monitoring dan pengawasan barang dan jasa	85%	3%		4%		5%	3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			194		203		212	Disdag	
1.7	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				0		450		450			Jumlah pameran atau expo yang diikuti	2 pameran		4 pameran		6 pameran		
	1	Jumlah komoditi yang diekspor	Na	315 Ton		333 Ton		350 Ton											
1.8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				4.060		7.300		10.350										
	1	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (Pasar dan Gudang)	2	2		3		5											
	2	Persentase penyediaan sarana perdagangan	8%	15%		20%		25%											
	3	Persentase penyediaan informasi dan promosi perdagangan	100%	100%		100%		100%											
1.9	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				0		375		450										
	1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	5,36%	10%		20%		30%											
	2	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	10%	20%		30%		40%											
3.05	URUSAN PERINDUSTRIAN				595		1.080		1.085	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
1.1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				0		200		200	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			100		105		110	Diskoperin
	1	Jumlah IKM Yang menerapkan inovasi	5	6		7		8			Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan industri, klaster dan sentra industri	1		2		3			
1.2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				20		200		200	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota			100		105		110	Diskoperin
	1	Jumlah rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah	72	75		80		85			Persentase pengendalian izin usaha industri	5%		7%		9%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021					2022		2023		TARGET			RP	
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	2	Jumlah IKM yang menjalin kerjasama dengan swasta	0	1	2		3		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			1.178		1.234		1.289	Diskoperin				
1.3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				130		80	85			Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	25%		30%		35%						
	1	Jumlah produk IKM yang memiliki SNI	5	6	7		8															
1.4	Program Penataan Struktur Industri				200		100	100														
	1	Persentase penataan hubungan	25%	30%		35%		40%														
1.5	Program Pengembangan Usaha Bina Industri Potensial				245		500	500														
	1	Jumlah IKM yang memiliki sarana informasi	0	0		1		2														
	2	Pameran hasil industri kecil dan kerajinan	3	4		4		4														
3.06	URUSAN TRANSMIGRASI				1.045		1.197	1.208	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi												
1.1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				1.045		1.197	1.208	3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi			0		100		100	Disnakertrans				
	1	Rencana Penyiapan Kawasan Transmigrasi	2 KW	4 KW		4 KW		4 KW		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi		-		100%		100%						
	2	UPT yang dibina dan dikembangkan (Ekosobud,Sapras)	2 UPT	1 UPT		1 UPT		1 UPT	3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			546		472		498	Disnakertrans				
										Persentase pembangunan kawasan transmigrasi		30%		50%		85%						
									3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			166		174		182	Disnakertrans				
										Persentase pengembangan kawasan transmigrasi		55%		70%		85%						
4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					177.214		213.636	213.473	4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																					
	SEKRETARIAT DPRD				65.128		67.531	64.607	4.02	Sekretariat DPRD												
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11.671		12.319	12.935	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			65.340		65.994		66.647	Setwan				
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%						
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.821		10.402	0	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			57.676		60.423		63.169	Setwan				
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Bidang Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi	100%		100%		100%						

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				226		237		249										
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%											
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				509		524		550										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				303		254		267										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				50.598		43.795		45.984										
	1	Tercapainya Rasio jumlah perda yang disahkan	5 Buah	5 Buah		5 Buah		5 Buah											
	2	Teridentifikasinya masalah - masalah di Daerah Pemilihan (DAPIL) yang teratasi	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali											
	3	Meningkatnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali											
	SEKRETARIAT DAERAH				54.924		70.250		74.400	4.01	Sekretariat Daerah								
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				28.810		30.251		31.763	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			78.141		78.923		79.704	Setda
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				9.038		9.690		10.164	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			21.679		22.711		23.743	Setda
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				614		645		677	4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan			6.619		6.934		7.250	Setda
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		20%		18%				Tingkat pemenuhan fasilitasi perekonomian dan pembangunan	100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				1.917		6.558		7.288										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.000		4.050		3.721										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021					2022		2023		2024		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD				466		294		309											
	1	Tersedianya Anggaran Setda Kab. OKI	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok												
1.7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				1.602		1.014		1.106											
	1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pelayanan informasi	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket												
	2	Tersedianya dan Terdokumentasinya Kegiatan Pemerintah kab.OKI	60%	60%		66%		73%												
1.8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah				4.787		6.051		6.437											
	1	Meningkatnya Pelayanan Acara Resmi Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	62%	62%		68%		75%												
	2	Tersedianya data pembangunan daerah	20 lap	20 lap		20 lap		20 lap												
	3	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%		100%		100%												
	4	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	100%	100%		100%		100%												
1.9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				200		275		295											
	1	Terbentuknya peraturan daerah yang baik	10 Perda	10 Perda		10 Perda		10 Perda												
	2	Tersedianya buku peraturan perundang-undangan	500 Buku	500 Buku		500 Buku		500 Buku												
1.10	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				400		480		500											
	1	Meningkatnya kinerja camat	18	18		18		18												
	2	Terfasilitasinya Kesuksesan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden	1	1		-		-												
1.11	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				590		1.218		1.335											
	1	Terfasilitasinya pembentukan kabupaten dan kecamatan baru	-	-		-		-												
	2	Tersedianya data nama-nama Rupa Bumi	200	200		300		300												
	3	Terwujudnya kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama antar daerah	1	1		1		1												
	4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Layanan Publik,Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	1	1		1		1												

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.12	Program Penataan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten				255		585		470										
	1	Terpenuhiya Tertib Wilayah administrasi Batas Desa/Kelurahan	-	-		-		-											
	2	Tersedianya Data Digital Penataan Batas	1	1		1		-											
1.13	Program Pengendalian perekonomian daerah				650		680		710										
	1	Tingkat koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kab. OKI	100%	100%		100%		100%											
	2	Tingkat pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	2 BUMD	2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD											
	3	Terfasilitasinya modal usaha golongan ekonomi lemah	4 Kec	4 Kec		4 Kec		5 Kec											
1.14	Program Pelayanan Peningkatan Pendidikan dan Kesenian				3.595		6.280		6.975										
	1	Jumlah pelayanan pendukung peningkatan peribadatan	3155 org	3155 org		4155		4155											
	2	Jumlah terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	700 org	700 org		650 org		650 org											
	3	Jumlah pembinaan dan peningkatan kerohanian masyarakat	1000 org	1000 org		1000 org		1250 org											
	4	Cakupan pembinaan keagamaan	3 lokasi	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi											
	5	Jumlah peserta pelayanan administrasi pernikahan	140 pasang	140 pasang		205 pasang		272 pasang											
	6	Jumlah peserta pelayanan pendukung pendidikan peribadatan	2000 org	2000 org		2250 org		2500 org											
1.15	Program mengintensifikan pelayanan pengaduan masyarakat				0		200		200										
	1	Terciptanya perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu	10 Perkara	10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara											
1.16	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa				0		1.980		2.450										
	1	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	25%	25%		50%		70%											
PEMERINTAHAN KECAMATAN					24.802		25.658		26.764	7	Unsur Kewilayahan								
KECAMATAN KAYUAGUNG					6.090		9.706		10.192	7.01	KECAMATAN KAYUAGUNG			20.681		21.629		22.614	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.090		5.090		5.345	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			12.337		12.924		13.512	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				418		418		439	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			8.084		8.469		8.854	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				69		69		72	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				30		30		32	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			260		236		249	Kecamatan
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				250		250		262	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			15		20		25	Kecamatan
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan		25%		30%		40%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				234		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
1.7	Program pembangunan kelurahan				0		3.850		4.043										
	1	Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%		100%		100%											
	2	Capaian Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%		100%		100%											
	KECAMATAN SP PADANG				1.093		768		807	7.01	KECAMATAN SP PADANG			3.589		3.724		3.895	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				308		308		323	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			63		66		69	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan		25%		30%		40%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				180		180		189	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.310		3.468		3.625	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				20		20		21	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			216		190		200	Kecamatan
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				210		210		221										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				325		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
KECAMATAN JEJAWI					1.093		817		858	7.01	KECAMATAN JEJAWI			3.732		3.874		4.051	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				374		374		393	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			49		51,42		53,75	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan		25%		30%		40%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				135		135		142	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.460		3.624		3.789	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				15		15		16	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			223		198		208	Kecamatan
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				243		243		255										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				276		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023		2024			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
	KECAMATAN PAMPANGAN				1.010		751		764	7.01	KECAMATAN PAMPANGAN			3.932		4.083		4.270	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				404		404		424	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			47		49,50		51,75	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan	25%		30%		40%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				105		105		110	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.704		3.880		4.056	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				24		24		0	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				12		12		13	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			181		154		162	Kecamatan
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%			
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				40		40		42										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				167		167		175										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.7	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				259		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
	KECAMATAN TULUNG SELAPAN				1.656		1.548		1.626	7.01	KECAMATAN TULUNG SELAPAN			5.666		5.900		6.170	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				333		333		350	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.792		5.020		5.248	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				476		476		500	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			683		715		748	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%				Tingkat pencapaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				45		45		47	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%		
1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				16		16		17	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			192		165		174	Kecamatan
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%				Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%		
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				45		45		47										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				133		133		139										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.7	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				345		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
1.8	Program pembangunan kelurahan				263		500		525										
	1	Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%		100%		100%											
	2	Capaian Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%		100%		100%											
	KECAMATAN PEDAMARAN				1.020		867		910	7.01	KECAMATAN PEDAMARAN			3.098		3.209		3.357	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				417		417		438	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			69		72		75	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan	25%		30%		40%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			199	199		209	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.831		2.966		3.101	Kecamatan	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%			
1.3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50	50		53	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				0		36		36	Kecamatan	
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%			
1.4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			201	201		211	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				198		172		181	Kecamatan	
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%			
1.5	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			153	0		0												
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
	KECAMATAN TANJUNG LUBUK			1.621	1.727		1.813	7.01	KECAMATAN TANJUNG LUBUK				5.678		5.913		6.183		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			518	518		543	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				1,37		1,43		1,50	Kecamatan	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan		25%		30%		40%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			566	566		594	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.659		4.881		5.103	Kecamatan	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			29	29		30	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				734		769		804	Kecamatan	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%	100%		100%			Tingkat pencapaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%		100%		100%			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50	50		53	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				0		36		36	Kecamatan	
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			154	154		162	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				283		261		274	Kecamatan	
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023		2024			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				244		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
1.7	Program pembangunan kelurahan				60		410		431										
	1	Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%		100%		100%											
	2	Capaian Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%		100%		100%											
	KECAMATAN LEMPUING				1.020		858		901	7.01	KECAMATAN LEMPUING			3.759		3.902		4.081	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				402		402		423	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			3,68		3,85		4,03	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan	25%		30%		40%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				182		182		191	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.456		3.621		3.785	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				12		12		13	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%			
1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				8		8		8	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			299		277		292	Kecamatan
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%			
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				40		40		42										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				213		213		224										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.7	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				162		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
	KECAMATAN MESUJI				1.020		1.284		1.284	7.01	KECAMATAN MESUJI			4.043		4.200		4.392	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				410		547		547	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.752,43		3.931,11		4.109,80	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				207		285		285	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				10		32		32	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			291		269		282	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		20		20										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0		12		12										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		50										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				177		338		338										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.8	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				166		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
	KECAMATAN SUNGAI MENANG				1.020		740		777	7.01	KECAMATAN SUNGAI MENANG			3.033		3.142		3.286	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				337		337		354	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.862,88		2.999,21		3.135,54	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				170		170		179	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				20		20		21	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			171		143		151	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				163		163		171										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				280		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
	KECAMATAN AIR SUGIHAN				1.204		969		1.017	7.01	KECAMATAN AIR SUGIHAN			3.596		3.767		3.938	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				426		426		447	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			0,869		0,910		0,952	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan	25%		30%		40%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				295		295		310	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.595		3.766		3.937	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				32		32		34	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			261		238		250	Kecamatan
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah	100%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				166		166		174										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021						2022		2023		2024		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%													
1.6		Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			235		0		0												
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%																	
	KECAMATAN CENGAL				1.020		738		775	7.01	KECAMATAN CENGAL				2.820		2.918		3.052		
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			359		359		377	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				4,41		4,62		4,83	Kecamatan	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan		25%		30%		40%				
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			230		230		242	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.638		2.764		2.890	Kecamatan	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%				
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur			7		7		7	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				0		36		36	Kecamatan	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%				
1.4		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			40		40		42	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				177		149		158	Kecamatan	
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%				
1.5		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			103		103		108												
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%													
1.6		Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			282		0		0												
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%																	
	KECAMATAN TELUK GELAM				1.020		975		904	7.01	KECAMATAN TELUK GELAM				3.341		3.464		3.623		
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			420		420		420	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.075,76		3.222,22		3.368,68	Kecamatan	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%				

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				239		333		274	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				0		30		18	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			265		242		254	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		50										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				142		142		142										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				169		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
	KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM				1.020		812		886	7.01	KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM			3.118		3.267		3.415	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				325		325		384	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			15,75		16,50		17,25	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan		25%		30%		40%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				272		272		276	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.902		3.041		3.179	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				18		18		19	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			200		210		219	Kecamatan
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				147		147		155										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.6		Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			208		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR						836		682		716	7.01	KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR			2.666		2.757		2.884
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			305		305		320	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.413		2.528		2.643	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			162		162		170	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%		
1.3		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			50		50		53	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			253		229		241	Kecamatan
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%				Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%		
1.4		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.5		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			116		116		121										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.6		Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			154		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
KECAMATAN LEMPUING JAYA						1.020		767		805	7.01	KECAMATAN LEMPUING JAYA			3.292		3.412		3.570
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			317		317		333	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			78,23		81,95		85,68	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Ikan	25%		30%		40%		
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			146		146		154	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.980		3.121		3.263	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB		
					2019		2020					2021		2022		2023			2024	
					TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				29		29		30	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			235		209		221	Kecamatan	
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%			
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				224		224		235											
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%												
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				253		0		0											
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%																
KECAMATAN MESUJI RAYA					1.020		850		893	7.01	KECAMATAN MESUJI RAYA			3.180		3.295		3.447		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				410		410		431	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.935		3.074		3.214	Kecamatan	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				174		174		183	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan	
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		0%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				46		46		48	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			245		221		233	Kecamatan	
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		100%		100%		100%			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53											
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%												
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				170		170		179											
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%												
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				170		0		0											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
	KECAMATAN MESUJI MAKMUR				1.020		798		838	7.01	KECAMATAN MESUJI MAKMUR			3.400		3.526		3.687	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				307		307		323	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.983		3.125		3.267	Kecamatan
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				194		194		204	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0		36		36	Kecamatan
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	0%		100%		100%			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				12		12		12	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			416		400		420	Kecamatan
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%			Tingkat pencapaian pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%		100%		100%			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan				50		50		53										
	1	Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				234		234		246										
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%											
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				222		0		0										
	1	Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%															
										6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah								
4.02	PENGAWASAN				5.164		7.669		8.111	6.01	Inspektorat Daerah								
2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				758		999		1.071	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.711		8.798		8.886	Inspektorat
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%			
2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				150		1.870		1.440	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan			3.468		3.633		3.799	Inspektorat
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%			Persentase Tingkat Pengawasan Internal	100%		100%		100%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021					2022		2023		2024			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
2.3	Program peningkatan disiplin aparatur					110		100		120	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendamping dan Assitensi				1.317		1.380		1.443	Inspektorat
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100%	100%				100%			Persentase Tingkat Integritas Aparatur		100%			100%		100%		
2.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					340		370		430											
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	100%			100%		100%											
2.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					418		220		510											
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%			100%		100%											
2.6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan					3.328		4.050		4.470											
	1	Persentase Pengaduan Masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan		65%	75%			80%		85%											
	2	Persentase hasil pemeriksaan/review tepat waktu		65%	68%			75%		80%											
	3	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti		83%	83%			80%		85%											
	4	Tingkat Kapabilitas APIP		84	84			84		85											
	5	Tingkat Maturitas SPIP		3	3			3		3											
2.7	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					60		60		70											
	1	Persentase ASN dalam menyampaikan LHKASN		83%	84%			85%		85%											
											5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
4.03	PERENCANAAN					5.053		4.809		5.670	5.01	Perencanaan									
3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.043		1.095		1.150	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.476		10.581		10.686	Bappeda
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	100%			100%		100%		Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan		100%			100%		100%		
3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					521		547		1.224	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.395		1.595		1.925	Bappeda
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%			100%		100%		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100%			100%		100%		
3.3	Program peningkatan disiplin aparatur					51		54		56	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				2.100		2.435		2.511	Bappeda
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100%	100%			100%		100%		Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah		100%			100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
3.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				10		11		11										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
3.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				110		116		121										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
3.6	Program Pengembangan data/informasi				120		130		130										
	1	Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%		100%		100%											
3.7	Program pengembangan kota-kota menengah dan besar				100		0		0										
	1	Jumlah dokumen koordinasi percepatan pembangunan bidang air bersih/drainase sanitasi dan pemukiman	1 lap	1 lap															
3.8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.821		1.136		1.141										
	1	Persentase program RPJMD yang ada di RKPD	100%	100%		100%		100%											
	2	Persentase Program Prioritas Kabupaten Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi dan Nasional	100%	100%		100%		100%											
3.9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				410		640		660										
	1	Persentase program/kegiatan PD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%											
3.10	Program Perencanaan Sosial Budaya				597		657		722										
	1	Persentase program/kegiatan PD bidang sosial budaya yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%											
3.11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				270		425		455										
	1	Persentase ppelaksanaan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%		100%		100%											
4.04 KEUANGAN					15.576		25.852		22.286	5.02	Keuangan								
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				10.952		15.920		15.725	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18.128		17.763		17.398	Bpkad
1.1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran				3.169		3.799		3.828			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
					2019		2020		2021					2022		2023		2024		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			479.397		470.331		462.498	Bpkad	
1.1	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				717		1.966		1.689			Pengelolaan Keuangan Daerah yan Efektif, Efisien dan Akuntabel / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	100%		100%		100%			
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.407		1.473		1.540	Bpkad	
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				98		145		173			Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	100%		100%		100%			
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%												
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				75		480		480											
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%												
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.434		880		890											
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%												
1.6	Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan Aset Daerah				0		800		800											
	1	Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD OKI)	100%	100%		100%		100%												
	2	Persentase Pelaporan Aset yang akurat	80%	80%		82%		85%												
1.7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.459		5.480		5.645											
	1	Predikat laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WTP		WTP												
	2	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat												
	3	Tingkat Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat												
	4	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	65,45%	66		70		75												
1.8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah				0		2.370		2.220											
	1	Meningkatnya Penata Usahaan Pengelolaan Aset	1 lap	1 lap		1 lap		1 lap												
	2	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	1 lap	1 lap		1 lap		1 lap												
	3	Terpenuhinya dan Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD Kab OKI)	1 lap	1 lap		1 lap		1 lap												

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)					URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
		BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH			4.624		9.932		6.561	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			14.533		15.225		15.917	Bppd
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.544		1.621		1.771			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.300		3.458		3.615	Bppd
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			240		4.240		390			Persentase Realisasi Pajak Daerah	100%		100%		100%		
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%											
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur			115		220		270										
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%											
1.4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			365		435		495										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											
1.5		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			375		497		567										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%											
1.6		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah			1.985		2.919		3.068										
	1	Persentase Peningkatan Pencapaian PAD	10,5%	10,55%		10,60%		10,70%											
4.05		KEPEGAWAIAN			4.968		8.272		8.325	5.03	Kepegawaian								
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			976		900		1.100	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.953		10.053		10.152	Bkpp
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%				Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			869		1.300		1.200	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah			6.726		7.078		7.430	Bkpp
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%				Persentase Pegawai (Responden) yang Puas Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	80%		83%		86%		
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur			50		25		25	5.04	Pendidikan dan Pelatihan								
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			4.320		4.504		4.668	Bkpp
1.4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			752		110		150			Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	35%		45%		55%		
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%											

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
				2019		2020		2021				2022		2023					
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1.5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				120		110		120										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%			100%		100%										
1.6	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur				0		2.040		1.970										
	1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%			88%		90%										
	2	Terpenuhinya CPNS golongan II dan III yang memenuhi persyaratan	100%	90%			91%		92%										
	3	Meningkatkan pemahaman PNS tentang jabatan fungsional dan perhitungan angka kredit bagi tenaga fungsional	100%	80%			82%		85%										
1.7	Program pembinaan dan pengembangan aparatur				2.141		1.545		1.660										
	1	Prosentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	70%	80%			83%		85%										
	2	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	1,3%	1,3%			1,2%		1,1%										
	3	Terpenuhinya formasi CPNS sesuai kebutuhan organisasi	90%	90%			92%		94%										
	4	Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%			100%		100%										
1.8	Program Pendidikan Kedinasan				0		2.172		2.035										
	1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%			88%		90%										
	2	Ketersediaan data PNS yang akurat	30%	85%			90%		93%										
	3	Peningkatan kualitas SDM aparatur	90%	80%			85%		90%										
1.9	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				60		70		65										
	1	Meningkatnya tingkat ketersediaan pelaporan data LHKPN pejabat Pemkab OKI	100%	100%			100%		100%										
4.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.600		3.595		3.310	5.05	Penelitian Dan Pengembangan								
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				608		650		650	5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.542		4.587		4.632	Balitbang
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	51,54	100%			100%		100%			Tingkat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				168		495		200	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			1.160		1.215		1.270	Balitbang
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	53,88	100%			100%		100%			Persentase Inovasi Hasil Kajian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh OPD/Stakeholder	100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				48		50		50										
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100	100%			100%		100%										

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)						URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN (Dalam Juta)				AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
				2019		2020		2021					2022		2023		2024		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				126		140		150										
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	21,09	100%		100%		100%											
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0		60		60										
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0%	0%		100%		100%											
1.6	Program Litbang dan Inovasi Daerah				0		300		300										
	1	Rekomendasi/laporan yang di terapkan	100%	100%		100%		100%											
1.7	Program Peningkatan IPTEK bagi UKM				0		300		300										
	1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%											
1.8	Program Litbang dan Inovasi Peningkatan bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan				0		300		300										
	1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%											
1.9	Program Kajian Sosial dan Kemasyarakatan				0		300		300										
	1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%											
1.10	Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan				150		300		300										
	1	Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%											
1.11	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian				260		300		300										
	1	Tingkat Laporan	100%	100%		100%		100%											
1.12	Program Desiminasi Iptek hasil Litbang dan Inovasi				40		100		100										
	1	Iptek dan Inovasi yang dipamerkan	100%	100%		100%		100%											
1.13	Program Peningkatan Hasil Pemasaran				200		300		300										
	1	Studi komoditas / produk unggulan lokal berkualitas	100%	100%		100%		100%											



Bab VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatannya. Tingkat keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur secara spesifik tingkat capaian kinerja program dan kegiatan baik kuantitatif dan/atau kualitatif. Dengan demikian indikator kinerja menjadi dasar penilaian kinerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator tersebut menjadi parameter prioritas pembangunan dan juga sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja setiap urusan diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

8.1 Indikator Kinerja Utama

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran dilakukan tidak oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Saat dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024, jumlah dan jenis IKU tidak mengalami perubahan, tetapi ada perubahan pada target beberapa indikator makro Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti pertumbuhan PDRB, Inflasi, Kemiskinan, Indeks Gini, IPM, Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022, 2023, dan 2024. Target ini menyesuaikan dengan pertumbuhan yang mengalami penurunan signifikan akibat terjadinya pandemi *Covid-19* tahun 2020, hal ini dikarenakan target yang lama akan sulit dicapai disebabkan nilai target masih terlalu tinggi.

Berikut indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk lima tahun kedepan sebagaimana ditampilkan pada tabel 8.1.

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Indikator	Target					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa							
1.	Indeks reformasi birokrasi						56,00
	- Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	B
	- Nilai LPPD (Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	ST	ST	ST	ST	ST	ST
	- Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	- Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	- Indeks Kepuasan Masyarakat	70	71	72	73	74	75
	- Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi/SPBE	55 % / 2,6	56/ 3,5	57/ 3,8	58/ 4,2	59/ 4,6	60 %/ 5,0
Misi II Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana							
2.	Indeks pelayanan infrastruktur dasar						0,75
	- Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	70,46 %	71%	72%	73%	74%	75 %
	- Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	65 %	67%	69%	71%	73%	75 %
	- Persentase rumah tangga yang terlayani sarana dan prasarana air limbah yang layak				71,75%	73,32%	74,11%
Misi III Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan							
3.	Indeks Pembangunan Manusia						68,32 Thn
	- Rata-rata lama sekolah	7,03 Thn	7,04 Thn	7,05 Thn	7,06 Thn	7,07 Thn	7,08 Thn
	- Angka Usia Harapan Hidup	68,41 Thn	68,61 Thn	68,81 Thn	69,01 Thn	69,21 Thn	69,41 Thn
	- Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi baik (%)	88 %	91%	94%	97%	99%	100 %
Misi IV Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi							
4.	Pertumbuhan ekonomi						5,05
	- Nilai Tukar Petani	94 %	95%	96%	97%	98%	100 %
	- Persentase Koperasi yang aktif	83%	84%	84%	85%	85%	86%
	- Indeks Gini	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	2,98%	3,29%	3,62%	3,30%	2,98%	2,77%
	- Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	10,5%	10,6%	10,7%	10,8%	10,9%	11%
	- Angka kemiskinan	15.01%	14,73%	14,45%	14,17%	13,89%	13,61%

No	Indikator	Target					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi V Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan							
5.	Indeks kualitas lingkungan hidup						65,49
	Indeks kualitas air	64	64	52,60	52,70	52,80	52,90
	Indeks kualitas udara	99,06	98	82,72	82,82	82,92	83,02
	Indeks tutupan lahan	55,97	54	49,92	51,51	53,10	54,68
Misi VI Menciptakan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Religius, Tertib, Aman dan Nyaman							
6.	Kasus konflik sosial SARA, politik, dan ekonomi						0
	- Jumlah kasus konflik antar umat beragama	0	0	0	0	0	0
	- Angka PMKS yang mendapat layanan	10%	10%	10%	10%	10%	10 %

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah sering pula disebut Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada lampiran A.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, selain dari ketentuan Indikator yang ada dalam regulasi tersebut di atas, RPJMD juga harus mengakomodir indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Maka untuk mempedomani regulasi tersebut, di dalam perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 diadakan penambahan 1 (satu) indikator SPM yaitu, indikator “Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia

Pendidikan Dasar.” Kemudian sesuai hasil masukan saat konsultasi dengan Gubernur, juga ditambahkan 1 (satu) Indikator penting lainnya yaitu, “Angka Harapan Lama Sekolah”. Sehingga dalam Perubahan RPJMD ini, terdapat 2 (dua) penambahan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditambahkan. Secara umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.2. sebagai berikut:

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>									
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	5,03	5,11	5,19	5,27	5,34	5,42	5,50	
	Target baru	%					3,09	4,12	5,05	
1.2	Laju inflasi Kabupaten	%	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	
1.3	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,60	14,66	13,72	12,78	11,83	10,89	9,95	
	Target baru	%					14,17	13,89	13,61	
1.4	Indeks Gini	Indeks	0,33 7	0,28	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	
	Target baru	Indeks					0,31	0,31	0,30	
1.5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,18	67,03	67,88	68,73	69,58	70,43	71,28	
	Target baru	Indeks					67,60	67,93	68,32	
2	<i>Fokus Kesejahteraan Sosial</i>									
2.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,25	7,30	7,50	7,60	7,70	7,80	8,00	DISDIK
	Target baru	Tahun					7,06	7,07	7,08	
2.2	Angka Putus Sekolah SD	%	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12	0,08	0,04	DISDIK

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,50	0,42	0,34	0,26	0,18	0,10	0,02	DISDIK
2.4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,02	98,4	98,8	99,2	99,6	100	100	DISDIK
2.5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,88	99,9	99,9	100	100	100	100	DISDIK
2.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	71,45	74,16	76,87	79,58	82,29	85	87,71	DISDIK
2.7	Angka usia harapan hidup	tahun	68,22	68,41	68,61	68,81	69,01	69,21	69,41	DINKES
2.8	Persentase balita gizi buruk	%	0,35	0,35	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2	DINKES
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar									
1,1	Pendidikan									DISDIK
1.1.1	APK PAUD	%	94,01	95,20	96,40	97,60	98,80	100	100	
1.1.2	APK SD	%	110,93	110,93	111	111	111	111	111	
1.1.3	APK SMP	%	95,18	96,10	97,10	98,10	99,00	100	100	
1.1.4	APM SD	%	101,71	101,80	101,82	101,90	101,92	102	102,02	
1.1.5	APM SMP	%	74,76	76,80	78,90	80,90	83,00	85,00	87,00	
1.1.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	%	5,33	12,30	19,20	26,10	33,10	40,00	43,00	
1.1.7	Persentase satuan pendidikan SD yang terakreditasi	%	48,84	56,10	63,30	70,50	77,80	78,00	83,80	
1.1.8	Persentase guru bersertifikasi	%	48,93	55,10	61,40	67,60	73,80	80,00	86,20	
1.1.9	Jumlah lembaga PKBM yang Terakreditasi	Lembaga	0	3	6	9	12	15	15	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.10	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	Lembaga	3	7	11	15	19	21	23	
1.1.11	Persentase satuan pendidikan yang sudah mencapai standar pelayanan minimal pendidikan dasar	%	59,16	62,3	65,5	68,7	71,8	75	78	
1.1.12	Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%	32,29	35,8	39,4	42,9	46,5	50	53	
1.1.13	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%	42,44	45	47,5	50	52,5	55	57,5	
1.1.14	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	%	31,79	37,4	43,1	48,7	54,4	60	63,4	
1.1.15	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun				11,43	11,44	11,45	11,46	
1,2	Kesehatan									DINKES
1.2.1	Cakupan rumah tangga sehat (persen)	%	80	80	90	100	100	100	100	
1.2.2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	90	100	100	100	100	100	100	
1.2.3	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin untuk Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.4	Persentase Ketersediaan Obat Generik dan Obat Esensial di Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.5	Persentase Pelayanan Kesehatan daerah rentan masalah kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.6	Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin	%	85	100	100	100	100	100	100	
1.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.8	Persentasase obat yang diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.9	Cakupan Rumah Tangga dengan Prilaku Hidup Bersih dan sehat	%	75	77	80	83	85	88	88	
1.2.10	Cakupan Desa Siaga Aktif	Desa	321	321	323	323	324	325	325	
1.2.11	Persentase Posyandu Aktif	%	70	70	75	75	80	80	80	
1.2.12	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.13	Persentase anak 6-24 bulan keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.14	Pesentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan GIZI	%	98	98	98	98	99	99	99	
1.2.15	Persentase Stunting pada anak balita yang ditangani	%	0	100	100	100	100	100	100	
1.2.16	Cakupan Rumah tangga dengan sumber air terlindungi	%	80	80	90	100	100	100	100	
1.2.17	Cakupan Rumah memiliki jamban sehat	%	65	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.18	Cakupan tempat umum dan Penjual Makanan yang sehat	%	78	80	83	85	90	95	95	
1.2.19	Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan	%	80	80	90	100	100	100	100	
1.2.20	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis sesuai dengan pelayanan kesehatan TB	%	81	100	100	100	100	100	100	
1.2.21	Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.22	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai standar pelayanan kesehatan HIV	%	90	100	100	100	100	100	100	
1.2.23	Cakupan desa/kelurahan UCI	Desa	321	321	323	323	324	325	325	
1.2.24	Cakupan Imunisasi Dasar anak Usia 12 -23 Bulan	%	95	95	95	95,5	96	96,5	97	
1.2.25	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemilogi	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.26	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.27	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM) sesuai standar pelayanan kesehatan penderita DM	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.28	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar pelayanan kesehatan penderita (SPM)	%	90	100	100	100	100	100	100	
1.2.29	Persentase sarana Kesehatan yang dapat dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.30	Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar	%	60	70	80	90	95	100	100	
1.2.31	Persentase Kelengkapan Prasarana,dan alat Kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai standar	%	80	80	90	95	95	95	95	
1.2.32	Persentase Peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan BPJS	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.33	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.34	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai dengan standar pelayanan persalinan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru baru lahir (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai dengan standar pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.38	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai dengan standar pelayanan kesehatan pada usia produktif (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.39	Jumlah Kematian Ibu	Ibu	11	9	7	5	3	2	2	
1.2.40	Persentase Hygiene air bersih dan air minum yang memiliki sertifikat hygiene	80	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.41	Persentase Upaya Keselamatan kerja dan olah raga	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.42	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (SPM)	%	90	100	100	100	100	100	100	
1.2.43	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan nasional Melalui PBI	%	75	80	85	90	95	100	100	
1.2.44	Cakupan stunting pada anak dibawah usia 5 Tahun	%	20	<20	<19,5	<18	<16	<15	<14	
1.2.45	Cakupan stunting pada anak dibawah usia 2 Tahun	%	13	<13	<12,5	<12	0	0	0	
1.2.46	Cakupan desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/kel	274	283	291	299	307	315	327	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.47	Cakupan desa/kelurahan yang Open Defecation free (ODF)/ Stop BAB Sembarangan	Desa/kel	60	82	104	128	148	168	188	
1.2.48	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	bayi	2	2	2	1	1	1	1	
1.2.49	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	balita	2	2	2	1	1	1	1	
1.2.50	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Neonatal	2	2	2	1	1	1	1	
1.2.51	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.52	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	%				100	100	100	100	DINKES
1.2.53	Rasio dokter persatuan penduduk	%	8,24	8,7	9,3	10,04	10,8	11,6	12,4	DINKES
1.2.54	Tingkatan akreditasi rumah sakit	Tingkat	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	RSUD
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.3.1	Rasio panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang	%	70,47	70,47	71,62	72,83	74,1	75,35	76,35	DINAS PUPR
1.3.2	Rasio jembatan kondisi mantap	%	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PUPR
1.3.3	Rasio drainase jalan kondisi Mantap	%	45,14	45,15	45,16	45,17	45,18	45,19	45,2	DINAS PRKP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.4	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	%	10	15	15	15	15	15	15	DINAS PUPR
1.3.5	Rasio jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	%	15	20	20	20	20	20	20	DINAS PUPR
1.3.6	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	18	37	57	75	88	100	100	DINAS PUPR
1.3.7	Persentase penduduk berakses air Minum	%	77,73	79,73	80,73	81,73	71,75	73,32	74,11	DINAS PRKP
1.3.8	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	5	10	10	10	10	10	10	DINAS PUPR
1.3.9	Persentase infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik	%	40,18	40,23	40,34	40,52	40,78	41,13	41,58	DINAS PRKP
1.3.10	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah	%	0,17	0,31	0,42	0,73	1,28	2,24	3,2	DINAS PUPR
1.3.11	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PUPR
1.3.12	Persentase rumah tangga yang terlayani sarana dan prasarana air limbah yang layak	%					65,58	68,86	72,30	DINAS PRKP
1,4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1.4.1	Rasio Rumah Layak huni	%	56,66	58,66	60,66	62,66	64,66	66,66	68,66	DINAS PRKP
1.4.2	Persentase kawasan kumuh yang Tertangani	%	2,67	2,80	2,94	3,09	3,25	3,41	3,58	DINAS PRKP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	<i>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>									
1.5.1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	POLPP & PK
1.5.2	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	100	POLPP & PK
1.5.3	Penegakkan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	POLPP & PK
1.5.4	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	%	60	65	70	75	80	85	90	KESBANGPOL
1.5.5	Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Ogan Komerling Ilir	%	63,87	100	-	-	-	100	100	KESBANGPOL
1.5.6	Persentase penurunan titik kebakaran (Hot Spot) hutan dan lahan	%	85	86	87	89	91	93	95	BPBD
1.5.7	Persentase kejadian bencana yang Ditanggulangi	%	50	60	60	70	70	70	70	BPBD
1.6	<i>Sosial</i>									DINSOS
1.6.1	Persentase panti sosial yang dibina	%	80	100	100	100	0	0	0	
1.6.2	Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyangang disabilitas terlantar diluar panti	%	10	10	10	10	10	10	10	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.3	Cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	%	-	100	100	100	100	100	100	
1.6.4	Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	%	22,2	100	100	100	100	100	100	
1.6.5	Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.6.6	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fokus Pelayanan Wajib Tidak Dasar									
2.1	Tenaga Kerja									DISNAKER-TRANS
2.1.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	97,39	97,09	86,50	86,80	87,00	87,25	87,40	
2.1.2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (per 1000 orang)	%	44,90	45	48	50	52	54	55	
2.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,45	3,25	3,00	2,75	2,50	2,25	2,00	
	Target baru	%					3,30	2,98	2,77	
2.1.4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,57	71,17	70	75	80	85	90	
	Target baru	%					71	73	75	
2.1.5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	20	22%	25%	30	35%	40	45%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									DINAS PP & PA
2.2.1	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	%	28,30	37,74	37,74	98,11	100	100	100	
2.2.2	Rasio KDRT perempuan	%	0,90	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,1	
2.2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	91,48	91,89	92,29	92,69	93,09	93,50	93,90	
2.2.4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,31	60,54	62,77	65,01	67,24	69,47	71,70	
2.2.5	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	%	23	50	50	50	100	100	100	
2.2.6	Jumlah kecamatan layak anak	%	0	17	17	56	72	89	100	
2.2.7	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	
2.2.8	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	95	95	95	100	100	100	100	
2.2.9	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	%	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	
2.2.10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	26,71	30	30	35	40	45	50	
2.2.11	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,9	16	16	16	16	16	16	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.2.13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.2.14	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	50	50	50	55	60	65	80	
2.2.15	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	50	50	55	55	60	70	90	
2.2.16	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	54	90	90	90	95	95	95	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.17	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	54	55	55	55	60	60	65	
2.2.18	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50	60	70	80	90	90	
2.3	Ketahanan Pangan									DKRTPH
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	PPH	87,9	90,8	90,9	100	100	100	100	
2.3.2	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan (Angka Skor)	Angka Skor	82,9	90,8	93,9	96,9	98,6	100	100	
2.3.3	Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	176,91	177,2	178,1	179,6	181,3	183,6	185,1	
2.3.4	Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	Rp/orang	1939,3	2032,4	2049,2	2052,7	2075,6	2080,9	2100,4	
2.4	Pertanahan									DINAS PERTANAHAN
2.4.1	Jumlah Bidang Tanah Aset yang Disertifikatkan	Persil	0	70	72	74	76	78	83	
2.4.2	Persentase Permasalahan Tanah yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.4.3	Jumlah Permasalahan Penguasaan Tanah yang Diidentifikasi	Kasus	70	70	75	76	77	78	84	
2.5	Lingkungan Hidup									DINAS LH
2.5.1	Persentase penanganan sampah	%	6,06	7	8	9	10	11	12	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.2	Persentase pengurangan sampah Kab.OKI	%	8,5	10	12	15	17	19	21	
2.5.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64	64	63	64,21	64,64	65,06	65,49	
	Indeks kualitas air	Indeks	65,38	64	64	52,60	52,70	52,80	52,90	
	Indeks kualitas udara	Indeks	99,06	99,06	98	82,72	82,82	82,92	83,02	
	Indeks tutupan lahan	Indeks	55,97	55,97	54	49,92	51,51	53,10	54,68	
2.5.4	Jumlah Bank Sampah yang terkelola	%	72	73	74	75	76	77	78	
2.5.5	Penegakkan Hukum Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.5.6	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.5.7	Persentase jumlah sekolah adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	
2.6	<i>Kependudukan dan Catatan Sipil</i>									DISDUKCAPIL
2.6.1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	%	85,74	92,59	99,08	99,2	99,4	99,6	99,8	
2.6.2	Lama Pengurusan KTP	Hari	7	7	7	7	7	7	7	
2.6.3	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	%	81,2	85,2	89,5	93,9	98,6	98,8	99	
2.6.4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	30,91	35,53	40,15	44,77	49,39	54,01	58,63	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.5	Kepemilikan KIA	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.6.6	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatn Sipil</i>	%	50	55	60	65	70	75	80	
2.7	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>									DINAS PMD
2.7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (Kelompok)	Kelompok	314	314	314	314	314	314	314	
2.7.2	Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (Desa)	Desa	314	50	50	50	50	50	64	
2.7.3	Jumlah PKK yang aktif (Kelompok)	kelompok	346	346	346	346	346	346	346	
2.7.4	Persentase desa inovasi	Desa	314	50	50	50	50	50	50	
2.7.5	Persentase aparat pemerintah desa yang berkinerja baik	%	40	50	60	70	80	90	95	
2.8	<i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>									DINAS PPKB
2.8.1	Prevalensi peserta KB aktif	%	82,04	79,00	79,05	80,00	80,05	81,00	81,00	
2.8.2	Rasio petugas KB /desa	org/desa	4	4	4	4	4	4	4	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Perhubungan									DINAS PERHUBUNGAN
2.9.1	Jumlah Prasarana Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api	lokasi	25	27	28	29	30	31	32	
2.9.2	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas per tahun	Or an %	3	3	4	4	5	5	5	
2.9.3	Persentase Kepemilikan Keur (Pengujian Kendaraan Bermotor)	%	60	63,34	66,68	70,02	73,36	76,70	80,00	
2.10	Komunikasi dan Informatika									DISKOMINFO
2.10.1	jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	media	23	28	35	41	46	52	55	
2.10.2	Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)	kerjasama	0	35	40	45	50	55	60	
2.10.3	Cakupan layanan telekomunikasi	%	60	65	70	75	80	85	90	
2.11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									DISKOPERIN
2.11.1	Persentase Usaha Mikro kecil dan menengah yang sehat	%	15	16	17	18	19	20	21	
2.11.2	Angka pertumbuhan wirausaha baru (org)	Org	1000	100	100	100	100	120	1520	
2.11.3	Rasio jumlah koperasi aktif	%	83	83	84	85	86	87	88	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12	Penanaman Modal									DINAS PM, PTSP
2.12.1	Nilai realisasi investasi PMDN	Triliun	0,393	3,938	4,331	4,765	5,241	5,767	6,342	
2.12.2	Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan	%	82,15	75	77	79	81	83	85	
2.12.3	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	izin	1500	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
2.12.4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	%	50	60	60	60	70	70	70	
2.13	Kepemudaan dan Olahraga									DISPORA
2.13.1	Persentase Pemuda yang bebas Narkoba	%	55	55	60	65	65	65	70	
2.13.2	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	%	25	25	30	30	35	40	45	
2.13.3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	20	20	21	22	23	24	25	
2.13.4	Rasio Lapangan Olahraga Per 1000 Penduduk	%	17	18	20	22,5	25	27,5	30	
2.14	Kebudayaan									DISBUDPAR
2.14.1	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	31 CB	0	1	2	3	4	5	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	4	4	5	6	7	7	7	
2.15	Perpustakaan									DINAS KP
2.15.1	Rasio jumlah pengunjung Perpustakaan	%	1,39	0,69	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	
2.15.2	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	9	9	9	18	21	24	27	
2.15.3	Jumlah koleksi buku perpustakaan	buku	11.920	0	12.516	13.142	13.799	14.489	15.213	
2.16	Kearsipan									DINAS KP
2.16.1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	%	57	66	70	75	85	94	100	
2.16.2	Persentase arsip statis dan in aktif yang terdata dan tertata dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.16.3	Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	Aplikasi	1	1	1	2	2	3	3	
2.17	Statistik									DISKOMINFO
2.17.1	Jumlah buku statistik daerah	Buku	100	100	100	100	100	100	100	
2.18	Persandian									DISKOMINFO
2.18.1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	%	1	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
3.1	Perikanan									DINAS PERIKANAN
3.1.1	Persentase penurunan Illegal Fishing	%	20 kasus	10	20	30	50	75%	100	
3.1.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	67.249	70.611,45	71.317,56	82.015,19	94.317,46	117.896,82	165.055,54	
3.1.3	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	26.005	26.525,1	27.851,35	30.079,45	33.688,98	40.426,77	54.576,13	
3.1.4	Nilai tukar nelayan / NTN	%	102,00	102,30	102,50	102,80	103,00	103,30	104,00	
3.1.5	Cakupan bina kelompok nelayan	%	40	40	40	40	40	40	40	
3,2	Pariwisata									DISBUDPAR
3.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	10.242	10.444	10.546	10.646	10.748	10850	10.950	
3.2.2	Peningkatan Jumlah objek wisata	unit	2	2	2	2	3	3	3	
3.3	Pertanian									DKPTPH
3.3.1	Produksi tanaman pangan									
	- Padi	Ton	810.570	846.068	862.989	880.249	897.854	915.811	933.768	
	- Jagung	Ton	47.087	47.172	48.587	50.045	51.546	53.092	54.685	
3.3.2	Produktivitas Tanaman pangan									
	- Produktifitas Padi	Ton	50.00	51.17	52.19	53.24	54.30	55.39	56.47	
	- Produktifitas Jagung	Ton	41.99	42.99	43.00	43.21	43.50	43.75	44.25	
3.3.3	Produktivitas Tanaman Perkebunan									
	- Produktivitas Karet	Ton/Ha	1,29	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	
	- Produktivitas Sawit	Ton/Ha	10,97	10,95	11,50	12	12,50	13	13,50	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.4	Produksi tanaman buah- buahan									
	- Produksi Duku (ton)	Ton	23.869	24.585	25.322	26.081	26.863	27.668		
	- Produksi Durian (ton)	Ton	5.976	6.155	6.339	6.529	6.724	6.925	7.132	
	- Produksi Mangga (ton)	Ton	21.548	21.550	21.555	21.565	21.570	21.570	21.57	
3.3.5	Produksi tanaman sayuran									
	- Produksi Cabe Besar (ton)	Ton	145.234	149.591	154.078	158.700	163.461	168.364	173.414	
	- Produksi Cabe Rawit (ton)	Ton	34.656	35.695	36.765	37.867	39.003	40.173	41.378	
3.3.6	Produktivitas tanaman sayuran									
	- Produksi Cabe Besar (ton)	Ton	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6	
	- Produksi Cabe Rawit (ton)	Ton	16,4	16,7	18	18,3	18,6	18,9	19,2	
3.3.7	Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	%	10	10	20	30	40	50	60	
3.3.8	Jumlah populasi Ternak	Ekor								DISBUNNAK
	- Sapi	Ekor	28.285	29.699	31.183	32.742	34.379	36.097		
	- Kerbau	Ekor	11.150	11.707	12.292	12.906	13.551	14.228	14.939	
3.3.9	Produksi Telur	Ton	748,9	763,87	779,14	794,72	810,61	826,62	843,35	DISBUNNAK
3.3.10	Produksi daging	Ton	482.044	491.684	501.517	511.547	521.777	532.212		DISBUNNAK
3,4	Perdagangan									DINAS PERDAGANGA
3.4.1	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	9	11	13	15	17	19	21	
3.4.2	Jumlah komoditi yang diekspor	Komoditi	1	315	333	350	370	390	390	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.3	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (Pasar dan Gudang)	pasar dan gudang	2	2	3	5	5	5	20	
3.4.4	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	5,36	10	20	30	40	50	55%	
3,5	Perindustrian									DISKOPERIN
3.5.1	Persentase Pertumbuhan industri secara keseluruhan (%)	%	2,8	3	3,25	3,50	3,70	3,80	4,00	
3.5.2	Jumlah pertumbuhan sentra IKM (sentra)	sentra	168	175	185	195	205	215	220	
3.5.3	Jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan	Produk	1	2	3	4	5	6	7	
3.6	Transmigrasi									DISNAKER TRANS
3.6.1	Jumlah rencana Penyiapan Kawasan Transmigrasi	KW	2	4	4	4	4	4	4	
3.6.2	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang terwujud	KW	3 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	
3.6.3	Jumlah UPT yang dibina dan dikembangkan	UPT	2 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	2 UPT	2 UPT	
4	Fokus Layanan Penunjang									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Administrasi Pemerintahan									
4.1.1	Persentase kunjungan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA
4.1.2	Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum bagi ASN	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/ BAG. HUKUM
4.1.3	Persentase Belanja untuk pengadaan barang/jasa yang dilelang secara SPSE	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/BAG. ULP
4.1.4	Jumlah OPD yang menetapkan SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/BAG. ORGANISASI
4.1.5	Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan kesra	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/BAG. KESRA
4.1.6	Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD	Perda	5	5	5	5	5	5	5	SETWAN
4.2	Pengawasan									INSPEKTORAT
4.2.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	83	83	85	85	85	85	85	
4.2.2	Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang di tindaklanjuti	%	65	75	80	85	87	90	95	
4.2.3	Nilai indeks reformasi birokrasi (RB)	Nilai	55,95	55,95	55,98	55,98	56	56,00	56,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.4	Persentase perangkat daerah sebagai zona integritas	%	2	2	3	3	3	3	4	
4.2.5	Persentase hasil pemeriksaan tepat waktu	%	65	68	75	80	85	90	95	
4.2.6	Persentase ASN dalam menyampaikan LHKASN	%	83	84	85	85	85	85	85	
4.2.7	Tingkat kapabilitas APIP		84	84	84	85	87	90	95	
4.2.8	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
4.2.9	Jumlah perangkat daerah yang memperoleh nilai LKJIP minimal B/ revidi LKJIP	%	0	30	36	42	48	54	60	
4.3	Perencanaan Pembangunan									BAPPEDA
4.3.1	Persentase program RPJMD yang ada di RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.3.2	Persentase Program Prioritas Kabupaten Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi dan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.4	Penelitian dan Pengembangan									BALITBANG
4.4.1	Persentase Pendayagunaan hasil Kelitbangan	%	80	80	80	90	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,5	Keuangan									
4.5.1	Predikat laporan keuangan daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
4.5.2	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	%	65,45	66	70	75	80	85	90	BPKAD
4.5.3	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	%	12	12	12	12	12	12	12	BPPD
4.5.4	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%					33	34	35	BPPD
4,6	Kepegawaian									
4.6.1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	%	80	85	88	90				BKPP
4.6.2	Prosentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	%	70	80	83	85				BKPP
4.6.3	Persentase pelanggaran disiplin Aparatur	%	1,3	1	1,20	1				BKPP
4.6.4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks					50	55	58	BKPP
4.6.5	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	%					65	67	70	BKPP
4.6.6	Persentase pegawai yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan	%					90	95	98	BKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur									
1.1	Perhubungan									DISHUB
1.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	M/kend	170	176	182	187	192	197	200	
1.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ bulan	358.104	376.008	394.812	414.552	435.276	457.044	479.892	
1.1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang/ bulan	91.440	96.012	100.813	105.853	111.146	116.703	122.538	
1.2	Penataan Ruang									DINAS PUPR
1.2.1	Keberadaan Perda RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.2	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
1,3	Perekonomian									DISBUDPAR
1.3.1	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	rumah makan	154	160	180	200	215	225	250	
1.3.2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	hotel	24	30	35	35	40	45	45	
2	Fokus Iklim Berinvestasi									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>									
2.1.1	Lama waktu proses perijinan	hari	4	3	3	3	3	3	3	DINAS PM, PTSP
2.1.2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	-	-	-	-	-	-	



Bab IX

Penutup

*Perubahan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024*

BAB IX

PENUTUP

Landasan utama dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yang meliputi penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hasil evaluasi RPJMD yang menunjukkan terdapat isu-isu yang telah selesai dan urgen untuk memperoleh treatment dalam penyelesaiannya, peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah seiring dengan perubahan dinamika situasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan urusannya, serta adanya perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD dimaksud merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan merupakan dokumen yang menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir yang erat kaitannya dengan proses penetapan arah pembangunan dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9.1. Pedoman Transisi

Masa jabatan Bupati Ogan Komering Ilir periode 2019-2024 berakhir pada bulan Januari 2024, namun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir dimulai pada tahun 2019 sehingga tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kepemimpinan tersebut berakhir pada tahun 2024. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD tahun 2024 agar berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Berikut adalah rancangan program transisi untuk dapat digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 :

No	Bidang Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1.	Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
			2) Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
			3) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			4) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5) Indeks kepuasan masyarakat
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	6) Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi
			7) SPBE
2.	Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata	8) Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
			9) Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih
			10) Persentase rumah tangga yang terlayani sarana dan prasarana air limbah yang layak

No	Bidang Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
3.	Pendidikan	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat	11) Angka melek huruf
			12) Rata-rata lama sekolah
		Meningkatnya mutu pendidikan	13) Angka kelulusan SD/MI
			14) Angka kelulusan SMP/MTs
4.	Kesehatan	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	15) Angka Usia harapan Hidup
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan	16) Rasio fasilitas kesehatan terkreditasi baik
		Meningkatnya pemberdayaan Gender dan perlindungan anak	17) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
5.	Ekonomi	Meningkatnya daya saing pertanian, perkebunan dan perikanan	18) Nilai tukar petani
		Berdayanya koperasi	19) Persentase koperasi yang aktif
		Meratanya ekonomi masyarakat	20) Indeks gini
		Meningkatnya kesempatan kerja	21) Tingkat pengangguran terbuka
		Meningkatnya PAD	22) Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
		Menurunnya angka kemiskinan	23) Angka kemiskinan
6.	Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	24) Indeks tutupan lahan
			25) Indeks kualitas air
			26) Indeks kualitas udara
		Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	27) Persentase penurunan titik kebakaran (hot spot)
7.	Sosial budaya	Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	28) Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat
		Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	29) Angka PMKS yang mendapat layanan

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 (lima) dan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2024 serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2022 hingga 2024;
3. Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra, karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta fokus pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah;

5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Perubahan RPJMD ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD;
6. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan diperkirakan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perubahan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
2021

